RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

2026

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

2025

BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsurpembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan *output* langsung.
24. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
25. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RKPD Tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman dan arah bagi Perangkat Daerah dan Desa.

Pasal 3

Tujuan RKPD Tahun 2026 adalah:

1. menjamin terwujudnya sinkronisasi pembangunan Daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2026 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan, dan sasaran Daerah, serta program Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan dan program prioritas Daerah tahun 2026;
3. menjamin terintegrasinya Program/Kegiatan/Subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja PD dengan tema pembangunan Daerah, program prioritas dan program strategis Daerah tahun 2026; dan
4. menjamin terumuskannya kebijakan dan anggaran pembangunan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 4

1. RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tahun kedua substansi RPJMD Tahun 2025-2029;
3. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
   a. RKP dan Program Strategis Nasional Tahun 2026;
   b. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026; dan
   c. RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dengan RKPD Tahun 2026.
4. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
   a. Bupati dalam penyusunan KUA, PPAS dan RancanganAPBD Tahun Anggaran 2026;
   b. PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2026 yang disusunsecara simultan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
   c. Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2026.

5. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai tolok ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1), memuat:

1. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
2. prioritas pembangunan Daerah;
3. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
4. Program Strategis Nasional;

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

a. Seluruh data Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi RKPD Tahun 2026, tercantum dalam SIPD.
b. Dalam hal terjadi pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, maka pemutakhiran dimaksud diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
c. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam SIPD yang terjadi setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, dibuat dalam berita acara kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
d. Seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2026 yang tercantum dalam SIPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Renja PD Tahun 2026.

BAB V

SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

1. Program dan hasil *(outcome)* dalam RKPD Tahun 2026 memedomani Program dan hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.
2. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada Program yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026, maka Program dalam RKPD Tahun 2026 memedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional, dan diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

3. Program dalam RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Kegiatan dan Subkegiatan.
4. Seluruh PD menjabarkan Program dalam bentuk Kegiatan dan Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Renja PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangjkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. L. FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 53

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah secara proses dan hasil harus mampu memberikan dampak yang besar pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan semestinya tercermin dalam berbagai aspek, baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah diukur dengan semakin meningkatnya daya saing serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan dalam proses pembangunan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Semua tahapan tersebut tersebut memiliki peran dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanan pembangunan yang baik harus mampu mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Fungsi perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dengan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 simultan dengan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Sedangkan Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Psal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomr 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Tengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Lombok Tengah, maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional, adapun hubungan antar dokumen tersebut sebagaimana gambar berikut.

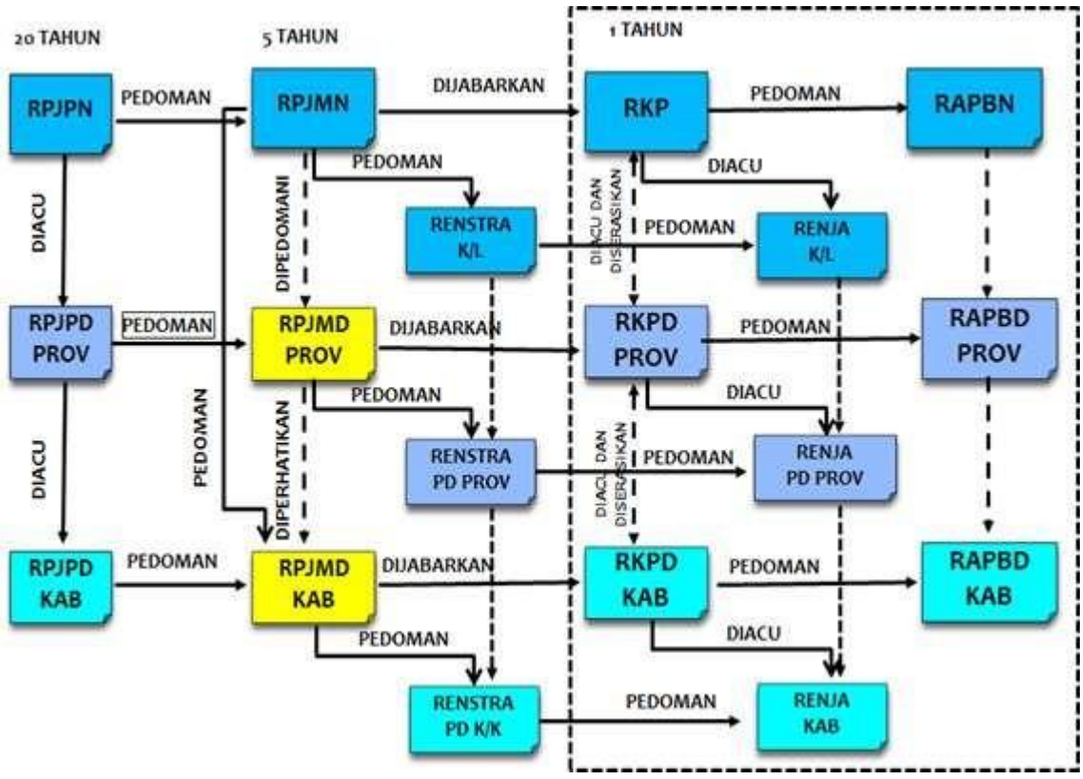

Gambar 1.1.Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara lengkap keterkaitan penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2026 untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.

1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 masuk dalam Tahap pertama yakni RPJMD Tahun 2025-2029. Dimana Tahap pertama ini difokuskan pada penguatan fondasi Masmirah dengan penguatan sumber daya manusia dan daya saing daerah yang ditunjang oleh transformasi perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, serta didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dan merupakan tahun transisi karena Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun bersamaan dengan RKPD.

1.3.4. Rencana Kerja Pemeintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026

Guna memastikan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

1.3.5. Dokumen Sektoral Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, diantaranya Dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan Dokumen pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah dalam memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang merupakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.
3. Menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan danprioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
	Bab ini menguraikan Rincian Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang termuat pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026
BAB VII	PENUTUP

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

   Kabupaten Lombok Tengah terletak antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 116.561 ha. Batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah meliputi:

   - Sebelah Utara : Lombok Utara dan Lombok Timur;
   - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
   - Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;
   - Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat.

   Pada tahun 2010 yaitu sekitar bulan september dan oktober, Kabupaten Lombok Tengah mengalami pemekaran wilayah desa sebanyak 15 desa, sehingga jumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 139 desa. Sedangkan jumlah kecamatan tetap berjumlah 12 kecamatan dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 km2. Kecamatan dengan luas wilayah terluas yakni Kecamatan Pujut, yang mencapai 19,33% dari luas wilayah Kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06%, 12,64% dan 10,34%, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah 7%. Pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan
1.	Praya	5.258,46	5	6	9	37	43
2.	Praya Tengah	6.362,68	5	10	3	67	14
3.	Praya Barat	15.171,68	13	10	-	68	-
4.	Praya Barat Daya	12.856,31	11	12	-	47	-
5.	Pujut	23.214,14	20	18	-	119	-
6.	Praya Timur	8.450,74	7	14	-	83	-
7.	Janapria	6.861,71	6	16	-	77	-
8.	Kopang	5.670,47	5	13	-	88	-
9.	Batukliang	5.030,39	4	11	-	108	-
10.	Batukliang Utara	16.449,13	14	8	-	59	-
11.	Jonggat	6.869,66	6	13	-	95	-
12.	Pringgarata	4.752,40	4	11	-	75	-
Jumlah		116.561	100	142	12	933	57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

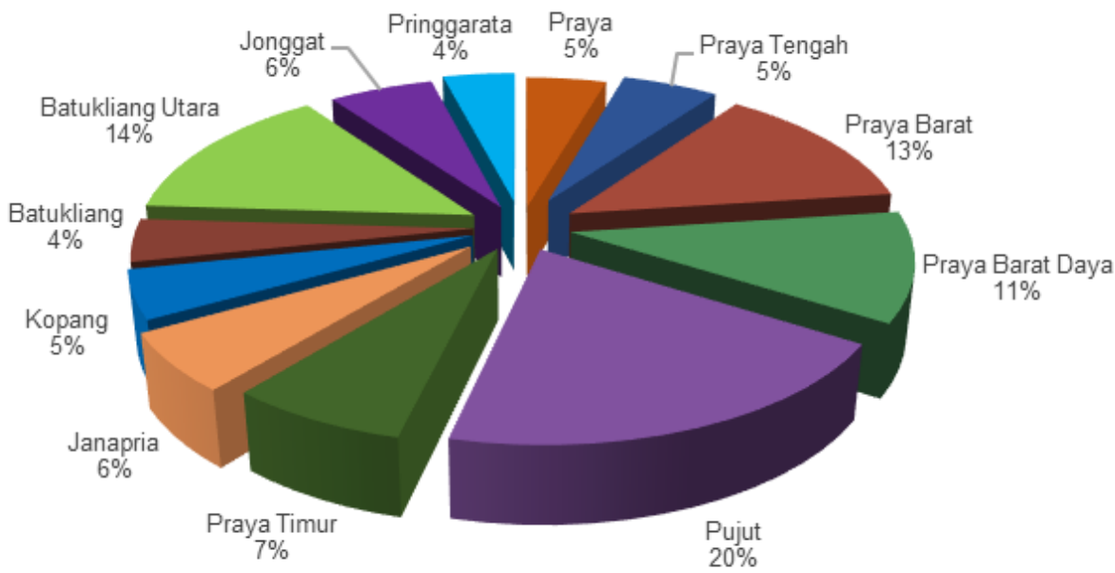

Gambar 2.1 Persentase Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat posisi geografis Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria. Adapun berikut desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dirinci pada tabel di bawah:

Tabel 2.2 Desa-Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	Praya	1	Kel.Panji Sari	2.	Praya Tengah	1	Kel.Jontlak
		2	Kel.Leneng			2	Kel.Gerantung
		3	Kel.Renteng			3	Kel.Sasake
		4	Kel.Praya			4	Lajut
		5	Kel.Prapen			5	Batunyala
		6	Kel.Tiwu galih			6	Pejanggik
		7	Kel.Semayan			7	Kelebuh
		8	Bunut Baok			8	Beraim
		9	Kel.Gerunung			9	Pengadang
		10	Kel.Gonjak			10	Jurang Jaler
		11	Jago				
		12	Aikmual				
		13	Mertak Tombok				
		14	Montong Terep				
3.	Praya Barat	1	Selong Blanak	4.	Praya Barat Daya	1	Montong Sapah
		2	Mekar Sari			2	Kabul
		3	Banyu Urip			3	Pelambik
		4	Kateng			4	Ranggagata
		5	Mangkung			5	Ungga
		6	Bondir			6	Darek
		7	Setanggor			7	Serage
		8	Penujak			8	Pandan Indah
		9	Batujai			9	Batu Jangkih
						10	Montong Ajan
5.	Pujut	1	Tumpak	6.	Praya Timur	1	Kidang
		2	Prabu			2	Bilelando
		3	Kuta			3	Semoyang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
		4	Rembitan			4	Ganti
		5	Sukadana			5	Beleka
		6	Mertak			6	Sengkerang
		7	Pengengat			7	Landah
		8	Teruwai			8	Marong
		9	Gapura			9	Mujur
		10	Kawo			10	Sukaraja
		11	Segala Anyar				
		12	Sengkol				
		13	Pengembur				
		14	Ketara				
		15	Tanak Awu				
7.	Janapria	1	Loang Maka	8.	Kopang	1	Muncan
		2	Langko			2	Monggas
		3	Selebung Rembiga			3	Darmaji
		4	Bakan			4	Dasan Baru
		5	Durian			5	Kopang Rembiga
		6	Pendem			6	Montong Gamang
		7	Janapria			7	Lendang Are
		8	Saba			8	Bebuak
		9	Lekor			9	Wajageseng
		10	Kerembong				
9.	Batukliang	1	Beber	10.	Batukliang Utara	1	Mas-mas
		2	Pagutan			2	Aik Bukak
		3	Barabali			3	Setiling
		4	Bujak			4	Aik Berik
		5	Peresak			5	Teratak
		6	Mantang			6	Lantan
		7	Aik Darek			7	Tanak Beak
		8	Selebung			8	Karang Sidemen
		9	Tampak Siring				
11.	Jonggat	1	Labulia	12.	Pringgarata	1	Bilebante
		2	Sukarara			2	Bagu
		3	Puyung			3	Sintung
		4	Gemel			4	Pringgarata
		5	Barejulat			5	Murbaya
		6	Bunkate			6	Sepakek
		7	Nyerot			7	Pemepek
		8	Batu Tulis				
		9	Jelantik				
		10	Ubung				
		11	Bonjeruk				
		12	Perina				
		13	Pengenjek				

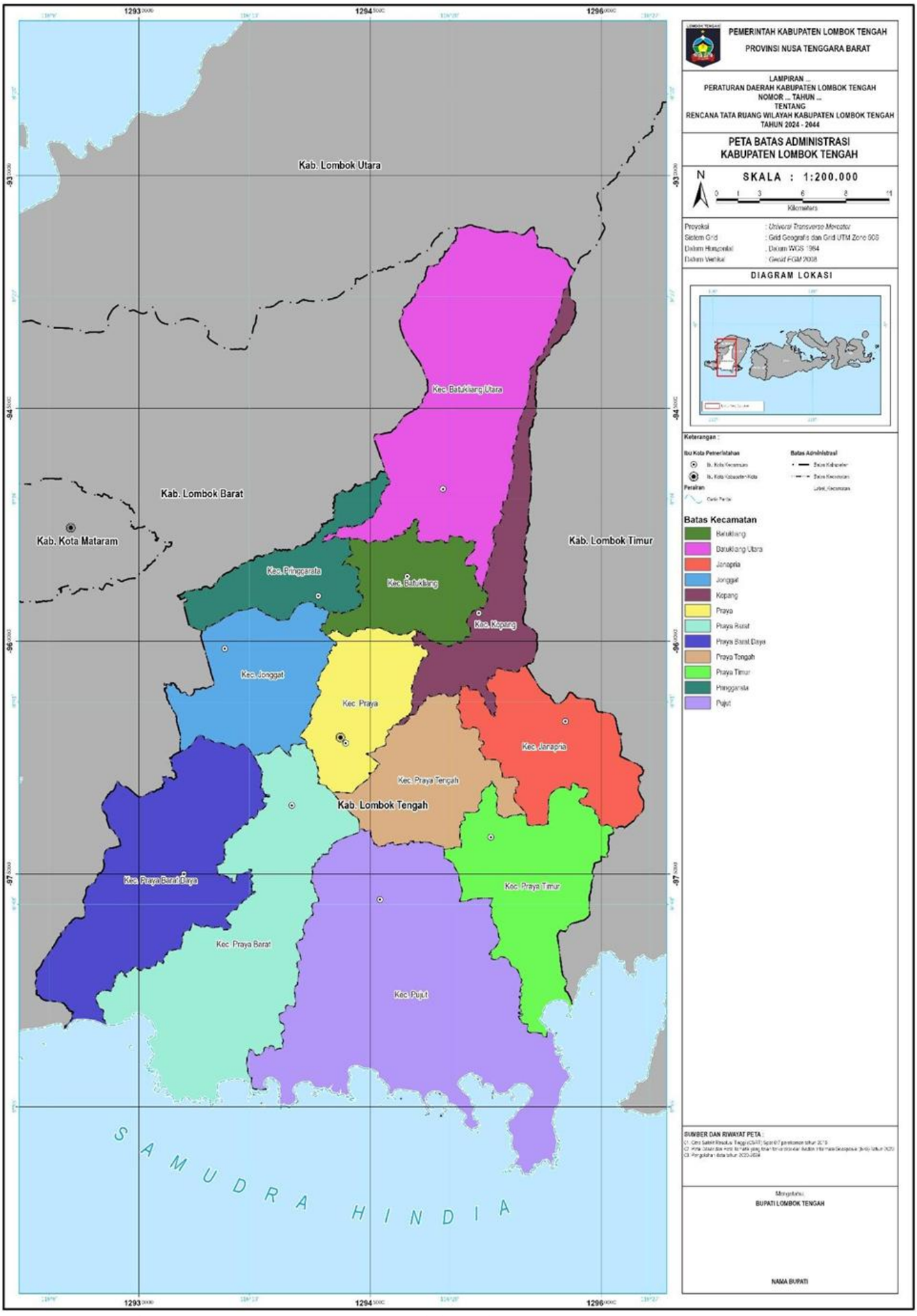

Gambar 2.2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Lombok Tengah

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, 2025

2. Fungsi dan Kontribusi Daerah

Kabupaten Lombok Tengah memberikan berbagai kontribusi signifikan, baik bagi wilayah sekitarnya, provinsi, maupun nasional, terutama melalui sektor ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

a. Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Lombok Tengah telah menjelma sebagai titik tumpu pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat, terutama melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sejak ditetapkan sebagai KEK pariwisata nasional, Mandalika membawa dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi, mengubah lanskap sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Penciptaan Lapangan Kerja dan Dampak Sosial: Hingga September 2024, KEK Mandalika berhasil menyerap 13.391 tenaga kerja lokal secara kumulatif. Meskipun target jangka panjang penyerapan tenaga kerja hingga tahun 2025 adalah 587.000 orang , realisasi saat ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dalam bentuk lapangan kerja yang luas masih dalam proses pengembangan. Event internasional seperti World Superbike (WSBK) dan MotoGP Mandalika tidak hanya mempromosikan nama Lombok ke pentas dunia, tetapi juga menyumbang pekerjaan tambahan, terutama di sektor pariwisata, jasa, konstruksi, UMKM, dan industri kreatif lokal. Masyarakat lokal turut serta dalam penyediaan akomodasi, transportasi wisata, makanan, dan produk kerajinan khas Sasak yang kini diminati wisatawan.

Peningkatan Investasi: KEK Mandalika tidak hanya hadir sebagai primadona pariwisata, tetapi juga sebagai pengungkit utama peningkatan investasi di NTB. Sejak ditetapkan sebagai KEK pariwisata nasional bertema *sport tourism*, Mandalika menarik perhatian investor dalam dan luar negeri yang melihat potensi ekonomi yang luar biasa . Realisasi investasi spesifik di KEK Mandalika hingga Semester I 2024 mencapai Rp722,97 miliar, yang merupakan 76,41 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp946,16 miliar. Komitmen investasi yang lebih besar juga telah teridentifikasi, seperti dari VINCI Construction Grand Project sebesar US 1miliar (sekitar Rp14 triliun) dan komitmen di sektor perhotelan sebesar Rp 3 triliun. Selain itu, pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US 248,4 juta (sekitar Rp3,6 triliun) dan dari Bank Exim Indonesia sebesar Rp1,18 triliun telah direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Secara kumulatif, realisasi investasi di seluruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia mencapai Rp263,4 triliun hingga tahun 2024 , dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang. Meskipun demikian, kontribusi Lombok Tengah terhadap total investasi Provinsi NTB pada tahun 2024 adalah Rp1,1 triliun, yang merupakan bagian yang relatif kecil dari total investasi provinsi sebesar Rp54,5 triliun yang didominasi oleh proyek-proyek industri berat di luar Lombok Tengah, seperti pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dampak Ekonomi dan Tantangan: Investasi yang mengalir tidak hanya berwujud hotel-hotel mewah seperti Hotel Pullman Mandalika dan Seccha Club, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan sepanjang 40 km, sistem drainase modern, dan fasilitas air tanah terpadu. Semua ini membentuk ekosistem yang mendorong kenyamanan dan efisiensi usaha. Daya tarik KEK Mandalika semakin kuat berkat kehadiran ajang internasional seperti MotoGP Mandalika, WSBK, dan Asia Road Racing Championship (ARRC) . Kegiatan ini bukan hanya mendongkrak citra Lombok di mata dunia, tetapi juga membuka peluang investasi baru di sektor perhotelan, transportasi, hingga industri kreatif. Investor asal Jepang, misalnya, telah membangun hotel dan vila di zona Kuta dan Prabu, sambil memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan operasional.

Pemerintah pusat dan daerah pun aktif mendorong pengembangan KEK ini sebagai bagian dari strategi desentralisasi ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan antara Jawa dan kawasan timur Indonesia. Koordinasi lintas kementerian dan promosi masif menjadikan Mandalika

sebagai contoh nyata bagaimana kawasan strategis bisa memicu pertumbuhan ekonomi berbasis investasi langsung.

Namun, di balik capaian ekonomi, KEK Mandalika menghadapi tantangan dalam memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dampak sosial, terutama terkait isu lahan dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lingkar kawasan. Terdapat laporan mengenai masalah pembebasan lahan yang dilakukan melalui proses "tali-asih" dan "kerohiman" (pembayaran kompensasi) yang tidak memuaskan masyarakat lokal. Selain itu, masih ada tuntutan relokasi bagi 120 Kepala Keluarga (KK) yang menempati lahan milik ITDC, dengan permintaan untuk direlokasi di tempat yang sama atau difasilitasi pengadaan tanah di Desa Kuta. Jika isu-isu ini tidak dikelola dengan baik dan adil, dapat mempengaruhi iklim investasi jangka panjang dan menimbulkan ketegangan sosial.

b. Kontribusi Infrastruktur

Sejak diresmikan pada 20 Oktober 2011 , Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah , telah menjadi simpul utama konektivitas udara di NTB. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia (API) sejak merger pada September 2024 . Keberadaan BIZAM tidak hanya mengubah wajah transportasi udara di NTB, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi regional.

Peran Strategis dan Statistik Operasional: Sebagai pintu gerbang utama ke Pulau Lombok, BIZAM memainkan peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata, khususnya menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika . Event internasional seperti MotoGP Mandalika, WSBK, dan Asia Road Racing Championship (ARRC) yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan aksesibilitas udara yang memadai. Lonjakan kunjungan wisatawan melalui BIZAM mendorong pertumbuhan sektor akomodasi, transportasi, dan jasa wisata di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Data lalu lintas udara BIZAM pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi. Hingga November 2024, BIZAM berhasil melayani sebanyak 2,17 juta penumpang , meningkat 1,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 . Pergerakan pesawat udara juga meningkat dari 22.339 menjadi 22.956 pergerakan pada periode yang sama . Selama periode Lebaran 2024 (3-18 April), BIZAM melayani 115.597 pergerakan penumpang , meningkat 9 persen dibandingkan Lebaran 2023 . Pergerakan pesawat meningkat 15 persen menjadi 1.160 pergerakan , dan volume kargo naik 16 persen menjadi 573.555 kg . Tingkat pemulihan operasional BIZAM telah mencapai 83 persen dibandingkan dengan periode pra-pandemi tahun 2019 . Rute penerbangan utama dari Lombok adalah ke Jakarta (37%), Surabaya (27%), Bali (12%), Kuala Lumpur (6%), dan Yogyakarta (2%) , menggarisbawahi peran BIZAM sebagai penghubung penting bagi wisatawan domestik dan internasional.

Dampak Ekonomi dan Prospek Pengembangan: Dari sisi ekonomi, relokasi bandara ke Lombok Tengah telah menciptakan pusat pertumbuhan baru. Studi menunjukkan bahwa keberadaan bandara berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, harga tanah di sekitar bandara meningkat tajam, mencerminkan dinamika ekonomi yang positif dan meningkatnya minat investasi di sektor properti dan komersial.

Namun, tantangan tetap ada. Pemulihan penuh operasional bandara masih memerlukan strategi yang lebih agresif, terutama mengingat kenaikan biaya operasional maskapai yang dapat mempengaruhi harga tiket dan permintaan. Selain itu, adaptasi terhadap pola

perjalanan pasca-pandemi dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dan logistik.

Secara keseluruhan, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid telah menjadi katalisator pembangunan regional di NTB. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan inklusif, bandara ini berpotensi memperkuat daya saing NTB di tingkat nasional dan global, membuka lapangan kerja, mendorong investasi, dan mempercepat transformasi wilayah menuju pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan konektivitas.

c. Kontribusi Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Kabupaten Lombok Tengah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengengat menjadi fasilitas vital dalam sistem pengelolaan sampah di kabupaten ini.

Profil dan Tantangan Kapasitas TPA Pengengat: TPA Pengengat berlokasi di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Fasilitas ini mulai dibangun pada tahun 2014 dan secara resmi beroperasi pada tahun 2015. TPA ini memiliki total luas lahan sekitar 10 hektar , dengan sekitar 2 hektar telah terpakai untuk penampungan sampah domestik. Zona penimbunan atau *landfill* di TPA ini memiliki luas awal 8.247,43 meter persegi (m2) dengan daya tampung sebesar 61.855,725 meter kubik (m3).

Namun, TPA Pengengat menghadapi krisis kapasitas yang semakin mendesak. Data menunjukkan bahwa pada Februari 2017, zona penimbunan yang belum digunakan tersisa 3.298,972 m2 dengan daya tampung 24.742,290 m3. Sesuai perencanaan awal, zona penimbunan diproyeksikan habis masa pakainya pada tahun 2018, dan seluruh TPA pada tahun 2025. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkirakan TPA akan penuh dalam tiga tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa TPA telah beroperasi melampaui proyeksi awal untuk zona penimbunan, mengindikasikan tekanan kapasitas yang signifikan dan dipercepat.

Volume sampah yang diangkut ke TPA saat ini mencapai 50 ton per hari, setara dengan sekitar 300 meter kubik per hari. Tingginya volume sampah yang terus-menerus masuk ke fasilitas dengan daya tampung yang menipis menciptakan tantangan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang kritis dan mendesak.

Sistem Pengelolaan dan Upaya Keberlanjutan: TPA Pengengat menerapkan metode penimbunan sampah yang dikenal sebagai *controlled landfill*. Dalam sistem ini, sampah yang dibuang langsung ditimbun menggunakan tanah untuk meminimalkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta mengurangi bau busuk dan potensi penyebaran penyakit. Proses operasional melibatkan penghamparan, pemadatan dengan *bulldozer*, dan penutupan dengan lapisan tanah. TPA ini juga telah dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah cair dan tinja. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah secara rutin melakukan pemantauan kualitas air di sekitar TPA Pengengat.

Meskipun sistem *controlled landfill* diterapkan, kapasitas yang terbatas dan potensi gangguan dari aktivitas pemulung dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan menimbulkan risiko pencemaran lingkungan. Tanpa perubahan segera dan drastis, Lombok Tengah berisiko menghadapi krisis pengelolaan sampah yang parah, yang dapat mengarah pada praktik pembuangan terbuka, polusi lingkungan (tanah, air, udara), dan masalah kesehatan masyarakat. Kondisi ini juga berpotensi merusak citra KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata yang bersih dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan pariwisata dan investasi.

d. Kontribusi terhadap Pariwisata Nasional

Kabupaten Lombok Tengah, melalui KEK Mandalika, memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian pariwisata nasional Indonesia. Peningkatan peringkat Indonesia dalam *Travel & Tourism Development Index* (TTDI) yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) menjadi indikator penting bagi daya saing pariwisata nasional dan memiliki relevansi langsung dengan pengembangan destinasi prioritas seperti KEK Mandalika.

Peningkatan Peringkat TTDI Indonesia: Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam peringkat TTDI. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 32 dari 119 negara . Peningkatan yang luar biasa terjadi pada tahun 2023, di mana peringkat Indonesia naik 10 posisi menjadi peringkat 22. Capaian ini dipertahankan pada TTDI 2024 (yang dirilis Mei 2024), dengan Indonesia tetap berada di peringkat 22 dari 119 negara . Prestasi ini menempatkan Indonesia sebagai negara terbaik ke-2 di ASEAN, melampaui pemimpin tradisional seperti Malaysia dan Thailand, dan peringkat ke-6 di kawasan Asia-Pasifik. Peningkatan ini didorong oleh kekayaan alam dan budaya Indonesia, serta prioritas kebijakan pemerintah yang menempatkan pariwisata sebagai mesin ekonomi utama.

Kontribusi terhadap Devisa dan PDB Pariwisata Nasional: Sektor pariwisata merupakan kontributor penting bagi perekonomian Indonesia. Realisasi devisa pariwisata pada tahun 2022 mencapai US6,72 miliar,berdasarkan catatan Bank Indonesia dan Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) [30,31], meningkat signifikan dari US520,74 juta pada tahun 2021. Meskipun ada data lain yang menyebutkan US4,26 miliar untuk tahun 2022, data dari Kemenparekraf/BankIndonesia dianggap lebih diutamakan karena konsistensinya dengan laporan resmi. Pada semesterI 2023,devisa pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, mencapai US6,08 miliar, naik 236,78% secara *year-on-year* (YoY). Untuk tahun 2024, sektor pariwisata diproyeksikan akan menyumbang devisa sebesar US$16,7 miliar, menunjukkan pertumbuhan 19,3 persen dibandingkan tahun 2023. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional diperkirakan sebesar 3,6% pada tahun 2022. Proyeksi kontribusi PDB pariwisata menunjukkan tren peningkatan yang stabil: 2,30% pada tahun 2021, 4,1% pada tahun 2023, dan 4,5% pada tahun 2024.

KEK Mandalika, sebagai salah satu "Bali Baru" dan Destinasi Prioritas Super, adalah pilar kunci dalam strategi pariwisata nasional untuk mencapai target devisa dan PDB yang ambisius . Keberhasilannya secara langsung berkontribusi pada peningkatan peringkat TTDI Indonesia. Setiap dolar yang dibelanjakan wisatawan di Mandalika, baik untuk akomodasi, transportasi, makanan, atau belanja, akan tercatat sebagai devisa pariwisata Indonesia. Selain itu, pengembangan KEK Mandalika juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional melalui investasi, pembangunan fasilitas, dan penciptaan lapangan kerja di kawasan tersebut.

Namun, keberadaan KEK Mandalika sebagai destinasi prioritas juga menempatkan tekanan pada Lombok Tengah untuk mengatasi tantangan yang masih ada, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal di TPA Pengengat , serta masalah sosial terkait pembebasan lahan dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani secara efektif, dapat menghambat potensi penuh KEK Mandalika untuk berkontribusi pada target pariwisata nasional dan bahkan dapat menurunkan persepsi kualitas pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Lombok Tengah memiliki beragam potensi sumber daya alam yang menjadi keunggulan komparatifnya, meliputi sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta ekonomi kreatif yang terintegrasi.

1. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu keunggulan komparatif utama Kabupaten Lombok Tengah dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021, menjadi proyek strategis nasional yang berfokus pada pengembangan pariwisata. KEK Mandalika juga telah ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) Pariwisata pada tahun 2017.

Pada tahun 2020, data objek dan lokasi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, serta kunjungan wisatawan asing dan domestik, dan jumlah hotel dan akomodasi lainnya tersedia melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Meskipun data spesifik untuk kunjungan wisatawan dan jumlah akomodasi untuk tahun 2021-2024 tidak tersedia secara langsung dalam sumber yang diberikan , laporan penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada alokasi anggaran serta jumlah kunjungan wisatawan di KEK Mandalika selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.

Keunggulan pariwisata Lombok Tengah tidak hanya terletak pada KEK Mandalika, tetapi juga pada destinasi wisata bahari seperti Pantai Kuta, Pantai Seger, Pantai Serenting, dan Pantai Gerupuk. Selain itu, terdapat desa-desa wisata yang kaya akan budaya dan tradisi lokal, seperti Desa Wisata Sade, Desa Wisata Mertak, dan Desa Wisata Bilebante. Potensi ekowisata juga sangat besar, seperti yang terlihat pada Danau Biru yang memiliki keindahan alam, keanekaragaman hayati, serta budaya dan tradisi lokal yang kuat untuk pengembangan wisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem pariwisata hijau berkelanjutan di KEK Mandalika, dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Program-program pemerintah untuk KEK Mandalika mencakup investasi infrastruktur (jalan, jembatan, bandara), peningkatan aksesibilitas, pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata (beberapa di antaranya bersertifikasi ramah lingkungan seperti LEED atau Green Globe), serta pengembangan lingkungan yang berfokus pada pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan. KEK Mandalika juga sejalan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan), dan Tujuan 13 (Tindakan untuk Mengatasi Perubahan Iklim). Pengembangan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Keunggulan komparatif di sektor ini didukung oleh jenis-jenis tanah yang subur, seperti Aluvial, Regusol Kelabu, Gromusol Kelabu, dan Mediteran Coklat, yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Salah satu komoditas unggulan yang signifikan adalah tembakau. Pada tahun 2024, luas lahan tembakau di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 15.000 hektar, menghasilkan sekitar 25.000 ton tembakau per tahun, termasuk jenis unggulan seperti tembakau Virginia dan 2.000 ton tembakau jenis Rakyat. Kualitas tembakau Lombok diakui secara nasional, menjadi bahan baku utama bagi perusahaan besar seperti PT Djarum. Sektor tembakau telah menjadi pilar ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dengan harga jual bervariasi antara Rp 25.000 hingga Rp 75.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Meskipun demikian, tantangan regenerasi petani menjadi perhatian, karena generasi muda cenderung kurang tertarik melanjutkan tradisi bertani tembakau.

Selain tembakau, Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki potensi besar dalam pengelolaan tanah hitam. Luas tanah hitam di NTB mencapai 71.659 hektar, sebagian besar tersebar di Kabupaten Lombok Tengah, meliputi kecamatan Jonggat, Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya,

Praya Tengah, dan Pujut. Tanah ini kaya akan kalsium dan magnesium, serta dimanfaatkan untuk pertanian padi, jagung, kedelai, dan hortikultura seperti bawang merah dan cabai. Sistem agroforestri dan perkebunan seperti mete dan mangga juga dikembangkan di beberapa wilayah.

Dalam upaya keberlanjutan, pertanian konservasi diterapkan untuk menjaga produktivitas tanah hitam, melibatkan pengolahan tanah minimal, penggunaan tanaman penutup (cover crop), rotasi tanaman, serta pengelolaan air melalui embung. Embung berfungsi sebagai penampung air hujan untuk irigasi suplemen di musim kemarau, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan akibat erosi, alih fungsi lahan, dan penurunan kandungan organik tanah.

Komoditas hortikultura unggulan lainnya yang berpotensi dikembangkan di dataran medium Lombok Tengah meliputi kentang, wortel, paprika, bawang putih, dan mentimun jepang. Komoditas ini diharapkan dapat dipasarkan di kawasan wisata seperti Pantai Selatan Mandalika, menciptakan sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata.

3. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Luas areal penangkapan ikan di perairan laut mencapai 11.937 km^2, dengan potensi lestari (Maximum Sustainable Yield; MSY) sumber daya ikan sebesar 40.623 ton per tahun. Sumber daya ikan yang terkandung meliputi ikan permukaan (pelagis besar seperti tuna, tongkol, cakalang, lemadang; dan pelagis kecil seperti tembang, lemuru, julung-julung, layang, teri, selar), serta ikan dasar (demersal seperti kakap, pari) dan ikan karang (baronang, kerapu).

Produksi perikanan laut Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 mencapai 2.614,10 ton, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Selain itu, potensi penangkapan ikan di perairan umum juga ada, terkonsentrasi di Dam Batujai (890 Ha) dan Dam Pengga (450 Ha), dengan produksi pada tahun 2019 sebesar 336,70 ton.

Sektor budidaya perikanan juga sangat menjanjikan. Total potensi perikanan budidaya di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 10.904,27 Ha, dengan pemanfaatan pada tahun 2019 sebesar 1.845,59 Ha dan produksi mencapai 78.784,51 ton. Potensi budidaya laut saja mencapai 2.263,00 Ha, meliputi rumput laut (1.000 Ha), Karamba Jaring Apung (KJA) untuk lobster dan kerapu (638,50 Ha), mutiara (549,50 Ha), kerang darah (35,00 Ha), dan teripang (40,00 Ha). Pada tahun 2019, pemanfaatan lahan budidaya rumput laut mencapai 585,92 Ha dengan produksi 43.740,91 ton (basah).

Teluk Gerupuk, khususnya, memiliki tingkat kesesuaian perairan yang tinggi untuk pengembangan budidaya laut, dengan area sangat sesuai untuk rumput laut seluas 60,343 Ha dan area cukup sesuai untuk budidaya ikan kerapu seluas 68,105 Ha. Kondisi lingkungan perairan seperti kadar oksigen terlarut dan suhu sangat mendukung pertumbuhan rumput laut dan ikan kerapu.

Meskipun terdapat target produksi perikanan budidaya nasional dalam RPJMN 2020-2024, data spesifik produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk Kabupaten Lombok Tengah dalam rentang 2020-2024 dari BPS atau Satu Data NTB tidak sepenuhnya tersedia dalam sumber yang diberikan. Namun, rencana strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2020-2024 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 menunjukkan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan melalui program pengelolaan budidaya dan penangkapan ikan. Tantangan yang dihadapi termasuk ketergantungan pada pakan impor, belum optimalnya penerapan teknologi pembenihan, dan kurangnya kompetensi SDM pembudidaya.

4. Kehutanan

Sektor kehutanan di Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi yang signifikan, terutama dalam pengembangan hutan rakyat dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Analisis kesesuaian

lahan menunjukkan bahwa mahoni memiliki luasan terbesar untuk pengembangan hutan rakyat, yaitu 79.640,1 hektar, diikuti oleh sengon dengan 32.914,5 hektar.

Selain kayu, HHBK juga menjadi keunggulan komparatif yang penting. Komoditas HHBK unggulan di Kabupaten Lombok Tengah meliputi nangka (unggulan I dengan nilai 86,222), bambu (unggulan II dengan nilai 73,940), dan durian (unggulan II dengan nilai 63,610). Komoditas lain yang termasuk unggulan III adalah kakao, talas, ubi kayu, dan jahe. Pemanfaatan HHBK merupakan kegiatan tradisional masyarakat sekitar hutan yang berkontribusi pada ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Provinsi NTB, yang mencakup Lombok Tengah, telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan. Penerbitan Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam mentransformasi sektor energi dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Upaya pelestarian dan pengelolaan hutan, termasuk pengawasan, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, sangat penting untuk menjaga fungsi ekosistem hutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas LHK, Dinas Pariwisata, dan masyarakat, seperti yang terlihat dalam rencana pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Gunung Rinjani, menunjukkan upaya terpadu dalam konservasi lingkungan.

5. Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Tengah memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata dan budaya lokal, menjadikannya potensi ekonomi yang kuat. Kawasan KEK Pariwisata Mandalika tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang bagi Lombok Tengah untuk memunculkan sentra ekonomi kreatif berbasis kearifan dan budaya setempat.

Data menunjukkan bahwa terdapat 26.786 pelaku/tenaga kerja yang terlibat dalam subsektor seni kriya di Lombok Tengah, dengan 288 unit usaha. Produk seni kriya unggulan meliputi kerajinan ketak (anyaman), gerabah (seperti Kendi Maling yang unik), dan kerajinan perak yang sering dikombinasikan dengan kerang mutiara laut. Desa Sukarara, misalnya, dikenal sebagai sentra kerajinan tenun.

Pemerintah daerah telah aktif mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan perajinan perak, kerajinan bambu, rotan ketak, dan gerabah. Pelaku bisnis juga berinovasi dalam desain, membina masyarakat sekitar, dan membentuk komunitas pengrajin. Komunitas-komunitas ini juga mengadakan pelatihan desain kemasan, Gugus Kendali Mutu (GKM), dan pelatihan digital marketing.

Sektor ekonomi kreatif, termasuk kriya, kuliner, dan fesyen, berfungsi sebagai pelengkap destinasi wisata, memenuhi kebutuhan wisatawan, dan berkontribusi pada peningkatan kunjungan serta lama tinggal wisatawan. Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan terus meningkat. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif di beberapa desa, seperti Desa Sepakek, belum berjalan maksimal karena faktor sumber daya manusia, modal, dan sarana prasarana. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan dukungan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi ini.

Tabel berikut merekapitulasi potensi sumber daya alam utama di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan analisis data yang tersedia dalam rentang 2020-2024, serta keunggulan komparatif dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Lombok Tengah

Sektor SDA	Potensi Utama	Keunggulan Komparatif	Data Kunci (2020-2024)	Optimalisasi Ekonomi Berkelanjutan
Pariwisata	Destinasi alam (pantai, danau),	Keindahan alam, budaya lokal yang	KEK Mandalika sebagai proyek strategis nasional	Pengembangan ekowisata, promosi

Sektor SDA	Potensi Utama	Keunggulan Komparatif	Data Kunci (2020-2024)	Optimalisasi Ekonomi Berkelanjutan
	budaya (desa wisata), KEK Mandalika	kuat, status DSP, dukungan infrastruktur dan program berkelanjutan	(PP No. 52/2014, peresmian 2021). Komitmen pariwisata hijau berkelanjutan. Peningkatan kunjungan wisatawan (tren positif 2020-2024).	budaya lokal, investasi infrastruktur ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, selaras SDGs (Tujuan 7, 8, 9, 11, 13).
Pertanian & Perkebunan	Lahan subur (tanah aluvial, regusol, gromusol, mediteran), komoditas unggulan (tembakau, hortikultura), tanah hitam	Kualitas tembakau Lombok yang diakui, potensi tanah hitam untuk berbagai tanaman pangan & hortikultura, praktik pertanian konservasi	Luas lahan tembakau 15.000 Ha (2024), produksi tembakau 25.000 ton/tahun (2024). Luas tanah hitam 71.659 Ha (NTB, sebagian besar Lombok Tengah). Komoditas hortikultura unggulan (kentang, wortel, paprika, bawang putih, mentimun jepang).	Peningkatan produktivitas tembakau, diversifikasi komoditas hortikultura, penerapan pertanian konservasi (pengolahan tanah minimal, rotasi tanaman, embung), sinergi dengan pariwisata.
Kelautan & Perikanan	Potensi penangkapan ikan laut & perairan umum, budidaya laut (rumput laut, kerapu, mutiara, lobster)	MSY tinggi, kesesuaian perairan untuk budidaya (Teluk Gerupuk), komoditas bernilai ekonomi tinggi	Potensi lestari perikanan laut 40.623 ton/tahun. Produksi perikanan laut 2.614,10 ton (2019). Potensi budidaya laut 2.263,00 Ha. Teluk Gerupuk sangat sesuai untuk rumput laut (60,343 Ha).	Peningkatan produksi budidaya (rumput laut, kerapu), optimalisasi penangkapan lestari, pengembangan produk olahan, penguatan SDM pembudidaya, pengembangan sistem logistik.
Kehutanan	Lahan untuk hutan rakyat (mahoni, sengon), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Potensi pengembangan hutan rakyat, keberadaan HHBK unggulan (nangka, bambu, durian, kakao, talas, ubi kayu, jahe)	Lahan sesuai mahoni 79.640,1 Ha, sengon 32.914,5 Ha. Nangka (nilai unggulan 86,222), bambu (73,940), durian (63,610).	Pengembangan hutan lestari, pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, mitigasi perubahan iklim.
Ekonomi Kreatif	Seni kriya (tenun, gerabah, perak), kuliner, fesyen	Kekayaan budaya lokal, keterkaitan erat dengan pariwisata, dukungan pemerintah & komunitas	26.786 pelaku/tenaga kerja seni kriya. 288 unit usaha. Desa Sukarara sebagai sentra tenun.	Peningkatan kualitas SDM, akses modal dan infrastruktur, inovasi desain, digital marketing, sinergi dengan destinasi wisata untuk peningkatan nilai tambah.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki keunggulan komparatif yang jelas dalam beberapa sektor sumber daya alam, yang jika dioptimalkan secara berkelanjutan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Keunggulan ini tidak hanya terletak pada kuantitas sumber daya, tetapi juga pada kualitas dan karakteristik unik yang dimiliki daerah.

Sektor pariwisata, dengan KEK Mandalika sebagai lokomotifnya, menjadi pendorong utama ekonomi. Keberadaan destinasi super prioritas ini menarik investasi dan kunjungan, menciptakan efek berganda bagi sektor lain. Komitmen terhadap pariwisata hijau dan berkelanjutan, yang sejalan dengan SDGs, menunjukkan arah pengembangan yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dari pariwisata tidak akan mengorbankan lingkungan atau budaya lokal, melainkan justru memperkuatnya. Tantangan dalam pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat perlu diatasi melalui kolaborasi multi-pihak untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Peningkatan aksesibilitas dan pembangunan fasilitas dengan konsep *eco green* juga menjadi kunci untuk menarik wisatawan yang semakin peduli lingkungan.

Di sektor pertanian, kualitas tembakau Lombok yang diakui secara nasional memberikan keunggulan kompetitif yang kuat. Optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan tembakau yang ada dan diversifikasi produk turunan. Potensi tanah hitam yang luas dan subur untuk berbagai komoditas pangan dan hortikultura juga menawarkan peluang besar untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Penerapan pertanian konservasi, seperti pengolahan tanah minimal dan penggunaan embung, adalah langkah krusial untuk menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi tanah. Sinergi antara pertanian dan pariwisata, misalnya dengan memasarkan produk hortikultura unggulan ke kawasan wisata, dapat menciptakan rantai nilai yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sektor kelautan dan perikanan, dengan potensi penangkapan dan budidaya yang besar, merupakan tulang punggung ekonomi pesisir. Keunggulan perairan Teluk Gerupuk untuk budidaya rumput laut dan kerapu menunjukkan potensi besar untuk peningkatan produksi. Untuk mengoptimalkan ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur budidaya yang memadai, pengembangan teknologi pembenihan yang ramah lingkungan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pembudidaya. Penguatan sistem logistik dan diversifikasi produk olahan perikanan juga akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pemanfaatan potensi lestari harus dilakukan secara bijaksana untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di laut.

Sektor kehutanan, meskipun seringkali terabaikan, memiliki peran vital dalam keseimbangan ekologi dan ekonomi. Potensi pengembangan hutan rakyat dengan komoditas seperti mahoni dan sengon, serta keberadaan HHBK unggulan seperti nangka, bambu, dan durian, memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk upaya konservasi dan rehabilitasi, sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan HHBK secara lestari dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem hutan.

Terakhir, ekonomi kreatif menjadi jembatan antara kekayaan budaya dan potensi pariwisata. Keberadaan ribuan pelaku seni kriya dengan produk-produk unik seperti tenun, gerabah, dan perak, merupakan daya tarik tambahan bagi wisatawan. Optimalisasi sektor ini memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dukungan akses permodalan, dan perbaikan sarana prasarana. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan promosi juga akan memperluas jangkauan pasar. Integrasi yang kuat antara produk ekonomi kreatif dengan destinasi wisata akan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal dan memperpanjang durasi kunjungan wisatawan.

Secara keseluruhan, keunggulan komparatif Kabupaten Lombok Tengah terletak pada sinergi antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan potensi sumber daya alam yang beragam. Optimalisasi ekonomi berkelanjutan di daerah ini menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan sektor-sektor ini, dengan dukungan infrastruktur berkualitas, kebijakan yang pro-lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Skenario Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

   Jasa Ekosistem Penyedia Pangan pada kawasan permukiman dan sarana pendukungnya sebagain besar berada pada kategori tinggi seluas 5.833,31 Ha atau sekitar 39,415 dari total kawasan permukiman, kategori sangat tinggi seluas 3.851,07 Ha (26,02%), dan kategori sedang seluas 3.500,26 Ha (23,65%).

Tabel 2.4 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Pangan (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Batukliang		73,74	14,77	947,44	56,42	1.092,38
2	Batukliang Utara		120,06	351,30	249,93	352,88	1.074,17
3	Janapria		77,47	30,66	798,87	117,09	1.024,09
4	Jonggat		187,35	569,03	450,16	266,00	1.472,55
5	Kopang		116,21	60,21	875,19	42,80	1.094,42
6	Praya		578,57	88,16	618,66	300,68	1.586,08
7	Praya Barat		89,96	338,56	286,85	515,62	1.231,01
8	Praya Barat Daya		35,01	147,71	505,60	218,85	907,17
9	Praya Tengah		91,76	30,69	439,91	489,90	1.052,25
10	Praya Timur		171,83	48,42	170,18	454,23	844,66
11	Pringgarata		48,92	488,01	187,08	312,92	1.036,94
12	Pujut	23,55	2,40	1.332,72	303,43	723,65	2.385,75
Total		23,55	1.593,30	3.500,26	5.833,31	3.851,07	14.801,47
Persentase (%)		0,16	10,76	23,65	39,41	26,02	100

Distribusi jasa ekosistem penyedia pangan yang sebagian besar berada dalam kategori tinggi dan sangat tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan permukiman memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan pasokan pangan di masa depan. Kawasan yang termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi memiliki kualitas tanah dan sumber daya alam yang baik, yang memungkinkan keberlanjutan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ini sangat penting untuk pengembangan kawasan permukiman yang berbasis pada ketahanan pangan lokal. Namun, keberlanjutan kawasan yang berfungsi sebagai penyedia pangan dapat terancam jika terjadi alih fungsi lahan untuk pembangunan atau pemanfaatan sumber daya secara tidak bijaksana. Oleh karena itu, perlu ada perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan-kawasan tersebut agar tetap dapat berfungsi dengan optimal sebagai penyedia pangan. Pengelolaan yang baik juga akan mendukung pengembangan kawasan permukiman yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan keberlanjutan sistem pangan lokal.

2. Skenario Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem penyedia air pada kawasan permukiman dan sarana pendukungnya sebagian besar berada pada kategori sedang, dengan luas 7.353,21 ha (49,68% dari total kawasan permukiman), dan kategori rendah seluas 6.483,09 ha (43,80%). Adapun rincian keseluruhan kondisi jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 6.9. Pengaruh dari distribusi jasa ekosistem penyedia air pada kawasan permukiman yang sebagian besar berada dalam kategori sedang dan rendah menunjukkan adanya potensi terbatas dalam penyediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan hampir 50% kawasan permukiman tergolong dalam kategori sedang, kualitas dan kuantitas air yang tersedia mungkin tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan permukiman dalam jangka panjang. Sementara itu, hampir 44% kawasan yang masuk dalam kategori rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah mungkin menghadapi tantangan besar dalam akses air yang cukup dan bersih, yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, perlu adanya perhatian dan intervensi dalam pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan kualitas jasa ekosistem ini agar dapat mendukung kawasan permukiman dengan lebih baik.

Tabel 2.5 Jasa Ekosistem Penyedia Air

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Air (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Batukliang		98,75	993,62			1.092,38
2	Batukliang Utara		409,12	665,05			1.074,17
3	Janapria		144,06	879,06		0,97	1.024,09
4	Jonggat		1.237,18	235,24		0,13	1.472,55
5	Kopang		203,44	890,98			1.094,42
6	Praya		754,00	831,72		0,36	1.586,08
7	Praya Barat	165,12	623,86	439,52	0,32	2,19	1.231,01
8	Praya Barat Daya	38,29	582,13	284,48		2,28	907,17
9	Praya Tengah		448,02	603,27		0,97	1.052,25
10	Praya Timur	1,21	631,49	211,96			844,66
11	Pringgarata		449,73	587,21			1.036,94
12	Pujut	752,95	901,32	731,10	0,39		2.385,75
Total (Ha)		957,57	6.483,09	7.353,21	0,70	6,90	14.801,47
Persentase (%)		6,47	43,80	49,68	0,005	0,05	100

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

   Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim pada kawasan permukiman dan sarana pendukungnya sebagain besar berada pada kategori sedang 9.111,82 Ha atau sekitar 61,56% dari total kawasan permukiman, kemudian kategori tinggi 2.275,63 Ha (15,37%), dan kategori rendah 1.938,02 Ha (13,09%).

Tabel 2.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Batukliang	47,06	36,92	926,70	81,70		1.092,38
2	Batukliang Utara		33,81	523,95	407,51	108,90	1.074,17
3	Janapria	77,47	1,34	944,31	0,97		1.024,09
4	Jonggat	138,35	308,40	834,85	190,96		1.472,55
5	Kopang	113,11	27,02	928,53	25,76		1.094,42
6	Praya	578,57	62,36	944,78	0,36		1.586,08
7	Praya Barat	89,96	212,45	787,71	138,42	2,46	1.231,01
8	Praya Barat Daya	35,01	265,41	571,78	34,98		907,17
9	Praya Tengah	91,76	194,05	765,47	0,97		1.052,25
10	Praya Timur	171,83	273,95	362,86	36,03		844,66
11	Pringgarata	16,71	129,54	444,20	446,49		1.036,94
12	Pujut	1,70	392,77	1.076,69	911,48	3,11	2.385,75
Total (Ha)		1.361,53	1.938,02	9.111,82	2.275,63	114,47	14.801,47
Persentase (%)		9,20	13,09	61,56	15,37	0,77	100,00

Pengembangan kawasan permukiman dapat mempengaruhi iklim lokal dan global melalui perubahan penggunaan lahan, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan perubahan aliran energi dan air. Jika kawasan permukiman berkembang pesat tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan, maka potensi jasa ekosistem pengaturan iklim seperti penyerapan karbon dan pengaturan suhu dapat berkurang. Sebagian besar kawasan permukiman yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa kemampuan kawasan tersebut dalam mengatur iklim relatif terbatas, yang bisa menyebabkan peningkatan suhu lokal atau urban heat island effect, dimana suhu di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan area pedesaan di sekitarnya. Kawasan permukiman yang berada pada kategori tinggi menunjukkan potensi yang lebih baik dalam pengaturan iklim, namun dengan adanya pengembangan kawasan perumahan yang tidak terencana, lahan tersebut bisa beralih fungsi dan mengurangi kemampuan ekosistem dalam menstabilkan iklim lokal. Sebaliknya, kerentanan terhadap perubahan iklim pada kawasan permukiman dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Kawasan permukiman dengan kemampuan pengaturan iklim rendah dapat mengalami dampak yang lebih besar dari perubahan iklim, seperti peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem. Oleh karena itu, penting untuk

merencanakan dan mengelola pengembangan kawasan permukiman secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan jasa ekosistem dan mengurangi kerentanannya terhadap perubahan iklim.

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan tiga pilar fundamental yang menopang pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Ketersediaan dan akses yang memadai terhadap sumber daya ini tidak hanya menjadi hak dasar bagi setiap warga, tetapi juga prasyarat mutlak untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menjadi kerangka acuan utama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara eksplisit mengarahkan prioritas pembangunan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya esensial.

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah menjadi katalisator utama dalam dinamika pembangunan daerah di Lombok Tengah, menarik perhatian nasional dan internasional serta investasi berskala besar. Pergerakan industri pariwisata di KEK Mandalika secara otomatis menuntut pasokan energi listrik yang substansial, dengan kebutuhan mencapai

30 Mega Volt Ampere (MVA) untuk seluruh kawasan dan 5,18 Megawatt (MW) khusus untuk operasional Sirkuit Mandalika. Pembangunan sirkuit dan infrastruktur pariwisata di Mandalika juga memiliki dampak signifikan terhadap sumber daya air lokal. Terdapat laporan mengenai peningkatan konsumsi air yang signifikan akibat aktivitas pariwisata , serta dampak lingkungan seperti salinisasi air tanah di beberapa dusun di Desa Kuta, Lombok Tengah, yang menyebabkan hilangnya sumber air bersih dan potensi banjir. Di sisi ekonomi, KEK Mandalika telah terbukti memicu perkembangan sektor pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta membuka lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan KEK Mandalika sangatlah substansial, tercermin dari realisasi belanja Proyek Strategis Nasional yang mencapai Rp 1.300,42 miliar pada periode 2020-2023, termasuk alokasi Rp 1,05 triliun untuk pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika dari tahun 2020 hingga 2022.

1. Kondisi Kemandirian Pangan (2020-2024)

   a. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lombok Tengah
   Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan skor komposit yang dirancang untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. IKP disusun dengan menggabungkan beberapa indikator utama yang mencerminkan tiga dimensi krusial dari ketahanan pangan:

   - **Ketersediaan Pangan:** Mengukur kecukupan pangan yang berasal dari hasil produksi lokal, cadangan pangan, dan efisiensi sistem distribusi, dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi normatif per kapita.
   - **Keterjangkauan (Akses) Pangan:** Meliputi aspek ekonomi, fisik, dan sosial yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan, seperti tingkat kemiskinan, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik.
   - **Pemanfaatan Pangan (Kualitas Konsumsi & Gizi):** Memperhatikan aspek kualitas konsumsi pangan dan status gizi, termasuk akses terhadap air bersih, tingkat stunting pada balita, tingkat pendidikan ibu, dan rasio tenaga kesehatan yang memadai. IKP diukur setiap tahun sebagai bagian dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Nasional, yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan panduan untuk memprioritaskan intervensi kebijakan.

Tren IKP Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024): Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pola yang relatif stabil selama lima tahun terakhir, dengan fluktuasi minor sebelum mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2024. Nilai IKP Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 adalah 77.10, yang merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (69.89 pada 2018 dan 75.26 pada 2019), menunjukkan tren penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tabel 2.7 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, 2020-2024

No	Tahun	Capaian IKP Lombok Tengah	Perubahan	Provinsi NTB	Selisih (Loteng - NTB)
1	2020	77.10	–	75.60	+1.50
2	2021	75.95	-1.15	75.67	+0.28
3	2022	77.06	+1.11	76.58	+0.48
4	2023	76.50	-0.56	75.60	+0.90
5	2024	79.50	+3.00	78.44	+1.06

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2025 (data diolah)

Analisis tren dari Tabel 3.1 menunjukkan bahwa IKP Lombok Tengah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2023, namun kemudian menunjukkan pemulihan dan penguatan yang tajam pada tahun 2024. Peningkatan IKP sebesar +3.00 poin pada tahun 2024 adalah sebuah capaian yang patut dicermati.

Perbandingan dengan Provinsi NTB menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah secara konsisten mempertahankan skor IKP yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi NTB sepanjang periode 2020-2024. Selisih rata-rata IKP antara Lombok Tengah dan NTB adalah sekitar +0.84 poin, menegaskan posisi unggul Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ketahanan pangan di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Lombok Tengah berhasil menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif.

Peningkatan IKP yang substansial pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa kebijakan pangan daerah mulai menunjukkan efektivitas yang nyata setelah periode transisi atau kendala yang mungkin terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar peningkatan angka, melainkan cerminan dari strategi yang berhasil diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan pangan. Kebijakan ini mencakup penguatan sistem distribusi pangan lokal dan intervensi yang ditargetkan untuk kelompok rentan dalam hal gizi dan akses pangan. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 secara komprehensif mencakup peningkatan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, penguatan pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan untuk mitigasi potensi kerawanan, penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga, dan penguatan cadangan pangan masyarakat melalui kerja sama pemerintah kabupaten. Selain itu, program percepatan seperti pompanisasi dan irigasi perpompaan yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk perluasan areal tanam padi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan. Inovasi seperti kolaborasi dengan sistem blockchain "Padigital" pada Januari 2024 untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan, termasuk pengembangan industri pengolahan jagung dan sistem pergudangan , juga berperan dalam efisiensi rantai pasok dan keberlanjutan produksi.

Konsistensi IKP yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB menegaskan peran strategis Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu lumbung pangan utama di provinsi tersebut, bahkan sebagai daerah penyangga lumbung pangan nasional. Posisi ini mengindikasikan fondasi pertanian yang kuat dan manajemen pangan yang efektif. Kemampuan Lombok Tengah untuk secara konsisten melampaui rata-rata provinsi menunjukkan bahwa wilayah ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada keamanan pangan regional dan nasional. Hal ini juga dapat menjadi daya

tarik bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dan program pertanian di kabupaten ini.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) adalah indikator penting yang mengukur proporsi penduduk yang secara reguler mengonsumsi makanan dalam jumlah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk hidup sehat dan aktif. Indikator ini berfungsi sebagai alat krusial untuk mengevaluasi kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah.

Data PoU Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024): Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 mencapai 2.98%. Angka ini menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 0.16% dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 2.82%. Namun, perlu dicatat bahwa dalam rentang lima tahun terakhir (2018-2023), angka PoU di Lombok Tengah menunjukkan penurunan sebesar 3.17%. Perbandingan dengan rata-rata nasional menunjukkan bahwa PoU di Kabupaten Lombok Tengah jauh lebih rendah, mengingat rata-rata PoU Indonesia pada tahun 2023 adalah 8.53%. Data terbaru untuk tahun 2024 menunjukkan PoU Lombok Tengah sebesar 3.84% , yang mengindikasikan adanya kenaikan berkelanjutan dari tahun 2023.

Dalam konteks Provinsi NTB, pada tahun 2023, Kabupaten Lombok Tengah berada di urutan ke-9 dari 10 kabupaten/kota dalam hal PoU, yang berarti posisinya termasuk dalam tiga wilayah dengan PoU tertinggi. Wilayah dengan PoU terendah di NTB adalah Kota Mataram (0.65%), sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Bima (3.21%).

Meskipun angka PoU secara keseluruhan relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, kenaikan yang terlihat dari tahun 2022 ke 2024 (dari 2.82% menjadi 3.84%) perlu diwaspadai sebagai indikator adanya kantong-kantong kerentanan gizi atau tekanan baru pada akses pangan di wilayah tertentu. Posisi Lombok Tengah yang berada di urutan ke-9 di NTB juga menunjukkan bahwa, meskipun lebih baik dari rata-rata nasional, masih terdapat disparitas internal atau kerentanan spesifik yang memerlukan perhatian. Misalnya, Kecamatan Praya disebut sebagai wilayah yang paling rawan akibat tekanan urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur. Perubahan penggunaan lahan ini dapat mengurangi ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan harga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi akses pangan bagi rumah tangga rentan. Kenaikan harga komoditas pangan, seperti cabai yang dilaporkan tinggi di Lombok Tengah pada Januari 2025 , juga dapat menjadi faktor pendorong kenaikan PoU di area-area tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kerentanan pangan yang lebih granular hingga tingkat desa atau dusun untuk mengidentifikasi penyebab spesifik dari kenaikan ini dan merumuskan intervensi yang lebih terfokus.

Penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan di Kabupaten Lombok Tengah, dari 12.93% pada Maret 2023 menjadi 12.07% pada Maret 2024, menunjukkan hubungan kausal yang kuat antara jaring pengaman sosial dan mitigasi ketidakcukupan konsumsi pangan. Penurunan kemiskinan ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan beras cadangan pemerintah. Program-program ini berhasil mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, sehingga secara langsung memengaruhi dimensi keterjangkauan pangan dalam IKP. Tanpa program-program bantuan sosial ini, angka PoU kemungkinan akan menunjukkan tren yang lebih mengkhawatirkan. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kemampuan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, dan peran penting intervensi pemerintah dalam mendukung akses ekonomi terhadap pangan.

c. Kapasitas Produksi dan Tantangan Pangan Lokal

Kabupaten Lombok Tengah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakteristik wilayahnya yang agraris didominasi oleh lahan subur dan didukung oleh sistem irigasi teknis serta tadah hujan. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan ubi kayu menjadi tulang punggung produksi pangan daerah, menunjukkan diversifikasi yang mendukung ketahanan pangan.

Kapasitas produksi pangan di Lombok Tengah tergolong sangat tinggi, bahkan melebihi ambang batas minimal untuk swasembada. Luas tanam tanaman pangan per kapita mencapai 216.67% dari ambang minimal swasembada pangan yang ditetapkan sebesar 0.06 hektar per kapita per tahun. Angka ini mengindikasikan potensi surplus pangan yang signifikan, yang tidak hanya mencukupi kebutuhan internal kabupaten tetapi juga berkontribusi pada pasokan pangan regional. Secara kuantitatif, produksi tanaman pangan di Lombok Tengah diperkirakan setara dengan ±2.2 triliun kilokalori per tahun, atau sekitar 613.565.924 kg beras, jumlah yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh penduduk kabupaten. Kecamatan-kecamatan seperti Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, dan Praya Barat diidentifikasi sebagai wilayah dengan potensi swasembada tertinggi, menunjukkan konsentrasi produksi pangan yang kuat di area-area tersebut.

Meskipun memiliki potensi produksi yang melimpah, Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan kapasitas pangannya. Kecamatan Praya, sebagai pusat pemerintahan dan salah satu area dengan potensi swasembada tinggi, justru tercatat sebagai wilayah yang paling rawan pangan. Hal ini disebabkan oleh tekanan urbanisasi yang masif dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur. Fenomena ini menciptakan konflik pemanfaatan lahan yang signifikan, di mana pembangunan ekonomi jangka pendek (perumahan, fasilitas umum, dan pengembangan pariwisata seperti KEK Mandalika) berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk mempertahankan lahan pertanian produktif demi ketahanan pangan jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, alih fungsi lahan ini dapat mengikis fondasi agraris kabupaten.

Kondisi infrastruktur irigasi juga menjadi hambatan signifikan terhadap optimalisasi produksi pangan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 40.56% jaringan irigasi primer dan 48.04% jaringan sekunder yang berada dalam kondisi baik. Persentase yang rendah ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur air baku. Kondisi jaringan irigasi yang kurang optimal ini dapat menghambat distribusi air secara efisien ke lahan pertanian, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan kerentanan terhadap variabilitas iklim, terutama saat musim kemarau panjang. Meskipun demikian, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada tahun 2024 memiliki target indikator kinerja untuk melayani 69.19% luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan jaringan irigasi, dan target ini berhasil terealisasi. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah ini melalui program percepatan seperti pompanisasi dan irigasi perpompaan pada tahun 2024, yang bertujuan untuk perluasan areal tanam padi. Upaya ini menunjukkan kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses air bagi pertanian guna menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi pangan.

2. Kondisi Akses Air Minum (2020-2024)

d. Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga

Air minum layak didefinisikan sebagai air yang memenuhi persyaratan kesehatan dan aman untuk dikonsumsi manusia, baik melalui proses pengolahan maupun tanpa pengolahan. Sumber air minum layak meliputi air yang berasal dari PDAM, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH), mata air terlindung, dan sumur terlindung (termasuk sumur bor atau sumur pompa) dengan syarat jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Penting untuk

dicatat bahwa definisi ini tidak mencakup air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, serta air sumur atau mata air yang tidak terlindungi.

Tren Cakupan Layanan Air Minum (2020-2024): Cakupan layanan air minum di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang signifikan.

Tabel 2.8 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Layanan Air Minum	77.28	78.64	80.37	83.67	78.82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Analisis tren dari tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan layanan air minum meningkat dari 77.28% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 83.67% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini mengalami penurunan menjadi 78.82%.

Penurunan cakupan pada tahun 2024 ini bukan merupakan indikasi regresi kinerja dalam penyediaan infrastruktur, melainkan disebabkan oleh perubahan metode perhitungan. Sebelumnya, satu sambungan rumah tangga perpipaan diasumsikan melayani 4 orang, namun pada tahun 2024, asumsi ini diubah menjadi hanya 3 orang per sambungan rumah. Perubahan metodologi ini memiliki implikasi penting. Meskipun angka persentase cakupan menurun, secara infrastruktur, terdapat peningkatan jaringan untuk menjangkau kebutuhan air minum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur air bersih terus berlanjut dan bahkan meningkat, namun metode pelaporan yang lebih ketat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang cakupan per individu. Perubahan ini menyoroti tantangan dalam mengukur akses air minum layak secara akurat, terutama dalam konteks perbedaan kepadatan penduduk per rumah tangga atau pola konsumsi. Ini juga dapat mengindikasikan bahwa target cakupan sebelumnya mungkin kurang ambisius dalam konteks kebutuhan riil per kapita, dan penyesuaian ini adalah langkah positif menuju pelaporan yang lebih presisi dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

e. Tantangan dalam Penyediaan Air Bersih

Meskipun capaian cakupan layanan air minum secara keseluruhan mencapai 78.82% pada tahun 2024, Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam memastikan akses air bersih yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah-wilayah seperti Praya Timur, Janapria, Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya masih tergolong rawan kekeringan, terutama saat musim kemarau panjang. Identifikasi wilayah-wilayah yang secara eksplisit rawan kekeringan ini menunjukkan perlunya intervensi yang terfokus secara geografis. Ini bukan hanya masalah cakupan total, melainkan juga masalah keadilan spasial dalam akses air, yang memerlukan perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih detail di tingkat sub-distrik. Kerentanan terhadap kekeringan di musim kemarau panjang juga menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur air yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Keterbatasan sumber air alami dan kondisi infrastruktur yang belum optimal juga menjadi hambatan. Meskipun wilayah utara dan perbukitan memiliki potensi sumber air alami yang melimpah seperti Benang Stokel, Tibu Lempanas, dan Pemasir, distribusi dan kapasitas sumber-sumber tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Lebih lanjut, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 40.56% jaringan irigasi primer dan 48.04% jaringan sekunder yang berada dalam kondisi baik. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur air baku. Kondisi buruk jaringan irigasi tidak hanya memengaruhi ketahanan pangan, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi ketersediaan air baku untuk air minum, terutama di daerah yang bergantung pada sumber air yang sama. Investasi dalam perbaikan irigasi dapat memberikan manfaat ganda,

meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian sekaligus untuk konsumsi. Selain itu, upaya pembangunan embung dan penampungan air lainnya belum terealisasi sesuai target pada tahun 2024 (0 dari 5 unit yang direncanakan berhasil dibangun), meskipun anggaran telah dialokasikan. Kegagalan ini merupakan peluang yang terlewatkan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, yang krusial bagi ketahanan air.

Faktor sosial dan budaya juga berperan sebagai hambatan non-teknis. Di beberapa desa, masyarakat masih sangat mengandalkan sumber air tradisional seperti sumur gali dan sungai karena faktor budaya dan kepercayaan terhadap kualitas air tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya air minum yang aman dan higienis. Solusi teknis saja tidak cukup; diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan perilaku untuk memastikan adopsi praktik penggunaan air yang lebih aman. Ini menyiratkan bahwa kampanye kesehatan masyarakat dan keterlibatan komunitas sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur rekayasa.

f. Intervensi dan Upaya Peningkatan Akses Air

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengimplementasikan berbagai intervensi dan program untuk meningkatkan akses air minum layak bagi penduduknya. Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Artha Rinjani sangat sentral dalam penyediaan air melalui jaringan perpipaan. PDAM Tirta Artha Rinjani saat ini melayani sekitar 52.000 pelanggan. Kinerja finansial PDAM ini menunjukkan tren positif, dengan laba bersih meningkat signifikan dari Rp 239 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 1.234 juta pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi Rp 2.450 juta pada tahun 2023. Peningkatan kinerja finansial ini merupakan indikator positif dari kapasitas finansial PDAM untuk mendukung ekspansi layanan dan pemeliharaan infrastruktur di masa mendatang.

Selain itu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) juga memainkan peran krusial, terutama di desa-desa prioritas. Program Pamsimas telah berhasil membangun lebih dari 30 sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat, dengan 475 Kepala Keluarga (KK) di 6 desa telah menikmati air minum layak melalui program ini pada tahun 2023. Model kemitraan yang beragam ini, menggabungkan layanan perpipaan terpusat dari PDAM dengan solusi berbasis komunitas melalui Pamsimas, memungkinkan penyesuaian strategi penyediaan air sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis yang berbeda di seluruh kabupaten.

Di wilayah selatan dan timur yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan, sumur bor menjadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan air. Namun, pemanfaatan sumur bor ini menghadapi tantangan seperti debit air yang rendah dan keterbatasan biaya operasional, yang menunjukkan bahwa solusi ini mungkin tidak selalu berkelanjutan atau efisien dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah telah menetapkan peningkatan akses air minum sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah berkelanjutan, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan. Peningkatan akses ini harus dilakukan secara terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penguatan kelembagaan. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2024 mencapai Rp 25.007.781.500, dengan realisasi anggaran sebesar 96.49%. Target persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman adalah 80.37%, dan capaian realisasinya sedikit melampaui target, yaitu 80.76%. Demikian pula, target jumlah masyarakat yang terlayani adalah 1.967 KK, dengan realisasi mencapai 2.622 KK.

Meskipun ada komitmen dan anggaran yang signifikan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), beberapa target tidak tercapai sepenuhnya karena *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19. Misalnya, target perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan

perdesaan adalah 3.500 Sambungan Rumah (SR), namun hanya terealisasi 2.622 SR karena adanya pengurangan anggaran. Hal ini menunjukkan bagaimana krisis tak terduga dapat mengalihkan sumber daya dari program pembangunan jangka panjang, dan menekankan pentingnya memprioritaskan kembali proyek-proyek yang tertunda ini pasca-pandemi untuk memastikan keberlanjutan peningkatan akses air.

3. Kondisi Ketahanan Energi (2020-2024)

a. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan standar hidup masyarakat di suatu wilayah. Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ekspansi sektor ekonomi yang semakin bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Tabel 2.9 Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	Konsumsi per Kapita (kWh/tahun)
2020	348
2021	368
2022	388
2023	407
2024	426

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan konsumsi listrik per kapita dari sekitar 348 kWh/tahun pada tahun 2020 menjadi sekitar 426 kWh/tahun pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5.2%. Peningkatan yang stabil dan signifikan ini merupakan indikator kuat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup masyarakat di Lombok Tengah. Konsumsi listrik yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan peningkatan kepemilikan peralatan elektronik, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan aktivitas bisnis.

Namun, perlu dicatat adanya kontradiksi data dalam informasi yang diberikan. Selain tabel di atas, narasi juga menyebutkan bahwa "Pada tahun 2023, rata-rata konsumsi listrik penduduk Lombok Tengah mencapai 710 kWh per kapita per tahun, meningkat dari 670 kWh pada tahun sebelumnya". Angka 710 kWh untuk tahun 2023 ini sangat berbeda dengan 407 kWh yang tercantum dalam tabel. Selain itu, data dari Satu Data NTB menunjukkan konsumsi listrik per kapita untuk Provinsi NTB secara keseluruhan mencapai 748.74 kWh/kapita pada tahun 2024 , yang juga jauh lebih tinggi dari angka Lombok Tengah dalam tabel. Perbedaan angka ini dapat disebabkan oleh metodologi pengumpulan data yang berbeda, cakupan wilayah (kabupaten vs. provinsi), atau perbedaan antara data awal dan data final. Untuk tujuan analisis tren tahunan dalam laporan ini, data dari tabel yang menunjukkan tren konsisten dari 2020-2024 akan diprioritaskan, sambil mengakui adanya perbedaan data dari sumber lain.

Distribusi konsumsi listrik berdasarkan sektor menunjukkan bahwa rumah tangga mendominasi penggunaan dengan 58% dari total konsumsi. Angka ini mencerminkan naiknya standar hidup dan intensitas penggunaan listrik untuk kebutuhan harian masyarakat. Di sisi lain, sektor industri kecil dan UMKM menyerap 22% dari total konsumsi, menandakan tumbuhnya aktivitas produktif masyarakat, terutama di area wisata Mandalika dan sekitarnya. Sektor publik, seperti sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas kesehatan, berkontribusi sekitar 12%, sementara sisanya digunakan untuk keperluan pertanian, terutama untuk pengoperasian pompa air. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, khususnya yang didorong oleh pariwisata dan UMKM, memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan permintaan energi.

e. Rasio Elektrifikasi dan Infrastruktur Energi

Rasio elektrifikasi adalah indikator kunci dalam mengukur akses masyarakat terhadap pasokan listrik. Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai keberhasilan yang sangat signifikan dalam penyediaan akses listrik, dengan rasio elektrifikasi mencapai 98.7% pada akhir tahun 2024. Data dari Satu Data NTB bahkan menunjukkan angka yang lebih tinggi untuk Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 99.69% pada tahun 2020, meningkat menjadi 99.97% pada tahun 2021, dan mencapai 99.98% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Kontribusi Rasio Elektrifikasi (RE) Non PLN sangat kecil, hanya sekitar 0.01%. Capaian ini menempatkan Lombok Tengah di atas rata-rata Rasio Desa Berlistrik (RDB) nasional yang mencapai 99.92% pada tahun 2024. Tingginya rasio elektrifikasi ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam penyediaan akses listrik ke hampir seluruh rumah tangga di Lombok Tengah, yang merupakan fondasi penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Lonjakan konsumsi listrik yang telah dibahas sebelumnya tidak lepas dari ekspansi jaringan listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). PLN terus memperkuat rasio elektrifikasi sebagai bagian dari komitmennya untuk menerangi desa-desa terpencil dan memperluas akses listrik ke seluruh pelosok negeri.

Meskipun rasio elektrifikasi tinggi, upaya diversifikasi energi di Lombok Tengah masih dalam tahap awal. Di beberapa desa, mulai terlihat inisiatif Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala rumah tangga, namun kontribusinya terhadap total konsumsi listrik masih sangat kecil, di bawah 2%. Di sisi lain, kawasan Mandalika telah menunjukkan langkah konkret dalam pemanfaatan energi terbarukan dengan pemasangan 541 unit penerangan jalan umum (PJU) berbasis tenaga surya dan 5 unit *charging station* berbasis *solar cell* yang tersebar di Kuta Beach Park dan Sirkuit Mandalika. Provinsi NTB sendiri memiliki target ambisius untuk mencapai 35% energi terbarukan dalam pembangkit listrik pada tahun 2025.

Tingginya rasio elektrifikasi adalah pencapaian besar yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, memungkinkan akses pendidikan, dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Namun, tantangannya adalah bagaimana listrik tersebut dihasilkan. Ketergantungan pada sumber energi fosil masih menjadi isu strategis. Pembangkit listrik fosil seperti PLTMGU Lombok Tanjung Karang dan PLTU/PLTG Jerangjang masih menjadi pemasok utama listrik di Pulau Lombok, termasuk ke Mandalika. Meskipun ada upaya diversifikasi ke energi bersih, kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap kebutuhan energi Mandalika masih sangat kecil (sekitar 5.4 MW dari 30 MVA total kebutuhan). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi target EBT provinsi dan realitas implementasi di lapangan. Transisi energi yang lebih cepat dan signifikan menuju sumber-sumber terbarukan adalah kunci untuk meningkatkan ketahanan energi jangka panjang dan mengurangi dampak lingkungan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan prasyarat mutlak bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang tercemar dapat berdampak langsung pada kesehatan publik, mengurangi produktivitas kerja, dan menghambat potensi ekonomi daerah. Sebaliknya, lingkungan yang terjaga dengan baik akan mendukung ekosistem yang sehat, menyediakan sumber daya alam yang lestari, dan menciptakan daya tarik bagi investasi serta pariwisata berkelanjutan. Pentingnya lingkungan hidup berkualitas ini juga diamanatkan dalam arahan kebijakan pemerintah daerah, yang menekankan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana digariskan dalam dokumen perencanaan.

1. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah, yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan selama periode 2020 hingga

2024. Dimulai dengan kondisi yang relatif baik pada **tahun 2020 dengan nilai 67,55**, IKLH mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya. Meskipun sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai **67,18**, tren ini tidak bertahan lama. IKLH kembali menurun pada tahun 2024, mencapai **63,47**, yang masih lebih rendah dari kondisi awal tahun 2020. Pola ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan di wilayah ini belum mampu menciptakan stabilitas atau peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Tabel 2.10 Ringkasan Data Indikator Penyusun IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	67,55	62,71	63,17	67,18	63,47
IKA	56,15	50,00	50,00	56,67	49,05
IKU	93,03	91,76	92,88	94,70	92,81
IKTL	56,99	30,82	30,83	34,34	33,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Fluktuasi yang terjadi pada IKLH sebagian besar didorong oleh dinamika drastis pada dua sub-indikator utama: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air (IKA). Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan stabilitas yang relatif baik. Berikut adalah ringkasan data dan analisis dari setiap indikator:

- **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL):** Ini adalah faktor paling dominan yang memengaruhi IKLH secara keseluruhan. IKTL mengalami penurunan drastis sebesar **26,17 poin**, dari **56,99 di tahun 2020 menjadi 30,82 di tahun 2021**. Sejak saat itu, nilainya tetap berada pada level yang sangat rendah (sekitar 30-34) hingga tahun 2024. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya degradasi tutupan lahan yang signifikan, kemungkinan besar akibat deforestasi atau alih fungsi lahan yang masif. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan pembangunan pesat, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dampaknya serius terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

- **Indeks Kualitas Air (IKA):** IKA menunjukkan pola yang tidak stabil. Setelah mengalami penurunan signifikan dari **56,15 (2020) menjadi 50,00 (2021 dan 2022)**, IKA sempat pulih ke **56,67 pada tahun 2023** namun kembali anjlok ke **49,05 pada tahun 2024**. Pola ini mengindikasikan masalah persisten dalam pengelolaan kualitas air, yang bisa disebabkan oleh pencemaran dari limbah domestik, pertanian, atau aktivitas pariwisata. Kualitas air yang buruk berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ketersediaan sumber daya air bersih.

- **Indeks Kualitas Udara (IKU):** Indikator ini menunjukkan kinerja yang paling baik dan stabil, dengan nilai yang konsisten di atas 90. Nilai tertingginya adalah **94,70 pada tahun 2023** dan terendahnya **91,76 pada tahun 2021**. Meskipun ada sedikit fluktuasi, ini menunjukkan bahwa pencemaran udara belum menjadi masalah kritis dibandingkan dengan air dan tutupan lahan.

Dapat disimpulkan bahwa fluktuasi IKLH yang terjadi dari 2020-2024 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian serius. Dengan target IKLH sebesar 70,27 yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, data aktual secara konsisten berada di bawah target ini. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang ada belum cukup untuk menciptakan perbaikan yang stabil dan berkelanjutan. Penurunan signifikan pada IKTL dan IKA, serta korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung mungkin belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih kuat dan terintegrasi, dengan fokus utama pada pemulihan dan perlindungan tutupan lahan, serta peningkatan kualitas air, demi mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem di Lombok Tengah.

2. **Akses Sanitasi**

Persentase sanitasi layak di Kabupaten Lombok Tengah meningkat dan mencapai 85,31 persen di tahun 2024. Namun capaian ini masih berada di bawah target SDG's sebesar 90 persen. Standar sanitasi telah ditingkatkan menjadi sanitasi aman. Sanitasi aman adalah kondisi dimana fasilitas sanitasi digunakan dan dikelola dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Ketercapaian sanitasi aman di Lombok Tengah sampai dengan 2024, sebesar 2,68 persen.

Tabel 2.11 Presentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Aman tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Presentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi aman	0,57	1,5	2,35	2,68

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya tren positif yang konsisten dalam peningkatan akses sanitasi aman bagi rumah tangga. Perkembangan ini dimulai dari titik yang sangat rendah, yaitu hanya 0,57% pada tahun 2021. Angka ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi daerah dalam menyediakan infrastruktur dan kesadaran sanitasi yang memadai bagi masyarakatnya. Namun, upaya yang dilakukan mulai membuahkan hasil pada tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2022, terlihat sebuah lonjakan signifikan di mana persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman meningkat menjadi 1,5%. Kenaikan sebesar hampir satu poin persentase ini menandai adanya momentum awal yang kuat dalam program-program pemerintah atau inisiatif lain yang terkait. Tren positif ini terus berlanjut ke tahun 2023, di mana persentase kembali naik menjadi 2,35%. Angka-angka ini secara naratif menceritakan sebuah perjalanan bertahap menuju kondisi yang lebih baik, meskipun masih jauh dari kata ideal.

Pada tahun 2024, persentase akses sanitasi aman kembali meningkat, meskipun dengan laju yang lebih lambat, mencapai 2,68%. Perlambatan kenaikan ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa tantangan semakin kompleks. Mungkin daerah yang lebih mudah dijangkau sudah mendapatkan akses, sementara daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit menjadi target berikutnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan, data dari empat tahun ini menggambarkan sebuah narasi perjuangan dan kemajuan yang berkelanjutan, di mana setiap tahunnya ada lebih banyak rumah tangga yang berhasil mendapatkan akses sanitasi yang aman, walau dengan tantangan yang semakin berat di kemudian hari.

3. **Pengelolaan Sampah**

Selama periode 2022 hingga 2024, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam pengelolaan sampah, meskipun belum mencapai target nasional pengelolaan sampah sebesar 100% pada tahun 2025. Timbulan sampah tahunan meningkat dari 153.263 ton pada 2022 menjadi 159.368 ton pada 2024, mencerminkan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, upaya pengurangan dan penanganan sampah juga mengalami peningkatan, meskipun fluktuatif.

Pengurangan sampah meningkat dari 15,31% (2022) menjadi puncaknya 20,37% (2023), lalu sedikit menurun ke 18,75% (2024). Penanganan sampah juga naik dari 14,77% menjadi 17,68%, kemudian stagnan di 17,29%. Total sampah yang berhasil dikelola (pengurangan + penanganan) mencapai 38,05% pada 2023, sebelum turun tipis ke 36,05% di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, efektivitas pengelolaan belum sepenuhnya stabil.

Dari sisi daur ulang, terdapat peningkatan signifikan: dari 16,98% (2022) menjadi 21,65% (2023), lalu sedikit menurun ke 20,46% (2024). Ini menunjukkan bahwa sistem daur ulang dan pemanfaatan bahan baku mulai berfungsi, namun belum optimal. Volume daur ulang (D) dan bahan baku (E) meningkat secara absolut, tetapi kontribusinya terhadap total timbulan sampah masih terbatas.

Tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan antara timbulan dan kapasitas pengelolaan. Meskipun volume pengurangan dan penanganan meningkat, laju pertumbuhan timbulan sampah tetap lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi struktural, seperti:

1) Penguatan kelembagaan pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan.
2) Perluasan fasilitas TPS3R dan bank sampah.
3) Edukasi publik tentang pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber.
4) Integrasi sistem digital pelaporan dan pemantauan berbasis SIPSN.

Selain itu, fluktuasi capaian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah belum sepenuhnya sistemik. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, alokasi anggaran yang memadai, dan kolaborasi lintas OPD serta masyarakat untuk mencapai target pengelolaan sampah berkelanjutan.

Dengan capaian pengelolaan sampah yang baru mencapai 36% pada 2024, Lombok Tengah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistemnya. Jika tren positif ini dijaga dan diperkuat, maka target nasional 100% pengelolaan sampah dan 30% pengurangan sampah pada 2025 dapat lebih realistis dicapai.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Timbulan Sampah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun)(E)	Recycling Rate (D+E)/A
2022	153,263,50	23,468,78	22,630,00	46,098,78	23,465,13	2,555,00	16,98
2023	155,881,57	31,756,95	27,557,50	59,314,45	31,743,45	2,007,50	21,65
2024	159,368,34	29,888,11	27,557,50	57,445,61	29,874,60	2,737,50	20,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 2025

2.1.1. 6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Tengah, menghadapi kerentanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi, serta dampak perubahan iklim yang semakin intens. Laporan Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk Lombok Tengah menyoroti kerentanan wilayah ini terhadap gempa bumi, tsunami, dan banjir, di antara ancaman lainnya. Mengingat kondisi geografis dan demografisnya, kajian resiliensi ini menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah ancaman yang terus berkembang.

Penting untuk memahami bahwa resiliensi bukan sekadar respons pasca-bencana, melainkan sebuah pendekatan proaktif. Definisi resiliensi yang mencakup kemampuan "bertahan dan bangkit kembali" secara inheren menyiratkan pergeseran paradigma dari manajemen krisis yang reaktif menjadi strategi pengurangan risiko dan adaptasi jangka panjang. Kerentanan yang diidentifikasi di Lombok Tengah menunjukkan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi yang terencana dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun ketahanan yang sejati, bukan hanya pemulihan setelah kejadian.

1. **Indeks Risiko Bencana (IRB)**

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat penting yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Ini adalah indikator kunci untuk perencanaan berbasis risiko dan alokasi sumber daya. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang mendasari IRB tidak hanya penting bagi daerah tetapi juga memiliki nilai strategis di tingkat nasional, mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memberikan dukungan yang proporsional. KRB mendeskripsikan kelas bencana menggunakan unit analisis kecamatan dan mencakup data bahaya per jenis bencana, jiwa terpapar, kerugian finansial, kerusakan lingkungan (dalam hektar), dan kapasitas pemerintah daerah.

Klasifikasi tingkat risiko bencana berdasarkan nilai IRB adalah sebagai berikut :

- Risiko Rendah: kurang dari 13 poin
- Risiko Sedang: 13–144 poin
- Risiko Tinggi: lebih dari 144 poin

Tabel 2.13 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah dari Tahun 2020-2024:

Tahun	Nilai Indeks Risiko Bencana (poin)	Kategori Tingkat Risiko Bencana
2020	157.08	Risiko Tinggi
2021	146.99	Risiko Tinggi
2022	136.01	Risiko Sedang
2023	127.55	Risiko Sedang
2024	133.05	Risiko Sedang

Sumber: inarisk.bnpb.go.id, 2025 (data diolah)

Nilai rata-rata IRB untuk Lombok Tengah pada tahun 2024 adalah 113.64 poin. Jika dilihat dalam rentang enam tahun terakhir, nilai rata-ratanya adalah 121.21 poin. Nilai rata-rata tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 128.05 poin, sedangkan nilai rata-rata terendah adalah 113.64 poin.

Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren penurunan risiko bencana dari kategori "Risiko Tinggi" pada tahun 2020 dan 2021 menjadi "Risiko Sedang" pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Penurunan signifikan dari 157.08 poin di tahun 2020 menjadi 133.05 poin di tahun 2024 mengindikasikan adanya upaya pengurangan risiko yang mulai menunjukkan hasil yang positif. Tren penurunan ini kemungkinan merupakan refleksi dari implementasi kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih terfokus dan terkoordinasi, sejalan dengan visi NTB Tangguh yang diusung oleh pemerintah provinsi.

Laporan Kajian Risiko Bencana (KRB) menyoroti kerentanan Lombok Tengah terhadap ancaman geologi dan hidrometeorologi, seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Berdasarkan catatan sejarah bencana dari BPBD Kabupaten Lombok Tengah dan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), wilayah ini memiliki sepuluh ancaman bencana potensial. Ancaman-ancaman ini meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, erupsi gunung api, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta wabah penyakit.

Ancaman-ancaman ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya sebagai berikut :

- Tingkat Risiko Tinggi: Meliputi gempa bumi, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, wabah penyakit (PMK dan hama wereng), dan pandemi Covid-19.
- Tingkat Risiko Sedang: Meliputi gelombang ekstrem, abrasi, dan tsunami.
- Tingkat Risiko Rendah: Meliputi erupsi gunung api dan kebakaran hutan dan lahan.

Kajian risiko juga memberikan detail spesifik mengenai ancaman tsunami. Kecamatan Pujut memiliki persentase ancaman tsunami tertinggi sebesar 9%. Secara keseluruhan, total 3.320,4 hektar (2,9% dari luas wilayah kabupaten) berpotensi terpapar tsunami. Desa-desa dengan persentase area terpapar tertinggi adalah Selong Belanak (0,6% atau 651,3 Ha) dan Kuta (0,5% atau 634,5 Ha). Sembilan desa diklasifikasikan memiliki Kelas Bahaya Tinggi untuk tsunami, yaitu Mekar Sari, Selong Belanak, Kuta, Tumpak, Prabu, Sukadana, Montong Ajan, Belilando, dan Kidang.

Tabel 2.14 Data Potesi Kerugian Akibat Bencana

Category	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Lombok Barat	375161	4154514	16.704.499	70709.29	60916
Lombok Utara	310555	1195374	4.529.977	35504.06	42000
Lombok Tengah	461644	4775696	23.888.537	108190.04	30038
Sumbawa Barat	677390	853073	3.786.838	25857.36	190978
Bima	1576530	2795255	12.713.267	133612.61	389134
Kota Bima	101185	927898	5.949.069	13476.58	15903
Lombok Timur	539803	5559409	23.323.692	126164.15	91415

Dompu	1041823	1279037	6.499.777	80058.95	209956
Sumbawa	2713220	2944223	14.887.785	178121.08	791646
Kota Mataram	41639	3031150	11.492.713	26386	

Sumber: inarisk.bnpb.go.id, 2025

Identifikasi ancaman yang beragam, termasuk wabah penyakit, menunjukkan pemahaman holistik terhadap risiko yang dihadapi daerah. Detail spasial ancaman tsunami, seperti yang diuraikan untuk Kecamatan Pujut dan desa-desa tertentu, memungkinkan perencanaan mitigasi yang sangat terfokus pada wilayah dan komunitas yang paling rentan. Hal ini merupakan ciri khas pendekatan pengurangan risiko bencana yang efektif, menggarisbawahi pentingnya data geospasial dalam strategi resiliensi. Kajian Risiko Bencana ini berfungsi sebagai fondasi perencanaan berbasis spasial dan multispektrum, memenuhi kebutuhan akan indikator kontekstual yang relevan dengan kondisi daerah.

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi luas bahaya yang signifikan sebesar 461.644 Ha, dengan 4.775.696 jiwa terpapar. Potensi kerugian fisik diperkirakan mencapai Rp 23.888,537 Miliar, kerugian ekonomi Rp 108.190,04 Miliar, dan kerusakan lingkungan seluas 30.038 Ha. Angka-angka ini menggarisbawahi skala tantangan yang dihadapi Lombok Tengah dalam konteks resiliensi bencana, menekankan urgensi mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan.

2. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah upaya sistematis untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Tujuan utama IKD adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dan menjadi masukan penting untuk mengukur penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB). Pengukuran IKD menggunakan 71 indikator yang komprehensif, mencakup berbagai aspek kapasitas penanggulangan bencana.

Klasifikasi tingkat ketahanan daerah berdasarkan nilai IKD adalah sebagai berikut :

- Rendah: kurang dari 0,4 poin
- Sedang: 0,4–0,8 poin
- Tinggi: lebih dari 0,8 poin

Data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun tetap berada dalam kategori "Sedang".

Tabel 2.15 IKD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (poin)	Kategori Tingkat Ketahanan Daerah
2024	0.50	Sedang
2023	0.50	Sedang
2022	0.49	Sedang
2021	0.44	Sedang
2020	0.40	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Nilai rata-rata IKD pada tahun 2024 adalah 0.56 poin, dan rata-rata dalam enam tahun terakhir adalah 0.54 poin. Nilai rata-rata tertinggi tercatat 0.57 poin, sedangkan nilai rata-rata terendah adalah 0.53 poin pada tahun 2021.

Peningkatan IKD yang konsisten dari 0.40 di tahun 2020 menjadi 0.50 di tahun 2024, meskipun tetap dalam kategori "Sedang," merupakan indikasi positif bahwa upaya penguatan kapasitas penanggulangan bencana di Lombok Tengah telah membuahkan hasil. Ini menunjukkan kemajuan bertahap dalam kapasitas daerah untuk menghadapi bencana.

Nilai IKD Kabupaten Lombok Tengah yang berada di level menengah ("Sedang") mengindikasikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilakukan. Namun, interpretasi lebih lanjut menunjukkan bahwa manfaat dari upaya-upaya ini belum terasa

menyeluruh, sehingga belum cukup untuk secara signifikan mengurangi dampak negatif dari bencana.

Hal ini menyoroti kebutuhan untuk tidak hanya melanjutkan program yang ada tetapi juga untuk meningkatkan kualitas, cakupan, dan koordinasi lintas sektor agar dampak positifnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan infrastruktur di seluruh wilayah. Peningkatan kapasitas yang terukur harus diikuti dengan peningkatan efektivitas di lapangan.

3. **Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengukur jumlah emisi GRK yang dihasilkan per unit aktivitas ekonomi atau produksi, seperti per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penurunan intensitas emisi GRK menunjukkan adanya dekarbonisasi ekonomi dan peningkatan efisiensi sumber daya. Konsep ini sangat signifikan dalam konteks perubahan iklim karena merupakan strategi mitigasi vital yang bertujuan untuk mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global dan dampak ekstrem yang diakibatkannya.

Meskipun tidak spesifik untuk Lombok Tengah, dokumen metodologi perhitungan emisi GRK menyediakan kerangka kerja yang relevan. Misalnya, emisi baseline (EBy) dapat dihitung dengan formula EBy=PLy×FEGy, di mana PLy adalah produksi listrik neto dan FEGy adalah faktor emisi GRK sistem ketenagalistrikan. Reduksi emisi (PEy) dihitung sebagai selisih antara emisi baseline dan emisi aksi mitigasi (PEy=EBy−EPy). Kerangka ini menunjukkan bahwa kuantifikasi GRK dapat dilakukan untuk berbagai sektor.

Data mengenai nilai *intensitas* emisi GRK atau angka *penurunan* emisi GRK yang terverifikasi untuk Kabupaten Lombok Tengah dalam periode 2020-2024 tidak secara eksplisit tersedia dalam sumber yang diberikan. Data yang ada lebih banyak bersifat agregat nasional atau provinsi, seperti capaian penurunan emisi GRK di sektor kehutanan dan limbah secara nasional, atau laporan inventarisasi GRK dari Kementerian Perhubungan, atau laporan umum inventarisasi GRK di tingkat kabupaten lain. Ketiadaan data kuantitatif spesifik ini merupakan celah data kritis yang membatasi analisis presisi mengenai kontribusi langsung Lombok Tengah terhadap mitigasi iklim melalui pengurangan intensitas emisi.

Sebagai indikator mitigasi tidak langsung, data mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat memberikan gambaran. Luas RTH di Kabupaten Lombok Tengah adalah 20.427 Ha dari total luas wilayah 120.800 Ha, menghasilkan rasio 16,91%. Angka ini masih jauh dari target ideal, 30% luas wilayah. Peningkatan RTH berkontribusi pada penyerapan karbon dan, oleh karena itu, merupakan bagian penting dari upaya mitigasi iklim. Meskipun data intensitas emisi spesifik kurang, upaya peningkatan RTH menunjukkan kesadaran akan pentingnya mitigasi berbasis lahan.

2.1.1.7 Demografi

Pada tahun 2024, Kabupaten Lombok Tengah mencatat total populasi sebanyak 1.128.716 jiwa. Angka ini mengukuhkan posisi Lombok Tengah sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang secara signifikan memengaruhi dinamika regional. Populasi ini tersebar di 12 kecamatan yang membentuk wilayah administratif Kabupaten Lombok Tengah.

Persebaran penduduk di antara kecamatan-kecamatan menunjukkan pola yang tidak merata. Kecamatan Praya menonjol sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, mencapai 136.064 jiwa, yang merepresentasikan 12.05% dari total populasi kabupaten. Konsentrasi ini mengindikasikan bahwa Praya berfungsi sebagai pusat gravitasi demografi, ekonomi, dan

kemungkinan besar juga administrasi di Lombok Tengah. Sebaliknya, Kecamatan Praya Barat Daya tercatat memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 64.165 jiwa, atau 5.68% dari total populasi. Kecamatan-kecamatan lain menunjukkan variasi yang signifikan dalam kontribusi populasi, mencerminkan perbedaan dalam tingkat urbanisasi, ketersediaan sumber daya, dan peluang ekonomi yang ditawarkan di setiap wilayah.

Konsentrasi populasi yang tinggi di Kecamatan Praya, sebagai wilayah terpadat di kabupaten, menunjukkan bahwa daerah ini kemungkinan besar berfungsi sebagai pusat pertumbuhan utama. Hal ini menimbulkan tekanan yang signifikan pada infrastruktur yang ada, seperti kebutuhan akan jaringan jalan yang lebih baik, sistem penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, serta pasokan listrik yang stabil untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Selain itu, konsentrasi penduduk secara langsung meningkatkan permintaan akan layanan publik esensial seperti fasilitas pendidikan (sekolah) dan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Tanpa perencanaan yang cermat dan investasi yang proporsional, konsentrasi ini dapat memicu masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan pemukiman yang tidak teratur, dan isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan polusi. Di sisi lain, konsentrasi penduduk di Praya juga menandakan adanya potensi pasar domestik yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang terkonsentrasi, yang dapat menjadi daya tarik bagi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 2.16 Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)
1	Praya Barat	89.899	7,96
2	Praya Barat Daya	64.165	5,68
3	Pujut	127.840	11,33
4	Praya Timur	77.011	6,82
5	Janapria	92.793	8,22
6	Kopang	101.379	8,98
7	Praya	136.064	12,05
8	Praya Tengah	79.721	7,06
9	Jonggat	114.808	10,17
10	Pringgarata	82.430	7,30
11	Batukliang	96.752	8,57
12	Batukliang Utara	65.854	5,83
Total	Lombok Tengah	1.128.716	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.17 Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin - Laki-laki	Jenis Kelamin - Perempuan	Jumlah
0-4	42.353	39.640	81.993
05-09	57.297	53.241	110.538
10-14	56.401	53.485	109.886
15-19	37.917	36.298	74.215
20-24	42.732	41.528	84.260
25-29	41.305	41.989	83.294
30-34	42.424	43.535	85.959
35-39	44.914	48.586	93.500
40-44	44.843	47.730	92.573
45-49	39.948	42.179	82.127
50-54	33.474	32.661	66.135
55-59	25.721	28.666	54.387
60-64	18.931	20.724	39.655
65-69	13.571	15.811	29.382
70-74	8.725	9.806	18.531
75+	10.212	12.069	22.281
Jumlah	560.768	567.948	1.128.716

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Struktur umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan konsistensi dalam dominasi kelompok usia muda dan usia produktif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, piramida penduduk digambarkan sebagai "ekspansif" atau muda, dengan penduduk usia produktif mendominasi dan proporsi perempuan produktif yang lebih banyak. Pada Desember 2023, kelompok umur 5-9 tahun (9.9%) dan 10-14 tahun (9.75%) adalah yang terbesar, diikuti oleh 35-39 tahun (8.43%). Proporsi usia produktif (15-59 tahun) mencapai 63.26% dari total populasi. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana kelompok umur 5-9 tahun (110.538 jiwa) dan 35-39 tahun (93.500 jiwa) tetap menjadi yang terbesar.

Konsistensi dalam dominasi kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia produktif (15-59 tahun) dari 2020 hingga 2024 secara jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah masih berada dalam fase bonus demografi yang signifikan. Ini adalah jendela peluang emas di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, jendela ini bersifat sementara. Jika tidak dimanfaatkan secara optimal dengan investasi di pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja, potensi ini bisa berubah menjadi beban demografi, yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan ketidakpuasan sosial. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana memastikan angkatan kerja muda ini memiliki keterampilan yang relevan dan dapat terserap ke pasar kerja yang memadai.

Tabel 2.18 Data Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
1	Praya Barat	612	98,52
2	Praya Barat Daya	487	97,36
3	Pujut	537	97,87
4	Praya Timur	890	97,19
5	Janapria	1.377	100,00
6	Kopang	1.866	98,93
7	Praya	2.664	98,53
8	Praya Tengah	1.269	99,18
9	Jonggat	1.708	98,23
10	Pringgarata	1.852	98,80
11	Batukliang	1.854	100,00
12	Batukliang Utara	398	100,00
	Lombok Tengah	966	99,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tren rasio jenis kelamin total menunjukkan fluktuasi yang mendekati keseimbangan. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin adalah 98.82 (514.355 laki-laki berbanding 520.504 perempuan) . Angka ini bergeser menjadi 99.49 pada tahun 2021 (523.363 laki-laki berbanding 526.001 perempuan), kemudian 100.14 pada tahun 2022 (535.162 laki-laki berbanding 534.421 perempuan) , 98.66 pada tahun 2023 (545.905 laki-laki berbanding 553.306 perempuan) , dan 101.41 pada tahun 2024 (558.776 laki-laki berbanding 551.024 perempuan) . Fluktuasi ini menunjukkan pergeseran kecil antara dominasi laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan tetap mendekati keseimbangan. Stabilitas rasio jenis kelamin yang mendekati 100 dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tidak adanya anomali demografi yang signifikan terkait jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah. Ini mencerminkan pola kelahiran dan kematian yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada pola migrasi yang sangat bias gender dalam skala besar yang dapat mengganggu keseimbangan populasi. Kondisi ini secara umum mendukung keseimbangan sosial dan memungkinkan partisipasi gender yang relatif seimbang dalam berbagai aspek masyarakat.

Analisis laju pertumbuhan penduduk per kecamatan untuk periode 2010-2022 menunjukkan variasi yang menarik. Kecamatan Praya Barat Daya, meskipun merupakan kecamatan dengan populasi terendah pada tahun 2024, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 2.27%. Di sisi lain, Kecamatan Janapria memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar 1.26%. Sementara itu,

Kecamatan Praya, yang merupakan kecamatan terpadat, memiliki laju pertumbuhan 1.94%, yang masih di atas rata-rata kabupaten (1.80%).

Laju pertumbuhan yang tinggi di Praya Barat Daya, meskipun basis populasinya kecil, dapat mengindikasikan bahwa wilayah ini sedang mengalami pengembangan baru atau menjadi tujuan migrasi bagi penduduk yang mencari lahan lebih terjangkau, biaya hidup lebih rendah, atau peluang baru di luar pusat yang padat. Hal ini juga bisa menunjukkan tingkat kelahiran yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Para perencana perlu secara spesifik memahami faktor-faktor pendorong pertumbuhan di Praya Barat Daya untuk mengantisipasi kebutuhan infrastruktur dan layanan di wilayah tersebut, serta untuk mengelola potensi urbanisasi di masa depan.

Tabel 2.19 Data Laju Pertumbuhan Penduduk Dari Tahun 2010-2022 Untuk Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Lombok Tengah:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023	Laju Pertumbuhan 2010-2022
1	Kopang	95.494	1,76
2	Janapria	87.271	1,26
3	Praya Timur	74.431	1,82
4	Batukliang Utara	62.001	1,42
5	Batukliang	90.638	1,82
6	Praya	129.881	1,94
7	Praya Tengah	74.966	1,90
8	Praya Barat	85.372	1,88
9	Pujut	120.538	1,69
10	Pringgarata	78.043	1,81
11	Jonggat	109.415	1,98
12	Praya Barat Daya	59.630	2,27
	Jumlah	1.067.680	1,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.20 Tren Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2020	514.355	520.504	1.034.859	98,82
2021	523.363	526.001	1.049.364	99,49
2022	535.162	534.421	1.069.583	100,14
2023	545.905	553.306	1.099.211	98,66
2024	558.776	551.024	1.109.800	101,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Tren rasio jenis kelamin total menunjukkan fluktuasi yang mendekati keseimbangan. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin adalah 98.82 (514.355 laki-laki berbanding 520.504 perempuan). Angka ini bergeser menjadi 99.49 pada tahun 2021 (523.363 laki-laki berbanding 526.001 perempuan), kemudian 100.14 pada tahun 2022 (535.162 laki-laki berbanding 534.421 perempuan), 98.66 pada tahun 2023 (545.905 laki-laki berbanding 553.306 perempuan), dan 101.41 pada tahun 2024 (558.776 laki-laki berbanding 551.024 perempuan). Fluktuasi ini menunjukkan pergeseran kecil antara dominasi laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan tetap mendekati keseimbangan. Stabilitas rasio jenis kelamin yang mendekati 100 dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tidak adanya anomali demografi yang signifikan terkait jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah. Ini mencerminkan pola kelahiran dan kematian yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada pola migrasi yang sangat bias gender dalam skala besar yang dapat mengganggu keseimbangan populasi. Kondisi ini secara umum mendukung keseimbangan sosial dan memungkinkan partisipasi gender yang relatif seimbang dalam berbagai aspek masyarakat.

Tabel 2.21 Proyeksi penduduk Lombok Tengah

Umur / Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	98.620	98.280	98.050	97.870	97.770	97.760
5–9	88.780	88.380	88.790	90.430	93.660	99.200
10–14	103.190	104.060	103.150	100.390	95.780	89.000
15–19	84.070	87.730	92.190	96.760	100.670	103.250
20–24	81.820	81.500	81.510	82.100	83.590	86.150
25–29	90.660	90.450	89.840	89.010	88.190	87.590
30–34	92.520	93.700	94.860	95.890	96.600	96.890
35–39	91.730	93.000	94.020	94.910	95.860	97.000
40–44	85.470	87.280	89.420	91.700	93.810	95.550
45–49	81.060	82.980	84.330	85.370	86.480	87.930
50–54	66.380	69.120	72.310	75.670	78.810	81.400
55–59	56.300	58.190	59.700	61.090	62.710	64.820
60–64	40.550	42.750	45.390	48.230	50.920	53.210
65–69	31.280	32.410	33.270	34.100	35.180	36.700
70–74	19.080	20.430	22.020	23.690	25.230	26.520
75+	18.270	19.380	20.490	21.680	23.020	24.560
Jumlah	1.129.780	1.149.640	1.169.340	1.188.890	1.208.280	1.227.530

Sumber: RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045

Proyeksi penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Total populasi diproyeksikan meningkat dari 1.129.780 jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.227.530 jiwa pada tahun 2030. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan tetap positif dalam enam tahun ke depan, meskipun dengan dinamika yang bervariasi antar kelompok umur.

Analisis struktur umur dalam proyeksi menunjukkan beberapa pergeseran penting. Kelompok usia 0-4 tahun diproyeksikan sedikit menurun dari 98.620 jiwa pada 2025 menjadi 97.760 jiwa pada 2030, mengindikasikan potensi penurunan angka kelahiran atau stabilisasi. Namun, kelompok usia 5-9 tahun menunjukkan peningkatan signifikan dari 88.780 jiwa pada 2025 menjadi 99.200 jiwa pada 2030, mencerminkan pergerakan kohort kelahiran sebelumnya. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) secara keseluruhan diproyeksikan akan terus tumbuh dan mendominasi populasi, meskipun dengan pergeseran internal. Misalnya, kelompok 15-19 tahun akan meningkat dari 84.070 jiwa pada 2025 menjadi 103.250 jiwa pada 2030, sementara kelompok 20-24 tahun juga menunjukkan peningkatan. Kelompok usia yang lebih tua (65+) juga diproyeksikan meningkat secara bertahap, dari 31.280 jiwa pada 2025 menjadi 36.700 jiwa pada 2030 untuk kelompok 65-69 tahun, dan dari 18.270 jiwa menjadi 24.560 jiwa untuk kelompok 75+ tahun. Pergeseran ini menunjukkan bahwa meskipun populasi akan tetap muda secara keseluruhan, akan ada peningkatan proporsi penduduk usia lanjut, yang memerlukan perhatian dalam perencanaan layanan kesehatan dan jaminan sosial.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Periode 2020 hingga 2024 mengukir babak penting dalam dinamika ekonomi Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun sempat terhantam keras oleh gejolak pandemi COVID-19 yang memperlambat laju perekonomian di awal, daerah ini berhasil menorehkan lintasan pertumbuhan yang stabil dan tangguh. Revitalisasi ekonomi ini tidak hanya terefleksi dari metrik makro, tetapi juga meresap ke berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat. Analisis ini akan mengupas tuntas karakteristik kesejahteraan ekonomi Lombok Tengah, menyoroti bagaimana indikator-indikator krusial seperti

Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, hingga Indeks Pembangunan Manusia saling berinteraksi dan membentuk potret komprehensif kondisi sosial-ekonomi daerah ini.

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makroekonomi fundamental yang mengukur peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari tahun ke tahun, sekaligus merefleksikan geliat pembangunan suatu wilayah. Sebagai tolok ukur utama kinerja pembangunan ekonomi daerah, LPE Kabupaten Lombok Tengah secara gamblang menunjukkan dinamika produktivitas, ketahanan struktural, serta respons adaptif terhadap tantangan nasional maupun global. Periode 2020–2024 menjadi kurun waktu penuh pelajaran, diawali dengan tekanan berat pandemi COVID-19 yang memicu kontraksi tajam pada PDRB, namun kemudian diikuti oleh proses pemulihan bertahap yang menegaskan kapasitas adaptasi dan resiliensi daerah.

Selama lima tahun tersebut, Lombok Tengah memperlihatkan lintasan pemulihan ekonomi yang relatif konsisten, ditopang oleh tren pertumbuhan positif yang bersumber dari konsumsi domestik yang kuat, geliat pembangunan fisik, serta penguatan layanan publik. Meskipun terjadi fluktuasi pertumbuhan pada beberapa tahun tertentu, capaian ini meletakkan fondasi esensial bagi arah pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan inklusivitas ekonomi.

Analisis mendalam terhadap LPE dalam periode ini menjadi landasan strategis untuk memahami kekuatan dan kerentanan struktural daerah, sehingga memungkinkan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, produktif, dan berkeadilan.

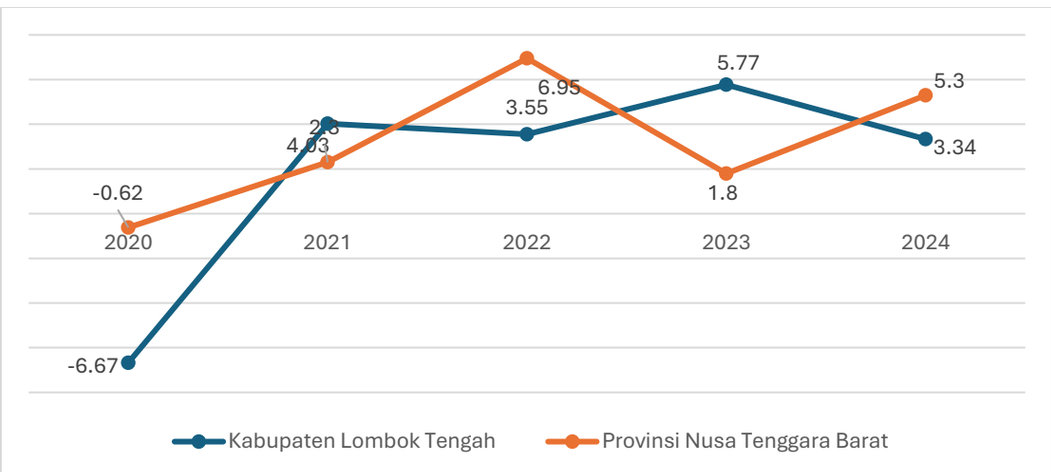

Gambar 2.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB

Lombok Tengah telah menunjukkan lintasan pemulihan ekonomi yang stabil dan berdaya tahan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Setelah menghadapi kontraksi tajam sebesar -6,67% pada tahun 2020 akibat hantaman pandemi, perekonomian daerah ini secara bertahap berhasil bangkit. Puncaknya, pertumbuhan mencapai 5,77% di tahun 2023, sebelum sedikit terkoreksi menjadi 3,34% di tahun 2024.

Perjalanan ini kontras dengan dinamika Provinsi NTB secara keseluruhan, yang justru mengalami fluktuasi pertumbuhan lebih ekstrem. Setelah kontraksi ringan -0,62% di tahun 2020, NTB melonjak signifikan ke 6,95% di tahun 2022. Namun, kemudian melambat drastis menjadi 1,80% di tahun 2023, sebelum akhirnya kembali menguat ke 5,30% di tahun 2024. Pola fluktuatif ini mengindikasikan ketergantungan NTB pada sektor ekspor dan komoditas,

khususnya pertambangan, yang memang lebih rentan terhadap gejolak dan dinamika pasar global.

Selama lima tahun terakhir, struktur ekonomi Lombok Tengah menampilkan karakteristik yang menarik. Sektor primer, terutama pertanian, tetap menjadi tulang punggung yang dominan, mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas agraris. Namun, di saat yang sama, terlihat adanya ekspansi signifikan pada sektor tersier, khususnya jasa dan perdagangan. Perkembangan ini didorong oleh peningkatan di sektor konstruksi, transportasi, dan penyediaan akomodasi, yang secara jelas merefleksikan arah pembangunan daerah yang lebih dinamis, berorientasi pada peningkatan konektivitas dan daya tarik pariwisata di Lombok Tengah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah pasca-pandemi menggambarkan adanya diversifikasi bertahap dan pemulihan yang cukup solid. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa kontribusi dari sektor industri pengolahan dan ekspor masih relatif terbatas, menunjukkan area potensial untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Tabel 2.22 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2023(dalam Miliar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,505.63	4,630.64	4,823.81	5,326.81	5,653.75
B	Pertambangan dan penggalian	825.73	893.44	896.29	980.99	1,023.50
C	Industri pengolahan	812.38	838.06	886.45	955.44	1,048.02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.02	13.98	15.61	16.51	17.98
E	Pengadaan Air	18.8	19.35	21.36	22.27	22.52
F	Konstruksi	2,586.66	3,124.22	3,119.69	3,456.90	3,555.86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,022.31	2,112.09	2,356.10	2,635.39	2,861.55
H	Transportasi dan pergudangan	1,600.23	1,536.04	2,230.95	2,635.61	2,849.24
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	170.19	176.58	241.44	269.34	302.94
J	Informasi dan Komunikasi	289.2	305.61	321.98	346.26	363.01
K	Jasa Keuangan	417.46	471.47	540.44	574.44	608.40
L	Real Estate	680.94	699.7	745.96	788.67	830.13
M,N	Jasa Perusahaan	25.36	25.5	29.1	32.58	34.96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	1,045.20	1,094.91	1,136.31	1,179.14	1,260.50
P	Jasa Pendidikan	857.37	890.48	945.67	1,021.49	1,086.10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	430.34	472.27	488.98	525.78	565.19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	365.81	382.26	443.19	482.03	521.23
PDRB (dalam miliar rupiah)		16,666.62	17,686.60	19,243.33	21,250.62	22,604.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Sektor pertanian tetap menjadi pilar fundamental ekonomi lokal, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Ini menggarisbawahi peranan vital pertanian dalam menopang mata pencaharian dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di sisi lain, sektor konstruksi dan transportasi memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Ekspansi ini merupakan cerminan langsung dari intensitas pembangunan serta peningkatan mobilitas barang dan jasa di wilayah ini. Geliat kedua sektor ini acapkali menjadi indikator positif bagi investasi infrastruktur dan konektivitas yang kian menguat.

Seiring dengan pemulihan daya beli masyarakat dan bangkitnya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan akomodasi juga mencatatkan pertumbuhan yang substansial. Ini menandakan adanya peningkatan kapasitas belanja dan minat kunjungan ke daerah tersebut, yang secara langsung memicu geliat usaha di kedua sektor vital ini.

Meskipun demikian, sektor industri pengolahan masih tergolong kecil dalam kontribusinya terhadap ekonomi lokal, kendati menunjukkan adanya pertumbuhan. Realitas ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan belum menjadi lokomotif utama penggerak ekonomi dibandingkan sektor-sektor lain yang telah disebutkan. Potensi pengembangan lebih lanjut di sektor ini patut menjadi perhatian untuk diversifikasi ekonomi ke depan.

Sedangkan melalui sudut pandang PDRB ADHB Menurut Pengeluaran selama lima tahun, pola pengeluaran ekonomi Lombok Tengah menyoroti dominasi konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi, sementara sektor ekspor masih menjadi faktor pengurang bersih PDRB. Tren ini mencerminkan ekonomi yang didorong oleh permintaan domestik dan pembangunan internal, dengan peran belanja pemerintah yang stabil serta kontribusi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang bertahap meningkat.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kekuatan ekonomi lokal masih bertumpu pada konsumsi dan belanja modal, bukan semata-mata pada daya saing ekspor. Kendati demikian, pertumbuhan yang berkelanjutan menunjukkan resiliensi struktural dan arah pembangunan yang berakar pada permintaan domestik.

Tabel 2.23 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2020-2023 (dalam Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah tangga	12.296,65	12.761,56	13.791,71	14.789,22	15.857,29
Konsumsi LNPRT	210,00	214,97	238,89	263,62	299,86
Konsumsi Pemerintah	2.417,01	2.474,09	2.514,57	2.611,03	2.821,18
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.307,25	9.560,22	9.512,91	10.646,12	11.029,88
Perubahan Inventori	51,39	22,40	24,15	19,94	8,23
Net Ekspor Barang dan Jasa	(-6.615,68)	(-7.346,65)	(-6.838,90	(-7.079,30)	-7.411,57
PDRB	16.666,62	17.686,60	19.243,33	21.250,62	22.604,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Menganalisis struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Tengah berdasarkan pengeluaran, kita dapat mengidentifikasi pilar-pilar utama yang menopang perekonomian lokal. Konsumsi Rumah Tangga (RT) muncul sebagai kekuatan dominan, menyumbang sekitar 70% dari total PDRB. Proporsi ini secara jelas mengindikasikan bahwa daya beli dan pengeluaran masyarakat adalah motor penggerak utama aktivitas ekonomi di wilayah ini, mencerminkan pasar domestik yang kokoh dan stabil.

Sejalan dengan geliat pembangunan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kenaikan ini merupakan indikator positif bagi investasi yang terus bertumbuh serta pembangunan fisik yang gencar dilaksanakan di berbagai sektor. Peningkatan PMTB mengisyaratkan adanya kepercayaan pelaku usaha dan pemerintah dalam menanamkan modal untuk prospek pertumbuhan jangka panjang.

Di sisi lain, kontribusi net ekspor secara konsisten berada pada nilai negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Lombok Tengah belum sepenuhnya mampu bersaing di kancah ekspor atau memang volume ekspornya masih tergolong rendah dibandingkan impor. Aspek ini dapat menjadi area strategis untuk pengembangan potensi produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing global.

Sementara itu, Konsumsi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menunjukkan kontribusi yang stabil. Konsistensi ini krusial dalam menopang kesinambungan program pelayanan publik serta aktivitas komunitas. Sektor ini berperan sebagai penyeimbang yang memastikan roda pemerintahan dan kegiatan sosial tetap berjalan efektif, terlepas dari fluktuasi sektor-sektor lainnya.

Secara keseluruhan, data ini merefleksikan ekonomi lokal yang sangat bergantung pada konsumsi domestik dan investasi internal, dengan tantangan di sektor ekspor yang memerlukan perhatian strategis.

2. **Tingkat Kemiskinan**

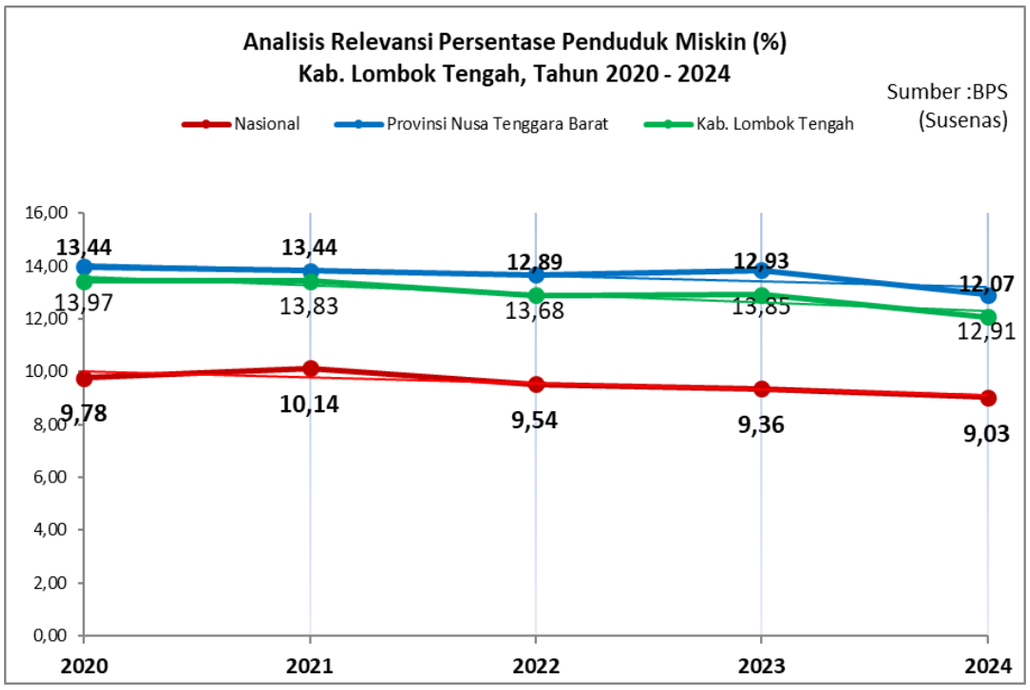

Gambar 2.4 Analisis Relevansi Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (Susenas), 2025

Terlihat dari grafik di atas bahwa persentase kemiskinan di tingkat Nasional memulai tren menurun dari 9,78% di tahun 2020 menjadi 9,03% di tahun 2024, meskipun sempat sedikit naik di tahun 2021. Pola serupa juga ditunjukkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, di mana keduanya secara konsisten memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi dibanding angka nasional. Provinsi NTB bergerak dari 13,44% di tahun 2020 ke 12,07% di tahun 2024, sementara Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan dari 13,97% menjadi 12,91% pada periode yang sama. Data yang bersumber dari BPS (Susenas) ini secara jelas menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di NTB dan Lombok Tengah lebih tinggi, ada indikasi perbaikan yang positif dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten.

Data ini mencerminkan perjalanan pemulihan dan upaya pengentasan kemiskinan pasca-pandemi COVID-19. Pada awal periode, tahun 2020, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang besar akibat pandemi, yang mungkin tercermin dari sedikit kenaikan angka kemiskinan nasional di tahun 2021. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai stimulus serta kebijakan pemulihan ekonomi, terlihat adanya momentum positif. Pemerintah pusat, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah tampak berhasil mengimplementasikan program-program yang efektif, yang tercermin dari penurunan angka kemiskinan yang stabil dan berkelanjutan hingga tahun 2024.

Tabel 2.24 Data Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase (P0)	Garis Kemiskinan (Rp.)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	128.100	13,44	421.400	1,42	0,26
2021	131.940	13,44	447.420	1,69	0,35

2022	128.000	12,89	480.660	2,01	0,44
2023	129.740	12,93	520.850	2,12	0,52
2024	122.320	12,07	549.400	1,56	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, Bapperida Lombok Tengah, 2025

Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat tren sedikit berbeda pada sisi Garis Kemiskinan, P1, dan P2 dari 2020 hingga 2023. Ini mengindikasikan bahwa meskipun persentase penduduk miskin sempat menurun tipis pada 2022, mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan justru semakin terpuruk dan kesenjangan di antara mereka semakin lebar. Situasi ini mencerminkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan mungkin belum sepenuhnya menyasar kelompok yang paling rentan atau bahwa dampak kenaikan harga kebutuhan pokok lebih terasa bagi mereka.

Namun, titik balik signifikan terjadi pada tahun 2024. Terjadi penurunan drastis pada jumlah penduduk miskin, persentase P0, P1, dan P2. Ini adalah kabar baik yang menunjukkan bahwa pada tahun terakhir periode ini, ada intervensi yang sangat efektif atau pemulihan ekonomi yang kuat yang tidak hanya mengurangi jumlah orang miskin tetapi juga mengangkat mereka yang paling terpuruk mendekati garis kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di antara mereka. Penurunan ini sejalan dengan tren positif yang terlihat di tingkat provinsi dan nasional pada grafik pertama, menunjukkan adanya upaya kolektif yang berhasil.

Pola penurunan persentase kemiskinan ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor kunci. Pertama, pemulihan ekonomi pasca-pandemi menjadi pendorong utama, di mana peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan akses terhadap layanan dasar, menunjukkan dampak yang signifikan. Ketiga, khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pariwisata, setelah infrastruktur Mandalika berkembang, kemungkinan besar turut andil dalam menciptakan peluang ekonomi baru bagi penduduk. Terakhir, koordinasi kebijakan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tampaknya menjadi faktor penentu dalam menciptakan penurunan yang serempak di ketiga tingkatan. Meskipun demikian, fakta bahwa angka kemiskinan di NTB dan Lombok Tengah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional mengindikasikan adanya tantangan struktural yang lebih dalam, seperti disparitas akses terhadap sumber daya atau kerentanan terhadap guncangan eksternal, yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

3. **PDRB Per Kapita**

Selama periode lima tahun ini (2020–2024), PDRB per kapita di Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang stabil namun moderat. Pada awal pandemi tahun 2020, PDRB per kapita tercatat Rp. 16.160.000.000 (atas dasar harga berlaku) dan Rp. 11.220.000.000 (atas harga konstan). Meskipun masih dalam kondisi pandemi, PDRB per kapita tahun 2021–2022 menunjukkan tren pemulihan ekonomi, tercermin dari kenaikan angka baik pada harga berlaku maupun harga konstan. Tahun 2023 menjadi tahun akselerasi, dengan kenaikan signifikan ke Rp.19.500.000.000 (harga berlaku) dan Rp. 12.100.000.000 (harga konstan). Tahun 2024 mencatatkan rekor tertinggi selama lima tahun ini, dengan Rp 20.370.000.000 (ADHB) dan Rp. 12.280.000.000 (ADHK). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dan menunjukkan bahwa terjadi recovery bertahap dan keberhasilan adaptasi ekonomi lokal pasca-pandemi.

PDRB per Kapita Lombok Tengah

Tahun	Harga Berlaku (Juta Rp)	Harga Konstan (Juta Rp)
2020	16,16	11,22
2021	16,85	11,47
2022	17,99	11,65
2023	19,50	12,10
2024	20,37	12,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Dari analisis data, terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara kumulatif, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku tumbuh sebesar +25,99%, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai sekitar Rp 18.170.000.000. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan nilai ekonomi secara nominal yang cukup substansial. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan positif sebesar +9,45% secara kumulatif, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar Rp 11.740.000.000. Angka harga konstan ini lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang telah disesuaikan dengan inflasi. Beberapa faktor utama yang mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi per kapita di Kabupaten Lombok Tengah ini antara lain adalah pemulihan sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal pasca-pandemi COVID-19 yang memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, proyek-proyek strategis nasional dan regional seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta penyelenggaraan event berskala internasional seperti MotoGP, telah berhasil mendongkrak nilai konsumsi dan investasi di wilayah tersebut. Tidak kalah penting, stabilisasi harga dan peningkatan daya beli masyarakat juga turut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku

Tabel 2.25 Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB

Tahun	Lombok Tengah (Harga Berlaku)	NTB (Harga Berlaku)	Lombok Tengah (Harga Konstan)	NTB (Harga Konstan)
2020	16,16	20,94	11,22	14,52
2021	16,85	21,87	11,47	14,89
2022	17,99	23,25	11,65	15,32
2023	19,50	25,04	12,10	15,89
2024	20,37	26,80	12,28	16,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, 2025

Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Lombok Tengah, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, secara rata-rata masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTB, baik secara nominal (Harga Berlaku) maupun riil (Harga Konstan). Selisih ini disebabkan oleh beberapa faktor. Provinsi NTB secara keseluruhan didorong oleh sektor pertambangan dan proyek strategis seperti tambang logam dan KEK Mandalika yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB provinsi. Di sisi lain, Kabupaten Lombok Tengah masih lebih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pariwisata, yang umumnya memiliki nilai tambah per kapita yang lebih rendah. Untuk mengakselerasi peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Lombok Tengah agar sejajar dengan Provinsi NTB, strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah peningkatan investasi dan penguatan sektor-sektor produktif lokal. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dapat menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tahun 2020 merupakan titik balik bagi pasar tenaga kerja nasional ketika pandemi COVID-19 memicu lonjakan pengangguran hingga 7,07 %. Seiring pembatasan sosial dilonggarkan dan aktivitas ekonomi pulih, tingkat pengangguran berangsur turun: 6,49 % (2021), 5,82 % (2022),

5,32 % (2023), dan mencapai 4,91 % pada Agustus 2024. Tren ini mencerminkan akselerasi pemulihan pasca-pandemi dan stimulus fiskal serta moneter yang diluncurkan pemerintah.

Di Provinsi NTB, struktur ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata sempat terpukul parah, tetapi pembukaan destinasi wisata domestik membuat TPT turun dari 5,11 % pada 2020 menjadi 2,73 % pada 2024. Pemulihan kunjungan wisatawan lokal dan program padat karya menjadi pendorong utama.

Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pola serupa, tetapi dengan laju penurunan lebih cepat berkat dominasi sektor pertanian dan UMKM mikro. TPT di wilayah ini menurun dari 4,05 % (2020) menjadi sekitar 2,20 % (2024).

Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020–2024

Tahun	Nasional (%)	NTB (%)	Lombok Tengah (%)
2020	7,07	5,11	4,05
2021	6,49	3,01	3,10
2022	5,82	2,89	2,86
2023	5,32	2,80	2,33
2024	4,91	2,73	2,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2025

Dengan melihat data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dianalisis bahwa secara rata-rata, TPT Kabupaten Lombok Tengah berada pada angka 2,71%, lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT Provinsi NTB yang sebesar 3,31%, dan jauh di bawah rata-rata TPT nasional yang mencapai 5,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa Lombok Tengah memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih baik secara relatif dibandingkan dengan provinsi maupun nasional. Selain itu, dalam rentang waktu 2020-2024, ketiganya menunjukkan tren penurunan TPT yang positif. Tingkat pengangguran nasional berhasil menurun sebesar 2,16 poin persentase (p.p.), sementara NTB menunjukkan penurunan yang lebih besar, yakni 2,38 p.p. Kabupaten Lombok Tengah juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,85 p.p. Apabila dihitung rata-rata laju penurunan per tahun, TPT nasional menurun sekitar 0,54 p.p. per tahun, NTB lebih cepat dengan 0,60 p.p. per tahun, dan Lombok Tengah mencatatkan penurunan sekitar 0,46 p.p. per tahun. Data ini secara deskriptif menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka pengangguran di semua tingkatan, dengan NTB dan Lombok Tengah menunjukkan performa yang cukup impresif dalam menjaga tingkat pengangguran tetap rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Secara diagnostik, tren TPT yang relatif rendah dan menunjukkan penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Dari sisi eksternal, guncangan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memang sempat menekan sektor jasa dan manufaktur yang berdampak pada peningkatan pengangguran. Namun, pemulihan permintaan global dan domestik selanjutnya berhasil memulihkan lapangan kerja, terutama di sektor pariwisata yang merupakan andalan daerah. Kebijakan pemerintah juga berperan besar; program subsidi upah dan bantuan sosial terbukti efektif mencegah lonjakan pengangguran yang lebih tinggi. Selain itu, inisiatif seperti pelatihan vokasi dan program padat karya turut menambah kapasitas angkatan kerja terampil, sehingga meningkatkan daya serap pasar kerja. Dari perspektif struktur ekonomi daerah, NTB secara keseluruhan diuntungkan oleh keberhasilan promosi pariwisata domestik dan digitalisasi UMKM yang mempercepat penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah, ketergantungan pada sektor pertanian memberikan perlindungan yang lebih stabil saat krisis, karena sektor ini cenderung lebih resilien terhadap gejolak ekonomi dibandingkan sektor lain. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan yang tersisa, seperti ketergantungan NTB pada sektor musiman yang dapat menghasilkan fluktuasi lapangan kerja, serta kesenjangan keterampilan (skill gap) di kalangan pemuda yang memperlambat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor modern yang membutuhkan keahlian lebih tinggi.

5. **Indeks Gini**

Indeks Gini, atau Rasio Gini, merupakan indikator statistik fundamental yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan atau pengeluaran yang sama), sementara nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan atau pengeluaran dikuasai oleh satu individu atau kelompok). Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan untuk perhitungan Indeks Gini.

Pemahaman terhadap tren Indeks Gini sangat krusial dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi, program sosial, dan strategi pembangunan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan merata. Periode 2020-2024 yang menjadi fokus laporan ini mencakup pergeseran sosial-ekonomi yang signifikan, terutama dampak pandemi COVID-19, yang memiliki implikasi besar terhadap struktur ketimpangan di Indonesia.

Untuk menginterpretasikan nilai Indeks Gini, klasifikasi yang umum digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- Ketimpangan Rendah: Bila koefisien Gini berada di bawah 0,350.
- Ketimpangan Sedang: Bila koefisien Gini berada antara 0,350 dan 0,500.
- Ketimpangan Tinggi: Bila koefisien Gini terletak di atas 0,500.

Penyediaan kerangka interpretasi ini sangat penting karena angka mentah Indeks Gini (misalnya, 0,381 dibandingkan 0,361) tidak secara langsung memberikan gambaran kualitatif tentang tingkat ketimpangan. Dengan adanya klasifikasi ini, dapat dipahami apakah ketimpangan yang diamati termasuk dalam kategori "rendah," "sedang," atau "tinggi" menurut standar yang ditetapkan. Misalnya, mengetahui bahwa nilai 0,350 adalah ambang batas untuk ketimpangan "sedang" membantu dalam menilai bahwa Indeks Gini Lombok Tengah sebesar 0,349 pada tahun 2023 mendekati batas antara ketimpangan rendah dan sedang, sementara nilai 0,313 pada tahun 2022 jelas menunjukkan ketimpangan yang rendah.

Analisis komparatif Indeks Gini di tingkat nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2020 hingga 2024 (dengan data hingga Maret 2025) menyoroti kompleksitas dan variasi dalam dinamika ketimpangan pengeluaran di berbagai tingkatan administrasi.

Pada tingkat nasional, tren Indeks Gini menunjukkan respons terhadap guncangan makro seperti pandemi, dengan fluktuasi yang signifikan. Data terbaru mengkonfirmasi pola konsisten di mana ketimpangan di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan perdesaan, meskipun ada perbaikan ketimpangan secara keseluruhan pada Maret 2025.

Tabel 2.27 Perbandingan Indeks Gini Nasional, Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2025

Tahun	Nasional (Keseluruhan)	NTB (Keseluruhan)	Lombok Tengah (Keseluruhan)
2020	0.381 (Maret) / 0.385 (Sept)	0.376	0.378
2021	0.384 (Maret) / 0.381 (Sept)	0.381	0.338
2022	0.384 (Maret) / 0.381 (Sept)	0.373	0.313
2023	0.388 (Maret)	0.375	0.349
2024	0.379 (Maret) / 0.381 (Sept)	0.364 (Sept)	N/A
2025	0.375 (Maret)	0.369 (Maret)	N/A

Catatan: Untuk Nasional, nilai yang ditampilkan adalah Gini Ratio gabungan perkotaan dan perdesaan pada periode Maret dan/atau September. Untuk NTB dan Lombok Tengah, nilai yang ditampilkan adalah Gini Ratio tahunan keseluruhan. "N/A" menunjukkan data belum tersedia.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2025, data diolah

Provinsi NTB menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun Indeks Gini keseluruhan cenderung berada dalam kategori rendah, analisis data semesteran yang lebih lengkap mengungkapkan adanya tren peningkatan ketimpangan di wilayah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan urbanisasi di NTB mungkin belum sepenuhnya inklusif, menciptakan kesenjangan yang melebar di pusat-pusat kota, meskipun program

pemerataan di perdesaan terbukti efektif dalam menjaga ketimpangan tetap rendah. Data tahunan NTB untuk 2024 menunjukkan perbaikan ketimpangan secara keseluruhan.

Fluktuasi nilai ketimpangan, yang diukur dengan Indeks Gini, di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks di tingkat lokal. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat 0,378, menunjukkan ketimpangan sedang, yang mungkin dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19 yang secara nasional menyebabkan penurunan pendapatan di berbagai lapisan masyarakat. Namun, periode 2021-2022 menunjukkan penurunan drastis Indeks Gini menjadi 0,338 pada tahun 2021 dan mencapai titik terendah 0,313 pada tahun 2022, menempatkannya dalam kategori ketimpangan rendah. Penurunan ini diyakini berkat efektivitas program bantuan sosial pemerintah daerah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) di Nusa Tenggara Barat yang secara langsung meningkatkan pendapatan petani di perdesaan Lombok Tengah.

Sayangnya, tren positif ini berbalik pada tahun 2023, dengan Indeks Gini kembali naik menjadi 0,349. Kenaikan ketimpangan ini kemungkinan besar disebabkan oleh fluktuasi harga kebutuhan pangan, di mana kenaikan harga komoditas pangan cenderung lebih membebani rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga memperlebar kesenjangan pengeluaran. Selain itu, dinamika ekonomi lokal yang berubah juga dapat berkontribusi, mengindikasikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan mungkin tidak terdistribusi secara merata pada tahun tersebut, atau adanya guncangan ekonomi yang lebih berdampak pada kelompok rentan.

6. **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang krusial untuk mengukur kualitas pembangunan di suatu wilayah. IPM mencerminkan pencapaian rata-rata penduduk dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, perubahan angka IPM menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah.

Komponen-komponen penyusun IPM secara spesifik adalah:

- **Kesehatan:** Diukur melalui Angka Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang merepresentasikan rata-rata rentang hidup yang dapat dijalani oleh bayi baru lahir.
- **Pengetahuan:** Diukur melalui dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) bagi penduduk usia 25 tahun ke atas.
- **Standar Hidup Layak:** Diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

Berdasarkan nilai IPM, Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan status pembangunan manusia ke dalam empat kelompok: sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi (IPM 70-79), sedang (IPM 60-69), dan rendah (IPM < 60). Kategorisasi ini penting untuk menempatkan nilai numerik IPM dalam konteks pencapaian pembangunan.

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	IPM Nasional	IPM Provinsi NTB	IPM Kabupaten Lombok Tengah
2020	72.81	70.46	68.32
2021	73.16	70.86	68.70
2022	73.77	71.65	69.57
2023	74.39	72.36	70.41
2024	75.02	73.10	71.19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025, data diolah

Secara absolut, IPM Nasional secara konsisten menempati posisi tertinggi, diikuti oleh Provinsi NTB, dan kemudian Kabupaten Lombok Tengah. Perbedaan nilai IPM antara ketiga wilayah ini menunjukkan adanya hierarki dalam pencapaian pembangunan manusia, di mana tingkat nasional memiliki capaian paling tinggi, diikuti oleh provinsi, dan kemudian kabupaten.

Meskipun nilai absolut IPM Lombok Tengah secara konsisten lebih rendah dibandingkan NTB dan rata-rata nasional, perhitungan laju pertumbuhan tahunan mengungkapkan bahwa Lombok Tengah menunjukkan laju peningkatan yang lebih cepat. Rata-rata pertumbuhan tahunan IPM Nasional dari 2020-2024 adalah sekitar 0,75%. Untuk NTB, rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 0,93% per tahun. Sementara itu, Lombok Tengah menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 1,05% per tahun.

Tabel 2.29 Perbandingan Pertumbuhan IPM Tahunan (%) untuk Nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan IPM Nasional (%)	Pertumbuhan IPM Provinsi NTB (%)	Pertumbuhan IPM Kabupaten Lombok Tengah (%)
2021	0.48	0.57	0.56
2022	0.83	1.12	1.27
2023	0.84	0.99	1.21
2024	0.85	1.02	1.11
Rata-rata	0.75	0.93	1.05

Sumber : Bapperida Lombok Tengah, 2025, data diolah

Perbedaan laju pertumbuhan ini menunjukkan adanya tren konvergensi. Meskipun kesenjangan absolut masih signifikan, Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang relatif lebih cepat. Dinamika ini penting untuk memahami efektivitas strategi pembangunan regional dan mengidentifikasi area di mana kemajuan yang dipercepat sedang terjadi.

Kesenjangan absolut yang persisten dalam nilai IPM, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat di Lombok Tengah, menandakan bahwa manfaat pembangunan manusia belum terdistribusi secara merata di semua tingkatan administrasi. Disparitas ini menyiratkan bahwa beberapa daerah, seperti Lombok Tengah, masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyediakan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang berkualitas dibandingkan dengan rata-rata provinsi atau nasional. Hal ini memerlukan intervensi kebijakan yang ditargetkan dan alokasi sumber daya yang dirancang khusus untuk mengatasi kebutuhan unik dan mempercepat kemajuan daerah-daerah yang tertinggal. Tanpa upaya yang ditargetkan tersebut, kesenjangan absolut, meskipun ada pertumbuhan relatif, dapat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditutup, berpotensi memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan Untuk Semua adalah visi ambisius yang menjamin setiap individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, lokasi geografis, atau status sosial-ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas dan mampu mencapai derajat kesehatan optimal sepanjang siklus hidup mereka. Ini mencakup tidak hanya ketiadaan penyakit, tetapi juga kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Visi ini adalah fondasi bagi masyarakat yang produktif, berdaya, dan berkelanjutan, di mana setiap warga negara dapat berkontribusi penuh pada pembangunan daerah dan nasional.

1. **Umur Harapan Hidup (UHH)/ Angka Harapan Hidup (AHH)**

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator fundamental yang mencerminkan derajat kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi. Lebih dari sekadar statistik angka kematian, UHH berfungsi sebagai barometer komprehensif yang mengukur efektivitas sistem layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas esensial, kondisi lingkungan, serta tingkat pembangunan

sosio-ekonomi secara keseluruhan. UHH yang tinggi menandakan masyarakat yang mampu menikmati kehidupan yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih produktif, sejalan dengan tujuan utama pembangunan manusia.

Konsep pembangunan manusia, sebagaimana diartikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari segala upaya pembangunan. Tujuan utamanya adalah "menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif". Dalam kerangka ini, UHH atau Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai "rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir". UHH secara langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat. Namun, peran UHH melampaui sekadar indikator kesehatan; UHH adalah salah satu dari tiga dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan pengetahuan dan standar hidup layak. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa UHH tidak berdiri sendiri sebagai metrik kesehatan yang terisolasi. Sebaliknya, peningkatan atau stagnasi UHH mencerminkan kondisi yang lebih luas, termasuk kemajuan di sektor pendidikan dan ekonomi. Misalnya, pendidikan yang lebih baik seringkali mengarah pada pilihan gaya hidup yang lebih sehat, sementara kondisi ekonomi yang membaik memungkinkan akses yang lebih baik terhadap nutrisi, air bersih, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, UHH yang rendah atau stagnan dapat mengindikasikan tantangan sistemik yang melintasi berbagai sektor pembangunan (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) bukan hanya masalah dalam sistem kesehatan. Pemahaman ini menjadikan analisis UHH sangat penting untuk perencanaan kebijakan yang terintegrasi.

Tabel 2.30 Data Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 2020-2024 (Tahun)

Region	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	71.47	71.57	71.85	72.13	72.39
NTB	66.51	66.69	67.07	67.47	67.73
Lombok Tengah	66.21	66.38	66.75	67.12	67.32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025, data diolah

Dari tabel di atas diperoleh perbandingan sistematis nilai UHH yang menunjukkan hierarki yang jelas dan konsisten sepanjang periode 2020-2024: Indonesia secara konsisten mempertahankan UHH tertinggi, diikuti oleh NTB, dengan Lombok Tengah secara konsisten mencatat UHH terendah. Sebagai contoh, pada tahun 2024, UHH Indonesia berada pada 72.39 tahun, NTB pada 67.73 tahun, dan Lombok Tengah pada 67.32 tahun.

Tabel 2.31 Kesenjangan Umur Harapan Hidup (UHH) Antar Wilayah 2020-2024 (Tahun)

Kesenjangan UHH (Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia - NTB	4.96	4.88	4.78	4.66	4.66
NTB - Lombok Tengah	0.30	0.31	0.32	0.35	0.41

Sumber: Bapperida Lombok Tengah, 2025, data diolah

Tabel di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- **Kesenjangan Indonesia - NTB:** Kesenjangan antara Indonesia dan NTB menunjukkan tren sedikit menyempit, menurun dari 4.96 tahun pada 2020 menjadi 4.66 tahun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa UHH NTB tumbuh pada tingkat yang sedikit lebih cepat atau sebanding dengan rata-rata nasional, mengindikasikan konvergensi yang lambat namun positif.
- **Kesenjangan NTB - Lombok Tengah:** Sebaliknya, kesenjangan antara NTB dan Lombok Tengah menunjukkan tren sedikit *melebar*, meningkat dari 0.30 tahun pada 2020 menjadi 0.41 tahun pada 2024.

Temuan paling signifikan di sini adalah kontradiksi dalam dinamika kesenjangan. Sementara NTB (sebagai provinsi) perlahan-lahan menutup kesenjangan UHH-nya dengan Indonesia, Lombok Tengah (sebagai kabupaten di dalam NTB) secara bersamaan semakin tertinggal dari rata-rata provinsinya sendiri. Kesenjangan yang melebar antara NTB dan Lombok Tengah ini merupakan temuan penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pembangunan di tingkat

provinsi NTB mungkin berkontribusi pada peningkatan provinsi secara keseluruhan relatif terhadap standar nasional, manfaat ini tidak mencapai Lombok Tengah secara efektif, atau Lombok Tengah menghadapi tantangan unik dan persisten yang menghambat pertumbuhan UHH-nya dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB. Ini menyiratkan bahwa masalahnya bukan hanya keterlambatan provinsi secara umum, tetapi masalah yang lebih spesifik dan terlokalisasi di dalam Lombok Tengah, yang menuntut intervensi yang ditargetkan khusus untuk kabupaten tersebut daripada hanya mengandalkan program provinsi yang lebih luas.

2. **Indeks Keluarga Sehat**

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan instrumen penting yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk mengukur dan mengevaluasi status kesehatan keluarga secara komprehensif. IKS didasarkan pada 12 indikator utama yang mencakup aspek-aspek vital kesehatan, mulai dari perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, hingga perilaku hidup bersih dan sehat serta akses terhadap fasilitas kesehatan. Indikator-indikator ini meliputi partisipasi dalam program KB, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap bayi, pemberian ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, pengobatan TB dan hipertensi sesuai standar, penanganan gangguan jiwa berat, tidak merokok, keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses air bersih, dan penggunaan jamban keluarga.

IKS memainkan peran strategis dalam memandu perencanaan pembangunan kesehatan dan intervensi program, mulai dari tingkat keluarga, Puskesmas, hingga tingkat nasional. Capaian IKS menjadi cerminan keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat secara holistik. Penilaian terhadap 12 indikator IKS menunjukkan bahwa IKS bukan sekadar metrik kesehatan klinis, melainkan sebuah kerangka penilaian yang menyeluruh. Indikator-indikator tersebut mencakup dimensi reproduksi (KB, persalinan, imunisasi, ASI), pertumbuhan anak (balita), manajemen penyakit kronis (TB, hipertensi, gangguan jiwa), gaya hidup (merokok), dan determinan lingkungan (air bersih, jamban). Keterkaitan antarindikator ini, misalnya antara akses air bersih dan kesehatan anak, atau JKN dengan akses pengobatan, mengindikasikan bahwa peningkatan IKS memerlukan upaya multisektoral yang terkoordinasi, tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan. Pendekatan IKS ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam kebijakan kesehatan publik dari fokus kuratif semata menjadi lebih preventif dan promotif, dengan keluarga sebagai unit intervensi utama. Hal ini menuntut kolaborasi lintas sektor, seperti Kementerian Pekerjaan Umum untuk sanitasi, Kementerian Sosial untuk JKN, dan Kementerian Pendidikan untuk literasi kesehatan, guna mencapai target IKS yang optimal.

Meskipun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah pengembang utama Indeks Keluarga Sehat (IKS) melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan memiliki aplikasi untuk pendataan keluarga sehat (https://keluargasehat.kemkes.go.id), data IKS nasional yang teragregasi dan spesifik untuk periode 2020-2024 tidak secara eksplisit tersedia dalam laporan publik resmi seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkes. Laporan-laporan ini lebih sering menyajikan capaian indikator kinerja program kesehatan individu (seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, prevalensi stunting, cakupan JKN, dan persentase merokok) yang merupakan komponen dari IKS, tetapi bukan nilai IKS komposit secara keseluruhan.

Hal serupa terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten. Dokumen "Profil Kesehatan Provinsi NTB" untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak memuat detail spesifik mengenai IKS provinsi secara keseluruhan. Demikian pula, untuk Kabupaten Lombok Tengah, data IKS secara eksplisit dinyatakan "tidak tersedia" dalam berbagai dokumen yang ditinjau, termasuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun data tentang indikator kesehatan lain seperti AKI, AKB, dan stunting tersedia secara rinci di tingkat kabupaten, agregasi dan publikasi IKS sebagai satu kesatuan indeks tampaknya belum tersedia untuk rilis publik.

3. **Prevalensi Stunting**

Stunting, sebagai masalah gizi kronis, tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan kesehatan. Kondisi ini diketahui memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 14% pada tahun 2024, dengan target lanjutan sebesar 14,2% pada tahun 2029, sebagai bagian dari upaya nasional yang terkoordinasi.

Kabupaten Lombok Tengah dengan bangga melaporkan pencapaian signifikan dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Pencapaian ini secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, yang mencerminkan efektivitas langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan.

Tabel 2.32 Perbandingan Prevalensi Stunting (%)
Kabupaten Lombok Tengah, Provindi NTB, dan Nasional (2020-2024)

Tahun	Lombok Tengah (Realisasi)	NTB Provinsi (SSGI/SKI)	Nasional (SSGI)
2020	21,65	N/A	26,2
2021	21,81	31,4	24,4
2022	20,81	32,7	21,6
2023	13,34	24,6 (SKI)	21,5
2024	10,14	29,8 (inferensi)	19,8

Catatan: Data NTB tahun 2023 berasal dari SKI, bukan SSGI. Data NTB tahun 2024 diinferensi dari peningkatan 5,2% dari data SKI 2023.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025, data diolah

Secara komparatif, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang periode 2020-2024. Sementara prevalensi nasional menunjukkan tren penurunan yang stabil, Provinsi NTB menampilkan tren yang lebih fluktuatif, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 (berdasarkan data SKI) yang kemudian diikuti oleh peningkatan yang mengkhawatirkan pada tahun 2024 (data SSGI), menjadikannya salah satu provinsi dengan peningkatan prevalensi terbesar.

Keberhasilan Lombok Tengah dapat diatribusikan pada beberapa faktor kunci yang menjadi fokus pemerintah daerah. Strategi tersebut meliputi intervensi gizi yang ditargetkan, peningkatan kualitas sanitasi dan kebersihan, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, optimalisasi peran kader posyandu, serta kolaborasi multi-sektoral yang erat di tingkat lokal. Pendekatan terpadu ini menjadi landasan kuat dalam menekan angka stunting, dan menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan kepemimpinan lokal yang solid.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan pilar fundamental dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan fondasi esensial untuk mewujudkan masyarakat serta bangsa yang bermartabat. Variabel ini berperan sentral dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Guna menjamin terwujudnya kondisi pendidikan yang diharapkan dan untuk mengukur sejauh mana capaian ini telah terealisasi, diperlukan serangkaian indikator komprehensif yang mencakup berbagai aspek aksesibilitas, partisipasi, kualitas, dan hasil belajar.

1. **Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen esensial dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka RLS secara spesifik merefleksikan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini merupakan cerminan fundamental dari kapasitas kolektif masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi

secara konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, meningkatkan pendapatan per kapita, serta memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun 2020-2024)
Tingkat Nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah

Region	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
NTB	7,31	7,38	7,61	7,74	7,87
Lombok Tengah	6,28	6,29	6,44	6,61	6,73

Sumber: BPS, Statistik Demografi dan Sosial, Update 27 Maret 2025

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Dalam periode 2020-2024, RLS di wilayah ini meningkat dari 6,28 tahun menjadi 6,73 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi pendidikan, yang sejalan dengan tren positif di tingkat nasional dan Provinsi NTB.

Dalam perbandingan dengan tingkat nasional, data menunjukkan bahwa kesenjangan absolut antara RLS Lombok Tengah dan RLS nasional menyempit dari 2,20 tahun pada 2020 menjadi 2,12 tahun pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan RLS di Lombok Tengah berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, kesenjangan absolut antara Lombok Tengah dan rata-rata Provinsi NTB melebar dari 1,03 tahun menjadi 1,14 tahun, menunjukkan laju peningkatan yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi.

Tabel 2.34 Kesenjangan Absolut (Dalam Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah antara
Lombok Tengah dengan tingkat Nasional dan Provinsi NTB

Kesenjangan RLS	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Tengah vs Nasional	2,20	2,25	2,25	2,16	2,12
Lombok Tengah vs NTB	1,03	1,09	1,17	1,13	1,14

Catatan: Kesenjangan dihitung dari RLS Nasional atau NTB dikurangi RLS Lombok Tengah

Sumber: Bapperida Lombok Tengah, 2025, data diolah

RLS Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai 6,73 tahun pada 2024 mencerminkan bahwa rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Kondisi ini memberikan informasi penting mengenai kualitas sumber daya manusia dan prospek pembangunan daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa data yang ada menggarisbawahi perlunya strategi pendidikan yang terfokus dan komprehensif untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Akan tetapi, data menunjukkan adanya keberhasilan kinerja Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan RLS secara berkelanjutan, meskipun dengan tantangan yang ada. Penurunan kesenjangan dengan tingkat nasional menjadi indikasi kuat bahwa program-program pendidikan yang dijalankan di Lombok Tengah memiliki efektivitas yang baik dalam mengejar ketertinggalan. Capaian ini menunjukkan potensi besar bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan strategi yang tepat dan dukungan multi-sektoral, Kabupaten Lombok Tengah dapat mempercepat pembangunan manusia yang berkelanjutan dan mencapai potensi penuhnya di masa depan.

2. **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator fundamental dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang secara langsung merefleksikan tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Indikator ini mengukur berapa lama seorang anak berusia 7 tahun diharapkan akan menjalani pendidikan di masa depan, dengan asumsi pola angka partisipasi sekolah saat ini tetap konstan. Peningkatan HLS tidak hanya

mencerminkan investasi yang signifikan dalam modal manusia suatu daerah, tetapi juga berkorelasi erat dengan peningkatan produktivitas ekonomi, kapasitas inovasi, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendidikan yang lebih baik membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pasar kerja dan berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, analisis HLS yang mendalam sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam konteks pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Tabel 2.35 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Region	Jenis Kelamin	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	laki-laki	12,93	12,95	12,96	12,98	12,99
	perempuan	13,04	13,22	13,28	13,33	13,39
NTB	laki-laki	13,90	14,08	14,09	14,10	14,11
	perempuan	13,61	13,84	13,95	13,96	13,97
Lombok tengah	laki-laki	14,05	14,24	14,25	14,26	14,28
	perempuan	13,40	13,41	13,67	13,68	13,69

Sumber: BPS, Statistik Demografi dan Sosial, Update 27 Maret 2025

Selama periode 2020-2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Meskipun peningkatannya bertahap, pola ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam sistem pendidikan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi sekolah. HLS laki-laki di Lombok Tengah secara konsisten menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan NTB. Pada tahun 2024, HLS laki-laki di Lombok Tengah mencapai 14,28 tahun, melampaui rata-rata nasional (12,99 tahun) dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata NTB (14,11 tahun).

Tabel 2.36 Kesenjangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin

Kesenjangan	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Tengah (Laki-laki - Perempuan)	0,65	0,83	0,58	0,58	0,59
Lombok Tengah Perempuan - Nasional Perempuan	0,36	0,19	0,39	0,35	0,30
Lombok Tengah Perempuan - NTB Perempuan	-0,21	-0,43	-0,28	-0,28	-0,28

Sumber: Bapperida Lombok Tengah, 2025, data diolah

Observasi terhadap HLS perempuan di Lombok Tengah yang secara konsisten lebih rendah dari laki-laki di kabupaten yang sama, serta di bawah rata-rata perempuan nasional dan NTB, merupakan area kritis yang memerlukan perhatian mendalam. Pada tahun 2024, HLS perempuan Lombok Tengah adalah 13,69 tahun, masih di bawah HLS laki-laki di Lombok Tengah (14,28 tahun), serta lebih rendah dari HLS perempuan nasional (13,39 tahun) dan NTB (13,97 tahun). Kesenjangan ini menunjukkan adanya hambatan spesifik yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi semua gender.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Lombok Tengah telah menunjukkan capaian HLS yang patut diapresiasi, khususnya untuk segmen laki-laki. Angka HLS laki-laki yang secara konsisten di atas rata-rata nasional dan NTB menunjukkan bahwa terdapat fondasi pendidikan yang cukup kuat atau keberhasilan program-program tertentu dalam menjangkau dan mempertahankan partisipasi pendidikan pada kelompok ini. Capaian ini menjadi modal dasar yang penting untuk pengembangan lebih lanjut, menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, peningkatan HLS secara keseluruhan dapat dicapai.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lombok Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Secara ekonomi dan sosial, masalah keuangan keluarga dan pernikahan dini menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah, terutama bagi anak perempuan. Dari sisi kebijakan, meskipun ada komitmen terhadap pendidikan inklusif, implementasinya masih belum optimal. Kualitas dan ketersediaan sumber daya pendidikan juga berperan besar, dengan tantangan

seperti kekurangan dan distribusi guru yang tidak merata, kesenjangan kualifikasi tenaga pendidik, akreditasi sekolah yang rendah, serta sarana prasarana yang belum memadai. Selain itu, angka putus sekolah yang tinggi (terutama di jenjang SMP) dan tingginya angka buta aksara juga secara langsung menekan HLS di Kabupaten Lombok Tengah.

3. **Angka Literasi/Numerasi**

Indikator capaian literasi mengacu pada kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks (baik informasi maupun fiksi) guna mencapai tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Sementara itu, numerasi didefinisikan sebagai kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan bagi individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.

Standar Kompetensi Minimum (SKM) merupakan batas kemampuan dasar yang harus dicapai peserta didik. Dalam kerangka Asesmen Nasional, kategori capaian meliputi empat tingkatan: "Di atas Kompetensi Minimum (Cakap/Mahir)" yang menunjukkan tingkat kompetensi tinggi pada peserta didik atau satuan pendidikan; "Mencapai Kompetensi Minimum" yang berarti sebagian besar peserta didik atau satuan pendidikan telah mencapai batas kompetensi dasar; "Di Bawah Kompetensi Minimum" yang mengindikasikan sebagian besar peserta didik atau satuan pendidikan belum mencapai batas kompetensi dasar; dan "Jauh Di Bawah Kompetensi Minimum (Perlu Intervensi Khusus)" yang menunjukkan bahwa peserta didik atau satuan pendidikan sangat jauh dari batas kompetensi dasar.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Asesmen Nasional Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	3.49	3.82	13.06	18.62
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	6.02	8.31	16.34	19.44
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	35.09	39.48	46.97	49.71
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	23.43	29.00	43.58	18.62

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025

Data dari 2021 hingga 2024 menunjukkan momentum positif yang semakin kuat di Kabupaten Lombok Tengah. Persentase sekolah yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) numerasi tumbuh hampir lima kali lipat, dari 3,49 % menjadi 18,62 %. Sementara itu, capaian SKM literasi membaca naik dari 6,02 % menjadi 19,44 %. Lonjakan signifikan ini menegaskan bahwa kebijakan dan praktik pembelajaran baru mulai berbuah hasil nyata, membuka jalan bagi transformasi mutu pendidikan yang lebih luas.

Di tingkat peserta didik, capaian literasi membaca kian mengokoh, naik dari 35,09 % pada 2021 menjadi 49,71 % pada 2024. Hampir setengah pelajar kini sudah memenuhi standar literasi minimum, bukti konkret efektivitas program literasi di sekolah dan kolaborasi dengan komunitas. Keberhasilan ini menjadi pijakan strategis untuk memperluas metode pengajaran interaktif dan memperkuat kebiasaan membaca di keluarga.

Meskipun numerasi siswa mengalami penurunan ke 18,62 % pada 2024 setelah puncak 43,58 % di 2023, hal ini justru menghadirkan peluang emas. Tren naik sebelumnya menunjukkan kapasitas sistem untuk berkembang pesat, sehingga anomali terbaru dapat dipahami sebagai sinyal untuk menyempurnakan pendekatan. Dengan menyelidiki metodologi asesmen dan

memperkaya pelatihan guru matematika, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi titik balik yang mempercepat pertumbuhan numerasi.

4. **Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH), menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS), adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya, seperti huruf Jawa atau Kanji. Indikator ini tidak sekadar menunjukkan kemampuan dasar membaca dan menulis, melainkan juga mencerminkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Lebih dari sekadar statistik, AMH adalah cerminan kapasitas fundamental suatu populasi untuk berinteraksi dengan informasi, berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, dan berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Tingkat melek huruf yang tinggi mengindikasikan adanya sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan AMH berkorelasi dengan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik, mobilitas sosial yang lebih tinggi, dan peningkatan ketahanan terhadap disinformasi. Oleh karena itu, AMH berfungsi sebagai proksi yang kuat untuk efektivitas program pendidikan dan sosial, serta menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan sosial ekonomi secara keseluruhan.

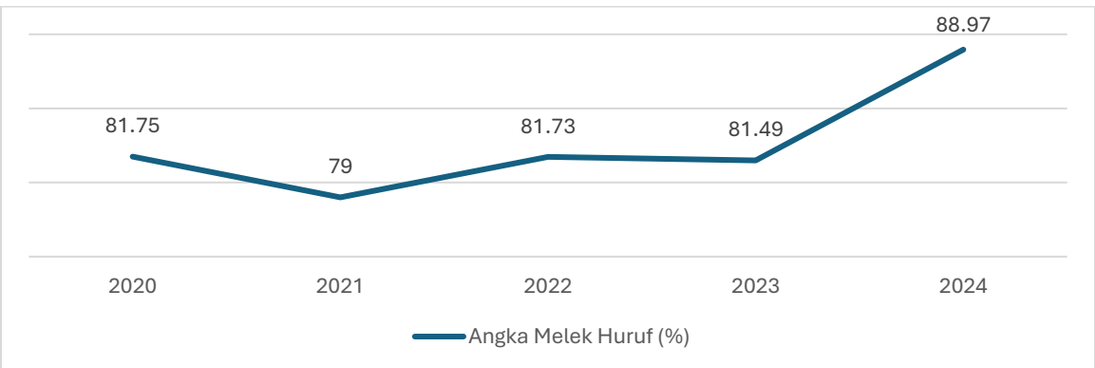

Gambar 2.5 Persentase angka melek huruf di Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Perjalanan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Lombok Tengah antara 2020 dan 2024 menggambarkan dinamika kompleks dalam meningkatkan literasi masyarakat, mulai dari tantangan pandemi hingga munculnya strategi inovatif. Di awal periode, AMH sempat stabil di 81,75 % pada 2020, namun anjlok ke 79 % pada 2021 akibat keterbatasan pembelajaran jarak jauh dan ketergantungan pada model konvensional yang tidak adaptif. Pemulihan bertahap mulai terlihat pada 2022 melalui kelas online darurat dan modul mandiri, dengan angka kembali naik ke 81,73 %, meski stagnasi muncul lagi pada 2023 di angka 81,49 % karena persoalan struktural seperti kesenjangan akses dan rendahnya minat baca. Lonjakan mencolok pada 2024 hingga 88,97 % menjadi bukti potensi besar intervensi partisipatif, dengan keberhasilan program literasi berbasis komunitas, perpustakaan keliling digital, serta kolaborasi lintas sektor menunjukkan arah baru yang lebih kontekstual dan menjanjikan dalam menumbuhkan budaya literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan alat ukur penting untuk menilai komitmen pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya literasi, khususnya melalui pengembangan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang berkelanjutan. Indeks ini menekankan aspek sistemik literasi, termasuk infrastruktur dan dukungan kelembagaan, bukan hanya kebiasaan membaca individu.

Tabel 2.38 Interval Kategori IPLM (Standar Perpusnas)

Kategori	Interval Skor
Sangat Rendah	0 - 29,9
Rendah	30 - 49,9
Sedang	50 - 79,9
Tinggi	80 - 89,9
Sangat Tinggi	90 - 100

Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Data IPLM yang disediakan untuk Kabupaten Lombok Tengah, bersumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

- 2023: 61,23 - Kategori: Sedang
- 2024: 38,01 - Kategori: Rendah

ndeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Lombok Tengah mengungkap penurunan dramatis sebesar 23,22 poin—sekitar 37,9%—dari 61,23 pada 2023 (kategori "Sedang") menjadi 38,01 pada 2024 (kategori "Rendah"). Penurunan tajam ini bukan mencerminkan kemerosotan minat baca atau kualitas literasi masyarakat, melainkan pergeseran metodologi pengukuran: dari kuesioner fisik manual di lapangan pada 2023 ke sistem daring Google Form yang dikelola Perpusnas pada 2024. Transisi teknis tersebut menghasilkan disparitas skor signifikan, menandakan bahwa fluktuasi nilai IPLM lebih berdasar pada perubahan prosedur dan kendala pelaksanaan daripada penurunan substansial dalam budaya literasi. Temuan ini menuntut investigasi segera dan harmonisasi metode untuk menjaga akurasi pemantauan literasi ke depan.

6. **Indeks Literasi Digital**

Indeks literasi digital di Kabupaten Lombok Tengah belum tersedia secara spesifik dalam data yang ada. Namun, diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Lombok Tengah berada, memiliki indeks literasi digital sebesar 3,44 pada tahun 2022, yang menempatkannya di urutan 7 terbawah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital di Lombok Tengah, sebagai bagian dari NTB, masih perlu ditingkatkan.

Ketersediaan data indeks literasi digital yang spesifik dan konsisten untuk Provinsi NTB dan terutama Kabupaten Lombok Tengah sangat terbatas untuk periode 2020-2024. Data yang tersedia untuk 2024 di tingkat sub-nasional adalah Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), yang merupakan metrik berbeda dan tidak dapat disamakan dengan indeks literasi digital. Meskipun demikian, berbagai inisiatif literasi digital lokal di Kabupaten Lombok Tengah, seperti lokakarya untuk siswa dan program pemberdayaan pengrajin, menunjukkan adanya upaya proaktif dan berorientasi pada kebutuhan komunitas dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan digital di tingkat akar rumput. Kesenjangan literasi digital antar wilayah (urban-rural) dan demografi (usia, pendidikan, status sosial ekonomi) masih menjadi isu signifikan, dengan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan rendah, minimnya pelatihan, dan infrastruktur yang tidak memadai sebagai penghambat utama.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan kunci strategis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Melalui sistem perlindungan sosial yang adaptif, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik, dengan dilengkapi indikator seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta indikator lain yang relevan dengan konteks daerah.

1. **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten baik dalam jumlah total peserta maupun peserta aktif dari tahun 2022 hingga 2024. Total kepesertaan meningkat dari 316.134 pada tahun 2022 menjadi 375.929 pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, jumlah peserta aktif juga mengalami peningkatan dari 122.377 menjadi 187.805 pada periode yang sama. Tingkat aktivasi, yang mengukur persentase peserta aktif dari total kepesertaan, juga menunjukkan peningkatan positif dari 38,71% di tahun 2022 menjadi 49,96% di tahun 2024. Meskipun ada pertumbuhan, tingkat aktivasi ini masih menunjukkan bahwa sekitar setengah dari peserta terdaftar tidak aktif berkontribusi.

Tabel 2.39 Data Cakupan dan Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah (2022-2024)

TAHUN	PU (Total)	BPU (Total)	JAKON (Total)	TOTAL (Kepesertaan)	PU (Aktif)	BPU (Aktif)	JAKON (Aktif)	TOTAL (Aktif)	% Aktif
2022	76.718	197.393	42.023	316.134	51.663	30.077	40.637	122.377	38,71%
2023	83.558	241.373	42.551	367.482	65.658	75.244	32.463	173.365	47,18%
2024	86.904	245.870	43.155	375.929	93.357	78.934	15.514	187.805	49,96%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Segmen Penerima Upah (PU), yang umumnya mencakup pekerja formal, menunjukkan pertumbuhan stabil dan positif. Total peserta PU meningkat dari 76.718 di 2022 menjadi 86.904 di 2024. Lebih penting lagi, peserta aktif PU meningkat signifikan dari 51.663 menjadi 93.357 pada periode yang sama. Ini mengindikasikan keberhasilan dalam mempertahankan dan memperluas cakupan di sektor formal, yang cenderung lebih stabil dalam hal kontribusi.

Segmen Bukan Penerima Upah (BPU), yang mewakili pekerja informal, menunjukkan jumlah total peserta terbesar di Lombok Tengah dan pertumbuhan yang konsisten (dari 197.393 di 2022 menjadi 245.870 di 2024). Peningkatan peserta aktif di segmen BPU juga sangat substansial, dari 30.077 di 2022 menjadi 78.934 di 2024. Peningkatan signifikan pada peserta aktif BPU ini, ditambah dengan pangsa mereka yang besar dalam cakupan keseluruhan, menunjukkan langkah maju yang positif dan berdampak dalam meningkatkan perlindungan sosial adaptif dengan berhasil menjangkau segmen besar angkatan kerja informal. Hal ini secara langsung menunjukkan penerapan praktis dari prinsip Perlindungan Sosial Adaptif untuk menargetkan kelompok rentan.

Meskipun total kepesertaan Jasa Konstruksi (JAKON) menunjukkan sedikit peningkatan (dari 42.023 di 2022 menjadi 43.155 di 2024), kepesertaan aktif di segmen ini mengalami penurunan drastis dan mengkhawatirkan, dari 40.637 di 2022 menjadi hanya 15.514 di 2024. Penurunan tajam dalam jumlah peserta aktif JAKON di Lombok Tengah, meskipun ada sedikit peningkatan dalam pendaftaran total, mengungkapkan kelemahan sistemik yang krusial dalam menyediakan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi pekerja berbasis proyek. Hal ini secara langsung merusak "adaptabilitas" sistem terhadap sifat sementara pekerjaan mereka, meninggalkan sebagian besar angkatan kerja rentan ini terpapar risiko di antara proyek-proyek. Pekerjaan jasa konstruksi seringkali melibatkan pekerjaan berbasis proyek, yang berarti pekerja sering dipekerjakan untuk durasi tertentu dan mungkin menghadapi periode pengangguran di antara proyek. Kesenjangan besar antara peserta JAKON total dan aktif menunjukkan bahwa pekerja terdaftar untuk proyek tertentu tetapi sering menghentikan kontribusi setelah proyek selesai. Ini menciptakan celah signifikan dalam cakupan perlindungan sosial mereka, membuat mereka sangat rentan terhadap kehilangan pendapatan, kecelakaan, atau guncangan lainnya selama periode tidak bekerja. Sistem saat ini tampaknya kurang adaptif terhadap pola pekerjaan intermiten pekerja konstruksi, menyoroti kebutuhan akan model kontribusi yang lebih fleksibel

atau mekanisme dukungan transisi yang memastikan cakupan berkelanjutan, sehingga meningkatkan adaptabilitas sistem yang sebenarnya untuk segmen spesifik ini.

2. **Indeks Kesejahteraan Sosial**

Sepanjang 2020 hingga 2022, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di tingkat nasional, provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah menampilkan tren peningkatan yang konsisten. IKS Nasional naik dari 72,09 menjadi 73,18; IKS NTB bergerak dari 70,92 ke 71,85; dan IKS Lombok Tengah meningkat dari 67,92 menjadi 68,90. Kenaikan ini menandai perbaikan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, meski kecepatan perbaikan di masing-masing wilayah menunjukkan variasi.

Tabel 2.40 Perbandingan Indeks Kesejahteraan Sosial Nasional, Nusa Tenggara Barat, dan Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	IKS Nasional	IKS NTB	IKS Lombok Tengah
2020	72,09	70,92	67,92
2021	72,63	71,30	68,35
2022	73,18	71,85	68,90
2023	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2024	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Di balik kemajuan tersebut, disparitas regional tetap nyata. IKS Nasional bertahan sebagai yang tertinggi, diikuti oleh IKS NTB, dan IKS Lombok Tengah yang selalu terletak di posisi terbawah. Pada 2022, misalnya, selisih IKS Nasional dan NTB mencapai 1,33 poin, sedangkan jarak antara NTB dan Lombok Tengah masih sebesar 2,95 poin. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa, meski ada perbaikan, kesenjangan sosial antara pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten belum teratasi sepenuhnya.

Lebih jauh, dinamika kesenjangan menunjukkan pola yang berbeda antar-wilayah. Gap antara IKS Nasional dan NTB melebar sedikit dari 1,17 poin pada 2020 menjadi 1,33 poin pada 2022, sementara jarak antara NTB dan Lombok Tengah justru sedikit menyempit dari 3,00 poin menjadi 2,95 poin dalam periode yang sama. Tren ini mengindikasikan bahwa intervensi di tingkat provinsi semakin mendekati capaian nasional, sedangkan kabupaten masih memerlukan terobosan kebijakan dan program yang lebih tajam.

Sayangnya, data resmi untuk 2023 dan 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sehingga analisis tren IKS tidak dapat diperpanjang ke dua tahun terakhir. Ketiadaan informasi ini membatasi kemampuan kita untuk menilai efektivitas kebijakan terbaru atau perubahan kondisi sosial-ekonomi pasca-2022, dan menegaskan perlunya percepatan publikasi data demi mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

3. **Indeks Zakat Nasional**

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan instrumen penting yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS untuk mengukur perkembangan dan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai indeks komposit, IZN berfungsi sebagai alat evaluasi berkelanjutan untuk kinerja zakat di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga organisasi pengelola zakat di daerah. Dengan mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan, IZN berperan krusial dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai pilar ekonomi Islam untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.

Sebagai "living index," IZN terus mengalami evolusi metodologi untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan. IZN telah mengalami pembaruan, dari versi awal menjadi IZN 2.0 pada tahun 2020, dan kemudian menjadi IZN 3.0 pada tahun 2023. Implementasi IZN 3.0 dimulai pada pengukuran tahun 2023, yang menandai perubahan konseptual dan model pengolahan data.

Perubahan metodologi ini, meskipun menunjukkan komitmen perbaikan, menimbulkan tantangan signifikan dalam hal komparabilitas data lintas tahun. Nilai IZN dari versi yang berbeda tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa penyesuaian metodologis yang cermat. Hal ini penting untuk diperhatikan, khususnya saat menganalisis tren kinerja jangka panjang atau membandingkan data dari tahun yang berbeda, seperti data Kabupaten Lombok Tengah yang tersedia dari tahun 2020 dan 2024.

Tabel 2.41 Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Dimensi Makro	Dimensi Mikro	IZN Total	Interpretasi
2020	0.76	0.52	0.59	Cukup Baik
2021	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2022	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2023	Tidak Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi
2024	0.71	0.56	0.60	Stable/Stabil

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Analisis Indeks Zakat Nasional (IZN) BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan perkembangan kinerja yang stabil namun masih memiliki ruang peningkatan antara tahun 2020 dan 2024. Pada tahun 2020, nilai IZN total tercatat sebesar 0,59, menempatkan BAZNAS pada kategori 'Cukup Baik'. Kinerja ini didukung oleh dimensi makro yang berada pada level 'Baik' dengan nilai 0,76, sementara dimensi mikro tercatat sebesar 0,52. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, BAZNAS memiliki kinerja yang lebih kuat pada aspek-aspek makro dibandingkan dengan aspek mikro.

Tabel 2.42 Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah (2024)

Indikator	Nilai	Kategori	Interpretasi dalam Image 2
Regulasi (X11)	1.00	Sangat Baik	Nilai tertinggi atau > 0.81
Dukungan APBN/APBD (X12)	0.68	Baik	Berada di kategori Baik
Database (X13)	0.58	Cukup Baik	Berada di kategori Cukup Baik
Penguatan Jaringan (X14)	0.37	Kurang Baik	Nilai kurang dari 0.45
Literasi dan Dakwah Zakat (X15)	0.85	Sangat Baik	Nilai tertinggi atau > 0.81
Indeks Tata Kelola (X21)	0.73	Baik	Berada di kategori Baik
Indeks Dampak Zakat (X22)	0.45	Cukup Baik	Berada di kategori Cukup Baik

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah berhasil meningkatkan nilai IZN totalnya menjadi 0,60, yang dikategorikan 'Stabil'. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan signifikan pada dimensi mikro menjadi 0,56, meskipun dimensi makro mengalami sedikit penurunan menjadi 0,71. Kinerja pada tahun 2024 juga diperkuat oleh beberapa indikator kunci, seperti Regulasi (1,00) yang mencapai nilai sempurna dan Literasi serta Dakwah Zakat (0,85) yang berada pada kategori 'Sangat Baik'. Namun, beberapa indikator lain masih memerlukan perhatian, termasuk Dukungan APBN/APBD (0,68), Database (0,58), dan Indeks Dampak Zakat (0,45).

Perbandingan data antara tahun 2020 dan 2024 menunjukkan adanya reorientasi fokus dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan pada dimensi mikro mengindikasikan adanya perbaikan dalam tata kelola internal dan strategi pengelolaan zakat. Meskipun demikian, nilai IZN total yang hanya naik sedikit menggarisbawahi bahwa tantangan masih ada. Secara khusus, indikator Penguatan Jaringan (0,37) yang masuk kategori 'Kurang Baik' menjadi area kritis yang harus segera diperbaiki. Penguatan ini, baik dalam koordinasi internal maupun eksternal, sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif dari seluruh indikator lain yang sudah berjalan baik.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai modal dasar pembangunan dan pelestarian budaya merupakan esensi dari bagian ini. Penjelasan akan difokuskan pada bagaimana agama menjadi landasan

spiritual, etika, dan moral untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Untuk mengukur efektivitasnya, indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator kontekstual lainnya akan digunakan sebagai acuan.

1. Indeks Kerukunan Umat beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan sebuah survei nasional yang dilaksanakan secara rutin oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama di masyarakat Indonesia. Tujuan utama dari pengukuran IKUB adalah sebagai alat evaluasi kinerja unit-unit teknis di Kementerian Agama terkait pencapaian hasil kerukunan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini terhadap isu-isu terkait harmoni sosial keagamaan.

Tabel 2.43 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Nasional (2020-2024)

Tahun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)
2020	67,46	82,53
2021	72,39	83,92
2022	73,09	84,55
2023	76,02	82,59
2024	76,47	83,83

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025

Skor IKUB nasional pada 2024 mencapai 76,47, naik 0,45 poin dibanding tahun sebelumnya, dan melampaui rata-rata nasional 2021 sebesar 72,39 (kenaikan 4,93 poin dari tahun sebelumnya) menandai pertumbuhan berkelanjutan selama lima tahun yang mencerminkan perbaikan mendalam dan sistemik dalam kerukunan antarumat beragama. Di sisi lain, Kementerian Agama juga memantau Indeks Kesalehan Sosial (IKS), yang meski relatif tinggi (82,53 pada 2020 dan 83,83 pada 2024) mengalami penurunan tipis menjadi 82,59 pada 2023 sebelum kembali naik. Kontras antara tren IKUB yang konsisten menanjak dan IKS yang berfluktuasi mengindikasikan bahwa harmoni sosial dan kesalehan mungkin dipengaruhi oleh faktor berbeda dan memiliki sensitivitas yang tak sama terhadap dinamika masyarakat, sehingga memunculkan pertanyaan tentang pendorong spesifik masing-masing indeks dan bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam lanskap sosial-keagamaan Indonesia.

Kabupaten Lombok Tengah menggunakan "Indeks Toleransi," yang meskipun terkait dengan dimensi toleransi dalam IKUB, tampaknya merupakan pengukuran lokal yang berbeda. Indeks Toleransi didefinisikan sebagai gambaran tingkat toleransi antarumat beragama yang dinyatakan dengan angka indeks, dihitung dari rata-rata skor persepsi terhadap toleransi, sikap terhadap toleransi, kerja sama antarumat beragama, dan sikap pemerintah dalam hubungan antarumat beragama.

Tabel 2.44 Indeks Toleransi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Toleransi	3,72	3,61	3,68	3,70	3.79
Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Bapperida kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Toleransi di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,79, meningkat 0,09 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,70. Secara keseluruhan, nilai indeks ini secara konsisten berada dalam kategori "Tinggi", menunjukkan kondisi toleransi hidup beragama yang baik.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen pengukuran inovatif yang dirancang untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan kebudayaan di Indonesia. Instrumen ini diluncurkan pada tahun 2019, dengan data awal tahun 2018 yang mencatat nilai

IPK Nasional sebesar 53.74. IPK tidak hanya berfungsi sebagai alat statistik, melainkan sebagai panduan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah. Peran utamanya meliputi memandu perencanaan pembangunan kebudayaan, memantau kinerja program yang sedang berjalan, dan mendukung perumusan kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris.

Pengembangan IPK ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan dalam pembangunan nasional. Kebudayaan, yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai aspek "lunak" atau periferal, kini secara formal diakui sebagai komponen yang terukur dan integral dalam kemajuan negara. Inklusi IPK dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 semakin menegaskan posisinya sebagai area inti yang menuntut perencanaan sistematis, investasi yang terarah, dan akuntabilitas yang jelas. IPK bertujuan untuk memotret kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah, bukan untuk menilai nilai budaya itu sendiri, karena nilai-nilai budaya Indonesia dianggap adiluhung dan harus senantiasa dijunjung tinggi. Penggunaan IPK ini diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju kondisi yang lebih sejahtera, dengan kemajuan kebudayaan sebagai salah satu pilar utama pembangunan.

Tabel 2.45 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Provinsi NTB, 2020-2024

Tahun	IPK Nasional	IPK Provinsi NTB
2020	54.65	61.26
2021	51.90	54.73
2022	55.13	56.60
2023	57.13	57.37
2024	Data belum tersedia	Data belum tersedia

Sumber: Satu Data NTB, 2025

Capaian IPK nasional menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, nilai IPK nasional tercatat sebesar 54.65, dan terus meningkat hingga mencapai 57,13 pada tahun 2023. Di tingkat provinsi, Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana Lombok Tengah berada, memiliki IPK sebesar 57,37 pada tahun 2023, sedikit di atas rata-rata nasional.

Meskipun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) secara komposit belum dihitung di tingkat kabupaten, tujuh dimensi pembentuknya (Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Kesetaraan Gender) tetap menawarkan kerangka kerja yang relevan dan strategis untuk mengukur perkembangan kebudayaan secara lokal. Di Kabupaten Lombok Tengah, kerangka ini dapat diadaptasi melalui penyusunan indikator khusus yang sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data lokal, atau melalui upaya pelacakan data primer yang lebih kontekstual.

Misalnya, dimensi Ekonomi Budaya dapat diukur melalui jumlah pelaku ekonomi kreatif seperti pengrajin dan UMKM berbasis budaya, serta estimasi kontribusi sektor budaya terhadap pendapatan daerah, termasuk kunjungan wisata berbasis kebudayaan. Sementara itu, dimensi Pendidikan bisa dianalisis dari integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, serta jumlah program seni-budaya yang diselenggarakan pemerintah atau komunitas dan tingkat partisipasinya. Ketahanan Sosial Budaya dapat tergambar dari tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong bernuansa budaya dan survei toleransi antarumat beragama atau suku. Warisan Budaya mencakup pencatatan dan penetapan Cagar Budaya, pelestarian budaya takbenda, serta keterbukaan situs sejarah bagi publik dengan dukungan edukatif yang memadai. Ekspresi Budaya dapat dinilai dari jumlah dan frekuensi acara seni-budaya lokal, keberadaan sanggar dan komunitas budaya aktif, serta partisipasi warga sebagai pelaku seni dalam skala rumah tangga. Budaya Literasi tercermin dari jumlah perpustakaan desa atau taman bacaan dan pemanfaatannya, serta persentase penduduk yang mengakses konten budaya melalui media digital. Adapun Kesetaraan Gender dapat dianalisis melalui rasio keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan budaya dan pelatihan seni.

2.1.2.6. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan yang berkelanjutan berawal dari individu dan keluarga yang tangguh, serta masyarakat yang inklusif. Bab ini akan menyoroti pentingnya penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan, serta upaya kolektif untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Fokus utama juga diberikan pada penanganan isu ketimpangan gender dan strategi pengarusutamaan gender, yang kesemuanya akan diukur melalui indikator-indikator komprehensif seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Pemuda.

1. **Indeks Pembangunan Keluarga**

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator nasional yang krusial, dirancang untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia. Pentingnya iBangga ditegaskan oleh inklusinya secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menandakan perannya sebagai metrik kunci untuk kemajuan nasional. iBangga menawarkan pengukuran kualitas keluarga yang holistik, dikonseptualisasikan melalui tiga dimensi fundamental: Ketentraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan. Pendekatan multi-aspek ini bertujuan untuk menangkap peran dan fungsi keluarga yang komprehensif dalam tatanan sosial.

iBangga didefinisikan sebagai indeks komposit yang mengukur kualitas keluarga secara keseluruhan, mencerminkan peran dan fungsi inheren mereka dalam masyarakat. Perhitungannya berakar pada tiga dimensi utama, masing-masing didukung oleh serangkaian indikator spesifik:

- Dimensi Ketentraman: Dimensi ini menilai stabilitas dan harmoni dalam keluarga, mencakup indikator seperti Kegiatan Ibadah, Legalitas Keluarga, Jaminan Kesehatan, dan Keharmonisan Keluarga.
- Dimensi Kemandirian: Dimensi ini mengevaluasi kemandirian keluarga dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya, dengan indikator termasuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Jaminan Keuangan, Keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan Keluarga, dan Akses Informasi.
- Dimensi Kebahagiaan: Dimensi ini menangkap kesejahteraan emosional dan sosial keluarga, dengan fokus pada Interaksi Keluarga dan Interaksi Sosial.

Tabel 2.46 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2020-2024

Wilayah	2020	Sumber	2021	Sumber	2022	Sumber	2023	Sumber	2024	Sumber
NASIONAL	91.06	BPS	56.07	PK 22	61.43	PK 23	62.4	PK 24	*	*
Provinsi NTB	90.45	BPS	50.6	PK21	54.1	PK 22	57.05	PK 23	60.02	PK 24
Kabupaten Lombok Tengah	90.45	BPS	50.6	PK21	54.1	PK 22	57.05	PK 23	60.02	PK 24

Catatan: * = Data belum tersedia

Sumber: siperindu.online, 2025

Tabel di atas menyajikan gambaran komparatif Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) untuk tingkat Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, semua wilayah menunjukkan nilai iBangga yang sangat tinggi, dengan Nasional dan Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah masing-masing berada di angka 91,06 dan 90,45. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2021, di mana iBangga Nasional turun menjadi 56,07 dan NTB/Lombok Tengah menjadi 50,6. Penurunan tajam ini, bukan mencerminkan kemunduran kualitas keluarga yang sebenarnya, melainkan hasil dari perubahan metodologi pengukuran dan kerangka pengumpulan data iBangga yang baru diterapkan mulai tahun 2021. Setelah kalibrasi ulang ini, semua wilayah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif. iBangga Nasional secara bertahap naik dari 56,07 pada tahun 2021 menjadi 62,4 pada tahun 2023 (data 2024 belum tersedia). Demikian pula, iBangga

Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 50,6 pada tahun 2021 menjadi 60,02 pada tahun 2024. Sebuah observasi penting adalah bahwa nilai iBangga untuk Kabupaten Lombok Tengah secara numerik identik dengan Provinsi NTB di semua tahun yang tercatat, menunjukkan korelasi yang kuat atau praktik agregasi data antara kedua wilayah tersebut. Secara keseluruhan, setelah tahun 2020, iBangga Nasional secara konsisten mempertahankan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah, meskipun ketiga wilayah tersebut menunjukkan lintasan peningkatan yang positif

2. **Indeks Ketimpangan Gender**

Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.47 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan Nasional (2020-2024)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Lombok Tengah	N/A	N/A	0.601	0.603	0.544
Provinsi NTB	0.531	0.653	0.648	0.650	0.530
Nasional	0.472	0.465	0.459	0.447	0.421

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Analisis komparatif data IKG dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Provinsi NTB secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, IKG Provinsi NTB (0.531) jauh di atas Nasional (0.472). Disparitas yang konsisten ini menggarisbawahi bahwa ketimpangan gender merupakan isu yang lebih menonjol di tingkat sub-nasional (NTB) dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan strategi yang disesuaikan secara lokal untuk mengatasi konteks sosio-kultural, ekonomi, dan politik spesifik yang berkontribusi pada disparitas yang lebih tinggi di wilayah ini.

Untuk Kabupaten Lombok Tengah, data yang tersedia dari tahun 2022 menunjukkan IKG sebesar 0.601, yang lebih rendah dari IKG Provinsi NTB (0.648) pada tahun yang sama, namun masih lebih tinggi dari IKG Nasional (0.459). Pada tahun 2023, IKG Lombok Tengah (0.603) juga lebih rendah dari NTB (0.650) tetapi tetap di atas Nasional (0.447). Yang menarik adalah pada tahun 2024, IKG Lombok Tengah menunjukkan penurunan signifikan menjadi 0.544, yang menempatkannya sedikit di atas IKG NTB (0.530) dan jauh di atas IKG Nasional (0.421). Meskipun Lombok Tengah menunjukkan perbaikan yang kuat di tahun 2024, nilai IKG-nya masih mengindikasikan adanya ketimpangan yang perlu ditangani.

3. **Indeks Pembangunan Gender**

Berdasarkan tabel di bawan ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh tingkatan administratif. Pada tingkat nasional, IPG secara bertahap meningkat dari 91,06 pada tahun 2020 menjadi 92,46 pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan berkelanjutan dalam kesetaraan gender. Demikian pula, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pola yang serupa, dengan IPG mereka meningkat dari 90,45 pada tahun 2020 menjadi 91,62 pada tahun 2024. Konsistensi dalam peningkatan IPG di ketiga tingkatan ini mengindikasikan upaya yang luas dan efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender.

Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020-2024

Wilayah	2020	Sumber	2021	Sumber	2022	Sumber	2023	Sumber	2024	Sumber
NASIONAL	91,06	BPS	91,63	BPS	91,85	BPS	92,46	BPS	*	*
Provinsi NTB	90,45	BPS	90,53	BPS	91,08	BPS	91,39	BPS	91,62	BPS
Kabupaten Lombok Tengah	90,45	BPS	90,53	BPS	91,08	BPS	91,39	BPS	91,62	BPS

Catatan: * = Data belum tersedia

Sumber: siperindu.online, 2025

4. **Indeks Pembangunan Pemuda**

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang menunjukkan kemajuan yang berkesinambungan dalam upaya pembangunan pemuda di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun terdapat keterbatasan data di level kabupaten, tren yang terlihat memberikan gambaran optimis.

Tabel 2.49 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2020-2024

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2020	51,00	52,50	Data tidak ditemukan
2021	53,33	Data tidak ditemukan	Data tidak ditemukan
2022	53,83	Data tidak ditemukan	Data tidak ditemukan
2023	55,50	59,25	Data tidak ditemukan
2024	56,33	63,23	Data tidak ditemukan

Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda/Susenas KOR, Susenas MSBP dan Sakernas, 2025

Pada tingkat nasional Indeks Pembangunan Pemuda secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2020 (51,00) dan 2021 (53,33), dengan lonjakan sebesar 2,33 poin. Tren ini berlanjut dengan kenaikan yang lebih landai pada tahun-tahun berikutnya (53,83 di 2022, 55,50 di 2023, dan 56,33 di 2024), menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Sedangkan di Provinsi NTB secara deskriptif memiliki capaian Indeks Pembangunan Pemuda yang lebih tinggi dari rata-rata nasional di semua tahun yang datanya tersedia. Peningkatan paling substansial terjadi antara tahun 2023 (59,25) dan 2024 (63,23), dengan peningkatan sebesar 3,98 poin. Capaian di atas 60 pada tahun 2024 menempatkan NTB dalam kategori provinsi dengan tingkat pembangunan pemuda yang cukup tinggi.

5. **Indeks Partisipasi Olahraga**

Data partisipasi olahraga di Indonesia menunjukkan gambaran yang belum utuh, terutama akibat variasi metodologi pengukuran di tingkat nasional. Berdasarkan laporan Kemenpora, Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,408. Angka tersebut kemudian disajikan dalam bentuk persentase sebesar 25,4% pada tahun 2023 oleh Kemenko PMK, dan kembali menjadi indeks 0,263 pada tahun 2024, berdasarkan publikasi yang bersumber dari Kemenpora. Ketidakseragaman ini menyulitkan perbandingan langsung antar tahun, namun tren yang ada mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi olahraga secara nasional masih berada di kategori rendah. Sementara itu, kondisi partisipasi olahraga di tingkat Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah masih belum bisa dianalisis.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen fundamental dan penggerak utama dalam setiap upaya pembangunan ekonomi suatu daerah. Kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan strategis modal manusia secara langsung berkorelasi dengan daya saing ekonomi, kapasitas inovasi, serta kemakmuran suatu wilayah. Kabupaten Lombok Tengah, dengan posisinya yang strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi signifikan dalam sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pertanian, dan pengembangan infrastruktur. Kemampuan daerah ini untuk mengoptimalkan potensi tersebut sangat bergantung pada kekuatan dan adaptabilitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kondisi SDM menjadi esensial untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk merupakan fondasi utama dalam analisis sumber daya manusia, karena mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja dan pasar konsumsi. Pada tahun 2020, berdasarkan data sensus resmi, populasi Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 1.034.859 jiwa

Tren pertumbuhan penduduk terus berlanjut. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah meningkat menjadi 1.049.708 jiwa. Pada tahun 2022, total populasi Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 1.067.682 jiwa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 1.099.211 jiwa. Lebih lanjut, pada tahun 2024, total populasi diperkirakan mencapai 1.128.716 jiwa. Pertumbuhan yang konsisten ini menggarisbawahi dinamika demografi yang aktif di Kabupaten Lombok Tengah.

1. **Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Anak-anak, Produktif, Lanjut Usia)**

Tabel 2.50 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur (2020-2024)

Tahun	Total Penduduk (Jiwa)	Penduduk Usia 0-14 Tahun (Jiwa)	% (0-14 Tahun)	Penduduk Usia Produktif (15-59 Tahun) (Jiwa)	% (15-59 Tahun)	Penduduk Usia Lanjut (60+ Tahun) (Jiwa)	% (60+ Tahun)
2020	1.034.859	276.755	26,74%	690.706	66,74%	87.398	8,45%
2021	1.049.708	278.789	26,56%	679.450	64,73%	91.469	8,71%
2022	1.067.682	281.603	26,38%	680.030	63,70%	96.049	8,99%
2023	1.099.211	298.972	27,20%	695.358	63,26%	104.881	9,54%
2024	1.128.716	302.417	26,80%	716.450	63,47%	109.849	9,73%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan potensi demografi yang kuat dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Proporsi kelompok usia produktif yang konsisten tinggi, sekitar 63-68% dari total populasi dari tahun 2020 hingga 2024, merupakan karakteristik utama dari bonus demografi. Kondisi ini menyiratkan adanya pasokan tenaga kerja yang melimpah dan potensi peningkatan konsumsi, yang keduanya merupakan aset signifikan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah. Keunggulan kuantitatif ini memberikan peluang krusial untuk ekspansi ekonomi. Namun, memiliki populasi usia kerja yang besar saja tidak cukup; kualitas individu dalam kelompok ini, yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, serta ketersediaan lapangan kerja yang produktif, adalah faktor penentu untuk benar-benar memanfaatkan bonus demografi ini.

Di samping itu, terdapat pergeseran proporsi kelompok umur non-produktif yang patut diperhatikan. Meskipun proporsi penduduk usia produktif tetap dominan, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya fluktuasi pada proporsi anak-anak (0-14 tahun) dari 26,74% pada tahun 2020, sedikit menurun hingga 26,38% pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 27,20% pada tahun 2023, dan kembali sedikit menurun menjadi 26,80% pada tahun 2024. Secara bersamaan, proporsi penduduk usia lanjut (60+ tahun) mengalami peningkatan yang konsisten dari 8,45% pada tahun 2020 menjadi 9,73% pada tahun 2024. Pola ini adalah ciri khas dari transisi demografi, di mana penurunan angka kelahiran menyebabkan proporsi tanggungan muda berkurang, sementara peningkatan harapan hidup menyebabkan proporsi tanggungan lansia bertambah. Pergeseran ini, meskipun belum mengkhawatirkan secara langsung, memberikan sinyal tantangan di masa depan. Populasi lansia yang terus bertambah pada akhirnya akan meningkatkan rasio ketergantungan usia tua, yang akan menuntut lebih banyak alokasi sumber daya untuk jaminan sosial, sistem layanan kesehatan, dan fasilitas perawatan lansia. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang proaktif sangat diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur demografi ini.

2. **Tren Angka Beban Ketergantungan**

Angka beban ketergantungan adalah indikator vital yang mencerminkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi produktif. Angka ini merepresentasikan jumlah penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia) untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

Tabel 2.51 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Angka Beban Ketergantungan Total	Angka Beban Ketergantungan Anak (0-14 tahun)	Angka Beban Ketergantungan Lanjut Usia (65+ tahun)
2020	45,35	38,13	7,22
2021	46,61	38,94	7,67
2022	47,24	39,20	8,04
2023	49,73	40,72	9,00
2024	49,38	39,99	9,28

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Kabupaten Lombok Tengah berada dalam periode bonus demografi yang menguntungkan, ditandai dengan angka beban ketergantungan yang relatif rendah. Namun, terdapat indikasi bahwa optimalisasi bonus demografi ini mungkin terbatas atau menghadapi tantangan di masa depan. Rasio ketergantungan menunjukkan peningkatan dari 45,35 pada tahun 2020 menjadi 49,73 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 49,38 pada tahun 2024. Peningkatan ini, yang terutama didorong oleh bertambahnya proporsi penduduk usia lanjut, menunjukkan bahwa puncak keuntungan dari bonus demografi mungkin semakin dekat atau jendela demografi ini bergeser secara bertahap. Bonus demografi bukanlah keuntungan otomatis; ia memerlukan populasi produktif yang benar-benar produktif. Apabila kelompok usia produktif yang besar ini kekurangan keterampilan yang memadai, pendidikan yang relevan, atau kesempatan kerja yang produktif, keunggulan kuantitatif ini dapat berubah menjadi tantangan kualitatif, bahkan menjadi beban alih-alih bonus. Oleh karena itu, struktur demografi saat ini menawarkan peluang krusial, meskipun berpotensi terbatas waktu, untuk pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang ini, pemerintah daerah perlu mengintensifkan upaya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, meningkatkan pengembangan keterampilan, dan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat berarti kehilangan manfaat ekonomi penuh dari jendela demografi ini. Peningkatan tipis dalam ketergantungan lansia juga menuntut perencanaan proaktif untuk sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan guna mendukung populasi yang menua.

Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Angka beban ketergantungan yang rendah memang menandakan potensi angkatan kerja yang besar dari segi kuantitas. Namun, kekuatan kuantitatif ini harus dievaluasi bersamaan dengan kualitas angkatan kerja, yang ditentukan oleh indikator-indikator seperti pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Melek Huruf) dan kesehatan (Umur Harapan Hidup, prevalensi stunting). Jika populasi produktif, meskipun ukurannya besar, memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau kondisi kesehatan yang buruk, produktivitas dan kontribusi aktual mereka terhadap perekonomian akan terbatas. Oleh karena itu, rasio ketergantungan yang rendah memberikan kesempatan strategis untuk melakukan investasi substansial dalam pengembangan modal manusia. Kebijakan harus memprioritaskan peningkatan hasil pendidikan, pelatihan vokasi, dan inisiatif kesehatan masyarakat. Transformasi dari angkatan kerja yang besar menjadi angkatan kerja yang sangat terampil dan sehat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan memastikan daya saing regional yang berkelanjutan.

2.1.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. **Rasio PDRB industri pengolahan**

Secara historis, sektor industri pengolahan seringkali dipandang sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Sektor ini mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan, dan berkontribusi pada diversifikasi ekspor, yang pada gilirannya meningkatkan kompleksitas ekonomi suatu daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, meskipun sektor pertanian dan pariwisata mendominasi, sektor industri pengolahan memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif lapangan kerja dan aktivitas bernilai tambah di luar

komoditas primer dan jasa. Keberadaan sektor ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas pertanian atau volatilitas industri pariwisata.

Tabel 2.52 PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha
(Harga Berlaku, Miliar Rupiah, 2020-2024)

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.505,63	4.630,64	4.823,81	5.326,81	5.653,75
B. Pertambangan dan Penggalian	825,73	893,44	896,29	980,99	1.023,50
C. Industri Pengolahan	812,38	838,06	886,45	955,44	1.048,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,02	13,98	15,61	16,51	17,98
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,80	19,35	21,36	22,27	22,52
F. Konstruksi	2.586,66	3.124,22	3.119,69	3.456,90	3.555,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.022,31	2.112,09	2.356,10	2.636,39	2.861,55
H. Transportasi dan Pergudangan	1.600,23	1.536,04	2.230,95	2.635,61	2.849,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	170,19	176,58	241,44	269,34	302,94
J. Informasi dan Komunikasi	289,20	305,61	321,98	346,26	363,01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	417,46	471,47	540,44	574,44	608,40
L. Real Estat	680,94	699,70	745,96	788,67	830,13
M,N. Jasa Perusahaan	25,36	25,50	29,10	32,58	34,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.045,20	1.094,91	1.136,31	1.179,14	1.260,50
P. Jasa Pendidikan	857,37	890,48	945,67	1.021,49	1.086,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	430,34	472,27	488,98	525,78	565,19
R,S,T,U. Jasa Lainnya	365,81	382,26	443,19	482,03	521,23
Produk Domestik Regional Bruto	**16.666,62**	**17.686,60**	**19.243,33**	**21.250,62**	**22.604,87**

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Tabel 2.53 PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2010, Miliar Rupiah, 2020-2024)

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.099,65	3.131,05	3.183,22	3.254,27	3.288,00
B. Pertambangan dan Penggalian	614,33	655,07	628,66	662,54	674,74
C. Industri Pengolahan	662,46	663,84	674,60	688,28	715,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,53	11,39	12,58	13,23	14,45
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,73	13,93	14,59	14,73	14,66
F. Konstruksi	1.867,18	2.179,77	2.064,62	2.237,27	2.284,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.360,42	1.396,97	1.474,74	1.590,39	1.693,96
H. Transportasi dan Pergudangan	1.010,56	954,20	1.228,39	1.398,56	1.453,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102,24	104,52	136,84	148,63	162,82
J. Informasi dan Komunikasi	260,26	273,33	282,79	297,14	310,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	300,21	319,67	330,90	344,34	359,89
L. Real Estat	444,48	451,23	472,13	492,67	512,29
M,N. Jasa Perusahaan	17,80	17,88	19,51	21,13	22,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	626,10	642,63	653,77	661,03	695,96
P. Jasa Pendidikan	574,42	582,72	601,22	631,33	652,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	329,20	355,57	363,16	384,87	409,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	277,43	283,71	322,70	342,91	359,56
Produk Domestik Regional Bruto	**11.571,00**	**12.037,48**	**12.464,40**	**13.183,34**	**13.624,03**

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Tabel 2.54 Rasio Kontribusi Industri Pengolahan terhadap
PDRB Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	PDRB Industri Pengolahan (Harga Berlaku, miliar Rp)	Total PDRB (Harga Berlaku, miliar Rp)	Rasio Kontribusi (%) (Harga Berlaku)	PDRB Industri Pengolahan (Harga Konstan 2010, miliar Rp)	Total PDRB (Harga Konstan 2010, miliar Rp)	Rasio Kontribusi (%) (Harga Konstan 2010)
2020	812,38	16.666,62	4,87	662,46	11.571,00	5,72
2021	838,06	17.686,60	4,74	663,84	12.037,48	5,51
2022	886,45	19.243,33	4,61	674,60	12.464,40	5,41
2023*	955,44	21.250,62	4,50	688,28	13.183,34	5,22
2024**	1.048,02	22.604,87	4,64	715,74	13.624,03	5,25

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Rasio kontribusi PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB pada harga berlaku menunjukkan tren penurunan umum dari 4,87% pada tahun 2020 menjadi 4,50% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai absolut PDRB industri pengolahan mungkin meningkat, laju peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan laju peningkatan total PDRB nominal Kabupaten Lombok Tengah. Namun, terdapat proyeksi sedikit kenaikan kembali pada tahun 2024, mencapai 4,64%.

Pola serupa juga terlihat pada rasio kontribusi yang diukur pada harga konstan tahun 2010. Rasio ini menunjukkan penurunan yang konsisten dari 5,72% pada tahun 2020 menjadi 5,22% pada tahun 2023. Penurunan ini lebih signifikan karena mengeliminasi efek inflasi, menunjukkan bahwa kontribusi riil sektor industri pengolahan terhadap total output riil daerah memang mengalami penurunan relatif. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan sedikit kenaikan marjinal, mencapai 5,25%.

2. **Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum**

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, ditandai oleh keberadaan KEK Mandalika yang strategis dan telah menarik perhatian internasional melalui penyelenggaraan ajang bergengsi seperti MotoGP. Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum merupakan indikator vital dari dampak ekonomi sektor pariwisata, mencerminkan efektivitas kebijakan, imbal hasil investasi infrastruktur, serta daya tahan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal. Untuk menilai kontribusinya secara akurat, digunakan rasio PDRB yang dihitung dari perbandingan antara PDRB sektor tersebut dengan total PDRB kabupaten pada tahun bersangkutan, dikalikan 100 sehingga menghasilkan persentase yang informatif.

Tabel 2.55 Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum Harga Berlaku (2020-2024)

Tahun	PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum (miliar rupiah)	Total PDRB (miliar rupiah)	Rasio PDRB (%)
2020	170.19	16666.62	1.021
2021	176.58	17686.60	0.998
2022	241.44	19243.33	1.255
2023*	269.34	21250.62	1.267
2024**	302.94	22604.87	1.340

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum pada harga berlaku mengalami sedikit penurunan dari 1,021% pada 2020 ke 0,998% di 2021, mencerminkan dampak pandemi yang memperlambat pemulihan sektor dibanding sektor lain. Namun, mulai 2022, rasio meningkat signifikan menjadi 1,255%, lalu 1,267% pada 2023* dan diproyeksikan mencapai 1,340% pada 2024**, menunjukkan tren pemulihan kuat pasca-pandemi. Kenaikan ini mengindikasikan

kebangkitan aktivitas pariwisata dan efektivitas strategi pemulihan, didorong oleh pelonggaran pembatasan perjalanan, keberhasilan vaksinasi, dan daya tarik Mandalika sebagai tuan rumah acara internasional. Pola fluktuasi ini menyoroti kerentanan sektor terhadap guncangan besar sekaligus potensi pemulihannya yang tangguh.

Tabel 2.56 Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum Harga Konstan (2020-2024)

Tahun	PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum (miliar rupiah, konstan 2010)	Total PDRB (miliar rupiah, konstan 2010)	Rasio PDRB (%)
2020	102.24	11571.00	0.883
2021	104.52	12037.48	0.868
2022	136.84	12464.40	1.098
2023*	148.63	13183.34	1.127
2024**	162.82	13624.03	1.195

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum di Lombok Tengah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan pemulihan yang kuat setelah tantangan pada tahun 2020-2021. Meskipun rasio PDRB pada harga konstan sempat mencatat sedikit penurunan dari 0,883% pada tahun 2020 menjadi 0,868% pada tahun 2021, yang mengindikasikan pertumbuhan riil sektor ini sempat tertinggal dari pertumbuhan ekonomi riil regional secara keseluruhan, tren ini dengan cepat berbalik.

Sejak tahun 2022, rasio harga konstan menunjukkan lintasan kenaikan yang konsisten dan menggembirakan: 1,098% pada tahun 2022, 1,127% pada tahun 2023 (data sementara), dan proyeksi kenaikan menjadi 1,195% pada tahun 2024 (data sangat sementara). Dengan menghilangkan efek inflasi, metrik ini mengungkapkan bahwa volume aktual aktivitas ekonomi dalam sektor Akomodasi, Makan, dan Minum tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada volume aktual aktivitas ekonomi keseluruhan di Lombok Tengah. Ini menunjukkan pergeseran struktural yang signifikan dalam perekonomian regional, di mana sektor perhotelan secara progresif menjadi kontributor yang lebih substansial dan benar-benar berkembang terhadap kapasitas produktif Kabupaten Lombok Tengah.

Secara keseluruhan, sektor Akomodasi, Makan, dan Minum adalah komponen yang dinamis, tumbuh pesat, dan semakin vital dari struktur ekonomi Lombok Tengah. Lintasan pertumbuhannya yang mengesankan secara intrinsik terkait dan signifikan didukung oleh inisiatif pengembangan pariwisata yang sedang berlangsung, terutama investasi strategis di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sektor ini berfungsi sebagai mesin yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, generator lapangan kerja yang substansial, dan kontributor kunci bagi diversifikasi ekonomi regional, menggerakkannya menuju struktur yang lebih tangguh dan berorientasi jasa.

3. **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, baik secara nominal maupun riil, berdasarkan proporsi yang diberikan. Sub-sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" adalah pendorong utama pertumbuhan ini, mencerminkan pemulihan yang signifikan dan vitalitas sektor pariwisata dan kuliner di daerah tersebut pasca-pandemi. Peningkatan kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Lombok Tengah mengukuhkan perannya sebagai pilar strategis dalam ekonomi regional.

Tabel 2.57 PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Lombok Tengah
(Harga Berlaku, Miliar Rupiah, 2020-2024)

URAIAN	PROPORSI NILAI EKRAF	2020	2021	2022	2023*	2024**
C. Industri Pengolahan	0,2688	218,26	225,32	238,32	256,88	281,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,1295	261,90	273,62	305,15	341,40	370,65

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2985	50,84	52,74	72,07	80,39	90,43
J. Informasi dan Komunikasi	0,1432	41,39	43,76	46,09	49,57	51,98
M,N. Jasa Perusahaan	0,0500	1,27	1,28	1,46	1,63	1,75
P. Jasa Pendidikan	0,0013	1,11	1,16	1,23	1,33	1,41
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,0065	2,38	2,48	2,88	3,13	3,39
Total Nilai Ekraf		**577,15**	**600,36**	**667,20**	**734,33**	**801,31**
Proporsi Nilai Ekraf terhadap PDRB		**3,46%**	**3,39%**	**3,47%**	**3,46%**	**3,54%**

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara
Menggunakan proporsi sesuai dengan metadata dari Bappenas 2024

Sumber: BPS, Bappenas, Bapperida, 2025 (data diolah)

Tabel 2.58 PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Lombok Tengah
(Harga Konstan 2010, Miliar Rupiah, 2020-2024)

URAIAN	PROPORSI NILAI EKRAF	2020	2021	2022	2023*	2024**
C. Industri Pengolahan	0,2688	177,99	178,36	181,23	184,90	192,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,1295	176,17	180,90	191,03	206,02	219,37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2985	30,56	31,24	40,84	44,38	48,59
J. Informasi dan Komunikasi	0,1432	37,26	39,13	40,50	42,55	44,40
M,N. Jasa Perusahaan	0,0500	0,89	0,89	0,98	1,06	1,11
P. Jasa Pendidikan	0,0013	0,75	0,76	0,78	0,82	0,85
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,0065	1,80	1,84	2,10	2,23	2,34
Total Nilai Ekraf		**425,42**	**433,12**	**457,46**	**481,96**	**509,02**
Proporsi Nilai Ekraf terhadap PDRB		**3,68%**	**3,60%**	**3,67%**	**3,66%**	**3,74%**

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara
Menggunakan proporsi sesuai dengan metadata dari Bappenas 2024

Sumber: BPS, Bappenas, Bapperida, 2025 (data diolah)

Total estimasi PDRB ekonomi kreatif pada harga berlaku meningkat dari Rp577,15 miliar pada 2020 menjadi Rp801,31 miliar pada 2024. Pada harga konstan 2010, nilainya meningkat dari Rp425,42 miliar pada 2020 menjadi Rp509,02 miliar pada 2024. Rasio PDRB ekonomi kreatif terhadap total PDRB Lombok Tengah pada harga berlaku berkisar antara 3,39% hingga 3,54%, sedangkan pada harga konstan berkisar antara 3,60% hingga 3,74%. Sub-sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekonomi kreatif yang diestimasi, diikuti oleh Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi.

Penggunaan proporsi nilai ekraf (proporsi bersumber dari Bappenas) yang spesifik untuk setiap lapangan usaha memberikan estimasi yang lebih terperinci mengenai kontribusi ekonomi kreatif. Pertumbuhan yang stabil dalam nilai ekonomi kreatif, baik nominal maupun riil, menunjukkan bahwa sektor ini terus berkembang di Lombok Tengah. Meskipun proporsinya terhadap PDRB total masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor dominan lainnya, peningkatan yang konsisten mengindikasikan bahwa sektor kreatif semakin menjadi bagian integral dari ekonomi daerah. Dominasi Industri Pengolahan dan Perdagangan dalam estimasi PDRB ekonomi kreatif (berdasarkan proporsi yang diberikan) menunjukkan bahwa komponen kreatif dari sektor-sektor ini (seperti fesyen, kriya, atau distribusi produk kreatif) memiliki dampak yang signifikan. Hal ini juga menyoroti pentingnya sektor-sektor ini dalam ekosistem ekonomi kreatif lokal.

4. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan, yang didefinisikan sebagai proporsi populasi usia produktif yang terlibat dalam kegiatan wirausaha, adalah tolok ukur krusial bagi kesehatan dan daya tahan ekonomi suatu wilayah. Rasio ini tidak hanya mengukur tingkat kemandirian ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di

sektor non-formal yang sering kali menjadi tulang punggung perekonomian di negara berkembang. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan kontributor substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebuah konteks yang relevan dengan dinamika ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.59 Rekapitulasi Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
2020	Berusaha sendiri	48.027	48.641	96.668
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	78.535	49.832	128.367
	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	7.217	2.604	9.821
	Buruh/Karyawan/Pegawai	47.291	35.584	82.875
	Pekerja bebas	64.819	35.162	99.981
	Pekerja keluarga/tak dibayar	27.085	73.766	100.851
	Total Penduduk Bekerja	**272.974**	**245.589**	**518.563**
	Jumlah Wirausaha (Inti)	**55.244**	**51.245**	**106.489**
	Rasio Kewirausahaan (Inti)	**20.24%**	**20.87%**	**20.53%**
2021	Berusaha sendiri	47.827	65.121	112.948
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	92.707	46.267	138.974
	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.722	1.524	5.246
	Buruh/Karyawan/Pegawai	52.058	29.434	81.492
	Pekerja bebas	65.680	25.754	91.434
	Pekerja keluarga/tak dibayar	24.508	79.160	103.668
	Total Penduduk Bekerja	**286.502**	**247.260**	**533.762**
	Jumlah Wirausaha (Inti)	**51.549**	**66.645**	**118.194**
	Rasio Kewirausahaan (Inti)	**17.99%**	**26.95%**	**22.14%**
2022	Berusaha sendiri	54.193	67.398	121.591
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	88.299	25.381	113.680
	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.612	1.970	6.582
	Buruh/Karyawan/Pegawai	51.324	33.248	84.572
	Pekerja bebas	62.809	34.179	96.988
	Pekerja keluarga/tak dibayar	20.858	79.809	100.667
	Total Penduduk Bekerja	**282.095**	**241.985**	**524.080**
	Jumlah Wirausaha (Inti)	**58.805**	**69.368**	**128.173**
	Rasio Kewirausahaan (Inti)	**20.85%**	**28.67%**	**24.46%**
2023*	Berusaha sendiri	62.841	66.445	129.286
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	103.414	46.795	150.209
	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8.619	407	9.026
	Buruh/Karyawan/Pegawai	72.382	33.803	106.185
	Pekerja bebas	65.965	41.732	107.697
	Pekerja keluarga	22.265	77.416	99.681
	Total Penduduk Bekerja	**335.486**	**266.598**	**602.084**
	Jumlah Wirausaha (Inti)	**166.255**	**113.240**	**279.495**
	Rasio Kewirausahaan (Inti)	**49.55%**	**42.47%**	**46.42%**
2024**	Berusaha sendiri	57.430	64.627	122.057
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	104.347	39.681	144.028
	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	6.129	2.319	8.448
	Buruh/Karyawan/Pegawai	87.499	35.799	123.298
	Pekerja bebas	72.597	47.312	119.909
	Pekerja keluarga/tak dibayar	19.259	97.968	117.227
	Total Penduduk Bekerja	**347.261**	**287.706**	**634.967**
	Jumlah Wirausaha (Inti)	**63.559**	**66.946**	**130.505**
	Rasio Kewirausahaan (Inti)	**18.30%**	**23.20%**	**20.55%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

Tabel 2.60 Ringkasan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Total Penduduk Bekerja	Jumlah Wirausaha (Inti)	Rasio Kewirausahaan (Inti)
2020	518,563	106,489	20.53%
2021	533,762	118,194	17.99%

2022	524,080	128,173	24.46%
2023*	602,084	279,495	46.42%
2024**	634,967	130,505	20.55%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

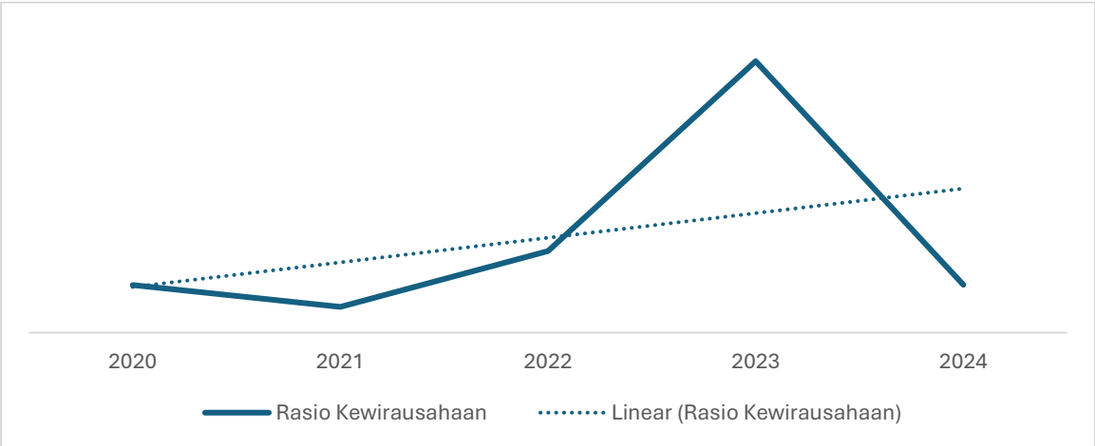

Gambar 2.6 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

Visualisasi data Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan sebuah pola yang khas. Kurva pergerakan rasio ini membentuk pola seperti huruf 'V' jika kita mengecualikan anomali data tahun 2023. Kurva dimulai pada 20,53% di tahun 2020, kemudian menurun ke titik terendah 17,99% pada tahun 2021, yang secara jelas menunjukkan dampak negatif pandemi COVID-19. Setelah itu, kurva melonjak tajam ke puncak tertinggi 22,14% di tahun 2022, menandakan fase pemulihan yang kuat dan cepat. Pada tahun 2024, kurva ini kembali stabil di angka 20,55%, mengindikasikan laju pertumbuhan yang melambat dan mencapai keseimbangan baru, mendekati kondisi awal pra-pandemi. Data tahun 2023 yang melonjak drastis ke 46,42% akan muncul sebagai lonjakan vertikal yang ekstrem, terpisah dari tren utama, mencerminkan dampak ekonomi dari acara-acara musiman seperti MotoGP.

Analisis terhadap data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk Agustus 2023 mengungkapkan sebuah anomali ekstrem yang memerlukan penjelasan khusus. Rasio kewirausahaan yang dihitung dari data ini mencapai 46,42%, sebuah angka yang jauh di luar kisaran tren tahunan yang konsisten di kisaran 17-22%. Angka ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari tren jangka panjang, melainkan sebagai cerminan dari dinamika ekonomi yang sangat spesifik. Perbedaan metodologi atau cakupan survei antara Sakernas (yang mungkin lebih inklusif dalam mendefinisikan 'pekerja') dan survei tahunan BPS/Bapperida menjadi salah satu faktor. Namun, faktor kontekstual yang lebih kuat adalah penyelenggaraan acara besar seperti MotoGP di KEK Mandalika. Meskipun balapan utama diadakan di bulan Oktober, persiapan dan aktivitas ekonomi terkait telah dimulai jauh lebih awal, menciptakan lonjakan permintaan barang dan jasa temporer. Ribuan pedagang informal, penyedia akomodasi, dan pekerja lepas lainnya yang terlibat dalam kegiatan ini kemungkinan besar terhitung dalam kategori Berusaha sendiri atau Berusaha dibantu buruh, sehingga secara temporer mendongkrak angka secara signifikan. Oleh karena itu, data 2023 harus dilihat sebagai cerminan dari dampak ekonomi yang didorong oleh acara khusus, bukan sebagai indikator tren ekonomi struktural yang berkelanjutan.

Salah satu karakteristik terpenting dari ekosistem kewirausahaan di Lombok Tengah adalah peran dominan perempuan. Analisis data dari tahun 2020 hingga 2024 secara konsisten menunjukkan bahwa jumlah wirausaha perempuan (Berusaha sendiri dan Berusaha dibantu) jauh lebih besar daripada laki-laki. Sebagai contoh, di tahun 2024, tercatat 66.946 wirausaha perempuan dibandingkan dengan 63.559 wirausaha laki-laki. Pola ini juga terlihat di tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini kemungkinan besar mencerminkan struktur sosial dan ekonomi di mana perempuan secara tradisional aktif dalam sektor mikro, seperti kerajinan tangan, tenun, kuliner, dan usaha kecil berbasis rumah tangga. Partisipasi masif perempuan

dalam sektor ini adalah pilar kunci yang menopang ketahanan ekonomi lokal, dan ini adalah sebuah kekuatan yang harus diakui dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

5. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tabel 2.61 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)
2020	75,04	3,74	538.728	518.563	20.165
2021	75,05	2,33	546.494	533.762	12.732
2022	73,2	3,02	540.424	524.080	16.344
2023	76,87	2,78	656.129*	637.899*	18.230*
2024	79,16	2,55	651.585	634.967	16.618

Catatan: *= data merupakan perhitungan berdasarkan metadata yang ada

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Untuk Kabupaten Lombok Tengah, TPAK menunjukkan fluktuasi. Tercatat sebesar 75,04% pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 75,05% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 73,2% pada tahun 2022, dan kembali meningkat signifikan menjadi 76,87% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, TPAK tercatat sebesar 79,16%. Untuk konteks provinsi NTB secara lebih luas, TPAK adalah 70,45% pada Agustus 2020 dan 70,57% pada Agustus 2021.

Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tergolong rendah, dengan angka 3,74% pada tahun 2020, 2,33% pada tahun 2021, 3,02% pada tahun 2022, 2,78% pada tahun 2023, dan 2,55% pada tahun 2024. Ini secara permukaan tampak positif, mengindikasikan kemampuan pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 75,04% pada tahun 2020, 75,05% pada tahun 2021, 73,20% pada tahun 2022, 76,87% pada tahun 2023, dan 79,16% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Namun, terdapat sebuah paradoks ketika angka pengangguran yang rendah ini disandingkan dengan tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sangat rendah (6,61 tahun pada 2023) dan proporsi penduduk yang besar dengan pendidikan minimal atau tanpa pendidikan formal (misalnya, 36,18% tidak/belum sekolah pada 2024). Kondisi ini sangat menyiratkan bahwa meskipun masyarakat bekerja, sebagian besar kemungkinan besar berada dalam pekerjaan informal, berketerampilan rendah, dan berupah rendah, terutama di sektor pertanian yang dominan (37,80% dari total lapangan kerja). Situasi ini menunjukkan prevalensi underemployment atau pengangguran terselubung, di mana individu bekerja tetapi tidak pada potensi penuh mereka atau dalam pekerjaan yang menawarkan pendapatan atau keamanan yang memadai. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang rendah, meskipun secara lahiriah positif, menyembunyikan tantangan yang lebih dalam terkait dengan kualitas pekerjaan dan produktivitas angkatan kerja. Kebijakan harus bergeser dari sekadar menciptakan lapangan kerja menjadi menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Hal ini memerlukan upaya terpadu untuk meningkatkan keterampilan, mendorong pekerjaan di sektor formal, dan mendiversifikasi ekonomi menuju kegiatan bernilai tambah yang lebih tinggi. Tanpa intervensi tersebut, pertumbuhan PDRB per kapita yang mengesankan mungkin tidak akan menghasilkan peningkatan substansial dalam kesejahteraan dan standar hidup sebagian besar penduduk.

6. **Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah pusat untuk menilai kapasitas inovatif pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola, pelayanan publik, dan daya saing. Melalui mekanisme tahunan seperti Innovative Government Award (IGA), Kemendagri mendorong daerah untuk terus menciptakan terobosan yang berdampak. Dalam periode 2021–2024, metodologi IID mengalami evolusi signifikan, terutama dalam penilaian kualitas inovasi. Pedoman awal tahun 2021 menitikberatkan pada kuantitas inovasi dengan

pembobotan 40% untuk aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan 60% untuk Satuan Inovasi Daerah (SID), namun sejak 2021 hingga 2023 terjadi pergeseran fokus ke arah kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi. Pedoman 2023 memperketat ambang batas kategori penilaian dan merevisi proporsi aspek SPD menjadi 25,20% dan SID menjadi 74,80%, dengan indikator yang lebih kompleks dan berbasis kinerja daerah. Perubahan ini menyebabkan fluktuasi skor di berbagai daerah, termasuk Lombok Tengah, yang mencerminkan tantangan adaptasi terhadap standar evaluasi yang semakin tinggi dan komprehensif.

Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika skor IID yang menarik antara 2021 dan 2024. Pada 2021, skor melonjak ke 37,70 sehingga masuk kategori "Inovatif," menandakan peningkatan cepat dalam identifikasi dan pelaporan inovasi. Tahun berikutnya, skor naik lagi menjadi 56,08 dan hampir mencapai ambang "Sangat Inovatif," menggambarkan kematangan proses inovasi. Namun pada 2023 terjadi penurunan tajam ke 33,09 akibat kriteria penilaian yang diperketat, sebelum akhirnya bangkit pada 2024 dengan skor 60,01, pertama kalinya menembus kategori "Sangat Inovatif."

Tabel 2.62 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Lombok Tengah (2021-2024)

Tahun	Nilai IGA	Kategori IID (Berdasarkan Kriteria Tahun Terkait)
2021	37.7	Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2021)
2022	56.08	Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2021)
2023	33.09	Kurang Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2023)
2024	60.01	Sangat Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2023)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (data diolah)

Dinamika tersebut mengindikasikan bahwa kinerja inovasi Lombok Tengah masih sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti penyesuaian metodologi dan tantangan internal dalam pengumpulan data. Volatilitas ini menunjukkan ekosistem inovasi yang belum stabil, sementara lonjakan pada 2024 memperlihatkan kapasitas adaptasi dan resiliensi daerah dalam merespons standar evaluasi baru. Fluktuasi tersebut menegaskan perlunya analisis mendalam dan strategi penguatan sistem untuk memastikan pertumbuhan inovasi yang berkelanjutan.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. **Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan**

Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ini didorong oleh investasi pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Prinsip-prinsip utamanya meliputi pertumbuhan yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan, efisiensi sumber daya melalui penggunaan energi terbarukan dan daur ulang, perlindungan lingkungan untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, inovasi dan teknologi bersih, pendekatan berbasis siklus hidup produk, keterlibatan masyarakat, serta kolaborasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Indikator yang digunakan untuk mengukur ekonomi hijau seringkali mencakup Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau PDRB per kapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tutupan lahan, dan persentase energi terbarukan, yang mencerminkan kemajuan di pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sedangkan Ekonomi Biru adalah pendekatan yang semakin populer, baik pada level konsep maupun implementasi, yang berupaya menggabungkan peluang pembangunan berbasis laut dan perikanan dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Konsep ini didasarkan pada premis bahwa ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan akan lebih produktif, dan ini merupakan keharusan bagi implementasi ekonomi berbasis laut. Prinsip-prinsip utamanya meliputi kesehatan dan konservasi laut sebagai prioritas utama, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menghindari eksploitasi berlebihan, pertumbuhan dan diversifikasi

ekonomi dari sumber daya laut (termasuk pariwisata laut, energi kelautan, dan bioteknologi kelautan), keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta inovasi dan teknologi bersih untuk industri kelautan. Indikator yang relevan untuk ekonomi biru mencakup Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI), volume produksi perikanan, kontribusi terhadap PDRB, investasi di sektor kelautan, jumlah lapangan kerja yang tercipta, serta upaya konservasi laut seperti rehabilitasi mangrove dan pengurangan polusi.

Kedua kerangka ini secara intrinsik terhubung oleh tujuan menyeluruh pembangunan berkelanjutan, yang melampaui model ekonomi tradisional yang sering mengabaikan biaya lingkungan. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Lombok Tengah sangat penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekologi, terutama mengingat ketergantungan daerah pada sumber daya alam. Kebijakan untuk satu sektor seringkali dapat melengkapi sektor lainnya, menghasilkan hasil yang sinergis.

PDRB Total Kabupaten Lombok Tengah
(ADHK & ADHB), 2020-2024 (miliar Rupiah)

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	PDRB (ADHB)
2020	11.571,00	16.666,62
2021	12.037,48	17.686,60
2022	12.464,40	19.243,33
2023*	13.183,34	21.250,62
2024**	13.624,03	22.604,87

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah (ADHK & ADHB), Kontribusi, dan Pertumbuhan (2020-2024)

Tahun	PDRB ADHK (miliar Rp)	Kontribusi ADHK (%)	Pertumbuhan ADHK (%)	PDRB ADHB (miliar Rp)	Kontribusi ADHB (%)	Pertumbuhan ADHB (%)
2020	3.099,65	26,79	-	4.505,63	27,03	-
2021	3.131,05	26,01	1,01	4.630,64	26,18	2,77
2022	3.183,22	25,54	1,67	4.823,81	25,07	4,17
2023*	3.254,27	24,68	2,23	5.326,81	25,07	10,43
2024**	3.288,00	24,13	1,04	5.653,75	25,01	6,14

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah dicirikan oleh keragaman praktik pertanian dan penggunaan lahan. Penggunaan lahan di daerah ini secara umum terbagi menjadi tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering), yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, dan tanah perkebunan. Keragaman ini menunjukkan adanya berbagai aktivitas pertanian, mulai dari budidaya tanaman pangan hingga perkebunan dan perikanan darat.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 52.957,17 Ha, dengan sebaran di berbagai kecamatan. Penetapan KP2B ini merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk mencegah konversi lahan pertanian yang tidak terkendali, yang merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Upaya ini sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi hijau.

Meskipun data spesifik mengenai komoditas pertanian unggulan tidak dirinci secara ekstensif dalam sumber yang tersedia, kontribusi PDRB yang besar dari sektor ini mengindikasikan adanya produksi yang signifikan dari tanaman pokok dan produk pertanian lainnya. Kebijakan

yang ada juga mendukung sektor ini, seperti penekanan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 pada "Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan". Selain itu, komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan "ekosistem pariwisata hijau berkelanjutan" di KEK Mandalika secara tidak langsung mendukung praktik pertanian hijau, karena sektor pertanian adalah komponen kunci dalam rantai pasok pariwisata. Inisiatif ini dapat mendorong permintaan akan produk pertanian yang diproduksi secara berkelanjutan.

Sektor Perikanan

Aktivitas perikanan di Lombok Tengah berfokus pada perikanan tangkap dan budidaya sebagai strategi utama untuk meningkatkan PDRB. Komoditas spesifik seperti lobster, rumput laut, dan mutiara juga diidentifikasi sebagai potensi berkualitas tinggi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, termasuk "Pengelolaan Perikanan Tangkap," "Pengelolaan Perikanan Budidaya," dan "Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan", menunjukkan upaya komprehensif dalam pengembangan sektor ini.

Dukungan kuat juga datang dari tingkat provinsi dan nasional. Penjabat Gubernur NTB secara aktif mendorong pengembangan ekonomi biru, mengakui potensi NTB sebagai "proyek percontohan pengembangan ekonomi biru di Indonesia" karena kekayaan sumber daya lautnya. Ada penekanan pada peningkatan investasi di sektor kelautan dan penciptaan lapangan kerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki program yang berfokus pada pengelolaan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dukungan politik dan programatik yang kuat dari tingkat provinsi dan nasional untuk ekonomi biru di NTB memberikan lingkungan yang kondusif bagi sektor perikanan Lombok Tengah. Penekanan dari atas ke bawah pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menempatkan Lombok Tengah pada posisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan di masa depan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru.

2. **Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi**

Transisi energi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks antara ambisi kebijakan dan realitas implementasi. Dalam periode 2020 hingga 2024, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional secara konsisten menunjukkan tren peningkatan, meskipun lajunya bertahap. Peningkatan ini belum mampu mencapai target ambisius yang ditetapkan di awal, yang pada akhirnya memicu revisi target EBT 2025 dari 23% menjadi 17-20%. Bioenergi, khususnya biodiesel B35, menjadi kontributor dominan dalam pencapaian bauran EBT ini, memberikan manfaat ekonomi signifikan namun juga memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang. Tantangan utama yang menghambat akselerasi transisi energi meliputi ketergantungan yang kuat pada energi fosil, kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta kesenjangan finansial dalam investasi EBT.

Di Kabupaten Lombok Tengah, proporsi fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) menjadi indikator utama Bauran Energi Primer. Meskipun data penggunaan EBT di gedung maupun operasional internal pemerintah masih terbatas, sejumlah inisiatif lokal menggambarkan potensi pengembangan energi bersih. Analisis belum sempurna, namun capaian-capaian ini memberi arah bagi kebijakan energi terbarukan di tingkat daerah.

Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) menjadi contoh nyata implementasi EBT untuk layanan publik. Sejak 2018, 270 unit PJU-TS berdiri di Pulau Lombok, termasuk 70 unit di delapan kecamatan Lombok Tengah. Meski proyek ini lebih merupakan infrastruktur publik daripada penggunaan EBT dalam gedung pemerintahan, keberlanjutan dan cakupannya menunjukkan komitmen pemerintah pada solusi energi terdesentralisasi.

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berbasis masyarakat sudah berlangsung sejak 1991. Berkapasitas 5–100 kW per unit, PLTMH memanfaatkan debit air dan kemiringan sungai setempat, memberdayakan komunitas dalam pengelolaan energi. Model ini

layak direplikasi atau diperluas untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas publik, sekaligus memperkuat ekosistem EBT skala kecil di daerah.

Inisiatif PLTS atap juga mulai menjalar di sektor swasta dan komunitas, seperti penggunaan Solar Dryer Dome untuk petani kopi di desa Karang Sidemen dan Lantan. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 mendorong pemasangan PLTS atap untuk menekan biaya listrik dan emisi GRK, dengan target nasional 2.145 MW pada 2030. Namun Lombok Tengah belum memanfaatkan potensi ini pada bangunan pemerintah daerah, menandai peluang strategis untuk memperkuat komitmen transisi energi di tingkat lokal.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital daerah menjadi pilar utama dalam upaya peningkatan daya saing dan kualitas layanan publik, mencakup pengembangan super platform, percepatan adopsi teknologi, dan pembentukan ekosistem talenta digital yang mumpuni. Sebagai tolok ukur kinerja dan kesiapan komunitas lokal, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) digunakan untuk memantau empat dimensi kritis—infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan ekonomi, dan pasar kerja digital—serta mengidentifikasi disparitas regional yang memerlukan intervensi terarah. Dengan mengintegrasikan IMDI ke dalam perencanaan dan evaluasi, pemerintah daerah dapat menetapkan sasaran terukur, memprioritaskan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa setiap program transformasi digital berjalan efektif, berkelanjutan, dan inklusif.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu kerangka kerja multidimensi yang dirancang untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia secara komprehensif, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun profesional. IMDI berfungsi sebagai instrumen evaluatif nasional yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan digital masyarakat, serta menjadi acuan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia digital. Tujuan utama pengukuran ini meliputi identifikasi tingkat kompetensi digital terkini, pelaksanaan pengukuran yang terperinci hingga tingkat kabupaten/kota guna menangkap disparitas regional, serta mendorong inklusivitas dalam ekonomi digital yang terus berkembang.

Keunggulan pendekatan IMDI terletak pada sifatnya yang non-komparatif. Indeks ini tidak dimaksudkan sebagai alat untuk membandingkan daya saing antar daerah, melainkan sebagai instrumen diagnostik yang bertujuan menetapkan target pengembangan yang terarah, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Urgensi pengukuran ini didasarkan pada prinsip bahwa digitalisasi tidak akan berjalan optimal tanpa kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, IMDI mendorong refleksi internal dan penyusunan solusi yang kontekstual, serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

IMDI Kabupaten Lombok Tengah mencatat skor total 42,17 pada 2022, meningkat menjadi 46,52 pada 2023 sebelum turun menjadi 45,97 pada 2024, mencerminkan keberlanjutan transformasi digital yang rentan. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem tumbuh dari 41,24 pada 2022 ke 59,97 pada 2023 namun merosot ke 55,34 pada 2024, sejalan dengan peningkatan Akses dan Adaptasi Teknologi dari 33,35 pada 2022 menjadi 60,87 pada 2023 dan 67,44 pada 2024, sedangkan Ekosistem Pembelajaran dan Digitalisasi Pemerintah mengalami penurunan setelah pencapaian puncak 81,00 pada 2023. Pilar Keterampilan Digital mempertahankan performa tinggi dengan skor 56,70 pada 2022, 64,14 pada 2023, dan 62,16 pada 2024, meski Keamanan TIK menurun pada tahun terakhir. Pilar Pemberdayaan tetap rendah antara 25,46 hingga 27,66 dengan peningkatan konsumen diimbangi penurunan penyedia, sementara Pilar Pekerjaan fluktuatif dengan skor 45,40 pada 2022, 33,97 pada 2023, dan 39,69 pada 2024 akibat permintaan tidak stabil serta penawaran yang turun dari 34,64 pada 2022 ke 17,84 pada 2024. Ketidakseimbangan antar-pilar ini

menegaskan perlunya intervensi terarah dan program integratif lintas-pilar untuk memastikan ekosistem digital Lombok Tengah yang inklusif, berkelanjutan, dan sinergis.

Tabel 2.63 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Kabupaten Lombok Tengah per Pilar dan Sub-Pilar (2022-2024)

Pilar/Sub-Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	**41.24**	**59.97**	**55.34**
- Akses dan adaptasi teknologi digital	33.35	60.87	67.44
- Ekosistem pembelajaran	49.14	48.38	43.51
- Digitalisasi pemerintah	-	81.00	59.78
Keterampilan Digital	**56.70**	**64.14**	**62.16**
- Komplementaritas	52.83	55.26	59.78
- Pengenalan	64.76	68.19	67.98
- Keamanan TIK	52.48	68.75	58.78
Pemberdayaan	**25.46**	**26.98**	**27.66**
- Konsumen/pengguna	27.21	31.09	34.64
- Penjual/penyedia	23.71	22.87	20.69
Pekerjaan	**45.40**	**33.97**	**39.69**
- Permintaan	56.16	48.21	61.54
- Penawaran	34.64	19.72	17.84
IMDI Kabupaten Lombok Tengah	**42.17**	**46.52**	**45.97**

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Lebih lanjut, analisis IMDI Kabupaten Lombok Tengah 2022–2024 mengungkap kemajuan digital yang melampaui rata-rata nasional dengan skor total naik dari 42,17 pada 2022 menjadi 46,52 pada 2023 lalu sedikit menurun ke 45,97 pada 2024, menandakan momentum yang menjanjikan namun rentan. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem melonjak pada 2023 berkat peningkatan akses dan adaptasi teknologi digital, tetapi ekosistem pembelajaran menurun dan digitalisasi pemerintah menunjukkan volatilitas; Pilar Keterampilan Digital tetap solid meski keamanan TIK melemah; Pilar Pemberdayaan konsisten terendah dengan pertumbuhan konsumen yang mengimbangi penurunan penyedia; dan Pilar Pekerjaan mengindikasikan kesenjangan talenta digital parah akibat permintaan meningkat tajam sementara penawaran menurun drastis. Ketidakseimbangan ini menyoroti kebutuhan strategi pilar-spesifik dan integrasi lintas-pilar (memperkuat infrastruktur lunak, keamanan siber, pemberdayaan produsen lokal, dan keseimbangan pasar tenaga kerja digital) untuk memastikan kesinambungan, kedalaman, dan inklusivitas ekosistem digital Lombok Tengah.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Bagian ini akan menguraikan secara mendalam kondisi integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Lombok Tengah, serta perannya dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat keterpaduan ekonomi dalam negeri, tetapi juga untuk mendukung partisipasi aktif Kabupaten Lombok Tengah dalam rantai pasok global.

1. **Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Analisis Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2024 didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data PDRB disajikan dalam dua basis harga: Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku. Penggunaan Harga Konstan 2010 memungkinkan pengukuran pertumbuhan riil dengan menghilangkan efek inflasi, sehingga mencerminkan perubahan volume investasi yang sebenarnya. Sementara itu, Harga Berlaku menunjukkan nilai nominal pada harga pasar yang berlaku, yang mencerminkan nilai ekonomi pada kondisi saat itu, termasuk dampak inflasi.

Tabel 2.64 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.296,65	12.761,56	13.791,71	14.789,22	15.857,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	210,00	214,96	238,87	263,62	299,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.417,01	2.474,09	2.514,57	2.611,03	2.821,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**8.307,25**	**9.560,22**	**9.512,91**	**10.646,12**	**11.029,88**
5. Perubahan Inventori	51,39	22,40	24,15	19,94	8,23
6. Net Ekspor	-6.615,68	-7.346,64	-6.838,89	-7.079,30	-7.411,57
Produk Domestik Regional Bruto	**16.666,62**	**17.686,60**	**19.243,33**	**21.250,62**	**22.604,87**

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Tabel 2.65 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.163,48	8.298,27	8.628,51	8.981,62	9.398,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	142,73	143,49	151,97	161,62	180,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.454,43	1.463,00	1.450,30	1.476,31	1.553,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**5.075,56**	**5.649,87**	**5.351,64**	**5.808,10**	**5.931,43**
5. Perubahan Inventori	33,10	14,12	14,89	13,47	5,64
6. Net Ekspor	-3.298,31	-3.531,27	-3.132,91	-3.257,79	-3.445,38
Produk Domestik Regional Bruto	**11.571,00**	**12.037,48**	**12.464,40**	**13.183,34**	**13.624,03**

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa PMTB nominal (ADHB) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari Rp 8.307,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 11.029,88 miliar pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2020 dan 2021, dengan lonjakan dari Rp 8.307,25 miliar menjadi Rp 9.560,22 miliar, menunjukkan momentum investasi yang kuat di awal periode. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 9.512,91 miliar, PMTB nominal kembali meningkat tajam pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam nilai riil (ADHK), PMTB juga menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp 5.075,56 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.931,43 miliar pada tahun 2024. Sama seperti PMTB nominal, pertumbuhan riil tertinggi terjadi pada tahun 2021, mencapai Rp 5.649,87 miliar, diikuti oleh penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 5.351,64 miliar. Namun, PMTB riil berhasil pulih dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2024.

Tabel 2.66 Pertumbuhan Tahunan PMTB Kabupaten Lombok Tengah (Harga Konstan dan Harga Berlaku), 2020-2024 (%)

Tahun	Pertumbuhan PMTB (Harga Konstan 2010)	Pertumbuhan PMTB (Harga Berlaku)
2021	11,31%	15,08%
2022	−5,37%	−0,50%
2023	8,53%	11,91%
2024	2,12%	3,59%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Perbandingan antara PMTB ADHB dan ADHK mengungkapkan adanya perbedaan yang mencolok, yang mengindikasikan dampak inflasi terhadap nilai investasi. Misalnya, pada tahun 2021, PMTB nominal meningkat sekitar 15,08%, sementara PMTB riil meningkat sekitar 11,31%. Pada tahun 2022, PMTB nominal sedikit menurun (-0,50%), namun PMTB riil mengalami penurunan yang lebih besar (-5,28%). Ini menunjukkan bahwa meskipun nilai investasi nominal tetap tinggi, daya beli riil dari investasi tersebut dapat tergerus oleh inflasi, terutama pada tahun 2022. Pemulihan PMTB riil pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan volume fisik investasi, meskipun laju peningkatannya lebih moderat dibandingkan dengan nilai nominal.

Tabel 2.67 Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah (Harga Konstan dan Harga Berlaku), 2020-2024 (%)

Tahun	Kontribusi PMTB terhadap PDRB (Harga Konstan 2010)	Kontribusi PMTB terhadap PDRB (Harga Berlaku)
2020	43,86%	49,85%
2021	46,94%	54,06%
2022	42,94%	49,43%
2023	44,06%	50,09%
2024	43,54%	48,80%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Lombok Tengah sangat signifikan, selalu berada di kisaran 48% hingga 54% selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PMTB menyumbang 49,85% dari PDRB. Kontribusi ini meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 54,06%, menunjukkan adanya dorongan investasi yang kuat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, kontribusi PMTB sedikit menurun menjadi 49,43%, sebelum kembali meningkat tipis menjadi 50,09% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, kontribusi PMTB kembali sedikit menurun menjadi 48,80%.

Proporsi PMTB yang mendekati atau bahkan melebihi setengah dari total PDRB menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah adalah daerah yang sangat berorientasi pada investasi dan pembangunan infrastruktur. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar output ekonomi daerah dialokasikan kembali untuk memperkuat kapasitas produksi di masa depan, daripada hanya untuk konsumsi.

Perkembangan PMTB di Lombok Tengah selama periode 2020-2024 sangat erat kaitannya dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. KEK Mandalika, yang diresmikan operasionalnya pada tahun 2021, merupakan proyek strategis nasional yang difokuskan pada pengembangan pariwisata. Investasi besar-besaran di KEK Mandalika mencakup pembangunan hotel, fasilitas pariwisata, serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, akses air bersih, dan listrik. Pembangunan ini secara langsung mendorong peningkatan PMTB, terutama pada sektor konstruksi.

Peningkatan PMTB pada tahun 2021 dan 2023 dapat dihubungkan dengan percepatan pembangunan di KEK Mandalika dan proyek infrastruktur lainnya setelah dampak awal pandemi COVID-19. Meskipun pandemi menyebabkan perlambatan ekonomi secara umum, investasi strategis ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas di sektor terkait. Penurunan PMTB riil pada tahun 2022 mungkin mencerminkan penyesuaian setelah lonjakan investasi awal atau adanya tantangan dalam pelaksanaan proyek. Namun, tren positif kembali pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap pembangunan modal tetap di daerah.

2. **Ekspor Barang dan Jasa**

Net Ekspor, yang merupakan selisih antara total ekspor dan total impor barang dan jasa, menunjukkan pola yang konsisten negatif di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang periode 2020-2024, baik pada harga konstan maupun harga berlaku.

Pada harga konstan, Net Ekspor tercatat sebesar -Rp3.298,31 miliar pada tahun 2020, melebar menjadi -Rp3.531,27 miliar pada tahun 2021, sedikit membaik menjadi -Rp3.132,91 miliar pada tahun 2022, namun kembali melebar menjadi -Rp3.257,79 miliar pada tahun 2023 dan -Rp3.445,38 miliar pada tahun 2024.

Pada harga berlaku, trennya serupa, dengan nilai yang lebih besar karena pengaruh inflasi. Net Ekspor tercatat -Rp6.615,68 miliar pada 2020, melebar menjadi -Rp7.346,64 miliar pada 2021, sedikit membaik menjadi -Rp6.839,89 miliar pada 2022, dan kembali melebar menjadi -Rp7.079,30 miliar pada 2023 dan -Rp7.411,57 miliar pada 2024.

Perhitungan laju pertumbuhan tahunan Net Ekspor menunjukkan dinamika defisit perdagangan daerah. Pada harga konstan, defisit melebar sebesar 7,06% pada 2021, kemudian menyempit 11,27% pada 2022, namun kembali melebar 3,99% pada 2023 dan 5,76% pada 2024. Pada harga berlaku, defisit melebar 11,05% pada 2021, menyempit 6,90% pada 2022, kembali melebar 3,50% pada 2023 dan 4,69% pada 2024.

Tabel 2.68 Laju Pertumbuhan Tahunan Net Ekspor
(Harga Konstan dan Harga Berlaku, 2020-2024)

Tahun	Laju Pertumbuhan Net Ekspor (Harga Konstan) (%)	Laju Pertumbuhan Net Ekspor (Harga Berlaku) (%)
2021	-7,06	-11,05
2022	11,27	6,90
2023	-3,99	-3,50
2024	-5,76	-4,69

Catatan: Nilai negatif pada laju pertumbuhan menunjukkan defisit yang semakin besar (melebar), sementara nilai positif menunjukkan defisit yang semakin kecil (menyempit).

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Tabel 2.69 Kontribusi Net Ekspor terhadap Total PDRB
(Harga Konstan dan Harga Berlaku, 2020-2024)

Tahun	Kontribusi Net Ekspor (Harga Konstan) (%)	Kontribusi Net Ekspor (Harga Berlaku) (%)
2020	-28,51	-39,70
2021	-29,34	-41,54
2022	-25,14	-35,54
2023	-24,71	-33,31
2024	-25,29	-32,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Kontribusi Net Ekspor terhadap total PDRB secara konsisten negatif, menunjukkan bahwa komponen ini bertindak sebagai penarik pertumbuhan PDRB, bukan pendorongnya. Pada harga konstan, kontribusinya berkisar antara -28,51% (2020) hingga -25,29% (2024). Pada harga berlaku, kontribusinya lebih signifikan negatif, berkisar antara -39,70% (2020) hingga -32,79% (2024).

Kinerja Net Ekspor Kabupaten Lombok Tengah yang konsisten negatif sepanjang 2020-2024 secara intrinsik terkait dengan narasi pembangunan ekonomi daerah, khususnya peran sentral Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan proyek-proyek infrastruktur masif. Pengembangan KEK Mandalika, yang dirancang untuk menarik investasi pariwisata dan telah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja signifikan di sektor perhotelan, kuliner, dan kerajinan, merupakan pendorong ekspor jasa (pariwisata) yang jelas, seperti terlihat dari penyelenggaraan acara internasional seperti Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024. Namun, perlu dipahami bahwa fase konstruksi besar-besaran KEK Mandalika kemungkinan besar memerlukan impor signifikan bahan dan peralatan khusus, yang pada gilirannya berkontribusi pada defisit perdagangan barang dalam jangka pendek hingga menengah (2020-2024), dengan harapan ekspor jasa berkelanjutan di masa depan akan mengimbangi biaya impor awal ini. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur ekstensif yang dipimpin Dinas PUPR, mencakup pengelolaan sumber daya air, irigasi, SPAM, sistem air limbah, dan jalan, meskipun tidak secara langsung menjadi ekspor, merupakan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa lokal, menjadikan investasi tinggi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan defisit Net Ekspor yang diakibatkannya sebagai fase "pra-investasi" esensial. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan juga memiliki potensi ekspor barang, dengan pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan minuman yang secara langsung berkaitan dengan ekspor jasa pariwisata, menyoroti kebutuhan untuk beralih dari ekspor komoditas mentah menuju pengolahan bernilai tambah. Terlebih lagi, periode ini diliputi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan disrupsi ekonomi global, meskipun PDRB Lombok Tengah menunjukkan pertumbuhan konsisten dan

ketahanan ekonomi daerah, dengan pelajaran yang didapat dari pandemi dapat diterapkan untuk membangun sektor ekspor yang lebih kuat dan terdiversifikasi di masa depan.

Perbandingan antara nilai Net Ekspor nominal (harga berlaku) dan riil (harga konstan) serta laju pertumbuhannya memberikan gambaran tentang dampak inflasi terhadap neraca perdagangan. Jika defisit nominal melebar lebih cepat daripada defisit riil, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga impor (atau harga ekspor yang relatif stagnan) memperburuk ketidakseimbangan perdagangan. Ini mengindikasikan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, terutama untuk barang-barang impor, dan menggarisbawahi perlunya strategi untuk meningkatkan produksi lokal atau mendiversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi risiko harga.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi

Bagian ini akan mengkaji secara komprehensif kondisi pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Fokus utama adalah pada bagaimana wilayah perkotaan dikembangkan menjadi pusat jasa dan perdagangan yang maju, sekaligus mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, akan dibahas pula strategi dan capaian dalam pembangunan pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan. Analisis ini akan didukung oleh indikator-indikator kunci seperti Indeks Infrastruktur, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, dan Persentase Desa Mandiri, serta indikator relevan lainnya sesuai konteks daerah.

1. **Indeks Infrastruktur Wilayah**

Infrastruktur merupakan tulang punggung esensial bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah prasyarat fundamental untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai studi telah menegaskan bahwa infrastruktur adalah salah satu roda penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, mampu meningkatkan output dan mendorong aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Kabupaten Lombok Tengah, dengan kekayaan potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian yang menjadi basis utama hingga sektor pariwisata yang berkembang pesat, sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Keberadaan infrastruktur yang handal memungkinkan aliran barang dan jasa yang efisien, menarik investasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Indeks Infrastruktur Wilayah (IIW) Kabupaten Lombok Tengah merupakan indeks komposit yang mencakup infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan penurunan kawasan kumuh. Meskipun formula pastinya dapat bervariasi antar daerah, komponen-komponen ini secara umum sejalan dengan indikator-indikator layanan infrastruktur yang diukur oleh Dinas PUPR di berbagai wilayah, seperti persentase jalan mantap, luas layanan irigasi, dan sarana prasarana lingkungan yang mencakup akses air bersih dan sanitasi layak.

Tabel 2.70 Indeks Infrastruktur Wilayah
Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)(poin)

Tahun	Indeks Infrastruktur Wilayah
2020	65,05
2021	66,23
2022	68,03
2023	69,55
2024	74,93

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2024. Peningkatan rata-rata tahunan sekitar 2,47 poin dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan adanya momentum pembangunan infrastruktur yang terjaga dan dilaksanakan secara konsisten selama periode tinjauan. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam sektor infrastruktur telah dijalankan dengan upaya yang berkelanjutan, meskipun mungkin menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi pemangkasan anggaran yang pernah terjadi. Konsistensi dalam peningkatan indeks ini mencerminkan prioritas yang diberikan pada pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari visi pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh telah menjadi prioritas utama pada periode 2020-2024. Proyek-proyek strategis seperti jalan bypass BIL-Mandalika, peningkatan jalan kota Praya, rehabilitasi jaringan irigasi (DI Pengga, IPDMIP), program Pamsimas, serta penanganan kawasan kumuh dan RTLH, telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan Indeks Infrastruktur Wilayah.

Infrastruktur terbukti berperan sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. Di wilayah perkotaan, infrastruktur transportasi (bandara, jalan bypass) secara signifikan mendukung sektor pariwisata dan jasa, memfasilitasi konektivitas dan menarik investasi. Sementara itu, di wilayah perdesaan, infrastruktur irigasi dan jalan produksi menjadi penopang vital bagi peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi distribusi hasil panen ke pasar. Infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja di kedua wilayah.

2. **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan infrastruktur yang tersedia. Infrastruktur yang dimaksud dalam konteks ini mencakup berbagai sektor vital seperti transportasi (termasuk jalan dan jembatan), energi, air bersih, saluran pembuangan, dan telekomunikasi. IKLI dihitung dengan mengukur tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh pengguna layanan. Indeks ini memiliki peran krusial sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik dan efektivitas investasi yang telah dilakukan dalam bidang infrastruktur.

Data spesifik Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang teragregasi untuk seluruh Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2020-2024 tidak tersedia secara komprehensif dalam materi riset yang ada.

Meskipun data IKLI kabupaten secara keseluruhan tidak lengkap, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Praya Barat dari 82 poin pada 2023 menjadi 83 poin pada 2024 dan capaian "Baik" menunjukkan tren positif dalam kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan dasar, termasuk infrastruktur, mulai membuahkan hasil. Data IKM yang konsisten tinggi (di atas 79 poin) dan kriteria "Baik" di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa investasi dan perbaikan dalam infrastruktur kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Namun, ketiadaan data IKLI yang teragregasi untuk seluruh kabupaten selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya tantangan dalam pelaporan dan konsolidasi data di tingkat daerah. Ini dapat menghambat evaluasi kebijakan infrastruktur secara holistik dan menyulitkan perbandingan kinerja antar tahun di tingkat kabupaten, karena data mungkin dikumpulkan secara terdesentralisasi dan belum tentu terintegrasi atau dipublikasikan secara konsisten di tingkat kabupaten.

3. **Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**

Tabel 2.71 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)

Tahun	Tipe Daerah	Persentase Rumah Layak Huni (%)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
2020	Perkotaan	70,37	29,63
2020	Perdesaan	56,67	43,33
2020	Perkotaan+Perdesaan	61,55	38,45
2022	Perkotaan	59,40	40,60
2022	Perdesaan	53,38	46,62
2022	Perkotaan+Perdesaan	55,66	44,34
2023	Perkotaan	60,75	39,25
2023	Perdesaan	58,18	41,82
2023	Perkotaan+Perdesaan	59,21	40,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data berikut menunjukkan fluktuasi dalam persentase rumah layak huni di Kabupaten Lombok Tengah antara tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni secara keseluruhan (Perkotaan+Perdesaan) adalah 61,55%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 55,66%, sebelum sedikit meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 59,21%.

Perbandingan antara daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa daerah perkotaan umumnya memiliki persentase rumah layak huni yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada tahun 2020, perkotaan mencapai 70,37% rumah layak huni, jauh lebih tinggi dari perdesaan yang hanya 56,67%. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan pada kedua tipe daerah, dengan perkotaan turun menjadi 59,40% dan perdesaan menjadi 53,38%. Pada tahun 2023, kedua area menunjukkan sedikit pemulihan, dengan perkotaan mencapai 60,75% dan perdesaan 58,18%.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2022, baik di perkotaan maupun perdesaan, perlu menjadi perhatian. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023, persentase rumah layak huni secara keseluruhan masih belum kembali ke tingkat tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan hunian layak perlu terus diintensifkan dan mungkin memerlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pada tahun 2022.

4. **Persentase Desa Mandiri**

Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam pembangunan desa, dengan capaian signifikan pada tahun 2024, yaitu status "nihil desa tertinggal" (tidak ada desa dengan status tertinggal atau sangat tertinggal). Ini merupakan prestasi yang membanggakan dan menunjukkan keberhasilan program pembangunan desa yang berfokus pada pemerataan dan pemberdayaan dari tingkat paling bawah. Pencapaian status "nihil desa tertinggal" adalah bukti nyata keberhasilan program pembangunan desa yang berfokus pada pemerataan dan pemberdayaan dari tingkat paling bawah. Mengingat klasifikasi IDM, ini berarti semua desa telah mencapai setidaknya status "Berkembang", dengan banyak yang Maju atau Mandiri. Ini adalah indikator kuat bahwa kebijakan pembangunan desa telah berhasil mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.72 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Total Desa	Persentase Desa Mandiri
2020	10	67	50	0	0	127	7,87
2021	15	70	42	0	0	127	11,81
2022	29	73	25	0	0	127	22,83
2023	52	64	26	0	0	142	36,62

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren positif yang signifikan dalam peningkatan status desa dari tahun 2018 hingga 2023. Jumlah desa mandiri meningkat drastis dari 0 unit pada tahun 2018 menjadi 52 unit pada tahun 2023,

dengan persentase desa mandiri yang melonjak dari 0% menjadi 36,62% dalam periode yang sama. Desa dengan status 'maju' juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari 14 unit pada 2018 menjadi 73 unit pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 64 unit pada 2023. Sebaliknya, jumlah desa 'berkembang' menurun dari 50 unit pada 2020 menjadi 26 unit pada 2023, mengindikasikan pergeseran ke status yang lebih tinggi. Yang paling menonjol adalah keberhasilan Kabupaten Lombok Tengah dalam menghilangkan status 'tertinggal' dan 'sangat tertinggal' sejak tahun 2019, yang konsisten hingga 2023. Perlu dicatat bahwa total jumlah desa mengalami pemekaran pada tahun 2023, meningkat dari 127 menjadi 142 desa, yang mempengaruhi persentase namun tidak mengurangi capaian positif dalam peningkatan status desa secara keseluruhan.

Capaian "nihil desa tertinggal" bukan berarti pembangunan berhenti. Contoh desa seperti Darmaji dan Keru yang berstatus Maju namun menargetkan Mandiri menunjukkan adanya dorongan internal dan eksternal untuk terus meningkatkan kualitas. Hal ini menandakan adanya dinamika positif dan aspirasi berkelanjutan untuk mencapai kemandirian penuh, yang memerlukan dukungan dan intervensi yang tepat sasaran dari pemerintah daerah. Penting juga untuk dicatat bahwa pada tahun 2022, 15 desa mengalami pemekaran, sehingga jumlah desa/kelurahan di Lombok Tengah menjadi 154 dan pekearan serupa juga terjadi di tahun 2024. Perubahan jumlah desa ini perlu diperhitungkan saat menganalisis persentase desa mandiri, karena dapat memengaruhi perbandingan data antar tahun.

5. **Indeks Desa**

Terjadi perkembangan signifikan dalam kerangka pengukuran status desa dengan diperkenalkannya Indeks Desa (ID) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan ini membawa beberapa modifikasi penting dari konsep Indeks Desa Membangun (IDM) sebelumnya:

- **Penyederhanaan Nama**: Nama "Indeks Desa Membangun" disederhanakan menjadi "Indeks Desa" untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman.
- **Perubahan Dimensi**: Indeks Desa kini memiliki enam dimensi utama, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Ini berbeda dengan IDM yang hanya memiliki tiga pilar utama (Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan).
- **Penambahan Indikator**: Setiap dimensi dalam Indeks Desa memiliki indikator-indikator spesifik yang lebih terukur dan terperinci untuk mengukur kemajuan desa.
- **Perubahan Metode Pengumpulan Data**: Metode pengumpulan data kini melibatkan proses yang lebih ketat dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Tujuan dari kedua indeks ini, baik IDM maupun Indeks Desa 2025, adalah untuk mengukur pembangunan desa. Namun, IDM lebih berfokus pada capaian pembangunan dan kemandirian desa, sedangkan Indeks Desa 2025 lebih menitikberatkan pada ketahanan desa dan dirancang untuk pengawasan berkelanjutan berbasis data. Indeks Desa 2025 dianggap lebih terintegrasi, memiliki cakupan yang lebih luas, dan lebih selaras dengan sistem pemerintahan digital serta kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Perubahan dimensi dan indikator dari IDM ke Indeks Desa (ID) berarti perbandingan langsung antara data sebelum 2025 (IDM) dan setelah 2025 (ID) akan menjadi lebih kompleks. Jika suatu desa diukur dengan IDM hingga 2024 dan kemudian dengan ID mulai 2025, skor dan statusnya mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung karena basis perhitungannya telah berubah. Hal ini menuntut kehati-hatian dalam analisis tren jangka panjang dan mungkin memerlukan penyesuaian atau penjelasan metodologis saat membandingkan data lintas periode, menekankan bahwa Indeks Desa 2025 adalah penyempurnaan yang bertujuan untuk

pengukuran yang lebih komprehensif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

6. **Rasio Konektivitas**

Rasio Konektivitas dalam bagian ini adalah Rasio Konektivitas Angkutan Jalan dan Penyeberangan, dimana rasio ini merupakan ukuran seberapa baik sistem transportasi di suatu wilayah (dalam hal trayek angkutan jalan dan/atau penyeberangan) dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam skala 0–100, di mana 0 berarti tidak ada konektivitas sama sekali, dan 100 berarti konektivitas maksimal, artinya semua kebutuhan transportasi terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, nilai Rasio Konektivitas Kabupaten adalah **47** pada tahun 2024. Nilai 47 ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas layanan transportasi di Kabupaten Lombok Tengah mencakup 47% dari potensi maksimal. Ini berarti sekitar setengah dari kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah ini telah terpenuhi, sedangkan sisanya belum optimal.

Data historis Rasio Konektivitas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- **2020**: 50
- **2021**: 50
- **2022**: 50
- **2023**: 50
- **2024**: 47

Data rasio konektivitas angkutan jalan dan penyeberangan menunjukkan stabilitas yang konsisten pada angka 50 poin dari tahun 2020 hingga 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa selama empat tahun tersebut, sekitar setengah dari kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah telah terpenuhi secara optimal. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan rasio konektivitas menjadi 47 poin. Penurunan ini, meskipun tidak drastis, mengisyaratkan adanya tantangan baru atau perubahan kondisi yang menyebabkan sedikit penurunan dalam pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan jumlah trayek yang dilayani, peningkatan kebutuhan trayek yang tidak diimbangi dengan penambahan layanan, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi efisiensi sistem transportasi. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk evaluasi lebih lanjut guna mengidentifikasi penyebabnya dan merumuskan strategi untuk mengembalikan atau meningkatkan kembali tingkat konektivitas.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Lombok Tengah, stabilitas ekonomi makro diwujudkan melalui kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal, menahan gejolak nilai tukar dan inflasi, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan. Dalam penentuan kebijakan, capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB, tingkat inflasi, dan indikator makroekonomi lain yang relevan dijadikan tolok ukur utama untuk memastikan arah kebijakan selaras dengan visi dan misi pemerintahan.

1. **Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB**

Realisasi pajak daerah menunjukkan tren peningkatan nominal dari tahun ke tahun, meskipun dihadapkan pada tantangan besar, terutama pada pajak hiburan akibat pandemi dan perubahan

regulasi nasional. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan peningkatan bertahap dari 0,48% pada tahun 2020 menjadi 1,34% pada tahun 2024, mengindikasikan peningkatan kapasitas pemungutan pajak relatif terhadap ukuran ekonomi daerah. Namun, fluktuasi rasio ini juga mencerminkan tantangan dalam optimalisasi penerimaan, seperti isu transparansi dengan entitas besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan dampak kebijakan fiskal pusat. Peningkatan rasio pajak daerah sangat krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kapasitas belanja pembangunan, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Rekomendasi strategis meliputi peningkatan efisiensi pemungutan, diversifikasi basis pajak, penyelesaian isu transparansi dengan KEK Mandalika, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Tabel 2.73 Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan PDRB (%)
2020	11.571,00	-6.68%
2021	12.037,48	4.03%
2022	12.464,40	3.55%
2023	13.183,34	5.77%
2024	13.624,03	3.34%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

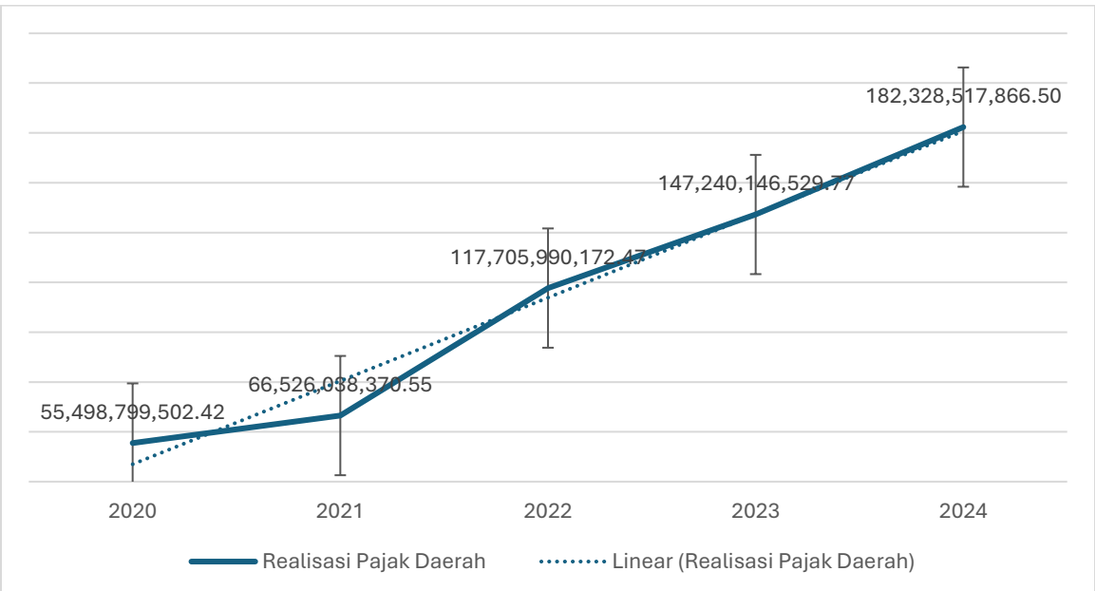

Gambar 2.7 Tren Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025 (data diolah)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai Rp 235 miliar, dari target Rp 324 miliar, atau sekitar 72,9% dari target. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi PAD tahun 2021 yang sebesar Rp 154 miliar. Untuk tahun 2023, target PAD ditetapkan sama dengan tahun 2022, yaitu Rp 324 miliar, dengan rincian target pajak daerah sebesar Rp 200 miliar. Hal ini menunjukkan ambisi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan dari pajak.

Tabel 2.74 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	PDRB Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Rasio Pajak Daerah/PDRB (%)
2020	55.498.799.502,42	11.571,00	0,48%
2021	66.526.038.370,55	12.037,48	0,55%
2022	117.705.990.172,47	12.464,40	0,94%
2023	147.240.146.529,77	13.183,34	1,12%
2024	182.328.517.866,50	13.624,03	1,34%

Sumber: Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

Tren rasio menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 0,48% pada tahun 2020 menjadi 1,34% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengumpulkan pendapatan pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan yang paling signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, di mana rasio hampir dua kali lipat dari 0,55% menjadi 0,94%. Ini mungkin mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan upaya intensif dalam pemungutan pajak.

Meskipun PDRB Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pertumbuhan positif sejak tahun 2021, rasio pajak daerah juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya respons positif antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas pemungutan pajak daerah. Namun, jika rasio pajak daerah tidak tumbuh seiring dengan pertumbuhan PDRB yang kuat, hal ini dapat mengindikasikan adanya "celah pajak" atau basis pajak yang kurang elastis. Hal ini bisa disebabkan oleh dominasi sektor-sektor yang sulit dipajaki, seperti pertanian yang meskipun memberikan kontribusi PDRB terbesar, seringkali memiliki tarif pajak yang rendah atau banyak pengecualian. Selain itu, masalah administrasi atau kepatuhan juga dapat menjadi faktor. Rasio pajak yang stagnan di tengah pertumbuhan PDRB berarti pemerintah daerah tidak sepenuhnya menangkap potensi pendapatan dari ekspansi ekonomi, yang dapat menghambat kemampuan fiskal daerah.

2. **Tingkat Inflasi**

Analisis laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini mengacu pada data inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya melakukan perhitungan inflasi di dua kota tersebut di NTB. Pemilihan kedua kota ini sebagai proksi didasarkan pada posisi Mataram sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta Bima sebagai pusat perkotaan penting lainnya di NTB.

Meskipun penggunaan proksi ini bersifat praktis dan diperlukan, penting untuk memahami implikasi serta keterbatasannya. Pertama, terdapat potensi perbedaan dalam struktur ekonomi dan pola konsumsi antara Kabupaten Lombok Tengah yang lebih bersifat pedesaan atau peri-urban dengan Mataram dan Bima yang lebih urban. Misalnya, ketergantungan Lombok Tengah pada komoditas pertanian tertentu atau dampak langsung dari kegiatan pariwisata di Mandalika mungkin memiliki bobot yang berbeda dalam keranjang konsumsi dibandingkan dengan kota-kota proksi.

Kedua, meskipun ada korelasi yang kuat antara inflasi di Mataram dengan aktivitas kepariwisataan (sebesar 0,848), di mana kepariwisataan memiliki pengaruh signifikan sebesar 71,8% terhadap inflasi di Kota Mataram , dinamika ini mungkin tidak sepenuhnya merefleksikan seluruh aspek inflasi di Lombok Tengah. Sementara itu, Kota Bima mungkin memiliki pendorong inflasi yang berbeda, seperti biaya pendidikan yang menyumbang 22,05% terhadap inflasi di Kota Bima pada Juni 2025. Variabilitas kontribusi masing-masing kota terhadap inflasi gabungan, seperti Mataram yang memiliki inflasi tahunan tertinggi di NTB pada Maret 2024 (4,20%) sementara Bima terendah (3,10%) , dan kemudian Kota Bima memiliki inflasi tahunan tertinggi di NTB pada Desember 2024 (2,33%) , menunjukkan bahwa dinamika inflasi lokal bisa sangat spesifik.

Ketergantungan pada data proksi ini memperkenalkan tingkat ketidaktepatan dan dapat mengaburkan dinamika inflasi yang lebih granular dan terlokalisasi di Lombok Tengah. Oleh karena itu, interpretasi data harus dilakukan dengan hati-hati, mengakui bahwa angka-angka ini memberikan gambaran umum tren inflasi di tingkat provinsi yang kemudian diterapkan pada Lombok Tengah, bukan cerminan langsung dari tekanan harga di setiap sudut kabupaten. Keterbatasan ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas pengumpulan data inflasi yang lebih spesifik untuk Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

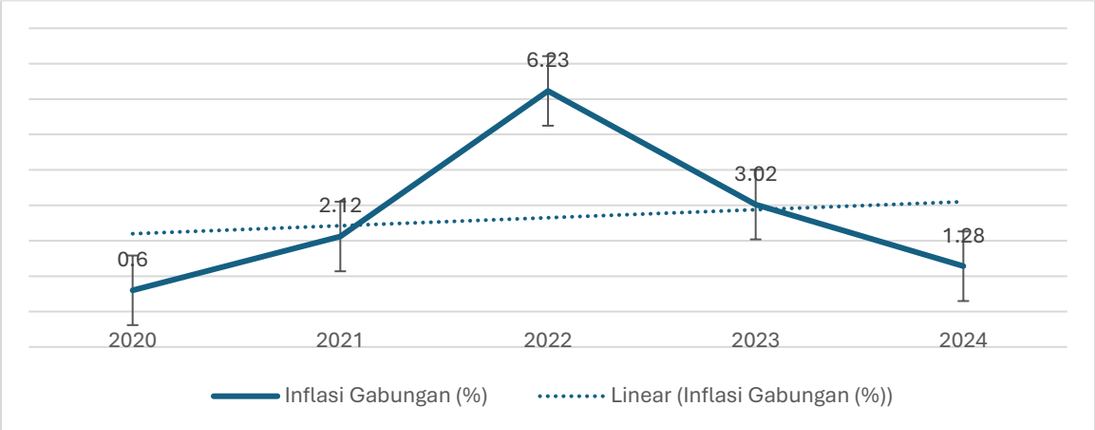

Gambar 2.8 Tren Inflasi Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Analisis laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2020-2024, yang menggunakan proksi inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima, mengungkapkan dinamika yang kompleks namun menunjukkan keberhasilan dalam mencapai stabilitas harga yang signifikan pada akhir periode. Trajektori inflasi yang membentuk pola "V-shaped" (dari titik terendah akibat pandemi pada 2020 (0,6%), lonjakan tajam ke puncak 6,23% pada 2022, dan kemudian penurunan drastis hingga 1,28% pada 2024) mencerminkan respons ekonomi terhadap serangkaian guncangan global dan domestik.

Puncak inflasi pada tahun 2022 didiagnosis sebagai fenomena dorongan biaya (cost-push) yang dominan, dipicu oleh lonjakan harga komoditas global (energi dan pangan) akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, diperparah oleh penyesuaian kebijakan PPN domestik. Namun, keberhasilan disinflasi yang cepat pada tahun 2023-2024, yang membawa inflasi ke level terendah dalam satu dekade terakhir di NTB (tidak termasuk periode pandemi), adalah bukti nyata efektivitas koordinasi kebijakan makroekonomi yang proaktif antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Intervensi kebijakan seperti subsidi energi, stabilisasi nilai tukar, dan manajemen pasokan pangan melalui GNPIP, terbukti krusial dalam meredam tekanan harga.

Meskipun demikian, inflasi di NTB dan Lombok Tengah tetap memiliki kerentanan struktural terhadap faktor musiman pada harga pangan bergejolak dan dampak dari acara pariwisata besar seperti MotoGP, yang dapat memicu tekanan tarikan permintaan (demand-pull) di sektor-sektor tertentu. Komponen inflasi non-pangan seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta emas perhiasan, juga menunjukkan kontribusi yang signifikan, mengindikasikan bahwa tekanan harga bersifat multifaset.

Dalam kaitannya dengan stabilitas ekonomi makro daerah, pengendalian inflasi yang berhasil pada tahun 2024 telah memberikan fondasi yang kuat. Daya beli masyarakat cenderung pulih, dan iklim investasi menjadi lebih kondusif. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi NTB yang positif pada Triwulan III 2024 dan penurunan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 2,73% pada Agustus 2024. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di NTB (12,91% pada Maret 2024) dan fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor pertambangan, menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro adalah tujuan multidimensional yang memerlukan strategi komprehensif. Peningkatan IPM di seluruh dimensi juga menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia meskipun ada fluktuasi inflasi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Tengah, melalui proksi inflasi NTB, telah menunjukkan kapasitas yang kuat dalam mengelola inflasi dan menjaga stabilitas harga. Namun, untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan perhatian berkelanjutan terhadap diversifikasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan manajemen dampak inflasi dari sektor pariwisata yang berkembang pesat.

3. **Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**

Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran standar kedalaman keuangan, yang mencerminkan ukuran liabilitas sektor perbankan relatif terhadap total output ekonomi. Rasio yang lebih tinggi umumnya menunjukkan sistem keuangan yang lebih berkembang dan mampu memobilisasi tabungan.

Tabel 2.75 Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	DPK (Miliar Rupiah)	PDRB Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Rasio DPK/PDRB (%)
2020	Data Tidak Tersedia (DTT)	16.666,62	Tidak Dapat Dihitung Secara Langsung
2021	Data Tidak Tersedia (DTT)	17.686,60	Tidak Dapat Dihitung Secara Langsung
2022	1.625,71	19.243,33	8,45%
2023	1.627,81 (Desember)	21.250,62	7,66%
2024 (Januari)	1.714,29 (Januari)	22.604,87	7,58%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Berbagai sumber, 2025 (data diolah)

Meskipun data DPK spesifik Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2020-2021 tidak tersedia secara langsung, informasi kontekstual dari tingkat provinsi dan nasional mengindikasikan ketahanan sektor perbankan. Laporan perbankan syariah nasional menunjukkan pertumbuhan DPK positif pada Desember 2020, dan kinerja Bank NTB Syariah pada tahun 2021 juga mencatat pertumbuhan DPK di atas rata-rata nasional. Namun, terdapat pula indikasi penurunan DPK secara umum pada pertengahan 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, sebelum kemudian pulih dan meningkat kembali menjelang akhir 2021 dan awal 2022. Oleh karena itu, analisis rasio DPK/PDRB untuk periode ini lebih bersifat kualitatif dan inferensial, berdasarkan tren yang lebih luas dan data PDRB yang tersedia.

Sejak tahun 2022, DPK di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang jelas dan signifikan. Peningkatan dari Rp 1.625,71 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 1.714,29 miliar pada Januari 2024 mengindikasikan peningkatan tabungan masyarakat dan likuiditas dalam sistem perbankan. Pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 17,97% pada Januari 2024 dibandingkan Januari 2023 sangat menonjol, menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap sektor perbankan dan/atau peningkatan substansial dalam pendapatan disposabel serta aktivitas ekonomi di Lombok Tengah. Meskipun terdapat fluktuasi intra-tahun, seperti penurunan dari Rp 1.625,71 miliar (2022) menjadi Rp 1.453,13 miliar (Januari 2023) sebelum kembali melonjak ke Rp 1.627,81 miliar (Desember 2023) dan terus meningkat menjadi Rp 1.714,29 miliar (Januari 2024), hal ini kemungkinan mencerminkan pergerakan likuiditas musiman, seperti pengeluaran liburan, siklus investasi, atau peristiwa lokal tertentu.Dalam perbandingan dengan kabupaten lain di NTB (Image 5), DPK Lombok Tengah sebesar Rp 1.714,29 miliar pada Januari 2024 menempatkannya di antara kontributor DPK yang cukup besar, meskipun masih di bawah Kota Mataram (Rp 32.262,56 miliar) dan Lombok Timur (Rp 2.650,35 miliar). Tingkat pertumbuhan YoY sebesar 17,97% juga sangat kuat, hanya dilampaui oleh Lombok Utara (25,87%) dan Lombok Timur (19,93%), menunjukkan lingkungan perbankan yang dinamis di Lombok Tengah. Meskipun Kota Mataram, sebagai ibu kota provinsi, secara alami mendominasi DPK, volume DPK yang substansial dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Lombok Tengah menegaskan posisinya sebagai pemain ekonomi penting di NTB. Basis DPK yang terus berkembang ini menyediakan fondasi krusial bagi intermediasi keuangan, memungkinkan bank untuk menyalurkan lebih banyak kredit untuk investasi dan konsumsi lokal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan PDRB. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini juga mengindikasikan peningkatan vitalitas ekonomi dan potensi kenaikan pendapatan rumah tangga, yang kemudian disalurkan ke dalam tabungan. Ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Lombok Tengah kemungkinan besar memainkan peran yang semakin penting dalam memobilisasi tabungan lokal untuk pembangunan regional.

4. **Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten**

Data nilai transaksi saham merupakan indikator vital aktivitas pasar modal, mencerminkan partisipasi investor, likuiditas pasar, dan kepercayaan terhadap prospek ekonomi. Di tingkat regional, data ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat dan entitas bisnis lokal terlibat dalam pasar modal, serta potensi mobilisasi dana untuk pembangunan daerah. Namun, akses terhadap data transaksi saham yang granular hingga tingkat kabupaten seringkali menjadi tantangan signifikan di Indonesia, di mana data pasar modal umumnya diagregasi pada tingkat nasional atau provinsi.

Data transaksi saham di Indonesia secara umum diagregasi pada tingkat nasional dan provinsi oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Publikasi data resmi seringkali tidak mencapai tingkat granularitas kabupaten atau kota. Meskipun demikian, mekanisme pelaporan transaksi efek oleh Bursa Efek dan Partisipan (Anggota Bursa) kepada OJK diatur secara rinci. Setiap pihak yang melakukan transaksi efek wajib menyampaikan laporan atas setiap transaksi yang dilakukannya kepada OJK melalui Penyelenggara Laporan Transaksi Efek (PLTE). Pelaporan ini harus dilakukan seketika setelah transaksi terjadi atau paling lambat 30 menit setelahnya, menunjukkan bahwa data transaksi yang sangat granular sebenarnya ada di tingkat sistem internal regulator dan bursa.

Keterbatasan data publik pada tingkat kabupaten/kota ini mengindikasikan bahwa alasan di balik kurangnya informasi tersebut mungkin bukan karena ketiadaan data itu sendiri, melainkan karena kebijakan diseminasi data. Pertimbangan seperti kerahasiaan komersial, potensi kekhawatiran terkait interpretasi data yang terlalu spesifik yang dapat memicu spekulasi tidak sehat, atau fokus pada agregasi yang lebih luas untuk tujuan kebijakan makro, dapat menjadi faktor. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memungkinkan adanya informasi yang dikecualikan dari akses publik, meskipun tidak secara spesifik merujuk pada transaksi saham, namun memberikan dasar hukum untuk pembatasan akses data tertentu. Oleh karena itu, ketiadaan data nilai transaksi saham per kabupaten yang tersedia untuk umum merupakan tantangan signifikan dalam analisis ini.

Tabel 2.76 Data Transaksi Saham Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Desember 2023)

Kota /*City*	Beli/Buy			Jual/Sell			Total		
	Frekuensi/ Frequency	Volume (Juta/Million)	Nilai (RpM)	Frekuensi/ Frequency	Volume (Juta/Million)	Nilai (RpM)	Frekuensi/ Frequency	Vol (Juta/Million)	Nilai (RpM)
BIMA	182	0,46	0,43	297	0,45	0,40	479	0,91	0,82
BIMAKOTA	3.218	17,74	18,47	2.835	17,10	19,73	6.053	34,84	38,19
DOMPU	652	5,61	2,30	515	3,66	2,46	1.167	9,28	4,76
LOMBOKBARAT	8.615	76,69	39,01	7.884	71,96	39,59	16.499	148,65	78,60
LOMBOKTENGAH	4.976	36,13	15,94	5.104	31,27	16,06	10.080	67,40	32,00
LOMBOKTIMUR	9.564	39,05	12,64	4.898	35,95	10,88	14.462	74,99	23,52
LOMBOKUTARA	422	1,91	0,74	304	1,98	0,80	726	3,89	1,53
MATARAM	23.353	237,30	112,48	20.557	215,70	108,92	43.910	453,00	221,39
SUMBAWA	5.269	28,37	14,90	4.233	26,39	15,18	9.502	54,76	30,08
SUMBAWABARAT	1.317	7,26	3,95	1.197	4,87	3,64	2.514	12,14	7,59

Sumber: Ototritas Jasa Keuangan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas, terdapat informasi spesifik mengenai aktivitas transaksi saham untuk Kabupaten Lombok Tengah pada bulan Desember 2023. Data tersebut menunjukkan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pembelian (Beli): Rp 15,94 Miliar
- Nilai Penjualan (Jual): Rp 16,06 Miliar
- Total Nilai Transaksi: Rp 32,00 Miliar

Ini adalah satu-satunya titik data spesifik mengenai nilai transaksi saham untuk Kabupaten Lombok Tengah yang ditemukan dalam rentang waktu yang diminta (2020-2024), dan hanya mencakup satu bulan. Nilai transaksi sebesar Rp 32,00 Miliar dalam satu bulan menunjukkan adanya aktivitas pasar modal yang terukur di Lombok Tengah. Angka ini juga relatif signifikan bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat yang tercantum dalam sumber yang sama, menempatkan Lombok Tengah di posisi menengah ke atas dalam hal nilai transaksi di provinsi tersebut untuk bulan Desember 2023. Hal ini mengindikasikan adanya basis investor lokal atau regional yang aktif. Namun, karena data ini hanya mencakup satu bulan, tidak mungkin untuk mengekstrapolasinya menjadi rata-rata tahunan yang akurat atau untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dalam periode 2020-2024.

5. **Total Kredit/PDRB (Persen)**

Rasio kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi yang krusial, mencerminkan kedalaman finansial (financial deepening) dan peran intermediasi keuangan dalam aktivitas ekonomi suatu wilayah. Indikator ini sangat penting dalam menilai kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengidentifikasi potensi kerentanan atau akumulasi kredit yang berlebihan. Bank for International Settlements (BIS) menggunakan "credit-to-GDP gap" sebagai indikator peringatan dini untuk potensi krisis perbankan atau tekanan sistemik yang parah, yang didefinisikan sebagai selisih antara rasio kredit terhadap PDB dan tren jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi rasio ini memerlukan pemahaman yang bernuansa; peningkatan rasio, jika didukung oleh sektor-sektor produktif, mengindikasikan pendalaman keuangan yang sehat, sementara peningkatan yang terlalu cepat atau berlebihan tanpa pertumbuhan ekonomi riil yang sepadan dapat menandakan risiko gelembung atau leverage yang tidak berkelanjutan.

Tabel 2.77 Total Kredit Perbankan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Total Kredit (miliar rupiah)	Pertumbuhan (%) (YoY)	Catatan
2020	N/A	-	Kredit UMKM: 1.740
2021	2.800	-	Per Oktober 2021
2022	3.313	18,32%	Akhir tahun
2023	3.749	13,16%	Desember 2023
2024	3.753	0,11%	Januari 2024

Sumber: Ototritas Jasa Keuangan, Berbagai Sumber, 2025 (data diolah)

Data menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit perbankan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, total kredit perbankan di Lombok Tengah mencapai Rp2,8 triliun per Oktober. Angka ini kemudian meningkat tajam menjadi Rp3,313 triliun pada akhir tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan sebesar 18,32% dari estimasi tahun sebelumnya. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2023, mencapai Rp3,749 triliun pada Desember, dengan pertumbuhan 13,16%. Namun, data awal tahun 2024 menunjukkan perlambatan yang signifikan, dengan total kredit sebesar Rp3,753 triliun pada Januari 2024, hanya tumbuh 0,11% dibandingkan Desember 2023. Perlambatan ini bisa jadi merupakan efek musiman atau indikasi awal dari kondisi pengetatan kredit atau pelonggaran permintaan.

Meskipun data total kredit untuk tahun 2020 tidak tersedia, informasi mengenai kredit UMKM sebesar Rp1,74 triliun pada tahun tersebut memberikan gambaran parsial tentang lanskap kredit selama tahun-tahun awal pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam periode yang penuh tantangan, volume kredit yang signifikan diarahkan ke usaha kecil dan menengah, mungkin sebagai refleksi dari program dukungan pemerintah atau ketahanan sektor UMKM itu sendiri.

Pertumbuhan kredit yang cepat dari tahun 2021 hingga 2023, setelah tahun awal pandemi, menunjukkan permintaan pembiayaan yang kuat, didorong oleh pemulihan ekonomi dan investasi. Perlambatan yang terlihat pada awal tahun 2024 memerlukan pemantauan lebih lanjut. Ini bisa menjadi fluktuasi sementara atau sinyal awal dari pengetatan kondisi pinjaman

atau pelonggaran permintaan, yang akan berdampak pada pertumbuhan PDRB di masa depan. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan kredit di Lombok Tengah (14,12% YoY untuk Januari 2024) cukup kuat dan sebanding dengan rata-rata provinsi NTB (17,30% YoY), menunjukkan bahwa tren ini merupakan bagian dari ekspansi kredit regional yang lebih luas.

Tabel 2.78 Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	PDRB (miliar rupiah)	Total Kredit (miliar rupiah)	Rasio Kredit/PDRB (%)	Catatan
2020	16.666,62	N/A	N/A	Kredit UMKM: 1.740 (10,44% dari PDRB)
2021	17.686,00	2.800	15,83%	Kredit per Oktober 2021
2022	19.243,33	3.313	17,22%	Kredit akhir tahun [Gambar 2]
2023	21.250,62	3.749	17,64%	Kredit Desember 2023 [Gambar 2]
2024	22.604,87	3.753	16,60%	Kredit Januari 2024 [Gambar 2]

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Berbagai sumber, 2025 (data diolah)

Rasio Kredit/PDRB di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 15,83% pada tahun 2021 menjadi 17,64% pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit sejalan atau bahkan melampaui pertumbuhan PDRB selama periode tersebut. Meskipun ada proyeksi sedikit penurunan menjadi 16,60% pada tahun 2024, hal ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data kredit awal tahun dibandingkan proyeksi PDRB setahun penuh, atau mencerminkan dinamika penyaluran kredit yang berubah.

Perbandingan dengan tingkat nasional dan negara maju menunjukkan bahwa rasio Kredit/PDRB Lombok Tengah yang berada di kisaran 15-17% jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Indonesia (sekitar 40%) atau negara maju (seringkali di atas 100%). Perbedaan signifikan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Lombok Tengah masih berada dalam fase pendalaman finansial yang besar, dengan potensi ekspansi kredit yang substansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan kekhawatiran stabilitas makro-finansial terkait utang berlebihan. Namun, pemantauan berkelanjutan tetap penting untuk memastikan pertumbuhan kredit selaras dengan kapasitas penyerapan ekonomi riil.

Secara keseluruhan, analisis rasio Kredit/PDRB dari tahun 2020 hingga 2024 menyoroti ketahanan PDRB Lombok Tengah yang luar biasa selama pandemi dan pertumbuhan yang kuat, didorong oleh pengembangan Mandalika serta kontribusi sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Ekspansi kredit perbankan yang signifikan dari 2021-2023, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sehat, telah mendorong pendalaman finansial berkelanjutan. Rasio Kredit/PDRB saat ini menunjukkan konteks makro-finansial yang sehat tanpa indikasi kredit berlebihan atau risiko sistemik mendesak, didukung oleh sektor perbankan NTB yang kuat. Proyek Mandalika sendiri telah menjadi katalis ganda, mendorong baik pertumbuhan PDRB maupun permintaan kredit, menciptakan umpan balik positif bagi pembangunan ekonomi regional.

6. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif, bertujuan memperkuat pemantauan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.

Tabel 2.79 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten/Kota di NTB

Kabupaten/Kota	IKAD - 2022	IKAD - 2023	IKAD - 2024
Kab. Lombok Barat	3,00	3,28	3,22
Kab. Lombok Tengah	2,74	3,14	3,23
Kab. Lombok Timur	2,97	3,24	3,41
Kab. Sumbawa	3,79	4,10	4,39

Kab. Dompu	4,27	4,09	4,09
Kab. Bima	3,61	3,75	3,85
Kab. Sumbawa Barat	3,74	3,50	3,14
Kab. Lombok Utara	2,27	2,44	2,59
Kota Mataram	6,53	6,16	5,48
Kota Bima	5,21	4,36	3,51

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Kabupaten Lombok Tengah, data IKAD tahun 2022-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif, 2,74 pada tahun 2022 menjadi 3,23 pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan yang stabil dalam akses keuangan di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB, Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata beberapa wilayah yang lebih maju secara ekonomi atau perkotaan seperti Kota Mataram (meskipun mengalami penurunan dari 6,53 menjadi 5,48), Kota Bima (juga menurun dari 5,21 menjadi 3,51), Kabupaten Sumbawa (meningkat dari 3,79 menjadi 4,39), Dompu (relatif stabil di sekitar 4,09), dan Bima (meningkat dari 3,61 menjadi 3,85).

Namun, tren peningkatan IKAD Lombok Tengah yang konsisten ini sangat signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan mulai membuahkan hasil. Kenaikan IKAD ini sejalan dengan berbagai program inklusi keuangan yang telah dan sedang dijalankan di daerah tersebut, seperti penyaluran KUR/UMi dan inisiatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan formal. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa fondasi akses keuangan di Lombok Tengah semakin kuat, meskipun masih ada ruang untuk terus meningkatkan posisi relatifnya di antara kabupaten/kota lain di NTB.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Bagian ini akan menguraikan kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya terkait dengan implementasi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Pembahasan akan berfokus pada pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, yang didukung oleh pertukaran informasi yang terbuka dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Analisis ini akan diperkuat dengan menggunakan berbagai indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional, serta indikator-indikator relevan lainnya yang sesuai dengan konteks daerah.

1. **Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)**

Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah instrumen strategis yang dirancang untuk mengukur kematangan dan keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi tata kelola, dan transparansi. Pemdi mengukur berbagai aspek, termasuk kebijakan digital, infrastruktur TIK, layanan digital yang berorientasi pada masyarakat, pemanfaatan data, dan keamanan siber. Dalam konteks ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berperan sebagai fondasi utama. SPBE merupakan kerangka kerja yang mencakup tata kelola, manajemen, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan siber yang esensial untuk menjalankan pemerintahan secara elektronik.

Indeks Pemdi dapat dipandang sebagai evolusi dari Indeks SPBE yang memberikan standar pengukuran lebih holistik. Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang dalam proses penguatan SPBE menuju Pemerintahan Digital yang lebih matang. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar penerapan teknologi menjadi pencapaian hasil konkret, seperti layanan yang terpadu dan berorientasi pada

kebutuhan pengguna. Peningkatan indeks SPBE secara langsung mencerminkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien, sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia.

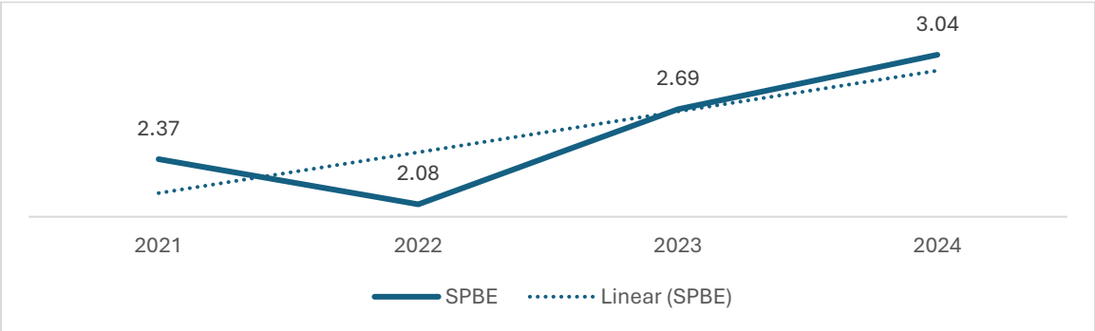

Gambar 2.9 Tren Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Grafik di atas menunjukkan tren yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Setelah mengalami penurunan sementara pada tahun 2022 (dari 2,37 menjadi 2,08), Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kebangkitan yang impresif. Indeks SPBE melonjak menjadi 2,69 pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya di 3,04 pada tahun 2024. Angka ini tidak hanya menunjukkan pemulihan, tetapi juga melampaui target Indeks SPBE Nasional tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 2,85. Progres ini menyiratkan adanya pergeseran strategis dari inisiatif digital yang bersifat ad-hoc dan terisolasi menuju pendekatan yang lebih sistematis, terstandardisasi, dan terintegrasi. Pergerakan melalui tingkat kematangan ini merupakan lompatan signifikan yang menunjukkan kematangan kapabilitas tata kelola digital di Kabupaten Lombok Tengah.

Pencapaian Indeks SPBE yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, tidak hanya mencerminkan kematangan kapabilitas digital, tetapi juga mengindikasikan implementasi Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Tata kelola yang berintegritas memastikan bahwa setiap inisiatif digital didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan akuntabilitas. Sementara itu, sifat adaptif dari tata kelola ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat, seperti yang terlihat dari kemampuan mereka untuk bangkit kembali setelah penurunan indeks pada tahun 2022.

Meskipun kapabilitas digital pemerintah daerah semakin matang, keberhasilan transformasi digital secara keseluruhan sangat bergantung pada keselarasan antara Indeks SPBE dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Transformasi ini memerlukan upaya simultan dari sisi penawaran (pemerintah) dan permintaan (masyarakat) untuk menciptakan ekosistem digital yang holistik. Dengan demikian, regulasi dan tata kelola yang adaptif dan berintegritas tidak hanya harus fokus pada pembangunan sistem internal pemerintah, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

2. **Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen vital yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur dan mendorong kemajuan reformasi hukum di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menata ulang, dan memperkuat sistem regulasi nasional, serta mendorong re-regulasi dan deregulasi aturan yang ada. IRH merupakan bagian integral dari agenda Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih luas, berfungsi sebagai indikator kunci untuk mencapai "birokrasi yang bersih dan akuntabel" serta "penataan regulasi yang berkualitas". Indeks ini menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola hukum dan efisiensi layanan publik.

Penilaian IRH umumnya mencakup empat variabel inti yang memberikan gambaran holistik tentang kemajuan reformasi hukum, mulai dari koordinasi kebijakan hingga pengembangan sumber daya manusia dan manajemen informasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan melakukan penilaian ini, khususnya dalam meninjau berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah.

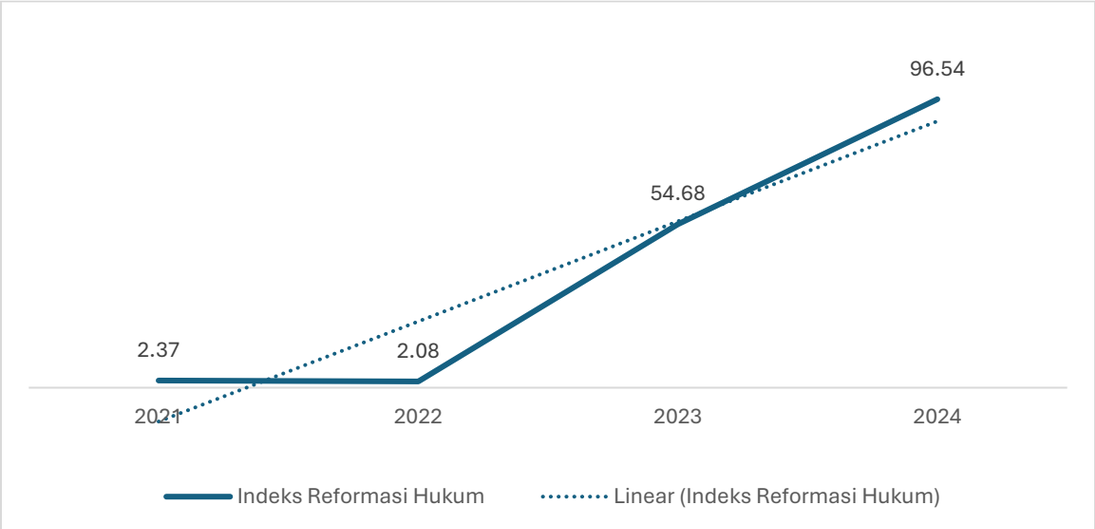

Gambar 2.10 Tren Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2025

Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dan cepat dalam kinerja Indeks Reformasi Hukumnya dari tahun 2021 hingga 2024, yang berpuncak pada nilai yang sangat tinggi. "Lonjakan" dramatis awal yang diamati antara tahun 2022 dan 2023 paling baik dipahami sebagai titik transisi yang signifikan, di mana pemerintah daerah secara efektif beradaptasi dan mulai berkinerja secara kuat di bawah kerangka penilaian yang lebih terstruktur dan komprehensif yang diperkenalkan oleh Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022. Kenaikan berkelanjutan selanjutnya ke nilai yang mendekati sempurna pada tahun 2024 lebih lanjut mencerminkan komitmen berkelanjutan, perbaikan nyata dalam inisiatif reformasi hukum, dan adaptasi strategis terhadap pergeseran halus dalam bobot variabel dan penekanan yang diperkenalkan atau diperkuat oleh Permenkumham Nomor 23 Tahun 2024 yang lebih baru.

Meskipun perubahan metodologis tidak dapat disangkal memainkan peran dalam nilai numerik IRH, kinerja tinggi yang konsisten yang dicapai oleh Kabupaten Lombok Tengah dalam beberapa tahun terakhir sangat menunjukkan komitmen kelembagaan yang kuat terhadap reformasi hukum dan birokrasi. Komitmen ini berkontribusi secara signifikan terhadap agenda nasional yang lebih luas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depannya, transparansi yang berkelanjutan dari Kemenkumham mengenai pembaruan metodologis dan fokus berkelanjutan oleh pemerintah daerah seperti Lombok Tengah pada dampak nyata dari reformasi mereka akan semakin meningkatkan kegunaan dan interpretasi IRH sebagai metrik kinerja yang vital untuk reformasi hukum di Indonesia.

3. **Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran kuantitatif yang diperoleh dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP berfungsi sebagai indikator krusial yang mencerminkan efisiensi, kualitas, dan responsivitas layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nilai indeks ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana layanan pemerintah memenuhi standar yang ditetapkan dan harapan masyarakat, menjadikannya alat penting untuk evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan perbaikan.

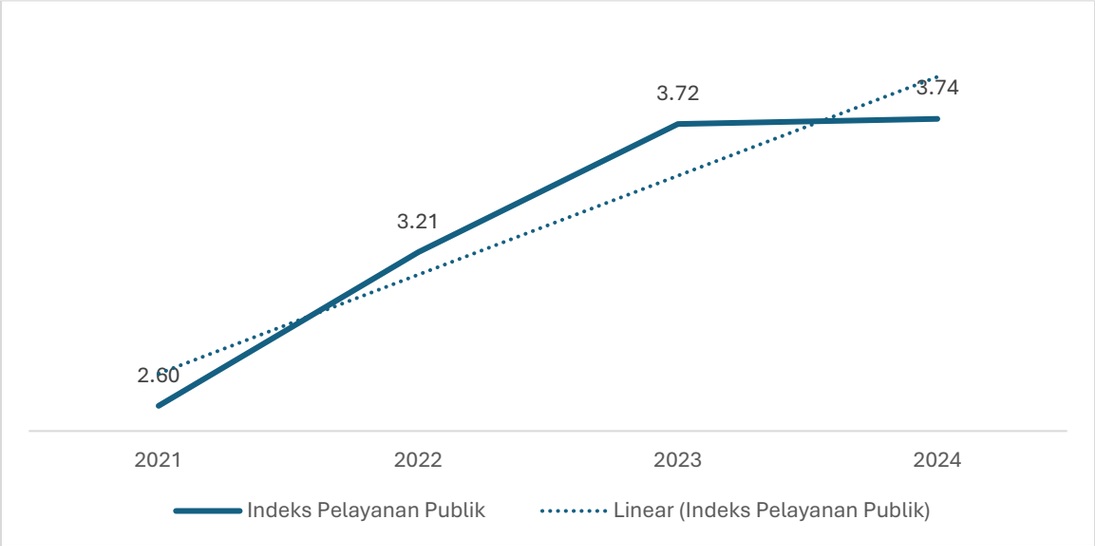

Gambar 2.11 Tren Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi., 2025

Analisis deskriptif terhadap data IPP Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif sepanjang periode 2021 hingga 2024. Indeks ini secara bertahap meningkat dari 2.610 pada tahun 2021 menjadi 3.740 pada tahun 2024.

Pola pertumbuhan IPP menunjukkan dinamika yang menarik. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 0,6 poin dari tahun 2021 (2,61) ke tahun 2022 (3,21), menandai lonjakan absolut tahunan terbesar dalam periode ini. Peningkatan ini diikuti oleh pertumbuhan yang kuat sebesar 0,51 poin dari tahun 2022 (3,21) ke tahun 2023 (3,72). Namun, terdapat perlambatan yang mencolok, bahkan mendekati stagnasi, dalam pertumbuhan dari tahun 2023 (3,72) ke tahun 2024 (3,74), dengan peningkatan hanya sebesar 0,02 poin.

Pola pertumbuhan IPP yang khas ini, ditandai dengan akselerasi awal yang cepat (2021-2022), diikuti oleh pertumbuhan yang berkelanjutan namun sedikit melambat (2022-2023), dan kemudian perlambatan atau stagnasi yang signifikan (2023-2024), merupakan observasi penting. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi awal yang berdampak tinggi atau perbaikan fundamental kemungkinan besar telah menghasilkan keuntungan substansial di awal periode. Perlambatan berikutnya dapat mengindikasikan bahwa perbaikan signifikan lebih lanjut mungkin memerlukan reformasi sistemik yang lebih kompleks, bernuansa, atau lebih mendalam, karena "buah yang mudah dipetik" dari peningkatan mungkin telah ditangani.

4. **Survey Penilaian Integritas**

SPI merupakan survei elektronik tahunan yang menggunakan skala penilaian dari 1 hingga 100, di mana nilai yang semakin mendekati 100 mengindikasikan tingkat integritas yang semakin baik. Penilaian ini bersifat komprehensif, melibatkan perspektif dari tiga kelompok responden yang berbeda: pegawai pemerintahan (internal), masyarakat pengguna layanan (eksternal), dan responden ahli (eksper). Dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, hasil SPI tidak hanya mencerminkan persepsi internal yang mungkin bias, tetapi juga menangkap pengalaman nyata masyarakat saat berinteraksi dengan birokrasi serta penilaian objektif dari para ahli.

Penilaian yang dilakukan dalam SPI mencakup berbagai aspek penting, antara lain transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), intervensi eksternal atau trading in influence, pengelolaan anggaran, serta efektivitas sosialisasi antikorupsi. KPK mengklasifikasikan hasil skor SPI ke dalam tiga kategori untuk memudahkan pemetaan risiko: kategori Merah (Rentan) untuk rentang nilai 0-72,9; kategori Kuning (Waspada) untuk nilai 73-77,9; dan kategori Hijau (Terjaga) untuk nilai 78-100. Klasifikasi ini memberikan tolok ukur yang jelas mengenai posisi suatu instansi dalam spektrum risiko korupsi dan menjadi panduan strategis untuk menentukan

langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan skor yang signifikan, khususnya yang berhasil melampaui ambang batas kategori, bukan sekadar perubahan angka, melainkan indikasi perbaikan yang holistik dan berdampak nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

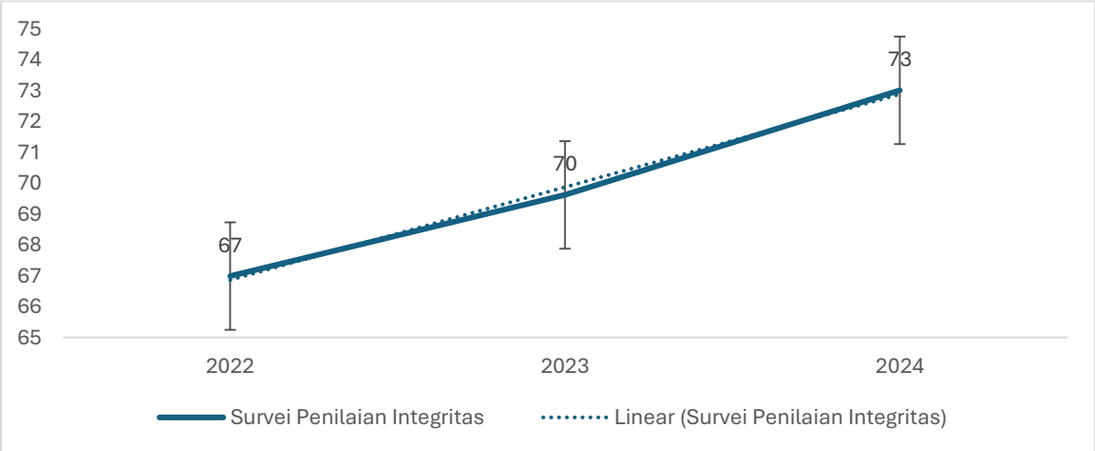

Gambar 2.12 Tren Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) selama periode tiga tahun. Data inti hasil survei adalah sebagai berikut: pada tahun 2022, skor yang diraih adalah 67; pada tahun 2023, skor meningkat menjadi 70; dan pada tahun 2024, skor kembali meningkat secara signifikan menjadi 73.

Peningkatan ini menunjukkan sebuah pola yang terstruktur, di mana terjadi kenaikan skor sebesar 3 poin setiap tahunnya. Kenaikan yang stabil dan konsisten ini mengindikasikan bahwa perbaikan integritas yang dilakukan bukanlah hasil dari upaya tunggal atau musiman, melainkan buah dari strategi jangka panjang dan implementasi program yang sistematis. Peningkatan yang gradual dan konsisten ini juga menyiratkan adanya keselarasan antara perbaikan yang dirasakan oleh internal birokrasi, pengalaman positif yang dialami oleh masyarakat, dan pandangan yang semakin membaik dari para responden ahli. Fenomena ini mustahil terjadi tanpa adanya fondasi kebijakan dan program yang kuat yang secara terus-menerus diterapkan dan dievaluasi.

Untuk menempatkan pencapaian Kabupaten Lombok Tengah dalam konteks yang lebih luas, penting untuk membandingkan skornya dengan rata-rata nasional untuk pemerintah kabupaten serta kategorisasi yang ditetapkan oleh KPK.

5. **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen pengukuran yang krusial untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan suatu daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2020, IPKD didefinisikan sebagai satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Penilaian IPKD dilakukan melalui enam dimensi utama, yaitu: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Kualitas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (5) Kondisi keuangan daerah; dan (6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kisah di balik angka-angka IPKD Kabupaten Lombok Tengah adalah narasi tentang transformasi yang berlandaskan pada komitmen dan implementasi kebijakan yang terukur. Pada tahun 2021, dengan nilai IPKD 60,2141, kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan sebagai "cukup baik" dan berada dalam posisi yang kompetitif, meskipun sedikit di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang lebih mendalam dan sistematis.

Tabel 2.80 Data IPKD dan Pertumbuhan Tahunan Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Nilai IPKD	Selisih Nilai Absolut	Persentase Pertumbuhan Tahunan
2021	60,2141	-	-
2022	65,2622	+5,0481	8,38%
2023	75,5984	+10,3362	15,84%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan nilai IPKD Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya konsisten, tetapi juga menunjukkan akselerasi yang signifikan. Laju pertumbuhan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 15,84% hampir dua kali lipat dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 8,38%. Fenomena akselerasi ini mengindikasikan bahwa inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah setelah tahun 2021 mulai memberikan dampak yang jauh lebih besar dan terukur di tahun-tahun berikutnya, bukan sekadar perbaikan kecil, tetapi bukti adanya perubahan sistemik.

Untuk menempatkan kinerja ini dalam perspektif yang lebih luas, perbandingan dengan tolok ukur nasional menjadi relevan. Menurut data yang tersedia, rata-rata nasional IPKD untuk kabupaten/kota pada tahun 2021 adalah 61,9804. Jika dibandingkan, nilai IPKD Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 (60,2141) sedikit berada di bawah rata-rata nasional. Namun, peningkatan drastis yang terjadi pada tahun 2022 (65,2622) dan puncaknya di tahun 2023 (75,5984) menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga secara signifikan melampaui tolok ukur nasional. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berpuas diri dengan kinerja awal dan secara proaktif mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki tata kelola keuangannya.

6. **Indeks Reformasi Birokrasi**

Tabel 2.81 Data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah 2020-2024

Tahun	IRB	Kategori
2020	51,77	CC
2021	50,73	CC
2022	55,77	CC
2023	70,28	BB
2024	77,28	BB

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025

Tabel 2.82 Perbandingan Metodologi Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Komponen Penilaian	Periode 2020-2022	Periode 2023-2024
Utama	Komponen Pengungkit (60%) & Komponen Hasil (40%)	RB General (100) & RB Tematik (20)
Fokus Penilaian	Pemenuhan aspek formal, tata kelola, dan perbaikan berkelanjutan	Implementasi dan hasil nyata dari program prioritas, termasuk penilaian "top up"
Indikator Tematik	Tidak ada	Ada, difokuskan pada isu prioritas pemerintah seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025 (data diolah)

Rentang nilai yang digunakan untuk menentukan kategori predikat juga perlu dipahami. Menurut pedoman penilaian, kategori predikat ditentukan sebagai berikut :

- **Predikat AA:** nilai >90 - 100 (Sangat Memuaskan)
- **Predikat A:** nilai >80 - 90 (Memuaskan)

- **Predikat BB:** nilai >70 - 80 (Sangat Baik)
- **Predikat B:** nilai >60 - 70 (Baik)
- **Predikat CC:** nilai >50 - 60 (Cukup/Memadai)
- **Predikat C:** nilai >30 - 50 (Kurang)
- **Predikat D:** nilai >0 - 30 (Sangat Kurang)

Dari data di atas, dapat diidentifikasi bahwa tahun 2020-2022 merupakan fase pembangunan fondasi reformasi birokrasi yang relatif stagnan. Nilai IRB Kabupaten Lombok Tengah pada periode ini menunjukkan nilai yang stabil di kisaran 50 hingga 60, dengan predikat yang konsisten di kategori CC. Kenaikan nilai dari 50,73 di tahun 2021 menjadi 55,77 di tahun 2022 mengindikasikan adanya perbaikan, tetapi belum mencapai level yang dramatis.

Tahun 2023 menandai titik balik yang sangat jelas dalam narasi reformasi birokrasi Kabupaten Lombok Tengah. Lompatan nilai IRB dari 55,77 di tahun 2022 menjadi 70,28 di tahun 2023 merupakan indikator keberhasilan yang luar biasa. Kenaikan 14,51 poin ini secara efektif memindahkan Kabupaten Lombok Tengah dari kategori "Cukup" ke kategori "Sangat Baik".

Peningkatan kinerja ini tidak berhenti di tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai IRB terus meningkat menjadi 77,28, yang semakin mengukuhkan posisi pemerintah daerah dalam kategori BB. Narasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu mencapai kategori BB, tetapi juga memiliki momentum untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkannya. Transisi dari fase pemenuhan formal ke fase implementasi yang berorientasi pada hasil nyata merupakan kisah keberhasilan strategis yang patut dianalisis lebih dalam. Peningkatan ini juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk beradaptasi secara efektif terhadap perubahan kebijakan nasional dan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata yang berdampak pada skor evaluasi.

Lonjakan skor ini bukan semata-mata hasil dari perbaikan internal, tetapi merupakan produk dari respons strategis yang adaptif terhadap perubahan metodologi penilaian nasional yang memperkenalkan komponen RB Tematik. Keberhasilan dalam program-program tematik yang berorientasi hasil, seperti yang dicontohkan oleh raihan Paritrana Award 2024, menjadi bukti nyata bahwa peningkatan skor IRB didukung oleh kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat. Prestasi ini juga didukung oleh fondasi tata kelola yang kuat, termasuk akuntabilitas keuangan yang solid, yang ditandai dengan perolehan WTP berturut-turut selama 13 kali.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Bagian ini menguraikan visi dan strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada tiga pilar utama: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial. Pembangunan di sektor ini diarahkan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan berkeadilan, menjamin keamanan serta ketertiban bagi seluruh masyarakat, dan memperkuat proses demokrasi agar lebih bermakna dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Upaya ini merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kemajuan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan senantiasa berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

1. **Persentase Penegakan Perda**

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu fungsi esensial dari pemerintahan daerah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendukung tercapainya visi pembangunan. Di Kabupaten Lombok Tengah, peran ini diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai wilayah yang berstatus kawasan pariwisata super

prioritas, Lombok Tengah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan unik dalam pelaksanaan tugas tersebut. Periode 2020-2024 menjadi rentang waktu yang krusial untuk dikaji, karena di dalamnya terdapat pengaruh dari pandemi COVID-19, pertumbuhan pesat di sektor pariwisata, serta dinamika sosial dan politik lokal yang menguji ketangguhan kerangka regulasi dan efektivitas birokrasi penegak hukum.

Analisis mendalam terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak seragam. Meskipun data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP tahun 2024 mencatat keberhasilan terukur, seperti persentase penurunan pelanggaran Perda sebesar 10,5%, pola yang terungkap dari data sepanjang periode ini lebih fluktuatif dan reaktif.

Tabel 2.83 Konsolidasi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Berdasarkan Jenis (2020-2023)

Jenis Perda/Perkada	2020	2021	2022	2023
Perda Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras	0	16	22	8
Perda 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	40	143	63	113
Instruksi Bupati Lombok Tengah Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Disiplin PNS/PTT dan Pelajar Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	0	14	11	18
Perda 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan	-	-	7	0
Perbup nomor 36 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	2	0
Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 12.b Tahun 2020	59	-	-	-
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12.b Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker	-	14	-	-
Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam I, II, dan III Tahun 2018/2019	0	-	-	-
Himbauan Bupati Lombok Tengah Tahun 2019	0	-	-	-

Sumber: Satu Data Lombk Tengah, 2025

Berdasarkan konsolidasi data pelanggaran dari tahun 2020 hingga 2023, dapat dilihat bahwa penegakan hukum cenderung bersifat responsif terhadap isu-isu spesifik. Pelanggaran terhadap Perda Ketertiban Umum (Perda 6/2012) selalu menjadi yang tertinggi, menunjukkan tantangan yang persisten, meskipun dengan fluktuasi signifikan seperti puncaknya di tahun 2021 (143 kasus), penurunan tajam di tahun 2022, dan peningkatan kembali di tahun 2023. Tren serupa terlihat pada penegakan Perda Minuman Keras, yang efektivitasnya tidak konsisten dengan variasi kasus yang tajam (dari 0 kasus di 2020 menjadi 22 kasus di 2022, lalu menurun drastis menjadi 8 kasus di 2023). Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya sering kali diprioritaskan untuk penanganan masalah yang paling mendesak, seperti penindakan masif terkait regulasi COVID-19 di tahun 2020 (59 kasus), daripada penerapan strategi yang konsisten.

Dinamika ini juga tercermin dari studi kasus yang menonjol. Keberhasilan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal, misalnya, didorong oleh sinergi kuat antara Satpol PP dan Bea Cukai Mataram, didukung oleh landasan hukum yang jelas dan pendanaan yang terarah. Model kolaborasi ini berfungsi sebagai studi kasus yang sukses dan dapat direplikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam menertibkan bangunan vila ilegal di kawasan pariwisata mencerminkan hambatan sistemik, seperti kelemahan koordinasi antar-OPD dan kurangnya keberanian politik untuk menindak tegas pelanggaran yang merugikan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, penegakan Perda di Lombok Tengah adalah perpaduan antara respons yang efektif terhadap isu-isu tertentu dan tantangan struktural yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2. **Indeks Kriminalitas**

Secara terminologi, "indeks kriminalitas" sering kali digunakan dalam percakapan publik atau media untuk merujuk pada metrik kualitatif yang mengukur persepsi keamanan atau skor

gabungan dari berbagai faktor, seperti yang sering dilakukan oleh lembaga riset global. Namun, dalam konteks statistik resmi pemerintah, istilah yang lebih spesifik dan terukur adalah "angka kriminalitas" atau *crime rate*.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator ini dihitung berdasarkan banyak kejadian per 100.000 penduduk. Definisi ini juga diperkuat oleh sumber lain yang menyatakan bahwa Angka Kriminalitas atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan, kemudian dikalikan 100.000. Angka ini memberikan estimasi risiko yang dihadapi oleh penduduk di suatu wilayah. Misalnya, angka kriminalitas 200 berarti dalam 100.000 penduduk, terdapat 200 penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan dalam satu tahun.

Tabel 2.84 Angka Kasus Kriminalitas Berdasarkan Jenis di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)

Jenis Kriminalitas	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	2	2	-	2
Penganiayaan Berat (Anirat)	163	82	54	-
Penganiayaan Ringan (Anira)	2	1	63	-
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	39	45	827	23
Perkosaan	6	1	4	2
Pencabulan	17	5	7	9
Penculikan	-	-	-	-
Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-	-	-
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	67	21	20	28
Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata	-	-	20	-
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	37	33	24	20
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	111	70	53	64
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	170	139	67	112
Pengrusakan/Penghancuran Barang	22	10	10	8
Pembakaran Dengan Sengaja	-	-	-	-
Penadahan	21	7	-	-
Narkotika Dan Psikotropika	52	37	29	46
Penipuan/Perbuatan Curang	40	16	20	40
Penggelapan	28	30	7	25
Korupsi	1	1	2	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	1	-	-
jumlah	778	501	1219	380

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat tren yang tidak konsisten dan sangat fluktuatif. Jumlah total kasus menurun dari 778 kasus di tahun 2020 menjadi 501 kasus di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam menjadi 1.219 kasus, yang sebagian besar disebabkan oleh angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melonjak drastis menjadi 827 kasus. Tren ini kembali menurun tajam di tahun 2023, dengan total 380 kasus.

Tabel 2.85 Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan (*Crime Total*) di Lombok Tengah dan NTB (2020-2023)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Lombok Tengah	946	597	403	547
Nusa Tenggara Barat	6.963	5.636	4.205	5.478

Sumber: Badan Pusat Statistik (Survei Statistik Politik dan Keamanan), 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat tren yang lebih konsisten. *Crime Total* di Lombok Tengah menurun tajam dari 946 kasus pada tahun 2020 menjadi 403 kasus pada tahun 2022. Tren ini kemudian berbalik arah, dengan jumlah kasus meningkat menjadi 547 pada tahun 2023. Pola yang sama juga terlihat di tingkat provinsi NTB, di mana jumlah kasus menurun dari 6.963 di tahun 2020 menjadi 4.205 di tahun 2022, sebelum naik kembali menjadi 5.478 kasus di tahun 2023.

Tabel 2.86 Perbandingan Jumlah Kasus yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

di Lombok Tengah dan NTB (2020-2023)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Lombok Tengah	619	503	325	233
Nusa Tenggara Barat	4.643	4.903	3.726	3.708

Sumber: Badan Pusat Statistik (Survei Statistik Politik dan Keamanan), 2025

Data *Crime Cleared* di Lombok Tengah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat 619 kasus yang diselesaikan, yang kemudian turun menjadi 503 di tahun 2021, 325 di tahun 2022, dan 233 di tahun 2023. Menariknya, tren penurunan ini berbanding terbalik dengan tren Crime Total di tahun 2023 di mana jumlah kasus kejahatan justru meningkat.

Rasio penyelesaian kasus (*Clearance Rate*) juga menjadi indikator penting. Meskipun data yang lengkap untuk perbandingan tahunan tidak tersedia, beberapa rilis pers memberikan gambaran. Pada tahun 2022, Polres Lombok Tengah melaporkan penyelesaian 322 kasus dari 376 laporan, dengan persentase penyelesaian sebesar 88%. Di tahun 2023, dilaporkan 373 kasus diselesaikan dari 440 kasus, yang menunjukkan tingkat penyelesaian sekitar 85%. Namun, perlu dicatat bahwa angka-angka ini berbeda dari data dalam tabel di atas, yang menunjukkan adanya perbedaan sumber data dan metodologi pelaporan.

Data mengenai jumlah personel polisi juga memberikan perspektif lain tentang kapasitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Jumlah personel dapat mempengaruhi kemampuan polisi dalam melakukan patroli, penindakan, dan penyelesaian kasus.

Tabel 2.87 Jumlah Personel Polisi di Kabupaten Lombok Tengah dan NTB (2020-2023)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Lombok Tengah	894	952	894	914
Nusa Tenggara Barat	9.655	9.910	10.280	10.718

Sumber: Badan Pusat Statistik (Survei Statistik Politik dan Keamanan), 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah personel polisi di Lombok Tengah mengalami fluktuasi. Terdapat peningkatan dari 894 personel di tahun 2020 menjadi 952 di tahun 2021. Angka ini kemudian menurun drastis di tahun 2022 menjadi 894, dan kembali meningkat sedikit menjadi 914 di tahun 2023. Tren ini tidak sejalan dengan tren jumlah kasus yang diselesaikan (*Crime Cleared*) yang justru terus menurun dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya faktor-faktor lain di luar jumlah personel yang memengaruhi tingkat penyelesaian kasus.

Tabel 2.88 Angka Kriminalitas (*Crime Rate*) di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)

Tahun	Jumlah Kejahatan (Crime Total)	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)
2020	946	1,053,280	89,81
2021	597	1,059,042	56,37
2022	403	1,082,573	37,23
2023	547	1,099,211	49,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Hasil perhitungan *Crime Rate* menunjukkan tren penurunan dari 89,81 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 37,23 di tahun 2022. Angka ini kemudian naik kembali menjadi 49,76 di tahun 2023.

Berdasarkan analisis angka kriminalitas (*Crime Rate*), sebuah temuan krusial terungkap dimana tren kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Perhitungan *Crime Rate*, yang menormalisasi jumlah kasus kejahatan terhadap jumlah penduduk, menunjukkan penurunan tajam dari 89,81 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 37,23 pada tahun 2022. Penalaran di balik penurunan ini kemungkinan besar terkait dengan pembatasan mobilitas sosial selama pandemi

COVID-19, yang secara signifikan mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*) di ruang publik. Namun, tren ini berbalik pada tahun 2023, di mana *Crime Rate* naik kembali menjadi 49,76, seiring dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi pasca-pandemi.

Lebih lanjut, penurunan Crime Rate secara makro dari 2020 hingga 2022 harus dipahami sebagai cerminan parsial dari realitas, di mana ancaman kriminalitas tidak berkurang secara total, melainkan berubah bentuk dan lokasi, menegaskan bahwa kualitas dan konsistensi data menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

3. **Indeks Demokrasi**

Analisis Indeks Demokrasi Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2020-2024 menghadapi keterbatasan data. Penting untuk dicatat bahwa skor spesifik Indeks Demokrasi Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak tersedia dalam materi penelitian yang diberikan. Oleh karena itu, analisis longitudinal untuk Lombok Tengah akan difokuskan terutama pada data yang tersedia untuk tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2023, Indeks Demokrasi Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 57,34. Angka ini menunjukkan Indeks Demokrasi berada pada level sedang.

Untuk tahun 2024, Indeks Demokrasi Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 51,63. Angka ini menunjukkan Indeks Demokrasi berada pada level sedang.

Analisis tren dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 5,71 poin dalam IDI Kabupaten Lombok Tengah. Fakta bahwa IDI Lombok Tengah tidak hanya menunjukkan skor numerik 57,34 pada tahun 2023 tetapi mengalami penurunan lebih lanjut menjadi 51,63 pada tahun 2024, tetap berada pada level "sedang", menunjukkan bahwa tantangan terhadap demokrasi di Kabupaten Lombok Tengah bukan bersifat sementara atau dangkal. Hal ini menyiratkan bahwa masalah-masalah tersebut kemungkinan besar bersifat mendalam dan sistemik, membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan cepat. Ini menunjukkan perlunya reformasi fundamental dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan demokrasi, daripada hanya mengatasi gejala-gejala.

Besarnya penurunan 5,71 poin dalam satu tahun merupakan penurunan yang substansial untuk indeks yang berskala 0-100, terutama ketika dimulai dari basis yang sudah rendah. Besarnya penurunan ini menunjukkan kerentanan signifikan proses demokrasi Lombok Tengah terhadap tekanan internal atau eksternal, khususnya yang berkaitan dengan siklus politik yang intens. Hal ini menyiratkan bahwa fondasi demokrasi di Kabupaten Lombok Tengah mungkin kurang tangguh atau kuat dari yang diinginkan, membuatnya rentan terhadap dampak negatif selama periode aktivitas politik yang meningkat. Situasi ini memerlukan perhatian segera dan terfokus untuk memperkuat mekanisme demokrasi.

4. **Indeks Trantibumlinmas**

Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan gambaran kinerja yang beragam dan kompleks dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) antara tahun 2020 dan 2024. Meskipun terdapat indikator keberhasilan yang kuat, laporan ini juga menyoroti kelemahan strategis yang mendasar.

Dari sisi kekuatan, Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan tren positif yang konsisten dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Persentase penegakan ini meningkat dari 50% pada tahun 2022 menjadi 76,92% pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan efektivitas Satpol PP. Kinerja yang sangat baik juga terlihat dalam respons terhadap gangguan Trantibum dan bencana, dengan tingkat penyelesaian dan penyelamatan yang mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, realisasi anggaran Trantibumlinmas yang tinggi, mencapai 97,11% pada tahun 2024, mengindikasikan efisiensi penyerapan dana. Peningkatan drastis dalam layanan informasi rawan bencana, yang mencapai 233% pada tahun 2024, juga menunjukkan upaya komunikasi yang proaktif kepada masyarakat.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai. Waktu tanggap penanganan kebakaran mengalami tren yang memburuk, meningkat dari 13,9 menit pada tahun 2023 menjadi 19,7 menit pada tahun 2024. Hal ini mengancam efektivitas layanan Damkartan. Selain itu, persentase warga yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat rendah, hanya 0,12% pada tahun 2024, menyoroti ketidakseimbangan strategis. Kelemahan ini diperburuk oleh kendala struktural, seperti kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana patroli yang tidak memadai, yang menjadi penghambat kinerja jangka panjang.

Tabel 2.89 Kekuatan dan Kelemahan Tantibumlinmas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 Berdasarkan Analisis Naratif dan Deskriptif.

Aspek Analisis	Kekuatan	Kelemahan
Respons & Penegakan Hukum	• Peningkatan konsisten dalam penegakan Perda dan Perkada. • Tingkat respons 100% untuk gangguan Trantibum dan penyelamatan bencana.	• Waktu tanggap penanganan kebakaran memburuk (19,7 menit pada 2024).
Kesiapsiagaan & Pencegahan	• Peningkatan drastis layanan informasi rawan bencana (233%).	• Persentase sangat rendah untuk layanan pencegahan bencana (0,12%).
Struktural & Pendanaan	• Realisasi anggaran tinggi (97,11%) menunjukkan efisiensi.	• Kekurangan PPNS dan sarana patroli yang tidak memadai. • Pendanaan bencana dari APBD rendah, bergantung pada APBN.
Korelasi dengan Peristiwa Penting	• Kapasitas lonjakan (surge capacity) yang terbukti saat penyelenggaraan MotoGP 2022.	• Keberhasilan ini mungkin tidak berkelanjutan dan dapat mengalihkan sumber daya dari tugas-tugas rutin.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

Keberhasilan penyelenggaraan acara besar seperti MotoGP pada tahun 2022 di Sirkuit Mandalika, yang melibatkan pengerahan sumber daya keamanan yang signifikan, menunjukkan "kapasitas lonjakan" Kabupaten Lombok Tengah dalam situasi bertekanan tinggi. Namun, keberhasilan ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan kapasitas operasional sehari-hari. Acara besar sering kali mengandalkan dukungan eksternal dan dapat mengalihkan fokus dari tugas-tugas rutin yang sama pentingnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengalaman tersebut diintegrasikan ke dalam operasi sehari-hari untuk meningkatkan kinerja Trantibumlinmas secara berkelanjutan.

Secara fundamental, data ini menyoroti adanya ketidakseimbangan antara pendekatan **reaktif** (respons cepat pasca-kejadian) dan **proaktif** (pencegahan dan kesiapsiagaan). Kinerja yang kuat dalam indikator responsif, yang sering kali memberikan manfaat politik jangka pendek, cenderung mengaburkan kurangnya investasi pada langkah-langkah pencegahan jangka panjang. Hal ini tercermin dari proporsi pendanaan penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah dan ketergantungan pada dana APBN untuk tanggap darurat, yang menunjukkan bahwa pencegahan bencana belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Sebagai kesimpulan, meskipun Kabupaten Lombok Tengah memiliki kemampuan respons yang kuat dan penegakan hukum yang meningkat, tantangan utamanya adalah menggeser prioritas strategis dari penanganan insiden ke pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Mengatasi tantangan ini memerlukan pergeseran pola pikir di tingkat kepemimpinan lokal dan investasi yang lebih besar dalam sumber daya manusia serta infrastruktur untuk membangun ketahanan masyarakat secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5. **Indeks Harmoni**

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah sebuah ukuran yang dikembangkan untuk menggambarkan tingkat harmoni dan kerukunan antar berbagai kelompok sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Indeks ini secara spesifik bertujuan untuk mengukur stabilitas sosial, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat. Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

merupakan inisiatif baru yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kebijakan dan pemantauan pada periode pembangunan RPJMN 2025-2029.

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) disusun oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Di tingkat daerah, pengukuran IHaI dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Pengukuran ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengisian survei elektronik (*e-survey*) yang diselenggarakan oleh Kesbangpol daerah.

Tabel 2.90 Data Skor Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dari Hasil Perhitungan Awal Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten	Jumlah Responden	Skor IHaI 2024
DI Yogyakarta	8531	7,35
Banten	7493	7,06
Kepulauan Riau	3308	7,19
Papua Barat Daya	NA	Nihil
Sumatera Selatan	5685	6,85
Kalimantan Timur	456	6,85
Kalimantan Tengah	1742	7,27
Nusa Tenggara Barat	383	7,03
Kabupaten Kepulauan Selayar	546	6,90

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (data diolah)

Meskipun Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dirancang untuk implementasi penuh pada tahun 2025, perhitungan pertamanya telah dilakukan sebagai survei sampel pada tahun 2024. Survei awal ini menunjukkan skor kumulatif nasional IHaI sebesar **7,13** dari sembilan wilayah yang disurvei, yang mengkonfirmasi bahwa IHaI adalah instrumen pengukuran yang sedang dikembangkan dan telah mulai menghasilkan data awal. Perhitungan awal IHaI tahun 2024 menunjukkan variasi skor di berbagai wilayah. DI Yogyakarta mencatat skor tertinggi sebesar 7,35, sementara Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur memiliki skor terendah di angka 6,85. Wilayah lain seperti Banten (7,06), Kepulauan Riau (7,19), Kalimantan Tengah (7,27), dan Nusa Tenggara Barat (7,03) menunjukkan skor di sekitar rata-rata nasional. Data ini juga mencatat bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki skor 6,90, dan data untuk Papua Barat Daya tidak tersedia (nihil).

Berdasarkan data perhitungan awal IHaI 2024, tidak ada data spesifik yang tersedia untuk Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun demikian, provinsi di mana kabupaten ini berada, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki skor IHaI sebesar 7,03. Ketiadaan data spesifik ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang memerlukan pengukuran di masa mendatang. Meskipun demikian, beberapa indikator lokal menunjukkan stabilitas sosial-politik yang kuat di wilayah Lombok Tengah selama periode 2020-2024. Data resmi mencatat nihilnya korban akibat konflik sosial atau aksi teror dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Bupati 2024 tetap tinggi, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2020. Komitmen terhadap akses keadilan juga terlihat dari inisiatif hukum, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Praya. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa, meskipun data IHaI spesifik tidak tersedia, fondasi sosial di Lombok Tengah terpelihara dengan baik dari perspektif keamanan dan partisipasi politik.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Bagian ini menjadi fondasi penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai sektor. Melalui ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk secara proaktif mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif, serta meningkatkan peran kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Capaian dari kebijakan ini akan diukur melalui indikator-indikator

yang relevan, seperti Indeks Daya Saing Daerah, yang disesuaikan dengan konteks dan prioritas pembangunan di tingkat regional.

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengevaluasi tingkat produktivitas pada skala provinsi dan kabupaten/kota. Instrumen ini dirancang untuk menyediakan data dasar tahunan yang esensial bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pembangunan. Lebih dari sekadar alat pengukuran, IDSD berfungsi sebagai instrumen diagnostik yang krusial bagi pemerintah daerah. Kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kesehatan ekonomi regional memungkinkan identifikasi area-area spesifik yang memerlukan intervensi strategis. Sifat data IDSD yang tahunan sangat berharga karena memungkinkan pelacakan berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan dan memfasilitasi penyesuaian adaptif terhadap rencana pembangunan daerah.

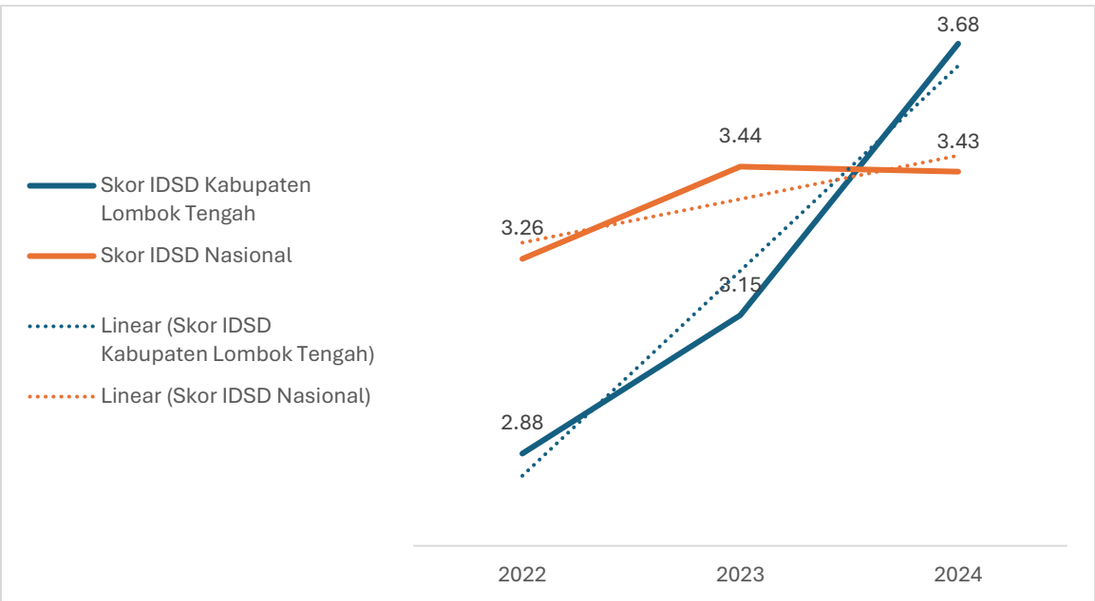

Gambar 2.13 Tren Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lombok Tengah dan Nasional (2022-2024)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan peningkatan skor IDSD yang signifikan dan konsisten sepanjang periode 2022-2024. Dimulai dari 2.88 pada tahun 2022, skor ini meningkat menjadi 3.15 pada tahun 2023, dan kemudian melonjak tajam menjadi 3.68 pada tahun 2024. Peningkatan progresif ini tidak hanya mencerminkan perbaikan internal yang berkelanjutan, tetapi juga memungkinkan Lombok Tengah untuk melampaui skor IDSD Nasional pada tahun 2024. Transisi ini, dari posisi di bawah rata-rata nasional menjadi di atasnya, merupakan indikator penting dari keberhasilan strategi pembangunan daerah. Lintasan skor IDSD Lombok Tengah, dari berada di bawah rata-rata nasional hingga secara tegas melampauinya dalam rentang waktu hanya tiga tahun, menunjukkan lebih dari sekadar peningkatan bertahap; hal ini mengindikasikan percepatan yang berhasil dalam inisiatif pembangunan. Kenaikan pesat ini menyiratkan bahwa kebijakan dan investasi strategis yang diterapkan pada awal periode (2022-2023) menghasilkan hasil yang substansial dan semakin cepat pada tahun 2024, yang menunjukkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya.

Tabel 2.91 Skor Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2022-2024)

Pilar	2022	2023	2024
Pilar 1 (Institusi)	4.00	4.18	4.58
Pilar 2 (Infrastruktur)	2.30	2.15	3.75
Pilar 3 (Adopsi TIK)	2.99	4.35	4.30
Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	2.98	3.35	4.02

Pilar 5 (Kesehatan)	3.54	3.80	3.51
Pilar 6 (Keterampilan)	2.83	2.97	3.75
Pilar 7 (Pasar Produk)	2.91	3.35	3.82
Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	3.62	3.17	3.64
Pilar 9 (Sistem Keuangan)	1.97	1.69	2.04
Pilar 10 (Ukuran Pasar)	0.79	4.20	4.23
Pilar 11 (Dinamisme Bisnis)	5.00	2.18	4.23
Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	1.47	2.81	3.75

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Dari data di atas, dapat simpulkan bahwa kekuatan utama Kabupaten Lombok Tengah terletak pada pilar-pilar fundamental seperti **Institusi**, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan terus meningkat, didukung oleh pengakuan nasional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi. Peningkatan signifikan pada pilar **Infrastruktur** dan **Adopsi TIK** menunjukkan investasi strategis dalam konektivitas fisik dan digital, yang krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi modern. Pilar **Stabilitas Ekonomi Makro** juga menunjukkan tren positif yang konsisten, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, khususnya dari sektor pariwisata dan pertanian, serta keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM. Lonjakan luar biasa pada **Ukuran Pasar** juga mengindikasikan ekspansi ekonomi yang substansial.

Namun demikian, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Pilar **Sistem Keuangan** menunjukkan skor yang secara konsisten rendah dan berfluktuasi, mengindikasikan bahwa kapasitas sistem finansial untuk memediasi aktivitas ekonomi masih terbatas. Selain itu, pilar **Dinamisme Bisnis** menunjukkan volatilitas yang tinggi, dengan penurunan tajam pada tahun 2023 sebelum pulih pada tahun 2024. Meskipun pemulihan ini positif, penyebab di balik penurunan sebelumnya perlu dipahami untuk mencegah fluktuasi serupa di masa mendatang. Pilar **Kesehatan**, meskipun secara keseluruhan IPM meningkat, menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2024, mengisyaratkan perlunya tinjauan terhadap aspek-aspek spesifik dalam sistem kesehatan daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan daya saing Kabupaten Lombok Tengah adalah hasil dari siklus positif yang kuat, di mana tata kelola pemerintahan yang efektif dan investasi strategis di sektor-sektor kunci telah menghasilkan kemajuan sosial-ekonomi yang nyata. Untuk mempertahankan dan mempercepat momentum ini, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pilar-pilar yang telah menunjukkan kinerja baik dan secara khusus mengatasi kelemahan pada sistem keuangan serta menganalisis lebih dalam volatilitas dinamisme bisnis demi menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi Rpjmd

2.2.1. Realisasi RKPD Tahun 2024

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD, RKPD dan APBD, dapat dilakukan analisisapakah terdapat perbedaan antara target kinerja RKPD dengan RPJMD (belum sinkron dan konsisten) serta terdapat kegiatan yang tidak direncanakan akan tetapi dianggarkan dalam mekanisme APBD dan kadang kurang sinkron dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Analisis dilakukan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV yang mencakup hasil keseluruhan Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi E-monev Bapperida dengan link http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id meliputi: (1) Realisasi Anggaran, dan (2) Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Skala nilai

peringkat kinerja diberikan sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagaiman terlihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.92. Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
b) Hasil Sedang
   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam menentukan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah, dilakukan penilaian terhadap capaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam *output* kegiatan. Realisasi *output* kegiatan dibandingkan terhadap rencana output kegiatan dalam DPA kemudian dikalikan bilangan 100 untuk melihat persentase capaian. Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja program, nilai capaian kegiatan tersebut dirata-ratakan, dengan persamaan sebagai berikut:

$$C_{Program} = \frac{\sum Zn}{n}$$

dimana:

$C_{Program}$ = Capaian kinerja Program
Z = Capaian indikator kinerja output kegiatan
N = Jumlah kegiatan dalam satu program

Dari hasil persamaan di atas kemudian di **kategorikan** ke dalam 5 (lima) kelas pencapaian dengan interval kelas sebagaimana interval nilai realisasi kinerja keuangan sebelumnya.

2.2.1.1. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.611.441.478.474,- atau 96,78% total pagu Renja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.527.375.026.251 atau termasuk kategori *sangat tinggi*. Capaian realisasi anggaran masing-masing OPD dan predikatnya sampai dengan Triwulan IV sebagaiaman terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 93. Realisasi Keuangan dan Predikat Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Triwulan IV

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	%	Predikat Keu
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	969.812.778.314	944.984.771.760	97	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	297.290.474.506	288.864.372.541	97	Sangat Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah	183.089.932.143	178.979.122.828	98	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.053.924.567	140.252.107.739	96	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38.187.849.222	37.926.716.936	99	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.445.390.420	10.157.606.451	97	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.777.199.136	3.555.806.870	94	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	7.590.995.409	7.357.471.329	97	Sangat Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.535.565.620	11.358.599.771	98	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	16.627.535.636	15.589.028.453	94	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.404.928.821	3.070.696.966	90	Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.565.637.650	13.813.242.916	95	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.070.341.145	6.034.569.880	99	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.333.402.979	10.079.680.333	98	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	19.789.132.386	19.516.614.027	99	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.797.169.598	7.550.478.248	97	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	8.749.552.619	8.569.336.461	98	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	%	Predikat Keu
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.408.320.112	6.044.686.471	94	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.662.515.501	13.391.128.800	98	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.181.043.177	5.094.285.591	98	Sangat Tinggi
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.523.466.263	10.313.366.872	98	Sangat Tinggi
22	Dinas Pariwisata	17.232.005.333	16.569.709.590	96	Sangat Tinggi
23	Dinas Pertanian	104.935.989.338	98.927.852.646	94	Sangat Tinggi
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.217.063.218	22.269.342.920	96	Sangat Tinggi
25	Sekretaris Daerah	31.604.817.777	30.609.699.001	97	Sangat Tinggi
26	Sekretariat DPRD	55.420.349.989	52.996.309.757	96	Sangat Tinggi
27	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	12.750.612.795	12.439.448.725	98	Sangat Tinggi
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	420.719.894.477	407.069.804.077	97	Sangat Tinggi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	21.471.316.126	17.259.784.294	80	Tinggi
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.450.690.237	8.003.304.360	95	Sangat Tinggi
31	Inspektorat	15.881.892.344	15.689.104.465	99	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Praya	20.892.970.942	20.508.783.530	98	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Praya Tengah	8.305.773.885	7.632.112.069	92	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Praya Barat	2.616.536.582	2.395.300.756	92	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Praya Barat Daya	1.974.014.675	1.805.634.894	91	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	%	Predikat Keu
36	Kecamatan Praya Timur	2.479.481.755	1.915.997.523	77	Tinggi
37	Kecamatan Pujut	2.757.690.925	1.880.354.864	68	Sedang
38	Kecamatan Janapria	2.787.957.370	2.662.806.089	96	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Kopang	2.992.277.012	2.851.369.470	95	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Batukliang	2.188.985.067	2.175.845.490	99	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Batukliang Utara	2.441.907.152	1.999.169.158	82	Tinggi
42	Kecamatan Pringgarata	2.607.378.060	2.547.364.042	98	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Jonggat	2.768.462.023	2.633.429.020	95	Sangat Tinggi
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	41.200.974.418	41.090.449.306	100	Sangat Tinggi
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.845.281.750	10.938.358.962	85	Tinggi

Realisasi anggaran terhadap pagu Renja Sebagian besar PD berpredikat *sangat tinggi* yaitu sejumlah 39 PD (86,67%), 5 PD (11,11%) dengan predikat *tinggi* dan terdapat 1 PD (2,22%) dengan predikat *sedang*. Rata-rata capaian keuangan kabupaten sebesar 96,78%.

Berdasarkan capaian kinerja yang diraih oleh Perangkat Daerah dalam memenuhi target indikator di triwulan IV tahun 2024, dari 45 perangkat daerah memperoleh predikat yang cukup variatif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.94.

Tabel 2. 94. Realisasi dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Triwulan IV

No	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja (%)	Predikat
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	101	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	93	Sangat Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah	100	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84	Tinggi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	61	Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	95	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	91	Sangat Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	131	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	98	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan	129	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	106	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	102	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	114	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	92	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	85	Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	76	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	102	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja (%)	Predikat
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	102	Sangat Tinggi
22	Dinas Pariwisata	125	Sangat Tinggi
23	Dinas Pertanian	88	Tinggi
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	106	Sangat Tinggi
25	Sekretaris Daerah	100	Sangat Tinggi
26	Sekretariat DPRD	100	Sangat Tinggi
27	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	100	Sangat Tinggi
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99	Sangat Tinggi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	92	Sangat Tinggi
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100	Sangat Tinggi
31	Inspektorat	121	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Praya	100	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Praya Tengah	100	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Praya Barat	100	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Praya Barat Daya	78	Tinggi
36	Kecamatan Praya Timur	68	Sedang
37	Kecamatan Pujut	60	Rendah
38	Kecamatan Janapria	100	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Kopang	87	Tinggi
40	Kecamatan Batukliang	100	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Batukliang Utara	94	Sangat Tinggi
42	Kecamatan Pringgarata	100	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Jonggat	91	Sangat Tinggi
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	107	Sangat Tinggi
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	84	Tinggi

Realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah dari 45 PD, Sebagian besar PD berpredikat sangat tinggi yaitu sejumlah 36 PD (80,00%), dan 6 OPD (13,33%) dengan predikat *tinggi,* 1 PD (2,22%) dengan predikat *sedang* dan 2 PD (4,44%) dengan predikat *rendah*. Rata-rata capaian kinerja kabupaten sebesar 96,62%. Berdasarkan capaian kinerja ini maka capaian kinerja PD sebagian besar telah mencapai target Renja dengan dukungan anggaran yang tersedia pada DPA PD Tahun Anggaran 2024.

2.3. PERMASALAH PEMBANGUNAN

2.3.1. Permasalahan Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   Permasalahan urusan Pendidikan dijabarkan secara rinci sebagai berikut ini.
   - Masih tingginya angka putus sekolah
   - Belum optimalnya pencapaian SPM pendidikan
   - Masih rendahnya rata-rata lama sekolah

2. Kesehatan

   Permasalahan urusan Kesehatan dijabarkan secara rinci sebagai berikut ini.
   - Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan
   - Masih tingginya angka kematian bayi
   - Masih tingginya prevalensi stunting
   - Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular
   - Kualitas layanan kesehatan rujukan perlu ditingkatkan
   - Masih belum optimalnya pencapaian SPM Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.95. Permasalahan Pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Cakupan dan kualitas layanan infratsruktur wilayah belum merata	Jalan mantap masih 73,25%	Masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau oleh jalan yang baik
			Jalan yang dibangun mengalami kerusakan lebih cepat dibanding umur teknis
			Jalan yang terbangun belum seluruhnya disertai dengan aksesoris yang memadai
		Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi masih di bawah standar	Panjang dan kualitas saluran irigasi masih kurang
			Kondisi sarana prasarana irigasi masih ada yang rusak
			Peran serta masyarakat dalam tata kelola air masih kurang
			Kelembagaan pengelolaan irigasi belum maksimal
			Masih adanya ketidakpatuhan pengguna air
		Cakupan layanan akses sanitasi layak baru mencapai 85,77% dan sanitasi aman baru mencapai 2,35%	Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki sanitasi layak
			IPAL komunal yang terbangun tidak efektif
			Kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan IPAL masih kurang
			Layanan IPLT belum berfungsi optimal
			Konstruksi IPAL individu belum memenuhi standar
		Cakupan layanan akses air bersih masih 83,67 %	SR Air Minum belum menjangkau seluruh wilayah
			SPAM yang terbangun belum berjalan optimal
			Keterbatasan sumber air baku
2	Pengembangan kawasan belum sepenuhnya sesuai dengan tata ruang	Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam pengembangan kawasan	RTRW yang berlaku belum mengintegrasikan perkembangan kawasan yang sudah ada
			Belum semua kawasan memiliki rencana rinci tata ruang
			Pengendalian ruang belum optimal

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator penurunan angka/tingkat kemiskinan adalah Upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain penanganan Rumah tidak layak huni, fokus yang menjadi prioritas adalah penurunan Luasan Kawasan Kumuh, peningkatan terhadap infrastruktur kawasan, lingkungan dan permukiman seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), jalan lingkungan, drainase, Penerangan Jalan Permukiman serta penyediaan tanah dan lahan untuk infrastruktur publik. Permasalahan yang dihadapai pada urusan perumahan rakyat dan permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.96 Permasalahan Pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Cakupan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman masih kurang	Penyediaan rumah layak huni belum sesuai kebutuhan	Tingkat kemiskinan masih tinggi
			Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan rumah yang layak huni
			Keterbatasan akses/ daya beli masyarakat terhadap hunian yang layak
		Masih terdapat kawasan permukiman yang kumuh	Dukungan PSU terbatas
			Masih terdapat banyak ruas jalan lingkungan yang belum tertangani
			Masih adanya kawasan rawan banjir akbat kurangnya upaya pemeliharaan drainase lingkungan
			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
			Masih terbatasnya ruang terbuka hijau yang memadai

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan urusan Ketentramam, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.97 Permasalahan Pembangunan urusan Ketentramam, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah/Tekanan Dinmis	Akar Masalah
1	Peningkatan derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi;	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
			Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah/Tekanan Dinmis	Akar Masalah
			ketertiban masyarakat
		Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
		Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun apar
			Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran

6. Sosial
   Permasalahan urusan Sosial lebih pada Cakupan penanganan PMKS belum optimal.

2.5.2 Permasalahan Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
   Permasalahan urusan Tenaga Kerja dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.
   - Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
   - Perluasan kesempatan kerja masih terbatas
   - Kompetensi dan produktifitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
   Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabarkan sebagai berikut.
   - Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
   - Pencapaian Kabupaten Layak Anak belum optimal
   - Masih tingginya kasus pernikahan anak

3. Pangan
   Permasalahan urusan Pangan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.98 Permasalahan Pembangunan urusan Ketahanan Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Masih terdapat desa rentan pangan rendah (Prioritas 3)	Ketersediaan pangan di masyarakat masih berfluktuatif	Masyarakat tidak membudayakan menyimpan pangan hasil panen
			Masyarakat kurang memanfaatkan pekarangan sebagai sarana pengembangan sumber pangan keluarga

4. Lingkungan Hidup
   Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana fungsinya bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu

bagian dari siklus hidrologi. Secara umum permasalhan urusan Lingkugan hidup dijabarkan dalam tabel berikit.

Tabel 2.99 Permasalahan Pembangunan urusan Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Nilai IKLH perlu ditingkatkan	Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Limbah cair masih ada yang dibuang ke Lingkungan setempat
			Meningkatnya jumlah kendaraan menyebabkan makin banyaknya polutan
			Menurunnya kualitas air baku
			Kurang optimalnya penanganan air limbah domestik
2	Cakupan layanan persampahan belum merata	Tumbuhnya permukiman dan pusat pertumbuhan baru yang meningkatkan produksi sampah	Sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum sebanding dengan beban layanan
			Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah

5. Pertanahan

Secara umum permasalahan urusan pertanahan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.100 Permasalahan Pembangunan urusan Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Minimnya ketesediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Pemerintah tidak memiliki aset untuk pembangunan fasilitas umum	Perencanaan kebutuhan pengadaan tanah untuk fasum belum baik
			Aset pemda belum seluruhnya tersertifikasi

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan sebagai berikut:

- Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia kurang memadai
- Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- Belum meratanya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
- Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh lembaga/instansi terkait perlu ditingkatkan
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang berwenang karena administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyaralat dan Desa dijabarkan sebagai berikut:
- Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan belum optimal
- Percepetan pencapaian desa mandiri belum optimal

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijabarkan sebagai berikut:
- Cakupan akseptor KB aktif perlu ditingkatkan
- Pelaksanaan konvergensi stunting belum optimal

9. Perhubungan
Masalah pokok urusan perhubungan adalah rendahnya pelayanan keselamatan jalan, karena hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan urusan perhubungan. Salah satu fungsi dari perhubungan adalah memastikan peningkatan keselamatan lalu lintas melalui upaya peningkatan manajemen keselamatan jalan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal urusan perhubungan adalah sebagimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.101 Permasalahan Pembangunan urusan Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Rendahnya pelayanan keselamatan jalan	Keamanan jalan rayan masih perlu ditingkatkan	Terbatasnya fasilitas keselamatan jalan
			Keterjadwalan petugas dalam pengaturan lalu lintas belum optimal
			Kendaran yang melaksanakan uji Keselamatan jalan masih kurang
			Lampu penerangan jalan masih kurang

10. Komunikasi dan Informatika
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahan urusan komunikasi dan informatika dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.102 Permasalahan Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	SPBE belum terlaksana secara optimal	Keterersediaan perangkat hardware dan software belum terpenuhi	Software belum disediakan
			Hardware belum tersedia
			SDM yang berkompetensi di TIK masih terbatas
2	Belum terbukanya badan public	Nilai pemeringkatan badan publik perlu ditingkatkan	SOP layanan informasi publik belum tersedia di semua perangkat daerah
			Tidak optimalnya fungsi PPID
3	Rendahnya pemanfaatan statitik sectoral	Belum terkonsolidasinya data sektoral daerah	Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
			Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
			Kurangnya Pemahaman OPD dalam penyediaan jenis data statistik pembangunan daerah;
			Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
			Kurangnya Pemahaman OPD tentang klasifikasi data
	Tingkat keamanan informasi rendah	Belum optimal standar pengamanan informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
			Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
			Belum adanya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
			Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan urusan Koperasi, usha kecil dan Menengah dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.103 Permasalahan Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro masih perlu ditingkatkan	Produktivitas koperasi dan Usaha Mikro belum optimal	Kapasitas pelaku koperasi dan usaha mikro masih terbatas
			Akses pemodalan masih terbatas
			Kelembagan Koperasi dan Usaha Mikro belum solid
			Manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro kurang professional
			Minimnya kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro

12. Penanaman Modal
Permasalahan urusan penanaman modal dijabarkan dengan rinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.104 Permasalahan Pemerintahan urusan Penanaman Modal

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
	Nilai investasi PMDN dan PMA belum optimal	Kualitas pelayanan perizinan dan investasi masih perlu ditingkatkan	Mall Pelayanan Publik belum berjalan optimal
		Iklim investasi belum favorabel	Masih sering terjadi sengketa lahan
			Masih sering timbul persoalan sosial terkait dengan investasi
			Masih ada oknum yang memanfaatkan investor untuk kepentingan pribadi
			Informasi perijinan dan penanaman modal belum sepenuhnya dipahami oleh investor
			Infrastruktur dasar (misal air, suplai air bersih) terbatas
			Isu keamanan masih ada

13. Pemuda dan Olahraga
    Permasalahan urusan Pemuda dan Olahraga dijabarkan sebagai berikut:
    - Masih kurangnya pemuda pelopor dalam pembangunan masyarakat desa;
    - Masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan seperti gelanggang remaja;
    - Masih kurangnya upaya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga;
    - Masih kurangnya pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih;
    - Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga olahraga;
    - Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

14. Persandian
    Permasalahan urusan Persandian dijabarkan sebagai berikut:
    - Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
    - Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
    - Belum adanya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
    - Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

15. Kebudayaan
    Permasalahan urusan Kebudayaan dijabarkan sebagai berikut:
    - Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara pelaku budaya.
    - Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan
    - Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

16. Perpustakaan
    Permasalahan urusan Perpustakaan dijabarkan sebagai berikut
    - Belum adanya regulasi tentang keanggotaan perpustakaan
    - Keterbatasan sarana prasarana

17. Kearsipan

Permasalahan urusan Kearsipan dijabarkan sebagai berikut:

- Rendahnya minat baca
- Belum adanya kesadaran tentang serah terima cipta karya di Masyarakat

2.5.3. Permasalahan Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan layanan Klautan dan perikanan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.105 Permasalahan Pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Produksi perikanan relatif stagnan	Nelayan belum berproduksi secara maksimal	Daya jangkau usaha penangkapan ikan masih terbatas
			Masih terbatasnya akses nelayan terhadap bantuan permodalan.
			Tingginya biaya produksi perikanan tangkap
		Produksi perikanan budidaya masih belum maksimal	Teknologi usaha budidaya ikan yang diterapkan masih sederhana
			Biaya produksi usaha budidaya ikan masih tinggi
			Rendanya kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan

2. Pariwisata

Permasalahan urusan Pariwisata dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.106 Permasalahan Pembangunan urusan Pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal	Masih rendahnya kunjungan wisatawan	Promosi belum optimal
			Daya saing produk wisata belum mampu menarik wisatawan
			Kualitas SDM di bidang pariwisata perlu ditingkatkan
			Event pariwisata perlu ditingkatkan

3. Pertanian

Permasalahan urusan Pertanian dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.107 Permasalahan Pembangunan urusan Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Produksi pertanian relatif stagnan	Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura belum optimal	Rata-rata produksi masih rendah
			Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida
			Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani
			Masih kurangnya infrastruktur pertanian
			Masih kurangnya ketersediaan benih unggul
			Inovasi teknologi pertanian masih terbatas
		Produksi Sub Sektor Peternakan masih rendah	Usaha peternakan masih sederhana
			Usaha peternakan di tingkat hilir terbatas
			Sumber pakan ternak terbatas
			Pakan ternak buatan (pelet) mahal
			Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular
			Minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi petenakanm

4. Perdagangan
   Permasalahan urusan Perdagangan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.108 Permasalahan Pembangunan urusan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih rendah	Kurang Optimalnya pengembangan perdagangan daerah	Penataan pedagang kaki lima belum optimal
			Belum optimalnya perlindungan konsumen
		Pasar kategori baik masih sedikit	Tata kelola pasar belum optimal
			Pedagang yang memanfaatkan pasar belum seluruhnya mengikuti SOP

5. Perindustrian
   Permasalahan urusan Perindustrian dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.109 Permasalahan Pembangunan urusan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah	Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat	Penjualan produk IKM belum optimal
			Rendahnya pertumbuhan industri berbasis sumber daya lokal
			Belum optimalnya pemanfaatan SDA unggulan
			Belum maksimalnya Pembangunan Perwilayahan Industri
		Lemahnya Daya saing Prodok IKM dan belum optimalnya utilitas kapasitas produk IKM	Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industri kecil dan indusri kreatif;
			Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif

2.3.2. Permasalahan Layanan urusan Penunjang unsur pendukung Pemerintah

1. Urusan Perencanaan
   Permasalahan urusan Perencanaan dijabarkan sebagai berikut:
   - Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan Pembangunan
   - Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
   - Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan
   - Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan

2. Urusan Pengawasan
   Permasalahan urusan Pengawasan dijabarkan sebagai berikut:
   - Kuantitas sumber daya manusia APIP terbatas
   - Pemahaman pada tataran teknis kegiatan Perangkat Daerah belum memadai
   - Budaya kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai
   - Masih adanya keengganan dari Pihak-Pihak tertentu untuk diawasi
   - Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal

3. Urusan Keuangan
   Permasalahan urusan Keuangan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.110 Permasalahan Pembangunan urusan Keuangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Penerimaan target pajak tidak optimal	Pemungutan pajak tidak berjalan maksimal	Intensifikasi pemungutan belum maksimal
			Jumlah dan kapasitas SDM pemungut pajak masih perlu ditingkatkan
			Kurangnya pemanfaatan teknologi
		Penetapan target pajak tidak sesuai dengan potensi yang ada	Validitas dan realibilitas data pajak perlu ditingkatkan
			Cakupan objek pajak masih perlu diperluas

4. Urusan Kepegawaian

   Permasalahan urusan Kepegawaian dijabarkan sebagai berikut:
   - Belum terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;
   - Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
   - Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.
   - Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai.
   - Masih belum jelasnya “rewardsystem”.
   - Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi.
   - Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan

5. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

   Permasalahan urusan Pendidikan dan PelatihanPenelitian dan Pengembangan dijabarkan sebagai berikut:
   - Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi.
   - Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi.
   - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan public belum optimal;

6. Urusan Penelitian dan pengembangan

   Permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan dijabarkan sebagai berikut:
   - Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah
   - Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah

2.4. ISU STRATEGIS

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam peembangunan. Pada tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Lombok Tengah. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin.

   Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek

pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah adalah melalui angka indeks pembangunan manusia. IPM di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 masih berada di bawah capaian provinsi dengan peringkat keenam terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga.

2. Belum optimalnya kualitas Pendidikan

   Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Lombok tengah adalah 6,44 tahun yang berarti penduduk secara rata – rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata – rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting salah satu dampak kurannya peranan orang tua yaitu masih banyak pernikahan di usia dini.

3. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing

   Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu dasar dalam memajukan suatu daerah agar dapat berdaya saing dengan daerah lainnya, untuk dapa mampu menjadikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing yaitu memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Kabupaten Lombok Tengah terbilang belum maksimal, hal ini di tinjau dari Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2012-2022 cenderung rendah dimana pada tahun 2022 sebesar 12.732 Jiwa serta besaran tenaga kerja yang dapat dilatih pada tahun 2022 masih rendah. Untuk mendorong peningkatan kualitas SDM yang berada di Kabupaten Lombok Tegah diperukan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mendorong motivasi dari masyarakat yang berada pada angka Angkatan kerja untuk dapat mengikuti pelatihan.

4. Lingkungan Hidup dan Kualitas infrastruktur yang merata dab berkelanjutan

   Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan permbangunan berkelanjutan. Target permbangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk indeks kualias lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 60,87% diantaranya yaitu Kabupaten Lombok Tengah memiliki Indeks Kualitas Udara sebesar 93,964 point dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,48 point serta nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang sama adalah sebesar 51,11 point. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah jangka Panjang, manajemen kebencanaan,

   Kualitas infrastruktur berkelanjutan merupakan konsep yang memperhatikan keseimbangan

pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan kualitas infrastruktur yang berkepanjangan dan merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk indeks infrastruktur/indeks kualitas layanan infrastruktur mencapai 81, 44 % berasarkan pada hunian yang layak, sanitasi yang layak, pemenuhan air bersih serta cakupan jalan untuk seluruh wilayah. Belum optimlaya kualitas infrastrukur berkelanjutan yang menjadi permasalaan pokok di Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

a. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur perkotaan dan desa, mengingat masih banyak kawasan – kawasan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.
b. Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan yaitu bersifat hierarkis mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan ke tingkat desa, sehingga dibutuhkan adanya integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, demikian juga pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
c. Belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman yang layak, Untuk mendukung tercapainya NUA dan SDGs seta meraih visi Indonesia Emas 2045, maka diperlukan scenario penanganan permukiman kumuh yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, untuk capaian pengurangan kumuh pada tahun 2021 permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebesar 37,75 Ha. Untuk kedepannya di harapkan dapat meuntaskan kekumuha dan menjadi permukiman layak huni sesau dengan program yang telah dituangkan dalam dokumen RP2KPKPK/RP3KP.
d. Belum optimlanya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi, untuk wilayah kabupaten Lombok Tengah belum maksimal dalam memperhatikan penyediaan transportasi publik yang baik dan mampu menjamin aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas.

5. Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju

Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju memberikan kualitas sosial dan buaya yang tinggi bagi keanekaragaman dan menjadikan nilai identitas di Kabupaten Lombok Tengah serta mendukung visi Indoensia Emas 2045. Untuk kondisi di Kabupaten Lombok Tengah masih belum optimal, hal ini di tinjau berdasarkan indicator keberhasilan kenirja diantaranya yaitu indeks pembangunan kebudayaan mencapai 16% dan indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dengan skor 3,68 yang termasuk dalam kategori “Tinggi”. Hal ini menandakan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kabupaten Lombok Tengah sudah menunjukkan kondisi yang memiliki persepsi positif sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal. Secara garis besar permasalahan pokok yang menyebabkan belum optimalnya penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju yaitu :

- Belum optimlanya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan/terdampak;
- Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana;
- Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal; dan
- Belum optimalnya pembangunan literasi/numerasi masyarakat.

6. Peningkatan produktivitas daerah

Peningkatan produktivitas daerah wajib untuk dilakukan agar dapat mengetahui pencapaian

produktivitas di Kabupaten Lombok Tengah, dan sebagai proses tercapaiannya Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Secara garis besar, untuk indikator pencapaian peningkatan daerah di Kabupaten Lombok Tengah diantaranya yaitu Indeks Ketahanan Pangan mencapai 77,06% Secara Nasional Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam meningkatkan ketahanan pangan kabupaten. Hal ini terlihat dari indeks ketahanan pangan yang ditunjukkan kabupaten Lombok Tengah secara nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang cenderung meningkat, indeks daya saing daerah mencapai 2,88 (sumber; penerbit BRIN), secara Provinsi Indeks Daya Saing Daerah berada pada urutan ke empat berdasarkan penilaian 12 pilar (sumber; penerbit BRIN), dan Rasio Kewirausahaan mencapai 0,98 dengan masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah, pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019.

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

   Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Nusa Tneggara Barat yang dapat mempengaruhi kondisi perekomian dan kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan IPM Nasional Tahun 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2024 sebesar 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,00 (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,00 (25,56 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,00/rumah tangga miskin/bulan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding pada Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 juta orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,16 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023. Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2024 sebesar 7,59 juta orang, naik sebesar 0,21 juta orang dibanding pada Agustus 2023.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,50 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023

tumbuh sebesar 4,95 persen (y- on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,95 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,69 persen. Sampai dengan triwulan III-2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,29 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,10 persen. Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencatat pertumbuhan (y-on-y) yang stabil.

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02	
2	Tingkat Kemiskinan	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03	Maret 2024
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	Agustus 2024
4	Pertumbuhan ekonomi	-2,07	5,02	5,31	5,05	4,55	Triwulan III 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

3.1.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, peningkatan kesejahteraan serta pemerataan antar wilayah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang. Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri high tech dengan focus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan mengalami moderasi. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 4,95 persen (Triwulan III 2024), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Pada tahun 2026 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi berkisar pada 5,5 – 6,0 persen. Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen pada tahun 2026.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang sebagai dua factor penting yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah. Peningkatan ekonomi global akan mendukung ekspor Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cadev dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah. Nilai Tukar Rupiah terus diupayakan terjaga dalam rentang Rp.14.900 – Rp.15.400 pada tahun 2026. Sementara itu, yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka menengah, meskipun tantangan yang dihadapi cenderung menurun. Pergerakan yield SBN akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor keuangan, baik secara global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan. Di sisi lain, upaya Pemerintah yang terus-menerus untuk memperbaiki ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga yield SBN tetap stabil pada tingkat yang rendah. Yield SBN 10 Tahun terus diupayakan terjaga dalam rentang 6,3 – 7,3 persen pada tahun 2026. Sedangkan target pencapaianan Indikator Makro Nasional Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5 – 6,0
2	Inflasi	%	1,5 – 3,5
4	Nilai Tukar Rupiah	(Rp/USD)	14.900 – 15.400
5	Yield SBN 10 Tahun	%	6,3 – 7,3

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah

3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah

Data BPS menunjukkan bahwa lndeks Pembangunan Manusia ((PM) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai 71,19 atau tumbuh 1,11 persen atau meningkat sebesar 0,78 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 70,40. Peningkatan IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,55 persen, menurun 0,23 persen poin dibanding tahun 2023. Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok tengah tahun 2024 2024 sebesar 12.07 persen, menurun 0,86 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, Tahun 2023, yang sebesar 17.93 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 sebesar 122.320 ribu orang, berkurang 7.24 ribu orang dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 129.320 ribu orang. Garis Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengaht Tahun 2024 tercatat sebesar Rp549.400 per kapita/bulan meningkat 5.48% dibandingkan tahun 2023, yang sebesar Rp520.852 per kapita/bulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Tahun 2024 sebesar 1.560, lebih rendah 0,560 dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 2.120. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 sebesar 0,270, lebih rendah 0,250 dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 0,520.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen, angka ini menurun apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 yang sebesar 5,77 persen. Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2024 mencapai 22.604,87 Milyar rupiah dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 13.624,03 Milyar rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9.54 persen). Adapun angka capaian/Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.32	68.70	69.57	70.41	71.19	
2	Tingkat Kemiskinan	13.44	13.44	12.89	12.93	12.07	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.74	2.33	3.02	2.78	2.55	
4	Pertumbuhan ekonomi	-6,67	4.03	3.55	5.77	3.34	
5	Gini Rasio	0.378	0.338	0.313	0.349	0,343	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025

3.1.2.2. Arah kebijakan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah

Proyeksi arah pembangunan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi

global dan nasional. Walau kondisi perekonomian global dan nasional diperkirakan menghadapi tantangan yang berat, tetapi dengan rangkaian kebijakan yang tepat diharapkan efek domino dari memburuknya ekonomi global yang ditandai adanya krisis energi maupun pangan, peningkatan pengangguran, serta ketegangan politik perdagangan antar Negara, tidak membawa dampak buruk yang signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada Tahun 2026 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Lombok Tengah diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Lombok Tengah, terutama dengan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat tumbuh. Sektor pariwisata yang mempunyai multiplier effect besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Seiring dengan perkembangan kondisi global dan nasional, tema pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah **"Membangun Fondasi Masmirah melalui Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan"**, dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
5. Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memeperhatikan tantangan dan peluang, maka proyeksi indikator makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Satuan	Target	Ket
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5-6,13	
2	PDRB Per Kapita	Juta	24,076	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	12,75	
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,27	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.47	
6	Rasio Gini	Nilai	0,324	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,23	
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	3,71	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	72,11	

Sumber: Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah **"Membangun Fondasi Masmirah melalui Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan"**. Tema ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap penguatan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemenuhan sarana prasarana dasar guna mensejahterakan masyarakat, serta memberikan membedayakan kelompok marjinal dan kelompok rentan agar dapat memperoleh standar hidup yang layak.

Melihat pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 diproyeksikan tumbuh pada kisaran angka 4,5 - 6.13 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah serta dampak ekonomi dari aktivitas masyarakat yang diprediksikan semakin meningkat di tahun 2026. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2026 dengan semakin berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madalika dan kawasan ekonomi lainnya. Pemerintah juga akan menggerakkan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah terutama sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, UMKM, Ekonomi Kreatif dan industri pengolahan.

Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan positif di tahun 2026 diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Pada Tahun 2026 angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 11.72 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 2.47 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercerminkan dari meningkatnya IPM yang diproyeksikan sebesar 72,23 pada tahun 2026.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah diarahkan melalui Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Maka terdapat beberapa penyesuaian terkait kewenangan dan perhitungan dalam pengenaan pajak dan retribusi pemerintah daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat dampak yang dirasakan oleh daerah, dampak tersebut antara lain:

1. Menurunkan Administration dan Compliance Cost
   - Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
   - Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.
2. Memperluas Basis Pajak
   - Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP.
   - Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb).

Terkait pengaturan pajak daerah dalam UU HKPD tersebut, terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian, hal tersebut antara lain:

1. Sinergi pemungutan provinsi-kabupaten/kota melalui opsen.
   Opsen tersebut tidak menambah beban WP. Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, sekaligus mempercepat penerimaan kabupaten/kota. Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB.
2. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
   PBJT mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ, dan Parkir).
   Tujuannya untuk:
   a. Mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi WP, serta
   b. Meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemda.
3. Green policy PKB dan BBNKB
   Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (nonfosil) dikecualikan dari PKB dan BBNKB, seperti: Kendaraan Bermotor Tenaga Listrik, Surya, dsb. Mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(KBLBB), serta NJKB lebih tinggi untuk Kendaraan Bermotor Fosil yang menghasilkan emisi lebih besar.

4. Dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro
   Insentif fiskal dapat diberikan kepada WP pelaku usaha dengan kriteria tertentu, termasuk usaha mikro dan ultra mikro. Pemberian Insentif Fiskal melalui permohonan WP atau secara jabatan oleh Kepala Daerah. Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.
5. Perubahan kebijakan jenis, objek, DPP, dan tarif pajak
   Memperkenalkan Pajak Alat Berat (PAB). Tarif maksimal PBB-P2 menjadi 0,5%, dengan assessment ratio (NJKP Kena Pajak 20%-100%). BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor baru. Earmarking sebagian penerimaan PKB, PBJKT Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Terkait pengaturan retribusi daerah dalam UU HKPD tersebut, terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian, hal tersebut antara lain:

1. Rasionalisasi jenis retribusi
   Rasionalisasi Retribusi Cetak KTP dan Akta Capil sesuai amanat UU 24/2013 tentang Adminduk. Penyederhanaan Retribusi Perizinan Tertentu melanjutkan semangat UU Cipta Kerja. Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemda tanpa pungutan.
2. Pengaturan detil dalam PP
   UU HKPD hanya mengatur mengenai jenis retribusi dan objek secara umum, sedangkan detil objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP.
3. Penerimaan PAD tetap terjaga
   Rasionalisasi beberapa jenis Retribusi Daerah dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk kabupaten/kota. Sehingga secara keseluruhan penerimaan PAD tetap terjaga
4. Penambahan retribusi baru
   Penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui PP. PP tentang Retribusi baru mengatur minimal: objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara penghitungan retribusi.

Dalam hal Pengelolaan Pajak dan Retribusi, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah¸ sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Serta diperlukan koordinasi yang lebih intens dengan Pemerintah ProvinsiNusa Tneggara Barat terkait validitas data wajib pajak untuk menjamin ketercapaian target pendapatan. Serta untuk mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerjasama antar daerah, dan peningkatan investasi daerah.

Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan kebijakan belanja daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan Penataan anggaran berbasis kinerja *(performance budget*) melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk memprioritaskan pemakaian produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, dimana dalam pasal 61 diamanatkan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Produk Dalam Negeri Wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2026 diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dengan tetap mendukung komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan program-program *pro poor, pro job, pro growth*, dan pro SDGs. Serta mengedepankan sinergitas sinergitas

kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, baik yang bersifat mandatory maupun mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam arah pembangunan pada tahap ini, salah satunya dengan Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi. Dalam hal pembangunan manusia serta peningkatan SDM juga turut dikedepankan, hal ini terlihat dalam arah kebijakan Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengubah struktur Pendapatan Daerah. Berdasarkan Pasal 30, Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Perincian atas pendapatan tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023–2024 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Pendapatan Asli Daerah	274,112,885,093	331,059,847,831	438,891,965,919
2	Pendapatan Transfer	1,972,976,082,091	2,289,284,360,966	2,334,375,424,869
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31,210,802,114	109,315,906,788	39,827,328,000
Jumlah		**2,278,299,769,298**	**2,729,660,115,585**	**2,813,094,718,788**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, pada proyeksi Tahun 2025 pendapatan daerah ditargetkan terkoreksi sebesar 3,06 persen dari tahun 2024 dengan Pendapatan Transfer sebagai proporsi terbesar yang mencapai 82.98% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 2021-2026 dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka kedepannya pengelolaan pendapatan daerah harus lebih dioptimalkan kinerjanya dalam memaksimalkan peningkatan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dilakukan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada serta optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah. Perincian atas PAD tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023–2024 dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Pajak Daerah	147,240,146,529	182,328,157,866	255,589,622,349
2	Retribusi Daerah	20,820,541,077	31,058,523,271	166,909,227,223
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,824,141,617	12,741,149,852	12,617,716,347
4	Lain-lain PAD yang Sah	94,228,055,870	104,932,016,843	3,775,400,000
Jumlah		**274,112,885,093**	**331,059,847,831**	**438,891,965,919**

Sumber : BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada Tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan meningkat sebesar 32,57 persen dari realisasi tahun sebelumnya, hal ini karena adanya penyesuaian dari beberapa pos pendapatan terutama dari Pajak daerah dan retribusi. Kontribusi paling besar terhadap PAD adalah Pajak Daerah yang mencapai 58,24%, kemudian disusul Retribusi Daerah yang mencapai 38,03%. Kondisi tersebut menunjukkan pajak daerah cukup penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Peran Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Tengah terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin meningkat. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dalam 3 (empat) tahun terakhir secara umum mengalami perkembangan yang signifikan dalam menopang PAD.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Pendapatan Transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena pendapatan transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa) dan Transfer Antar-Daerah (terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Termasuk di dalam Pendapatan Transfer ini adalah DBH, DAU, dan DAK. Perincian atas Pendapatan Transfer tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023–2024 dan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Transfer Pemerintah Pusat	1,853,774,800,135	2,165,107,290,050	2,232,850,666,000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119,201,281,956	124,177,070,916	101,524,758,869
Jumlah		**1,972,976,082,091**	**2,289,284,360,966**	**2,334,375,424,869**

Sumber: BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada Tahun 2025 Pendapatan Transfer diproyeksikan turun sebesar 1,79 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024. Pendapatan transfer ini merupakan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah, terutama pendapatan transfer pemerintah pusat. Komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain berasal dari DAU, DAK, DBH, Insentif daerah serta Dana Desa. Berdasarkan penggunaannya, beberapa komponen tersebut merupakan komponen yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Adapun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. senantiasa mengarahkan agar penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan tersebut sesuai dengan ketentuan dari provinsi maupun pusat. Terutama Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas nasional maupun daerah, seperti permasalahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas pendapatan hibah. Perincian atas Lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Pendapatan Hibah	700,863,693	266,910,500	302,000,000
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	30,509,938,421	109,048,996,288	39,525,328,000

Jumlah	**31,210,802,114**	**109,315,906,788**	**39,827,328,000**

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan turun sebesar 63.57 persen dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini disebabkan pendapatan dari FKTP dialihakn ke PAD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

3.2.1.4. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2026, Pendapatan Daerah sebesar 2,429,391,068,000,-. Beberapa asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan meningkat sesuai dengan target Pemerintah pusat, diperkirakan berada pada kisaran 8 persen.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5 – 6,1 persen.

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5% – 6,1% pada tahun 2026, didorong oleh sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM, meskipun menghadapi tekanan dari penurunan transfer pusat sebesar 18,09%
3. Pendapatan asli daerah diasumsikan naik dari pada APBD 2025.

   Pada tahun 2026 kondisi ekonomi diperkirakan meningkat, tetapi diperkirakan pendapatan asli daerah pada tahun 2026 masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini karena kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian serta berdampak kepada perekonomian Kabupaten Lombok Tengah, sehingga peningkatan diproyeksikan hanya pada pajak dan retribusi daerah.
4. Pendapatan transfer menurun sebesar 18,09 persen.

   Kebijakan Penurunan pendapatan transfer sebesar 18,09% merupakan tantangan serius bagi Kabupaten Lombok Tengah, namun juga menjadi momentum untuk transformasi fiskal daerah. Dengan strategi adaptif dan kolaboratif, pemerintah daerah dapat tetap menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan sebesar Rp. 26.626.522.000.

   Hal ini berdasarkan proyeksi penerimaan dana Hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merumuskan beberapa langkah dalam mencapai target pendapatan daerah. Langkah kebijakan ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat direalisasikan dalam program kgiatan peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih baik. Arah kebijakan atau langkah strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar *valid* dan *up to date*.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian

dan proyeksi pendapatan tahun 2023-2027 sebagai disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 s.d Tahun 2027

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025	Proyeksi/Target	
					RKPD 2026	RKPD 2027
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,278,299,769,297.99**	**2,729,660,115,585.25**	**2,813,094,718,788**	**2,429,391,068,000**	**2,594,759,789,151**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**274,112,885,092.99**	**331,059,847,831.25**	**438,891,965,919**	**490,726,579,000**	**529,940,154,611**
4.1.01	Pajak Daerah	147,240,146,529	182,328,157,866	255,589,622,349	276,329,166,000	295,672,207,620
4.1.02	Retribusi Daerah	20,820,541,077	31,058,523,271	166,909,227,223	134,430,122,000	154,594,640,300
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,824,141,617	12,741,149,852	12,617,716,347	13,197,306,000	13,197,306,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94,228,055,870	104,932,016,843	3,775,400,000	66,769,985,000	66,476,000,691
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,972,976,082,091.00**	**2,289,284,360,966.00**	**2,334,375,424,869**	**1,912,037,967,000**	**2,038,193,112,540**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,853,774,800,135	2,165,107,290,050	2,232,850,666,000	1,809,970,422,000	1,936,668,351,540
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119,201,281,956	124,177,070,916	101,524,758,869	102,067,545,000	101,524,761,000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**31,210,802,114.00**	**109,315,906,788.00**	**39,827,328,000.00**	**26,626,522,000**	**26,626,522,000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	700,863,693	266,910,500	302,000,000	302,000,000	302,000,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30,509,938,421	109,048,996,288	39,525,328,000	26,324,522,000	26,324,522,000
Jumlah Pendapatan		**2,278,299,769,297.99**	**2,729,660,115,585.25**	**2,813,094,718,788**	**2,429,391,068,000**	**2,594,759,789,151**

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dimana peruntukan masing-masing klasifikasi jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   - Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
   - Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
   - Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
   - Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
   - Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan; dan
   - Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranyaberupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
   - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   - digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   - batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   - bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaanyang mendesak yang meliputi:
     a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
     b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapatdiprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan.
e. kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Perincian atas Realisasi Belanja Daerah tersebut sebagaimana tabel berikut:

3.10. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023-2024 dan Target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Belanja Operasi	1,683,457,039,797.23	1,978,538,947,668.32	2,098,727,411,778.84
2	Belanja Modal	283,920,793,925.66	236,112,590,581.00	310,020,899,875.56
3	Belanja Tidak Terduga	14,359,344,815.00	8,838,353,947.00	13,700,285,174.60
4	Belanja Transfer	327,262,013,855.00	346,298,032,584.00	359,465,424,619.00
Jumlah		**2,308,999,192,393**	**2,569,787,924,780**	**2,781,914,021,448**

Sumber: BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada Tahun 2025 target belanja daerah diproyeksikan meningkatn sebesar 8.25 persen menjadi Rp. 2.781.914.021.448,- dibandingkan Tahun 2024. Proporsi belanja daerah terbanyak pada pos belanja Operasi berkisar antara 75.44 persen.

3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Perincian atas Realisasi Belanja Operasi tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023-2024 dan Target Belanja Operasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Belanja Pegawai	1,028,819,909,685.20	1,156,476,918,161.76	1,274,077,172,610.62
2	Belanja Barang dan Jasa	560,356,950,091.03	715,146,946,996.56	751,786,994,475.22
3	Belanja Bunga	12,111,886,019.00	11,302,707,488.00	9,449,712,191.00
4	Belanja Hibah	81,628,294,002.00	95,072,375,022.00	62,657,532,502.00
5	Belanja BantuanSosial	540,000,000.00	540,000,000.00	756,000,000.00
Jumlah		**1,683,457,039,797.23**	**1,978,538,947,668.32**	**2,098,727,411,778.84**

Sumber: BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada Tahun 2025 target belanja operasi adalah sebesar Rp2.098.727.411.778,84,- atau naik 6.07 persen dari realisasi tahun 2024. Proporsi belanja operasi terbanyak pada pos belanja pegawai (pembayaran gaji, tunjangan, dsb) berkisar antara 60 persen.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Perincian atas Realisasi Belanja Modal tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12.Realisasi Belanja Modal Tahun 2023-2024 dan Target Belanja Modal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Belanja Modal Tanah	-	-	750,000,000.00
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	80,516,876,650.00	91,727,573,671.12	91,720,600,500.56
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104,743,919,626.00	142,704,330,558.54	123,399,033,392.00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,496,385,300.00	38,965,281,078.00	80,881,385,983.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,355,409,005.00	10,513,658,618.00	13,209,184,000.00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	9,950,000.00	60,696,000.00
Jumlah		**236,112,590,581.00**	**283,920,793,925.66**	**310,020,899,875.56**

Sumber: BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Pada tahun 2025 belanja modal ditargetkan sebesar Rp310.020.899.875,56,- mengalami peningkatan sebesar 9.19 persen dibanding tahun 2024. Proporsi belanja modal terbanyak pada pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Peralatan Mesin; dan Irigasi dan Jaringan.

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Perincian atas belanja tidak terduga tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023-2024 dan
Target Belanja Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Belanja Tak Terduga	14,359,344,815	8,838,353,947	13,700,285,175
Jumlah		**14,359,344,815**	**8,838,353,947**	**13,700,285,175**

Sumber: BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Adapun tahun 2025 Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp. 13.700.285.175,- mengalami peningkatan sebesar 55.01 persen dibanding tahun 2024.

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun untuk belanja transfer perinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023-2024 dan
Target Belanja Transfer Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12,045,737,949	20,838,360,124	26,998,882,059
2	Transfer Bantuan Keuangan	315,216,275,906	325,459,672,460	332,466,542,560
Jumlah		**327,262,013,855**	**346,298,032,584**	**359,465,424,619**

Sumber : BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Adapun tahun 2025 Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp.359.465.424.619,- mengalami peningkatan sebesar 3,80 persen dibanding tahun 2024.

3.2.2.5. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2,381,146,142,713.27 ,-. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja.
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang Produktivitas, Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Anggaran lebih ditekankan pada program prioritas yang diperlukan (*money follow program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi.
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Hasil dari langkah-langkah strategis tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian dan proyeksi belanja tahun 2023-2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024		APBD 2025		Proyeksi/ Target Tahun 2026		Proyeksi/ Target Tahun 2027	
		Anggaran	Proporsi (%)	Anggaran	Proporsi (%)	Anggaran	Proporsi (%)	Anggaran	Proporsi (%)	Anggaran	Proporsi (%)
5.1	Belanja Operasi	1,683,457,039,797	74.45	1,978,538,947,668	75.59	2,098,727,411,779	75.44	1,978,795,135,104.47	83.10	2,068,795,135,104.47	81.24
5.1.01	Belanja Pegawai	1,028,819,909,685	45.50	1,156,476,918,162	44.18	1,274,077,172,611	45.80	1,363,432,632,598.52	57.26	1,363,432,632,598.52	53.54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560,356,950,091	24.78	715,146,946,997	27.32	751,786,994,475	27.02	587,361,652,680.75	24.67	677,361,652,680.75	26.60
5.1.03	Belanja Bunga	12,111,886,019	0.54	11,302,707,488	0.43	9,449,712,191	0.34	7,581,838,240	0.32	7,581,838,240	0.30
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	81,628,294,002	3.61	95,072,375,022	3.63	62,657,532,502	2.25	19,573,011,585.20	0.82	19,573,011,585.20	0.77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	540,000,000	0.02	540,000,000	0.02	756,000,000	0.03	846,000,000	0.04	846,000,000	0.03
5.2	Belanja Modal	236,112,590,581	10.44	283,920,793,926	10.85	310,020,899,876	11.14	88,469,263,608.80	3.72	151,337,984,759.80	5.94
5.3	Belanja Tidak Terduga	14,359,344,815	0.64	8,838,353,947	0.34	13,700,285,175	0.49	2,500,000,000	0.10	10,000,000,000	0.39
5.4	Belanja Transfer	327,262,013,855	14.47	346,298,032,584	13.23	359,465,424,619	12.92	311,381,744,000	13.08	316,381,744,000	12.42
Jumlah Belanja		**2,261,190,989,048**	**100**	**2,617,596,128,125**	**100**	**2,781,914,021,448**	**100**	**2,381,146,142,713.27**	**100**	**2,546,514,863,864.27**	**100**

Sumber: Bapperida dan BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya.Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
6. Penerimaan Piutang Daerah.
7. Penerimaan Dana Bergulir.
8. Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
3. Pembayaran pokok utang.

Adapun perincian atas Pembiayaan Daerah tahun 2023-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023–2024 dan
Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD 2025
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**41,854,120,220**	**44,064,564,543**	**31,180,697,340**
1.1	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	41,854,120,220	39,084,647,243	31,180,697,340
1.2	Pinjaman Dalam Negeri	-	4,950,317,300	-
1.3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-
1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	29,600,000	-
1.5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**19,901,253,226**	**20,787,131,560**	**31,180,697,340**
2.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	19,901,253,226	20,787,131,560	31,180,697,340
2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	-	-	-

Sumber: BKAD dan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Asumsi penerimaan pembiayaan tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 18.000.000.000,-, adapun terkait pengeluaran pembiayaan, diproyeksikan sebesar Rp. 49,180,697,340,-. Adapun rincian realisasi dan proyeksi/ target pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17. Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 s.d Tahun 2027

No.	Uraian	APBD 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026	Proyeksi/ Target Tahun 2027
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**31,180,697,340**	**18,000,000,000**	**18,000,000,000**
1.1	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	31,180,697,340	18,000,000,000	18,000,000,000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**31,180,697,340**	**49,180,697,340**	**49,180,697,340**
2.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	31,180,697,340	49,180,697,340	49,180,697,340
2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	-	-	-
2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
Pembiayaan Netto		**-**	**-31,180,697,340**	**-31,180,697,340**

Sumber: BKAD dan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, 2025

BAB 3
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bab ini secara substantif akan mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJD Tahun 2025-2029, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selanjutnya, pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bagian utama, yaitu: (1) tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada perencanaan Tahun 2026; (2) prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026; (3) pembangunan kewilayahan Tahun 2026; (4) inovasi pembangunan daerah Tahun 2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada Tahun 2026. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas
2. Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif
3. Tujuan 3 : Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
4. Tujuan 4 : Terwujudnya Penurunan Tingkat Kemiskinan
5. Tujuan 5 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan

Tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tahun perencanaan 2026 secara rinci dapat terlihat dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,23	75,13
		Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,17	75,91
		Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Peserta Didik Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk:			
			Literasi Membaca	%	52,10	61,34
			Numerasi	%	48,68	58,64
			Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk:			
			Literasi Membaca	%	28,02	41,07
			Numerasi	%	25,06	38,73
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≧ 25 Tahun	Tahun	6.91	7,45
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.07	14,37
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Partisipasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	50,71	52,71
			Indeks Partisipasi Olahraga	Poin	0,3778	0,509
2	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	78,76	81,23
			Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,76	3,87
		Peningkatan Kualitas Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	Poin	96,84	97,43
		Penguatan Stabilitas Keamanan Daerah dan Kehidupan Demokrasi Substansial	Indeks Kriminalitas	Poin	13,74	9,78
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	65	85,00
			Indeks Demokrasi	Poin	82,12	83,82
		Penguatan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	63,11	69,32
		Penguatan Birokrasi Pemerintahan Yang Berintegritas,	Nilai EKPPD	Angka	3.5647	3.8447

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		Adaptif dan Melayani				
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,856	4,026
			Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71,61	74
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	80,098	89,098
		Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks Pemerintah Digital	Poin	2,79	3,43
3	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,13	6,73
			PDRB Per Kapita	Juta/Tahun	24,04	32,79
			Rasio Gini	Angka	0,339	0,333
		Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi	%	2	2
			Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Angka	0,86	0,48
			Rasio Pajak Terhadap PDRB	%	0,78	0,78
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	3,36	3,51
		Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,08	5,71
		Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	%	1,59	1,95
			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	916,019,427,929	1,500,123,758,357
		Peningkatan Produktifitas Koperasi dan UKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,49	0,52
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,94	2,26

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	0,86	0,95
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	94,01	96,81
		Peningkatan Produktifitas BUMD	Nilai Tambah BUMD	Rp		
		Transformasi Digital Ekonomi Masyarakat	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	50,27	60,1
		Peningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,42	2,16
		Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	7,65	10,43
			Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	2,91	2,92
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-32,10	-30,01
			Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	52,19	53,33
		Meningkatnya Kerjasama dan Daya Saing Daerah	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rupiah	3,011	3,350
			Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	%	12,36	11,88
			Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB	%	8,49	9,06
4	Terwujudnya Penurunan Tingkat Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	%	11,27	9,91
		Perlindungan dan Jaminan	Cakupan Kepesertaan	%	73,75	79,27

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		Sosial yang Adaptif	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
		Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	45	52
			Indeks Zakat Daerah	Poin	0,66	0,82
5	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	80,83	89,83
			Indeks Desa	Poin	0,8692	0,9537
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,11	72,95
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antarwilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	80,58	88,58
		Penguatan Konektivitas Antarwilayah dan Layanan Tansportasi Multimoda	Rasio Konektivitas	Poin	42,80	91,90
		Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	96,13	96,71
			Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	%	95,81	98,93
			Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,47	12,52
		Penguatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	%	79,91	80,71
		Kualitas Lingkungan Hidup Optimal	Penurunan Emisi GRK	%	3,71	5,45
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	52,33	71,33
		Resiliensi Terhadap	Indeks Risiko Bencana	Poin	125,76	123,38

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		Bencana dan Perubahan Iklim				
6	Terwujudnya Nilai Ahlaqul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Harmoni Indonesia	Poin	56,31	64,55
		Beragama Maslahat dan Pemajuan Kebudayaan Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	77,00	79,00
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	54,92	63,67
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	64,46	81,38
			Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,574	0,538

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

4.2.1.1. Tema RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Tahap Perkuatan Fondasi Transformasi. Adapun Transformasi Indonesia dan Landasan transformasi untuk tahap pertama RPJPN adalah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social
2. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial
   a. Kesehatan untuk Semua Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
      2) Investasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Pustu, dan UKBM

3) Penurunan kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif
4) Pengendalian penyakit menular terutama TB dan eliminasi penyakit tropis terabaikan terutama kusta dan Schistosomiasis
5) Penguatan pembiayaan kesehatan dan JKN.

b. Pendidikan Berkualitas yang Merata Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2) Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru untuk mendorong pemerataan dan kualitas Pendidikan
3) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang berkualitas
4) Peningkatan lulusan pendidikan menengah dan tinggi (STEAM) yang produktif dan berdaya saing

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
3) Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
4) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

2. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Ekonomi

a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Produktivitas Ekonomi Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
1) Penguatan hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
2) Peningkatan industri padat teknologi dan inovasi (logam dasar; kimia dasar; elektronik dan digital; kimia hilir dan farmasi; alat angkut; serta kedirgantaraan)
3) Pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru
4) Pengembangan bioekonomi dan bioteknologi
5) Pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, regeneratif bali dan klaster pariwisata IKN (a.l Danau Toba, Borobudur, Lombok Gili Tramena, Manado-likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, BTS, Raja Ampat, Morotai, Bali, dan IKN)
6) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (seni, budaya, dan kerajinan; film, animasi, dan visual arts; kuliner; serta aplikasi dan gim)
7) Pengembangan industrialisasi perikanan dan kelautan
8) Pengembangan koperasi sektor produksi
9) Peningkatan peran UMKM dalam rantai nilai industri
10) Pengembangan wirausaha berorientasi tumbuh
11) Penguatan vokasi sesuai dunia usaha
12) Peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
13) Penciptaan ekosistem dan peningkatan anggaran iptek serta inovasi

b. Penerapan Ekonomi Hijau Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
1) 1) Penerapan ekonomi sirkular
2) 2) Percepatan transisi energi
3) 3) Penerapan transportasi hijau

c. Transformasi Digital Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
1) Pengembangan superplatform digital indonesia
2) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK
3) Penciptaan enabler transformasi digital
4) Penguatan SDM digital

5) Peningkatan adopsi teknologi digital pada berbagai sektor

d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
   1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
   2) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
   3) Penguatan logistik nasional
   4) Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara
   5) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antardaerah dan dengan global
   6) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
   7) Peningkatan partisipasi indonesia dalam rantai pasok global
   8) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global

e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
   1) Peningkatan kualitas 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado)
   2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
   3) Pengentasan rumah tidak layak huni
   4) Pembiayaan perumahan untuk semua
   5) Pengentasan permukiman kumuh
   6) Penyediaan perumahan publik terjangkau

3. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Tata Kelola Prioritas pembangunan untuk transformasi Tata Kelola adalah Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dengan beberapa intenvensi yang menjadi penekanan adalah:
   1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi nasional dan penyederhanaan tata kelola regulasi;
   2) Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
   3) Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan Prioritas Nasional/ shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target);
   4) Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
   5) Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
   6) Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi dan penerapan Sistem Integritas Partai Politik

4. Prioritas Pembangunan untuk Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   a. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Single prosecution system melalui penguatan kewenangan kejaksaan, kapasitas jaksa, dan pemenuhan sarana prasarana penanganan perkara
      2) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, keamanan insani, keamanan laut, dan keamanan siber
      3) Penguatan kebebasan sipil yang berwawasan Pancasila, penguatan kesetaraan kelompok rentan untuk akses informasi dan keterwakilan politik, serta penguatan kapasitas, fungsi, dan integritas Lembaga demokrasi

   b. Stabilitas Ekonomi Makro

      Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Reformasi perpajakan (penambahan kelembagaan administrasi perpajakan)
      2) Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
      3) Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
      4) Pengendalian inflasi dengan fokus penyelesaian masalah struktural (pasokan dan distribusi), penguatan data, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat & daerah
      5) Peningkatan kontribusi keuangan syariah dan inklusi keuangan

c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
   1) Peningkatan efektivitas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global
   2) Penguatan kerja sama pembangunan internasional dan diplomasi ekonomi
   3) Pemenuhan infrastruktur penopang kebijakan luar negeri
   4) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
   5) Peningkatan kemampuan pertahanan

5. Prioritas Pembangunan untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
      2) Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
      3) Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
      4) Penguatan moderasi beragama
      5) Transformasi penjaminan produk halal
      6) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
   b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
      2) Penguatan institusi keluarga dalam penanaman nilai, moral, etika, integritas, karakter, dan pengembangan psikososial anak
      3) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
      4) Pengembangan masyarakat inklusif terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya
   c. Lingkungan Hidup Berkualitas
      Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
      2) Sistem Peringatan Dini Slow On Set LH dan peningkatan Kesehatan laut
      3) Perbaikan kualitas ekosistem dan LH
      4) Penegakan Hukum Lingkungan
      5) Pembangunan Forest dan Sponge City di Ibu Kota Nusantara
      6) Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
      7) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy
   d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Menjamin ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi
      2) Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan Sentra Produksi Pangan, pangan lokal, pangan akuatik/blue foods)
      3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan (diversifikasi, keamanan, dan fortifikasi pangan)
      4) Penguatan tata kelola pangan (susut dan limbah pangan, serta Satu Data Pangan
      5) Pembangunan dan revitalisasi tampungan air alami dan buatan
      6) Penuntasan pemanfaatan air baku, irigasi, dan listrik dari bendungan terbangun
      7) Penyediaan air baku DKI Jakarta dari wilayah sungai di Banten dan Jawa Barat (Interbasin transfer)
      8) Rehabilitasi hutan dan lahan
      9) Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana
   e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
      Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
      1) Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut
      2) Pencegahaan penyakit menular akibat iklim
      3) Pertanian ramah iklim

4) Pembangunan dan konservasi sumber daya air
5) Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestic
6) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
7) Restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang)
8) Peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini terpadu bencana
9) Penguatan manajemen tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

4.2.1.2. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tema RKP Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan tahun 2026, pemerintah menetapkan indikator makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.60-6.80 %
2. Gini Perkapita sebesar 5.870 US$
3. Penurunan Intensitas Emisi FRK sebesar 4.17 %
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76.67 Indeks
5. Tingkat Kemsikinan sebesar 6.5-7.5%
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4.44-4.96 %
7. Rasio Gini sebesar 0.377-0.380 Indeks
8. Kemsikinan Ekstream sebesar 0.0-0.5%
9. Indeks Modal Manusia sebesar 0.57 Indeks

Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah pusat menetapkan prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

   Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan

   yang adil, inklusif dan merata.
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

   Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu

   negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan

Agromaritim

Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

   Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (*human capabilities*) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi. Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

   Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

   Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

   Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi

yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan

menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilainilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menguatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

4.2.2. Tema Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

4.2.3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 2026

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Tema Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah "**Fondasi Masmirah melalui Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan**", yang dijabarkan kedalam 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
2. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana
5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah
6. Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat

4.2.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program–program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah dan dapat memenuhi target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Prioritas Daerah dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Daerah	Ssaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Peningkatan Kualitas SDM (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	72.48	74.08
Peningkatan Kualitas SDM (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Peserta Didik Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat Nasional Untuk:			
		Literasi Membaca	%	52.10	61.34
		Numerasi	%	48.68	58.64
		Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat Nasional Untuk:			
		Literasi Membaca	%	28.02	41.07
		Numerasi	%	25.06	38.73
		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun	Tahun	6.86-6.91	7.20-7.34
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.06-14.29	14.77-14.77
Peningkatan Kualitas SDM (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	55.37	58.97
		Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0.574	0.538
Peningkatan Kualitas SDM (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	50.71	52.71
		Indeks Partisipasi Olahraga	Poin	0.3778	0.509
		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.21	3.31
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Hukum	Poin	59.03	64.77
		Indeks Pemerintah Digital	Poin	2.79	3.43
		Indeks Pelayanan Publik	Poin	3.856	4.026
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71.61	74.00
		Nilai EPPD	Angka	3.5647	3.8447

Prioritas Daerah	Ssaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Nilai SAKIP Pemda	Angka	65.65	71.75
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	76.50	76.90
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Indeks Kriminalitas	Poin	13.74	9.78
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	65.00	
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Kehidupan Demokrasi Substansial	Indeks Demokrasi	Poin	55.00	63.00
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Penguasaan Iptek, Pengembangan Inovasi Daerah, dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	%	9,08-12,36	5,59-11,88
		Indeks Inovasi Daerah	Poin	42.47	54.97
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.47 - 2.56	2.11 - 2.29
		PDRB Per Kapita	Juta/Tahun	23,298-24,076	30,578-33,156

Prioritas Daerah	Ssaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Transformasi Digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	50.27	60.10
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Pariwisata yang Tangguh, Inklusi dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	%	1.37	1.51
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Ekonomi Kreatif Meningkat	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	937,904,554,202	1,336,433,728,457
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Nilai Tambah Produk dan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,54-4,61	4,59-4,66
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Kontribusi UMKM dan Koperasi Meningkat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.49	0.52
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1.94	2.26
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	94.01	96.81
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	0.86	0.95
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	50,42-52,20	51,56-53,62

Prioritas Daerah	Ssaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Kerjasama Daerah Meningkat	Nilai Investasi Daerah	Trilyun Rupiah	3.011	3.350
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Terhadap PDRB	%	0,76-0,96	0,70-0,97
Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi (PD4)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	7,83-9,14	9,39-10,70
		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	2,91-2,95	2,92-2,97
		Rasio Gini	Angka	0,339-0,324	0,333-0,318
Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial (PD6)	Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	97.16	98.52
Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial (PD6)	Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	45.00	52.00
Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial (PD6)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	64.62	71.84
		Konsumsi Listrik Per Kapita	KWH	374.69	435.17
		Rumah Tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman	%	4.47	12.525
Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial (PD6)	Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Energi dan Air	Prevalensi ketidakcukupan pangan	%	2.34	0.74
		Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	%	95.81	98.93

Prioritas Daerah	Ssaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	4.47	12.52
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Pengurangan Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Indeks Kualitas Air	Angka	77.44	78.64
		Indeks Kualitas Udara	Angka	74.45	75.25
		Indeks Kualitas Lahan	Angka	58.23	58.50
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Efektif	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	52.33	71.33
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Peningkatan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.59	0.71
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan Emisi GRK	%	3.71	5.45
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	80.58	88.58
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Poin	40.00	66.67

Prioritas Daerah	Ssaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup (PD5)	Pembangunan desa berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	%	45.92	51.86
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Kerukunan hidup bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3.75	3.83
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat (PD3)	Pemajuan dan pelestarian budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	54.92	63.67

4.2.3.3. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Berikut disajikan arah kebijakan pada tujuh prioritas pembangunan tahun 2026.

Tabel 4.3 Prioritas Daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Pengarusutamaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Gerakan menuju Seratus Persen ODF (Open Defecation Free)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Penguatan lima pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik dan sarana prasarana penanganan limbah medis
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Menguatkan sistem data dan informasi kesehatan yang mendukung pengembangan sistem kesehatan daerah
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Meningkatkan rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Pemberian Insentif Tenaga Medis Non ASN
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Jaminan Sosial dan Kesehatan untuk tenaga medis Non ASN
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar layanan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Kesehatan Untuk Semua	Digitalisasi pelayanan kesehatan masyarakat
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Penyusunan regulasi dan kebijakan pendidikan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Penyusunan peta jalan pendidikan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Membangun sistem data dan informasi yang mendukung pengambilan kebijakan unggul untuk akselerasi pendidikan dasar

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan kepribadian untuk satuan pendidikan dasar
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Penyusunan kurikulum pendidikan muatan lokal
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan Komunitas dan Kolaborasi Antar Guru
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Pemberian Insentif dan Tunjangan Kesejahteraan untuk tenaga honorer guru/untuk Guru Non sertifikasi
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Jaminan Sosial dan Kesehatan untuk Guru Honorer
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Beasiswa retrival untuk anak putus sekolah
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Mengembangkan sekolah-sekolah unggulan dan sekolah rakyat
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Program Kejar Paket A dan B untuk masyarakat yang putus sekolah
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Mengembangkan sekolah inklusi
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan akses pendidikan usia dini dan pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	peningkatan asupan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan balita
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Pemberian insentif untuk para kader posyandu

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Penyediaan dapur sehat atasi stunting (dashat)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Dukungan makan bergizi gratis (MBG)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Penguatan peran dan fungsi posyandu keluarga dan kader
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap kebijakan dan program pemerintah
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Pendewasaan usia pernikahan pertama
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Penjaringan dan pembinaan pemuda pelopor
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Penyusunan masterplan pembangunan olahraga
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Pengadaan kompetisi dan mengikuti kejuaraan olahraga
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Menyusun skema penghargaan bagi atlet berprestasi, pelatih dan official
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia (PD1)	Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Pemasyarakatan olahraga tradisional dan rekreasi
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Regulasi dan de regulasi produk hukum daerah
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Insentif bulanan Ketua Rukun Tetangga
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para anggota Badan Keamanan Desa (BKD) dan Badan Keamanan Kelurahan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Penyediaan insentif umroh dan perjalanan ibadah lainnya bagi ASN dan Non ASN berprestasi
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Peningkatan profesionalitas ASN
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN serta penerapan sistem meritokrasi dalam pengembangan karir
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Pengawasan dan Pengendalian melalu penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Percepatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk pengelolaan data, perencanaan anggaran, dan pelaporan kinerja, guna memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Optimalisasi alokasi dan penggunaan dana pemerintah yang efisien dan tepat sasaran
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Revitalisasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dengan publikasi rutin laporan keuangan dan akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran melalui platform online
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Penegakan regulasi daerah yang berkeadilan dan berkepastian hukum
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Menjaga stabilitas dan kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD2)	Kehidupan Demokrasi Substansial	Jaminan Pemenuhan hak sipil
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penguasaan Iptek, Pengembangan Inovasi Daerah, dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, universitas, dan lembaga riset untuk mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan kapasitas SDM
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penguasaan Iptek, Pengembangan Inovasi Daerah, dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penguasaan Iptek, Pengembangan Inovasi Daerah, dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan produksi bahan baku secara berkelanjutan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penguasaan Iptek, Pengembangan Inovasi Daerah, dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Peningkatan program magang dan penempatan kerja
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Pengembangan program pelatihan yang berfokus pada keahlian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Migran
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Transformasi Digital	Mendorong partisipasi digital dalam dunia komersil atau e-commerce
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Transformasi Digital	Meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Transformasi Digital	Menciptakan keamanan informasi dan siber

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Transformasi Digital	Perluasan akses internet dan teknologi digital untuk mendukung ekonomi digital
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Pariwisata yang Tangguh, Inklusi dan Berkelanjutan	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Pariwisata yang Tangguh, Inklusi dan Berkelanjutan	Pembinaan, pengembangan dan standarisasi desa wisata pada destinasi prioritas kabupaten dan daerah penyangga KEK Mandalika
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Pariwisata yang Tangguh, Inklusi dan Berkelanjutan	Pembinaan, pengembangan dan standarisasi pelaku jasa usaha pariwisata pada destinasi prioritas kabupaten dan KEK Mandalika
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Pariwisata yang Tangguh, Inklusi dan Berkelanjutan	Penataan dan pembangunan fasilitas penunjang dan amenitas pada destinasi wisata prioritas kabupaten dan daerah penyangga KEK Mandalika
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Pariwisata yang Tangguh, Inklusi dan Berkelanjutan	Pengembangan desa wisata unggul

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Ekonomi Kreatif Meningkat	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Nilai Tambah Produk dan Daya Saing Industri Pengolahan	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat secara klaster
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Nilai Tambah Produk dan Daya Saing Industri Pengolahan	Mendorong pondok pesantren sebagai penggerak perekonomian
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kontribusi UMKM dan Koperasi Meningkat	Peningkatan UMKM dan koperasi
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kontribusi UMKM dan Koperasi Meningkat	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kerjasama Daerah Meningkat	Penyederhanaan regulasi yang terkait dengan investasi, perizinan usaha, dan pengelolaan SDA
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kerjasama Daerah Meningkat	Mendorong investasi dan penggunaan energi terbarukan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kerjasama Daerah Meningkat	Pemberian insentif dan kemudahan investasi di KEK Mandalika
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kerjasama Daerah Meningkat	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kemudahan pelayanan pajak dan retribusi daerah
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan infrastruktur, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan penggunaan material ramah lingkungan

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan dan operasional infrastruktur, termasuk solar, angin, dan bioenergi
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Kolaborasi dengan institusi keuangan, termasuk bank dan lembaga pembiayaan, untuk mendukung pendanaan proyek infrastruktur hijau
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Adaptif	Pengembangan model pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Penguatan Kapasitas Individu dan Komunitas

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Marginal
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rehabiltasi rumah tidak layak huni
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Fasilitasi perizinan dalam proses penyediaan perumahan sesuai Tata Ruang Wilayah.
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PD4)	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Penyediaan prasarana dan sarana umum kawasan perumahan dan permukiman
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Energi dan Air	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Energi dan Air	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Energi dan Air	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pengurangan Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Penghijauan dan konservasi sumber daya alam
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pengurangan Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Pemantau kualitas air udara dan tanah secara kontinyu
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pengurangan Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya beracun)
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Efektif	Optimalisasi pengelolaan persampahan terpadu
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Efektif	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Efektif	Penerapan pengelolaan sampah metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bencana
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Pengembangan sistem informasi bencana berbasis digital
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur dan Sistem Peringatan Dini
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Pengembangan teknologi pertanian tahan kekeringan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam praktik pertanian yang adaptif terhadao perubahan iklim
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Pengembangan sistem informasi pendidikan, pelatihan dan logistik
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Konservasi mata air
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Peningkatan Kapabilitas Daerah Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Rehabilitasi kawasan hutan di daerah tangkapan air,
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Pengurangan penggunaan pupuk kimia secara bertahap dengan memperluas penerapan pertanian organik
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Memperkuat penyuluhan dan pendampingan teknis terkait pertanian organik
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Penyediaan insentif untuk mendorong petani menggunakan teknologi yang ramah lingkungan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Pengelolaan pertanian berkelanjutan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Pengurangan emisi metana melalui pengembangan teknologi biogas dari limbah ternak
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil dengan mendorong pengembangan transfortasi publik berbasis energi listrik
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Pengoptimalan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan seperti energi surya,mikrohidro, dan biomassa

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk mempeluas penggunaan energi baru terbarukan di sektor rumah tangga maupun industri
Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana (PD5)	Penurunan gas emisi rumah kaca	Optimalisasi pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular, seperti memperluas cakupan sistem bank sampah serta metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan akses terhadap listrik dan air bersih
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Menyusun dokumen rencana detail tata ruang yang memperhitungkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan air limbah yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan untuk mencegah banjir dan pencemaran.
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Penyediaan akses yang merata terhadap air bersih, telekomunikasi dan listrik
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten menuju jalan kabupaten dalam kondisi mantap
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Penyediaan infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya serta ramah anak
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Pengembagan infrastuktur pendukung KEK Mandalika dan kawasan penyangga KEK
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Akses terhadap infrastruktur berkualitas	Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemanfaatan struktur dan pola ruang sesuai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Konektivitas antar wilayah	Peningkatan sarana keselamatan jalan
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah (PD5)	Pembangunan desa berkelanjutan	Pengembangan forum koordinasi antarwilayah
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat (PD6)	Kerukunan hidup bermasyarakat	Peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat (PD6)	Pemajuan dan pelestarian budaya	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat (PD6)	Pemajuan dan pelestarian budaya	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya

Sementara itu sasaran pembangunan yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing Perangkat Daerah merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program yang diselenggarakan oleh

Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Sedangkan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Program dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah PAUD dan DIKDAS	APK PAUD (poin)	71,89	72,99	75,19	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APK SD (poin)	105,46	106,56	108,76	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APK SMP/MTs (poin)	109,22	110,32	112,52	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	35,06	36,77	51,99	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SD Terakreditasi Minimal B (%)	72,83	73,23	74,03	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi Minimal B (%)	57,52	57,92	58,72	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartispasi dalam pendidikan khusus (%)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	87,41	86,62	88,62	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	56,40	61,40	71,40	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	52,27	57,07	66,67	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	72,09	73,89	77,49	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	64,08	67,08	73,08	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	68,37	70,37	74,37	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	65,47	67,47	71,47	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan PAUD dan DIKDAS	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi (%)	19,00	19,31	24,10	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase PTK SD tersertifikasi (%)	20,95	37,60	41,60	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase PTK SMP tersertifikasi (%)	31,11	30,66	31,98	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
Meningkatnya kualitas dan distribuisi institusi pendidikan PAUD dan DIKDAS	Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	-	10	25	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahansanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	-	59	55	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuaistandar (%)	100	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	80	82	90	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaanpangan memenuhi syarat (%)	49,5	50	70	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	28,4	32	40	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasyankes terakreditasiparipurna (%)	-	75	82	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasyankes denganperbekalan kesehatan sesuai standar (%)	96	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	90	91	95	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	-	14,14	10	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90	90	90	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	33,74	90	90	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	83,31	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	77	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	72	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	85	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,2	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,9	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	82	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	92	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	94	100	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	80	85	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dantenaga medis terhadap populasi (Rasio)	0:0	6:1000	6:1000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	88	92	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	80	82	90	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota (%)	82,00	88,69	100,00	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	-	95,81	98,93	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	78,82	81,32	84,24	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman (%)	87,94	88,93	91,93	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,75	4,47	12,52	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	21,46	23,15	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
Meningkatnya kualitas infrastuktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	100	100	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	100	100	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Proporsi fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan EBT (%)	0,11	1,51	6,26	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	0	374,69	435,17	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	74	76,786	81,166	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	20,24	21,57	25,25	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	77,50	100	100	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	3,29	6,25	15,84	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	3,03	3,56	4,15	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	15,80	36,06	76,57	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun (%)	0,01	1,54	7,66	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Satpol PP)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Damkartan)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.07.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (BPBD)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, penanganan gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan (%)	76	87,5	100	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	74,68	100	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50	50	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	207	181	148	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.07.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.05.0.00.0.00.07.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP PD (Angka)	65,24	72,00	82,00	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti Rehabilitasi Sosial bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	54,39	54,39	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	40	8,96	8,96	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	4	10	18	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti sesuai standar (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti (%)	30	46,55	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti (%)	37	52,94	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	11	44,58	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKs) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	41,81	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	91,39	81	85	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	86,00	89,64	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang yang meningkat kemandirian ekonomi (%)	0,13	0,23	0,96	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)	33,33	33,33	33,33	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Jumlah Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang dilakukan selama satu tahun (%)	33,33	33,33	33,33	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,13	3,68	11,04	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase korban bencana alam,sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial,Tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan dan pasca bencana sesuai standar (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	99	100	100	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100,00	100,00	100,00	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	52,71	60,00	65,00	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	96,00	96,75	97,75	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	49,96	73,75	79,27	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	45,44	51,00	55,00	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	87,82	100	100	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	71,38	75,78	84,56	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak (Lembaga)	1	1	2	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	11,11	100	100	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	53,88	54,20	54,84	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	99,66	100	100	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (%)	118,74	119,24	120,50	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (%)	70,00	110,00	125,00	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.631,62	2.650,10	2.652,00	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	72,90	73,20	74,50	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Indeks Stabilitas Harga Pangan Strategis (Beras, Telur Ayam Ras, Cabe Merah, Cabe Rawit, Bawang Merah) (Indeks)	1	1	1	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Konsumsi energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.376	2.374	2.370	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	73,5	72,50	69,50	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	8,44	5,19	0,00	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	72,00	80,00	95,00	2.09.0.00.0.00.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
Meningkatnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Dokumen penataagunaan tanah (Dokumen)	1	1	1	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)					1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	83,33	100	100	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau ketrusakan lingkungan (%)	100	100	100	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luasan taman kehati (ha) (Hektar)	4	5,37	6,15	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	100	100	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan kterhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	-	52	65	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	16,66	49,88	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	19,24	28	40	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	6,76	10,21	14,43	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	3,23	13,23	26,15	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	48,76	60	80	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	98,36	99,58	99,9	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,47	99,63	99,95	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	33,80	38,80	48,80	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	16,90	20,45	29,94	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah (%)	12	16	24	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2	2	2	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	28,85	11,36	7,30	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	9,86	20,51	5,32	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	89,44	91,67	100	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	9,28	5,00	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	18,08	31,94	41,13	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	74,65	80,13	95,21	2.13.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)	19	19	19,56	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	55,50	56,88	59,00	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase PUS akseptor KB (%)	15	15,49	16,40	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10	8	4	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	15	15,49	16,69	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	77,62	79	81	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	96,42	100	100	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	33,33	46,67	73,33	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (%)	0	9,09	45,45	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	26,93	27,91	32,26	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (%)	0	33,33	100,00	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	41,70	49,80	65,99	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	28,89	64,44	75,56	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	28,89	64,44	75,56	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	-	4,44	13,33	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2	2	2	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	19	23	30	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	9	9	9	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	14,55	16,33	19,89	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	25	25,6	27,3	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	-	0,86	0,95	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,1	0,1	0,1	2.17.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	40	100	100	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	-	52,20	53,62	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-23,83	2,54	2,83	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
Meningkatnya pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	2.18.0.00.0.00.19.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	2.19.0.00.0.00.20.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	0	0,65	1	2.19.0.00.0.00.20.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk pelatda provinsi (%)	0	7	17	2.19.0.00.0.00.20.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Satuan Organisasi Gerakan Pramuka yang aktif (%)	0	35	55	2.19.0.00.0.00.20.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))	33,33	55,56	100	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	15,38	35,29	56	2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	3	3	3	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
Meningkatnya warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai SNP	Tingkat Kunjungan Perpustakaan (%)	1,2	2	10	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan (%)	85,26	86,25	89,76	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
Meningkatnya Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5	7	15	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
Meningkatnya Tata Kelola Arsip dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	25	40	70	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat Digitalisasi Arsip (%)	50,05	55	70	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0	20	70	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	5	10	30	2.23.2.24.0.00.21.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3.25.0.00.0.00.22.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.084,18	4.245,32	4.518,88	3.25.0.00.0.00.22.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	46.125,46	48.300,51	50.875,62	3.25.0.00.0.00.22.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya KP	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Sumberdaya KP (%)	100	100	100	3.25.0.00.0.00.22.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat dan Produksi Garam Rakyat	Produksi Garam Rakyat (Ton) (Ton)	3.811,61	2.574,48	2.631,89	3.25.0.00.0.00.22.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton) (Ton)	4.834,23	4.987,54	5.182,23	3.25.0.00.0.00.22.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	66,67	100	100	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Orang)	200.526	234.313	326.671	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3,56	6,6	7,3	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
Meningkatnya jangkauan pemasaranKegiatan	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	25	50	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing (%)	5,6	7,25	7,73	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,10	0,13	0,23	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (%)	23,7	12,4	18,2	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	25	100	100	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3,00	3,07	3,15	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	5,00	5,05	5,12	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	2,00	2,05	2,15	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	5,00	5,05	5,15	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	37.225,19	37.225,19	37.225,19	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	30,00	31,15	40,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10,00	10,75	12,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	30,00	30,75	32,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	15,00	15,75	17,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	10,00	10,75	12	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,07	16,78	30,20	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	60	60	100	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	9	10	10	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	100	100	100	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	80	80	84	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (Koefisien)	1,00	0,86	0,48	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	-32,98	-32,10	-30,01	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	200.000.000	250.000.000	450.000.000	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	90	95	100	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	80	82	91	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
Meningkatnya Relisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (%)	4	4,08	4,48	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) (Orang)	0,5	0,16	0,2	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) (Nilai)	0,0000125	0,0000125	0,000025	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) (Rp)	0,1	0,1	0,5	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	30	30	50	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	8,4	8,6	9	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan (%)	70	70	90	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal ''Baik'' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan (%)	60	65	90	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
			2026	**2030**	
			TARGET	**TARGET**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(05)*	*(13)*	*(15)*
	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (%)	50	54	62	3.31.3.30.0.00.25.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
Meningkatnya penempatan transmigran	Persentase transmigran yang difasilitasi (%)	100	100	100	2.07.3.32.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Poin)	0	0	0	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Kepatuhan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%)	91,96	92,00	92,1	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat	Persentase efektifitas kerjasama daerah (%)	82,5	84,5	90,00	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tepat waktu (%)	80	88	100	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)	0	0	0	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Jumlah BUMD (Unit)	1	1	2	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Poin)	3,04	3,5	4,5	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai tingkat kematangan UKPBJ (Poin)	70	74	80	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ (Poin)	3,113	3,12	3,15	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	-	3,36	3,51	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase BUMD dan BLUD Sehat (%)	-	6,66	20	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Transaksi Saham per Kabupaten Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan (Milyar Rupiah)	31.999,45	34.999,45	38.999,45	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Total Kredit/PDRB ((%))	17,64	18,11	19,02	4.01.0.00.0.00.26.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
			2026	**2030**	
			TARGET	**TARGET**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(05)*	*(13)*	*(15)*
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	99,83	100	100	4.02.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD (Tepat Waktu)	1	1	1	4.02.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	50	55,00	65,00	4.02.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	4.02.0.00.0.00.27.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.02.0.00.0.00.30.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	37	36,78	33,97	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	91,20	92,30	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-4,0	-6,0	-8,5	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	27	29,32	35,35	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5,29	5,40	5,53	5.02.0.00.0.00.29.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
Meningkatnya upaya Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	12,13	15,87	16,41	5.02.0.00.0.00.30.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	5.02.0.00.0.00.30.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	5.02.0.00.0.00.30.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	95	95,20	95,60	5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (Poin)	82,68	83	89	5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	65	67	71	5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	75,00	75,80	79,00	5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	-	-	-	5.01.5.05.0.00.28.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6.01.0.00.0.00.32.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	91,77	92,06	92,65	6.01.0.00.0.00.32.0000 - INSPEKTORAT
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	6.01.0.00.0.00.32.0000 - INSPEKTORAT
	Manajemen Risiko Indeks (Level)	3	3	3	6.01.0.00.0.00.32.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
Meningkatannya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	6.01.0.00.0.00.32.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Jonggat)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	49,80	100	100	7.01.0.00.0.00.43.0000 - KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Pringgarata)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Batukliang)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	66,67	100	100	7.01.0.00.0.00.40.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Batukliang Utara)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.41.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Barat)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	66,67	100	100	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	90,69	100	100	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec.Pujut)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	50	100	100	7.01.0.00.0.00.38.0000 - KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Timur)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	50	100	100	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Janapria)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.44.0000 - KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Kopang)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.39.0000 - KANTOR CAMAT KOPANG
Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kec. Praya)	Nilai SAKIP PD (Angka)	67	71	81	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA
					7.01.0.00.0.00.33.0001 - KELURAHAN GONJAK
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Tengah)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA
					7.01.0.00.0.00.33.0001 - KELURAHAN GONJAK
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Tengah)	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Jonggat)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.43.0000 - KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Pringgarata)	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Batukliang)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.40.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Batukliang Utara)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.41.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Barat)	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Pujut)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.38.0000 - KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Timur)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Janapria)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.44.0000 - KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Kopang)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.39.0000 - KANTOR CAMAT KOPANG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya)	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif (%)	65	75	95	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA
					7.01.0.00.0.00.33.0001 - KELURAHAN GONJAK
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Tengah)	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Jonggat)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.43.0000 - KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Pringgarata)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	83	100	100	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Batukliang)	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.40.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Batukliang Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.41.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Barat)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Pujut)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.38.0000 - KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Timur)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	65	71	95	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Janapria)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	83,33	100	100	7.01.0.00.0.00.44.0000 - KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Kopang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	71	75	83	7.01.0.00.0.00.39.0000 - KANTOR CAMAT KOPANG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Tengah)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Jonggat)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.43.0000 - KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Pringgarata)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Batukliang)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.40.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Batukliang Utara)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.41.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Barat)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Pujut)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.38.0000 - KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Timur)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Janapria)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.44.0000 - KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Kopang)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.39.0000 - KANTOR CAMAT KOPANG
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Jonggat)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.43.0000 - KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Tengah)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Pringgarata)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Batukliang)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.40.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Batukliang Utara)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.41.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Barat)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Pujut)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.38.0000 - KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Timur)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Janapria)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.44.0000 - KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Kopang)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.39.0000 - KANTOR CAMAT KOPANG
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA

Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya Tengah)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	60	80	100	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Jonggat)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	53,85	92,31	100	7.01.0.00.0.00.43.0000 - KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Pringgarata)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Batukliang)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.40.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Batukliang Utara)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.41.0000 - KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya Barat)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	60	80	100	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Prabarda)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	25,00	58,33	100	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Pujut)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.38.0000 - KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya Timur)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Janapria)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.44.0000 - KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Kopang)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	7.01.0.00.0.00.39.0000 - KANTOR CAMAT KOPANG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
Meningkatnya etika dan budaya politik	Tingkat Partisipasi Pemilu (%)	83,58	0	0	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	72,22	72,22	94,44	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	5,32	40,43	68,79	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
Meningkatnya Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	8.01.0.00.0.00.45.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.2.3. Hubungan Prioritas Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung prioritas nasional dan provinsi guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi. Berikut disajikan keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.5.

Tabel. 4.5 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2026

Tema RKP Nasional	**Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**Tema RKPD Kabupaten Lombok Tengah**
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Menjadi Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia	Fondasi Masmirah melalui Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi**	**Prioritas Daerah**
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN1)	Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif, Dan Kolaboratif	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat - PD 5
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)	Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan - PD 3
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3)	Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan - PD 3
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas (PN4)	Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif Dan Inovatif	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia - PD 1
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5)	Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif, Dan Kolaboratif	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan - PD 3
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi Dan Tata Ruang Berkelanjutan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan - PD 4

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tema RKPD Kabupaten Lombok Tengah
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Menjadi Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia	Fondasi Masmirah melalui Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi**	**Prioritas Daerah**
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN7)	Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif, Dan Kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan - PD 2
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8)	Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah Dan Olahraga Prestasi Dan Transformasi Lingkungan Berkelanjutan Dan Ketahanan Iklim	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat - PD 5

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Kabupaten Lombok Tengah dengan SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan. Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evalusi capaian SDG's tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (goal) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

4.2.5. Keterkaitan Prioritas Kabupaten Lombok Tengah dengan SPM

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasara adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan

merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2026 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (TB, HIV dan AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2026 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, innformasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.6. Keterkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dimaksudkan:

a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam menyusun dokumen awal RKPD Tahun Anggaran 2026.
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Tengah melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2026.
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Lombok Tengah Tahun 2025-2029.
e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang lebih baik.

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan perangkat daerah (PD) yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program Pembangunan. Adapaun dalam menentukan indikatir kinerja dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan riil anggaran;
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu anggaran pada setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu anggaran pada setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi pagu anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.

Adapaun Rencana kerja pembangunan Tahun 2026 sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			910.910.578.218,00							981.266.370.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			907.960.578.218,00							972.016.370.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			907.960.578.218,00							972.016.370.000,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	729.726.172.329,00						-	709.770.000.000,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	163.545.801,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	400.000.000,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	39.622.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	29.344.522,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.449.078,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.130.201,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	40.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	728.104.310.824,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	700.470.000.000,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7264 Orang/bulan	727.875.230.634,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		700.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	99.584.190,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	114.496.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.400.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	100.000.000,00	
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	100.000.000,00	
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	44.631.122,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	600.000.000,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.299.122,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6.032.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	20.000.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	5.700.000.000,00	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.011.810.062,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	1.050.000.000,00	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	397.183.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	614.626.262,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	364.474.520,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	1.350.000.000,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	317.974.520,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	176.669.405.989,00						-	260.286.370.000,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	93.052.806.050,00			-	-	-	-	136.989.370.000,00	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	66 Unit	335.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	25 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	285.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	774 Orang	21.080.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	630 Satuan Pendidikan	217.536.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	630 Satuan Pendidikan	86.813.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		86.289.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24 Orang	115.153.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar											
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar											
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	136.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		16.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	28 Unit	40.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	86.405.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	630 Satuan Pendidikan	166.422.150,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	4.150.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	491.459.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	46.243.199.939,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	67.527.000.000,00	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	275.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	4.760.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium											
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	3.340.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	35.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	270.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	549 Orang	720.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	200 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	215 Satuan Pendidikan	35.900.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		31.285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24 Orang	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	101.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	200 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		5.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	621.839.939,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		3.462.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	30.942.959.700,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	41.640.200.000,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	230.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD											
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	11.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD											
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	8.919.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	10.378.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1015 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	35.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1200 Satuan Pendidikan	438.014.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	632 Satuan Pendidikan	25.457.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		24.670.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	24 Orang	140.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang	140.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	70.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17 Ruang	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	10.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	11.380.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	45.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	100 Paket	164.367.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD											
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.237 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 Ruang	3.860.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		2.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	6.430.440.300,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	14.129.800.000,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	78 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	78 Satuan Pendidikan	6.091.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		5.949.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	78 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	69.140.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	55.000.000,00						-	330.000.000,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	35.000.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	100 Buku	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	240 Orang	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar											
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	20.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	170.000.000,00	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	100 Buku	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	1.299.999.900,00						-	1.350.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.299.999.900,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	1.350.000.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	1.260.269.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	39.730.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	10.000.000,00						-	80.000.000,00	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	5.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	40.000.000,00	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	5.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	40.000.000,00	
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	200.000.000,00	
	1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota											
							Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	24 Orang	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0011	Fasilitasi media publik berbahasa daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	1 Media	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.950.000.000,00							9.250.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.950.000.000,00							9.250.000.000,00	
7	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	2.150.000.000,00						-	8.800.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	700.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	200.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan											
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.850.000.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	8.100.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	1.650.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional											
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	300.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	220.000.000,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	1 Sertifikat	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	500.000.000,00						-	230.000.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	10.000.000,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	400.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	220.000.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan											
							Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Kesehatan			351.401.877.487,40							194.184.014.393,77	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			351.401.877.487,40							194.184.014.393,77	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			351.401.877.487,40							194.184.014.393,77	
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	200.980.858.979,10						-	85.644.950.120,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	384.551.466,10			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	338.992.115,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	148.182.359,80	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		72.611.142,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	17.460.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		66.274.481,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	136.544.152,30	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		22.700.964,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	74.611.522,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		173.626.379,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	7.753.432,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.779.149,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	198.012.107.278,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	84.193.977.373,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1111 Orang/bulan	197.993.207.278,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		84.174.265.691,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.399.615,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		14.312.067,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	15.313.577,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	13.310.000,00	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.313.577,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	94.169.029,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	36.290.420,00	
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.999.792,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.418.043,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.824.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31.996.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		20.542.170,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	17.349.237,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.675.207,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.384.019.279,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	923.749.090,00	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.414.413.829,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		786.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	969.605.450,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		137.249.090,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.698.350,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	138.631.122,00	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	90.698.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		138.631.122,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	150.330.020.600,30						-	108.366.761.072,77	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keterpenuhan ASPAK	100 %	31.667.975.804,00			-	-	-	-	42.172.195.084,56	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas											
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	22.847.391.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		17.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	3.856.438.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		4.587.125.105,64	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	1.050.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.697.562.528,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	800.481.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.685.273.385,06	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	50.082.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.827.550,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	3.032.437.604,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.470.406.515,86	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	31.146.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan	100 %	118.590.294.941,10			-	-	-	-	66.029.899.651,21	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	22.512.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		257.124.879,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19.972.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-	-		111.898.682,50	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19.996.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		181.460.255,13	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	14.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.124.939,50	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19.998.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.120.160,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.124.395,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.933.739,50	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	25.040.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.088.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	25.040.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		15.073.575,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	20.035.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.063.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	30.090.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		18.022.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	35.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		30.234.875,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	42.519.332,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		578.677.738,65	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	12.502.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		30.882.012,04	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	27.498.678,10	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		60.540.396,46	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		18.059.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	57.506.259,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		50.650.842,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	105.028.971.770,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		63.240.829.123,43	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	12.340.744.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-	-		403.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	663.692.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		456.223.422,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	29.345.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.584.809,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	35.180.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.947.984,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	34.993.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.167.523,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	19.996.902,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		402.409.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	32.502.000,20			-	-	-	-	18.150.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	32.502.000,20	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	39.247.855,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-	-	146.516.337,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	30 Unit	22.501.840,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	16.746.015,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.516.337,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	23.490.359,00						-	82.396.093,00	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	23.490.359,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	82.396.093,00	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2484 Orang	980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		2.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	22.510.359,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.396.093,00	DINAS KESEHATAN
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	67.507.549,00						-	89.907.108,00	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	67.507.549,00			-	-	-	-	89.907.108,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	67.507.549,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		89.907.108,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Teratak			4.081.360.000,00							3.671.547.702,02	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.081.360.000,00							3.671.547.702,02	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.081.360.000,00							3.671.547.702,02	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	840.000.000,00						-	440.215.600,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	840.000.000,00			-	-	-	-	440.215.600,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	840.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		440.215.600,00	PUSKESMAS TERATAK
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.235.470.000,00						-	3.224.853.102,02	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.235.470.000,00			-	-	-	-	3.224.853.102,02	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	145.501.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		160.051.100,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	17.905.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		19.695.500,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	15.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.160.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	14.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.708.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	456.273.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		501.900.300,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.380.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.018.000,00	PUSKESMAS TERATAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		14.355.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.290.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.119.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	6.580.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.238.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	113.455.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		124.800.500,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.202.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		2.088.036.102,02	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	177.106.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		194.816.600,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.650.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.615.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.320.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.150.000,00	PUSKESMAS TERATAK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	41.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		45.870.000,00	PUSKESMAS TERATAK
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.890.000,00						-	6.479.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.890.000,00			-	-	-	-	6.479.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.890.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.479.000,00	PUSKESMAS TERATAK
						Puskesmas Darek			3.861.188.758,00							3.435.335.860,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.861.188.758,00							3.435.335.860,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.861.188.758,00							3.435.335.860,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	804.383.368,00						-	489.396.160,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	804.383.368,00			-	-	-	-	489.396.160,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	804.383.368,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		489.396.160,00	PUSKESMAS DAREK
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.051.037.390,00						-	2.939.594.900,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.051.037.390,00			-	-	-	-	2.939.594.900,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	99.116.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		109.027.600,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	15.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.149.000,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	9.295.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.224.500,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	380.602.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		418.662.200,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		770.000,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.870.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		14.157.000,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	13.291.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		14.620.100,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	76.475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		84.122.500,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.237.790.390,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		2.045.023.200,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	137.408.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		151.148.800,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	24.275.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		26.702.500,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	350.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		385.000,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.875.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.362.500,00	PUSKESMAS DAREK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	38.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		42.240.000,00	PUSKESMAS DAREK
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.768.000,00						-	6.344.800,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.768.000,00			-	-	-	-	6.344.800,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.768.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.344.800,00	PUSKESMAS DAREK
						Puskesmas Batujai			2.041.278.531,00							1.429.050.497,91	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.041.278.531,00							1.429.050.497,91	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.041.278.531,00							1.429.050.497,91	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	370.851.875,00						-	212.875.300,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	370.851.875,00			-	-	-	-	212.875.300,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	370.851.875,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		212.875.300,00	PUSKESMAS BATUJAI
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.665.000.656,00						-	1.210.206.597,91	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.665.000.656,00			-	-	-	-	1.210.206.597,91	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	20.040.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		22.044.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	26.380.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		29.018.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	5.850.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.435.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	3.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.465.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	199.081.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		218.989.100,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.405.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.645.500,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.540.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.994.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.839.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.722.900,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	210.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		231.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	39.402.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		43.342.200,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.266.664.656,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		772.036.997,91	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	65.578.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		72.135.800,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.828.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	481.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		529.100,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	720.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		792.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	18.180.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		19.998.000,00	PUSKESMAS BATUJAI
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.426.000,00						-	5.968.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.426.000,00			-	-	-	-	5.968.600,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.426.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.968.600,00	PUSKESMAS BATUJAI
						Puskesmas Tanak Beak			2.278.023.000,00							1.723.527.073,40	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.278.023.000,00							1.723.527.073,40	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.278.023.000,00							1.723.527.073,40	
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	576.748.000,00						-	264.355.080,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	576.748.000,00			-	-	-	-	264.355.080,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	576.748.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		264.355.080,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.696.795.000,00						-	1.454.243.993,40	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.696.795.000,00			-	-	-	-	1.454.243.993,40	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	52.920.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		58.212.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	23.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		25.476.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		990.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	4.020.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.422.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	220.888.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		242.976.800,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.122.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.226.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.748.600,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	5.520.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.072.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	1.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.452.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	39.810.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		43.791.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.210.734.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		919.576.893,40	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	82.831.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		91.114.100,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.012.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.913.200,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	189.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		207.900,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.158.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	35.465.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		39.011.500,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.480.000,00						-	4.928.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.480.000,00			-	-	-	-	4.928.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.928.000,00	PUSKESMAS TANAK BEAK
						Puskesmas Wajegeseng			2.268.383.000,00							1.567.140.300,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.268.383.000,00							1.567.140.300,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.268.383.000,00							1.567.140.300,00	
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	710.946.000,00						-	275.521.400,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	710.946.000,00			-	-	-	-	275.521.400,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	710.946.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		275.521.400,00	PUSKESMAS WAJEGESENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.552.877.000,00						-	1.286.602.900,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.552.877.000,00			-	-	-	-	1.286.602.900,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	53.240.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		58.564.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	22.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		25.080.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	1.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.980.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	4.140.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.554.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	216.507.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		238.157.700,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.772.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.682.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.550.750,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.456.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.902.150,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	1.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.320.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	54.175.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		59.592.500,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.080.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		766.438.200,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	79.803.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		87.783.300,00	PUSKESMAS WAJEGESENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.953.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.448.300,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	260.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		286.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.376.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	16.180.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.798.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.560.000,00						-	5.016.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.560.000,00			-	-	-	-	5.016.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.560.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.016.000,00	PUSKESMAS WAJEGESENG
						Puskesmas Mantang			4.783.758.938,00							4.349.758.463,88	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.783.758.938,00							4.349.758.463,88	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.783.758.938,00							4.349.758.463,88	
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.099.662.500,00						-	668.103.920,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.099.662.500,00			-	-	-	-	668.103.920,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.099.662.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		668.103.920,00	PUSKESMAS MANTANG
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.678.656.438,00						-	3.675.670.543,88	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.678.656.438,00			-	-	-	-	3.675.670.543,88	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	104.375.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		114.812.500,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	25.595.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		28.154.500,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	8.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.240.000,00	PUSKESMAS MANTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	11.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.870.000,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	514.382.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		565.820.200,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.900.000,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.433.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		19.176.300,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.296.000,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	1.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	90.685.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		99.753.500,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.562.019.438,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		2.448.909.843,88	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	190.716.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		209.787.600,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	6.045.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.649.500,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	175.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		192.500,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	50.591.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		55.650.100,00	PUSKESMAS MANTANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	76.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		84.458.000,00	PUSKESMAS MANTANG
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.440.000,00						-	5.984.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.440.000,00			-	-	-	-	5.984.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.984.000,00	PUSKESMAS MANTANG
						Puskesmas Praya			6.485.848.868,00							7.555.470.005,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.485.848.868,00							7.555.470.005,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.485.848.868,00							7.555.470.005,60	
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	250.581.300,00						-	885.343.412,80	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	250.581.300,00			-	-	-	-	885.343.412,80	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	250.581.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		885.343.412,80	PUSKESMAS PRAYA
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	6.199.854.768,00						-	6.631.172.512,80	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.199.854.768,00			-	-	-	-	6.631.172.512,80	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	192.240.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		211.464.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	157.460.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		173.206.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	4.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.280.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	11.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.210.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	659.177.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		725.094.700,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	7.860.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.646.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.170.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		16.687.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	37.166.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.882.600,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	8.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.240.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	83.595.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		91.954.500,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	4.617.686.568,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		4.890.787.492,80	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	243.514.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		267.865.620,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.532.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.785.750,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.153.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.568.850,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.620.000,00	PUSKESMAS PRAYA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	150.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		165.880.000,00	PUSKESMAS PRAYA
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	35.412.800,00						-	38.954.080,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.412.800,00			-	-	-	-	38.954.080,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	35.412.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		38.954.080,00	PUSKESMAS PRAYA
						Puskesmas Mangkung			3.577.944.180,00							3.382.659.989,25	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.577.944.180,00							3.382.659.989,25	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.577.944.180,00							3.382.659.989,25	
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	793.640.300,00						-	481.754.793,30	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	793.640.300,00			-	-	-	-	481.754.793,30	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	793.640.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		481.754.793,30	PUSKESMAS MANGKUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.776.970.880,00						-	2.892.838.895,95	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.776.970.880,00			-	-	-	-	2.892.838.895,95	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	71.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		78.540.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	59.580.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		65.538.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	8.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.240.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	412.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		454.080.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.004.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		19.404.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.980.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.360.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.696.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	79.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		87.428.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.879.076.880,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.905.155.495,95	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	152.864.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		168.150.400,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	19.880.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		21.868.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	15.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.204.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	215.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		236.500,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3.840.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.224.000,00	PUSKESMAS MANGKUNG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	37.355.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		41.090.500,00	PUSKESMAS MANGKUNG
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	7.333.000,00						-	8.066.300,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.333.000,00			-	-	-	-	8.066.300,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.333.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.066.300,00	PUSKESMAS MANGKUNG
						Puskesmas Mujur			3.517.298.264,00							3.314.005.508,01	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.517.298.264,00							3.314.005.508,01	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.517.298.264,00							3.314.005.508,01	
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	563.109.264,00						-	295.748.640,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	563.109.264,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	295.748.640,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	563.109.264,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		295.748.640,00	PUSKESMAS MUJUR
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.927.825.000,00						-	2.989.256.468,01	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.927.825.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	2.989.256.468,01	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19.775.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		21.752.500,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	44.990.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		49.489.000,00	PUSKESMAS MUJUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	10.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		11.880.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	21.960.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		24.156.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	422.950.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		465.245.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	11.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.166.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.563.450,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.819.795,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	22.500.550,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		24.750.605,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.960.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	60.730.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		66.803.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.078.712.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.055.232.168,01	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	147.483.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		162.231.300,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14.861.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		16.347.100,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.650.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.540.000,00	PUSKESMAS MUJUR
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	42.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		47.234.000,00	PUSKESMAS MUJUR
40	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	26.364.000,00						-	29.000.400,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	26.364.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	29.000.400,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	26.364.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		29.000.400,00	PUSKESMAS MUJUR
						Puskesmas Pengadang			4.945.607.018,00							4.544.798.519,80	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.945.607.018,00							4.544.798.519,80	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.945.607.018,00							4.544.798.519,80	
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.407.396.000,00						-	652.766.400,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.407.396.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	652.766.400,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.407.396.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		652.766.400,00	PUSKESMAS PENGADANG
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.536.951.018,00						-	3.890.646.119,80	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.536.951.018,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.890.646.119,80	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	17.885.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		19.673.500,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	27.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		29.876.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.234.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	30.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		33.825.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	404.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		445.390.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.260.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		9.086.000,00	PUSKESMAS PENGADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	11.505.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.655.500,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	5.645.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.209.500,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	840.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		924.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	63.665.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		70.031.500,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.646.360.018,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.910.996.019,80	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	155.909.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		171.499.900,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	80.577.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		88.634.700,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.826.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	26.760.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		29.436.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	52.135.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		57.348.500,00	PUSKESMAS PENGADANG
43	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.260.000,00						-	1.386.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.260.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	1.386.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1.260.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.386.000,00	PUSKESMAS PENGADANG
						Puskesmas Ubung			4.895.262.936,00							4.102.847.542,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.895.262.936,00							4.102.847.542,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.895.262.936,00							4.102.847.542,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	954.081.136,00						-	432.588.200,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	954.081.136,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	432.588.200,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	954.081.136,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		432.588.200,00	PUSKESMAS UBUNG
45	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.937.434.200,00						-	3.666.136.982,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.937.434.200,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.666.136.982,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	105.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		115.500.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	36.920.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		40.612.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	1.950.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.145.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	35.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		39.534.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	445.805.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		490.385.500,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.600.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.959.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.454.900,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		22.165.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	2.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.080.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	83.540.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		91.894.000,00	PUSKESMAS UBUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.943.586.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.572.904.842,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	172.537.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		189.791.140,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.416.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		24.657.600,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	450.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		495.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	16.860.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		18.546.000,00	PUSKESMAS UBUNG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	38.520.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		42.372.000,00	PUSKESMAS UBUNG
46	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	3.747.600,00						-	4.122.360,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.747.600,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	4.122.360,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.747.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.122.360,00	PUSKESMAS UBUNG
						Puskesmas Bagu			4.448.789.016,00							3.362.519.298,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.448.789.016,00							3.362.519.298,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.448.789.016,00							3.362.519.298,00	
47	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.459.677.600,00						-	566.205.200,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.459.677.600,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	566.205.200,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.459.677.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		566.205.200,00	PUSKESMAS BAGU
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.982.021.416,00						-	2.788.515.098,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.982.021.416,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	2.788.515.098,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	103.680.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		114.048.000,00	PUSKESMAS BAGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	14.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		16.104.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	13.680.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		15.048.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	7.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.920.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	354.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		390.280.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.630.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.425.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		8.167.610,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	5.450.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.995.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	8.260.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		9.086.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	91.952.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		101.148.190,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.190.922.416,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.918.306.198,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	134.695.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		148.164.500,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.956.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.451.600,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.080.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	100 Dokumen	3.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.158.000,00	PUSKESMAS BAGU
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	34.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		37.928.000,00	PUSKESMAS BAGU
49	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	7.090.000,00						-	7.799.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.090.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	7.799.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.090.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.799.000,00	PUSKESMAS BAGU
						Puskesmas Pringgarata			4.068.530.000,00							3.767.622.770,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.068.530.000,00							3.767.622.770,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.068.530.000,00							3.767.622.770,00	
50	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	814.432.000,00						-	345.875.200,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	814.432.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	345.875.200,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	814.432.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		345.875.200,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
51	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.247.734.000,00						-	3.414.747.170,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.247.734.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.414.747.170,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	141.407.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		155.547.700,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	22.075.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		24.282.500,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	11.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.870.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	21.240.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		23.364.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	468.631.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		515.494.100,00	PUSKESMAS PRINGGARATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.314.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.673.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.240.300,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	5.710.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.281.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.290.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	120.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		132.308.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.209.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.273.129.770,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	177.478.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		195.225.800,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5.790.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.369.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	350.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		385.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	9.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		10.010.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	38.760.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		42.636.000,00	PUSKESMAS PRINGGARATA
52	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.364.000,00						-	7.000.400,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.364.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	7.000.400,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.364.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.000.400,00	PUSKESMAS PRINGGARATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Aik Darek			4.676.376.200,00							4.515.950.780,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.676.376.200,00							4.515.950.780,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.676.376.200,00							4.515.950.780,00	
53	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.147.585.200,00						-	922.480.680,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.147.585.200,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	922.480.680,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.147.585.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		922.480.680,00	PUSKESMAS AIK DAREK
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.524.265.560,00						-	3.588.492.116,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.524.265.560,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.588.492.116,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	67.420.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		74.162.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	31.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		34.628.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	11.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.090.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	11.550.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.705.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	461.524.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		507.676.400,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	17.560.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		19.316.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.670.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.237.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		27.720.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	99.401.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		109.341.100,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.518.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.481.600.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	172.176.560,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		189.394.216,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	35.850.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		39.435.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.224.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.346.400,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		23.760.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	43.710.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		48.081.000,00	PUSKESMAS AIK DAREK
55	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.525.440,00						-	4.977.984,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.525.440,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	4.977.984,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.525.440,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.977.984,00	PUSKESMAS AIK DAREK
						Puskesmas Aik Mual			5.171.805.000,00							10.050.046.207,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.171.805.000,00							10.050.046.207,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.171.805.000,00							10.050.046.207,00	
56	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	682.888.000,00						-	5.680.006.992,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	682.888.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	5.680.006.992,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	682.888.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.680.006.992,00	PUSKESMAS AIK MUAL
57	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	4.473.267.000,00						-	4.352.824.215,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.473.267.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	4.352.824.215,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	119.520.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		131.472.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	45.810.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		50.391.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	9.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		9.900.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	9.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		10.065.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	670.565.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		737.621.500,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.430.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		10.373.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.124.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.736.400,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.580.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.738.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	5.760.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.336.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	169.325.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		186.257.500,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	3.073.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.812.530.515,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	244.318.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		268.749.800,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	28.970.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		31.867.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	895.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		984.500,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	30.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		33.660.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	39.220.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		43.142.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
58	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	15.650.000,00						-	17.215.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15.650.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	17.215.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	15.650.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		17.215.000,00	PUSKESMAS AIK MUAL
						Puskesmas Sengkol			5.796.479.770,60							5.424.327.744,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.796.479.770,60							5.424.327.744,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.796.479.770,60							5.424.327.744,00	
59	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.352.424.150,00						-	943.290.810,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.352.424.150,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	943.290.810,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.352.424.150,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		943.290.810,00	PUSKESMAS SENGKOL
60	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	4.436.962.820,60						-	4.473.234.854,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.436.962.820,60			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	4.473.234.854,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		110.352.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	66.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		73.040.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2.340.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.574.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	6.120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.732.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	526.090.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		578.699.000,00	PUSKESMAS SENGKOL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	11.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.090.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.158.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.273.800,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.130.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		19.943.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	7.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		8.580.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	110.870.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		121.957.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	3.287.668.620,60	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.209.011.234,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	202.053.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		222.258.520,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.686.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	733.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		806.300,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		8.580.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	73.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		80.652.000,00	PUSKESMAS SENGKOL
61	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	7.092.800,00						-	7.802.080,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.092.800,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	7.802.080,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.092.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.802.080,00	PUSKESMAS SENGKOL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Kuta			3.643.427.000,00							3.048.239.856,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.643.427.000,00							3.048.239.856,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.643.427.000,00							3.048.239.856,00	
62	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.351.289.000,00						-	528.914.760,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.351.289.000,00			-	-	-	-	528.914.760,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.351.289.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		528.914.760,00	PUSKESMAS KUTA
63	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.281.854.500,00						-	2.508.013.246,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.281.854.500,00			-	-	-	-	2.508.013.246,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	88.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		97.970.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	14.470.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.917.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	3.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.949.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	6.632.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.295.200,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	332.685.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		365.953.500,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	7.380.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.118.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	19.530.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		21.483.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.296.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.078.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	70.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		77.484.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	1.578.207.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.733.820.996,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	119.022.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		130.924.750,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.373.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.810.300,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	605.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		665.500,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		660.000,00	PUSKESMAS KUTA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	25.080.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		27.588.000,00	PUSKESMAS KUTA
64	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	10.283.500,00						-	11.311.850,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.283.500,00			-	-	-	-	11.311.850,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	10.283.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11.311.850,00	PUSKESMAS KUTA
						Puskesmas Batu Jangkih			2.157.323.966,00							2.005.387.314,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.157.323.966,00							2.005.387.314,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.157.323.966,00							2.005.387.314,00	
65	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	400.944.160,00						-	177.076.240,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	400.944.160,00			-	-	-	-	177.076.240,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	400.944.160,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		177.076.240,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
66	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.749.668.806,00						-	1.820.928.974,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.749.668.806,00			-	-	-	-	1.820.928.974,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	28.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		31.680.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	13.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		14.465.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	7.920.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.712.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	4.680.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.148.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	244.837.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		269.320.700,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	2.730.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.003.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	8.320.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.152.110,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	5.075.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.582.500,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	5.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.940.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	42.952.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		47.248.190,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	1.252.278.806,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.273.799.974,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	84.564.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		93.020.400,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100 Dokumen	6.171.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.788.100,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100 Dokumen	1.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.265.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	10.140.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11.154.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		34.650.000,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
67	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.711.000,00						-	7.382.100,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.711.000,00			-	-	-	-	7.382.100,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.711.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.382.100,00	PUSKESMAS BATU JANGKIH
						Puskesmas Puyung			4.187.386.485,00							4.208.212.008,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.187.386.485,00							4.208.212.008,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.187.386.485,00							4.208.212.008,00	
68	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	843.984.810,00						-	783.646.753,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	843.984.810,00			-	-	-	-	783.646.753,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	843.984.810,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		783.646.753,00	PUSKESMAS PUYUNG
69	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.330.481.675,00						-	3.410.353.255,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.330.481.675,00			-	-	-	-	3.410.353.255,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	55.840.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		61.424.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	35.630.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		39.193.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	3.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.290.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	11.340.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.474.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	424.572.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		467.029.200,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.575.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.732.500,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.580.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	21.079.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		23.186.900,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	6.240.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.864.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	80.455.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		88.500.500,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.450.982.675,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		2.442.904.355,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	150.888.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		165.976.800,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	26.270.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		28.897.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		770.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11.088.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	43.130.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		47.443.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
70	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	12.920.000,00						-	14.212.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.920.000,00			-	-	-	-	14.212.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12.920.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		14.212.000,00	PUSKESMAS PUYUNG
						Puskesmas Penujak			3.262.467.000,00							2.684.309.029,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.262.467.000,00							2.684.309.029,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.262.467.000,00							2.684.309.029,00	
71	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	758.000.000,00						-	455.025.120,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	758.000.000,00			-	-	-	-	455.025.120,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	758.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		455.025.120,00	PUSKESMAS PENUJAK
72	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.497.873.000,00						-	2.222.030.509,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.497.873.000,00			-	-	-	-	2.222.030.509,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	47.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		52.008.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	26.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		28.875.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	5.540.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.094.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	17.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		18.810.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	354.464.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		389.910.400,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	20.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	-	-		22.055.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.820.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	-	-		5.302.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	14.960.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		16.456.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	5.930.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.523.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	73.530.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		80.883.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.740.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.388.370.209,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	117.409.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		129.149.900,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14.650.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		16.115.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	430.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		473.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.240.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	47.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		51.766.000,00	PUSKESMAS PENUJAK
73	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.594.000,00						-	7.253.400,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.594.000,00			-	-	-	-	7.253.400,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.594.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	-	-		7.253.400,00	PUSKESMAS PENUJAK
						Puskesmas Ganti			4.013.374.000,00							2.850.479.724,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.013.374.000,00							2.850.479.724,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.013.374.000,00							2.850.479.724,00	
74	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	611.743.000,00						-	414.194.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	611.743.000,00			-	-	-	-	414.194.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	611.743.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		414.194.000,00	PUSKESMAS GANTI
75	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.392.721.000,00						-	2.426.484.724,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.392.721.000,00			-	-	-	-	2.426.484.724,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	56.520.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		62.172.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	35.420.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		38.962.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.310.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	9.660.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.626.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	452.282.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		497.510.200,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.960.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.589.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		13.847.900,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		19.910.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	1.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.540.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	64.345.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		70.779.500,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.520.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.466.491.624,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	149.412.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		164.353.200,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5.123.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.635.300,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	840.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		924.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.620.000,00	PUSKESMAS GANTI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	57.130.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		62.843.000,00	PUSKESMAS GANTI
76	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.910.000,00						-	9.801.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.910.000,00			-	-	-	-	9.801.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.910.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.801.000,00	PUSKESMAS GANTI
						Puskesmas Batunyala			3.910.627.709,00							3.020.113.871,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.910.627.709,00							3.020.113.871,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.910.627.709,00							3.020.113.871,00	
77	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.088.122.100,00						-	372.652.500,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.088.122.100,00			-	-	-	-	372.652.500,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.088.122.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		372.652.500,00	PUSKESMAS BATUNYALA
78	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.817.289.609,00						-	2.641.723.771,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.817.289.609,00			-	-	-	-	2.641.723.771,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	79.971.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		87.968.100,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	36.850.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.535.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	10.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11.550.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	11.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.804.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	401.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		441.914.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	14.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.510.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	14.430.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.873.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.755.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	11.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		13.090.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	94.430.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		103.873.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.944.620.609,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.681.787.871,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	148.252.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		163.077.200,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.325.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.557.500,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	975.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.072.500,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.920.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.412.000,00	PUSKESMAS BATUNYALA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	33.586.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		36.944.600,00	PUSKESMAS BATUNYALA
79	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.216.000,00						-	5.737.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.216.000,00			-	-	-	-	5.737.600,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.216.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.737.600,00	PUSKESMAS BATUNYALA
						Puskesmas Langko			3.800.594.848,00							3.354.983.748,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.800.594.848,00							3.354.983.748,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.800.594.848,00							3.354.983.748,00	
80	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.342.736.248,00						-	748.117.480,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.342.736.248,00			-	-	-	-	748.117.480,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.342.736.248,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		748.117.480,00	PUSKESMAS LANGKO
81	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.452.386.600,00						-	2.600.847.068,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.452.386.600,00			-	-	-	-	2.600.847.068,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	112.540.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		123.794.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	25.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		27.566.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	7.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.920.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	11.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.804.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	429.921.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		472.913.100,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.030.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11.033.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.078.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.585.800,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.220.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		22.242.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.600.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	95.136.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		104.649.600,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.520.902.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.576.214.668,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	158.322.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		174.154.200,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.884.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.052.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.157.200,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.434.000,00	PUSKESMAS LANGKO
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	39.905.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		43.895.500,00	PUSKESMAS LANGKO
82	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.472.000,00						-	6.019.200,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.472.000,00			-	-	-	-	6.019.200,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.472.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.019.200,00	PUSKESMAS LANGKO
						Puskesmas Bonjeruk			4.430.935.150,00							2.965.201.905,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.430.935.150,00							2.965.201.905,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.430.935.150,00							2.965.201.905,00	
83	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.543.648.150,00						-	336.591.640,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.543.648.150,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	336.591.640,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.543.648.150,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		336.591.640,00	PUSKESMAS BONJERUK
84	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.881.227.000,00						-	2.621.944.265,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.881.227.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	2.621.944.265,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		54.120.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	23.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		25.740.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	1.260.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.386.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	7.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		8.514.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	338.143.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		371.957.300,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	14.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		15.466.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.859.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		8.644.900,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.510.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		26.961.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.828.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	63.245.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		69.569.500,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.124.096.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.789.100.165,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	130.957.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		144.052.700,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	43.287.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		47.615.700,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		858.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.728.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	36.730.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		40.403.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
85	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.060.000,00						-	6.666.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.060.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	6.666.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		6.666.000,00	PUSKESMAS BONJERUK
						Puskesmas Teruwai			3.266.968.300,00							2.571.241.479,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.266.968.300,00							2.571.241.479,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.266.968.300,00							2.571.241.479,00	
86	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	806.325.300,00						-	451.541.200,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	806.325.300,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	451.541.200,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	806.325.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		451.541.200,00	PUSKESMAS TERUWAI
87	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.454.245.000,00						-	2.112.662.479,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.454.245.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	2.112.662.479,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	48.840.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		53.724.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	18.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		19.976.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	1.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.320.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	2.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.058.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	320.151.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		352.166.100,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.460.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.806.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.165.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.381.500,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	5.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.808.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	360.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		396.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	81.315.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		89.446.500,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.803.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.396.358.979,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	109.207.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		120.127.700,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	210.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		231.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	28.897.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		31.786.700,00	PUSKESMAS TERUWAI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	29.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		32.076.000,00	PUSKESMAS TERUWAI
88	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.398.000,00						-	7.037.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.398.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	7.037.800,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.398.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.037.800,00	PUSKESMAS TERUWAI
						Puskesmas Kopang			4.874.205.000,00							3.961.394.041,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.874.205.000,00							3.961.394.041,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.874.205.000,00							3.961.394.041,00	
89	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.362.837.000,00						-	928.142.160,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.362.837.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	928.142.160,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.362.837.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		928.142.160,00	PUSKESMAS KOPANG
90	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.502.428.000,00						-	3.023.417.881,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.502.428.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.023.417.881,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	44.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		48.840.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	36.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		40.414.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	10.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		11.880.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	15.115.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		16.626.500,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	426.025.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		468.627.500,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	7.070.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.777.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.579.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		10.536.900,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.960.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		9.856.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	2.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.904.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	93.145.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		102.459.500,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.642.184.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.077.149.481,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	151.946.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		167.140.600,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	15.675.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		17.242.720,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.208.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.329.680,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.620.000,00	PUSKESMAS KOPANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	32.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		36.014.000,00	PUSKESMAS KOPANG
91	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.940.000,00						-	9.834.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.940.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	9.834.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		9.834.000,00	PUSKESMAS KOPANG
						Puskesmas Muncan			3.947.587.454,00							3.505.738.482,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.947.587.454,00							3.505.738.482,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.947.587.454,00							3.505.738.482,00	
92	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	548.477.454,00						-	292.325.880,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	548.477.454,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	292.325.880,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	548.477.454,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		292.325.880,00	PUSKESMAS MUNCAN
93	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.389.902.000,00						-	3.203.283.802,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.389.902.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.203.283.802,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.560.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		54.516.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	50.930.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		56.023.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.310.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	16.650.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		18.315.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	463.443.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		509.787.300,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.370.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.458.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.458.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	26.789.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		29.467.900,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	2.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.310.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	77.360.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		85.096.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.472.708.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.195.103.002,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	156.813.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		172.507.500,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		7.700.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.751.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.126.100,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		4.620.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	42.340.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		46.574.000,00	PUSKESMAS MUNCAN
94	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	9.208.000,00						-	10.128.800,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.208.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	10.128.800,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.208.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		10.128.800,00	PUSKESMAS MUNCAN
						Puskesmas Janapria			5.078.506.473,00							4.911.215.215,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.078.506.473,00							4.911.215.215,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.078.506.473,00							4.911.215.215,00	
95	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.293.712.473,00						-	1.184.987.387,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.293.712.473,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	1.184.987.387,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.293.712.473,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.184.987.387,00	PUSKESMAS JANAPRIA
96	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	3.776.104.000,00						-	3.716.668.828,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.776.104.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	3.716.668.828,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	47.680.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		52.448.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	35.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		38.720.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2.880.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.168.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	7.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.052.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	488.453.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		537.298.300,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	23.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		26.070.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.080.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.288.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12.060.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.266.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	4.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.434.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	124.145.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		136.559.500,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.766.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.606.214.428,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	173.906.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		191.296.600,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.935.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		13.128.500,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.860.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	31.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		34.452.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	41.285.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		45.413.500,00	PUSKESMAS JANAPRIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.690.000,00						-	9.559.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.690.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	9.559.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.690.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		9.559.000,00	PUSKESMAS JANAPRIA
						Puskesmas Pelabuhan Awang			766.374.377,00							315.499.140,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			766.374.377,00							315.499.140,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			766.374.377,00							315.499.140,00	
98	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	207.799.800,00						-	60.940.440,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	207.799.800,00			-	-	-	-	60.940.440,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	207.799.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.940.440,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
99	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	554.824.577,00						-	250.433.700,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	554.824.577,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	250.433.700,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	11.550.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		12.705.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	7.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		8.030.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	360.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		396.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	3.180.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.498.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	113.924,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		125.316.400,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.420.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.562.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	3.123.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.435.300,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		3.498.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	1.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		1.980.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	22.470.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		24.717.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	440.967.653,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		0,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	42.536.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		46.789.600,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.684.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		5.152.400,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	140.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		154.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		2.640.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.560.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
100	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	3.750.000,00						-	4.125.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.750.000,00			-	-	-	-	4.125.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.125.000,00	PUSKESMAS PELABUHAN AWANG
						Rumah Sakit Umum Daerah Praya			105.289.723.224,00							99.705.271.192,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			105.289.723.224,00							99.705.271.192,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			105.289.723.224,00							99.705.271.192,00	
101	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	91.720.459.778,00						-	40.309.222.283,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	32.439.000,00			-	-	-	-	189.222.283,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.039.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		189.222.283,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	17.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	-	-	40.000.000.000,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	460 Orang/bulan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	650.529.778,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	120.000.000,00	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	499.373.278,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	61.716.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	89.440.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	89.406.000,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	0,00	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.406.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	90.948.085.000,00			-	-	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	90.948.085.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
102	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	13.059.419.846,00						-	55.805.733.911,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keterpenuhan ASPAK	100 %	12.950.139.846,00			-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-	-	55.785.733.911,00	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	539.375.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		900.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	26.770.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	1.437.396.463,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		15.524.920.880,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	171.437.779,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	768 Unit	775.133.503,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan sistem layanan Kesehatan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	10.000.027.101,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		38.650.813.031,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	109.280.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	109.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
103	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	509.843.600,00						-	3.590.314.998,00	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	509.843.600,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-	-	3.590.314.998,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	509.843.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		3.590.314.998,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
						UPTD. Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (BLUD)			3.454.046.000,00							110.259.987.601,50	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.454.046.000,00							110.259.987.601,50	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.454.046.000,00							110.259.987.601,50	
104	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.454.046.000,00						-	110.259.987.601,50	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.454.046.000,00			-	-	-	-	110.259.987.601,50	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.454.046.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		110.259.987.601,50	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN DAN UNIT TRANSFUSI DARAH (BLUD)
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			44.584.645.489,00							133.083.686.674,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			44.584.645.489,00							133.083.686.674,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			44.584.645.489,00							133.083.686.674,00	
105	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	20.991.626.279,00						-	12.830.663.887,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100 Persen	141.639.338,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)	-	155.622.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.710.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		9.622.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.163.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.863.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.318.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	74.090.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.793.838,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (Bapperida, Inspektorat, BKAD)		26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan, ketepatan, dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 Persen	16.503.811.329,00			-	-	Bendahara dan pengelola keuangan perangkat daerah , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) ,Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)	-	418.587.425,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	16.329.111.329,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bendahara dan pengelola keuangan perangkat daerah , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) ,Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	156.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Bendahara dan pengelola keuangan perangkat daerah , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) ,Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)		396.035.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	18.420.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Bendahara dan pengelola keuangan perangkat daerah , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) ,Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)		22.551.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	718.200,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengelola Barang dan Pengurus Barang pada masing-masing perangkat daerah, Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Auditor Internal (Inspektorat)	-	0,00	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	718.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengelola Barang dan Pengurus Barang pada masing-masing perangkat daerah, Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Auditor Internal (Inspektorat)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dan ketepatan waktu administrasi kepegawaian	100 Persen	9.480.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan perangkat daerah, Bagian/Subbagian Kepegawaian, BKPSDM	-	16.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.480.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan perangkat daerah, Bagian/Subbagian Kepegawaian, BKPSDM		16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai prosedur	100 Persen	223.489.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Seluruh unit kerja di lingkungan perangkat daerah	-	155.214.608,00	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	156.475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Seluruh unit kerja di lingkungan perangkat daerah		50.107.304,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	65.214.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Seluruh unit kerja di lingkungan perangkat daerah		99.107.304,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Seluruh unit kerja di lingkungan perangkat daerah		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai rencana, tepat mutu, dan tepat waktu	100 Persen	756.490.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional dan Struktural, Pengelola Barang Milik Daerah, Bagian Aset Daerah	-	5.458.973.560,00	
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	756.490.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional dan Struktural, Pengelola Barang Milik Daerah, Bagian Aset Daerah		5.458.973.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan spesifikasi, kebutuhan, dan waktu pelaksanaan	100 Persen	2.771.630.208,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah, pegawai, dan pengguna layanan perangkat daerah	-	5.945.520.024,00	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.604.194.080,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah, pegawai, dan pengguna layanan perangkat daerah		1.582.631.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.167.436.128,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah, pegawai, dan pengguna layanan perangkat daerah		4.362.888.984,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan	100 Persen	584.368.204,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Unit kerja pengguna kendaraan dinas operasional , Bidang teknis pengguna peralatan dan mesin , Staf administrasi pengguna perlengkapan perkantoran, Petugas lapangan pengguna peralatan kerja, Pengelola Barang Milik Daerah	-	680.746.270,00	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	200.464.060,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Unit kerja pengguna kendaraan dinas operasional , Bidang teknis pengguna peralatan dan mesin , Staf administrasi pengguna perlengkapan perkantoran, Petugas lapangan pengguna peralatan kerja, Pengelola Barang Milik Daerah		198.746.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya											
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	383.904.144,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Unit kerja pengguna kendaraan dinas operasional , Bidang teknis pengguna peralatan dan mesin , Staf administrasi pengguna perlengkapan perkantoran, Petugas lapangan pengguna peralatan kerja, Pengelola Barang Milik Daerah		482.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	88,69 Persen	521.550.000,00						-	47.017.986.530,00	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26,40 KM	521.550.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petani/Gapoktan/GP3A, Masyarakat sekitar Irigasi	-	47.017.986.530,00	
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	31,67 KM	8.370.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petani/Gapoktan/GP3A, Masyarakat sekitar Irigasi		38.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	28,5 KM	458.370.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petani/Gapoktan/GP3A, Masyarakat sekitar Irigasi		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26,40 KM	8.370.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petani/Gapoktan/GP3A, Masyarakat sekitar Irigasi		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	30 Lembaga	41.390.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petani/Gapoktan/GP3A, Masyarakat sekitar Irigasi		167.986.530,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa											
							Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	5.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Petani/Gapoktan/GP3A, Masyarakat sekitar Irigasi		2.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	100 Persen	12.570.000,00						-	5.222.769.400,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit SPAM Non Perpipaan yang Beroperasi sesuai standar teknis	100 Persen	12.570.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat penerima layanan air minum (pelanggan SPAM), Rumah tangga berpenghasilan rendah (MBR), Instansi Pemerintah/Pelayanan Publik pengguna air minum ,	-	5.222.769.400,00	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	5.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat penerima layanan air minum (pelanggan SPAM), Rumah tangga berpenghasilan rendah (MBR), Instansi Pemerintah/Pelayanan Publik pengguna air minum ,		222.769.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	6.980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat penerima layanan air minum (pelanggan SPAM), Rumah tangga berpenghasilan rendah (MBR), Instansi Pemerintah/Pelayanan Publik pengguna air minum ,		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
108	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	88,93 Persen	716.449.610,00						-	12.150.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	100 Persen	716.449.610,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Rumah tangga pengguna sistem pengelolaan air limbah domestik, Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program layanan sanitasi, Instansi pelayanan publik	-	12.150.000.000,00	
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat											
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	100 M^3/Hari	705.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Rumah tangga pengguna sistem pengelolaan air limbah domestik, Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program layanan sanitasi, Instansi pelayanan publik		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja											
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	10.859.610,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Rumah tangga pengguna sistem pengelolaan air limbah domestik, Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program layanan sanitasi, Instansi pelayanan publik		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
109	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	100 Persen	5.140.000,00						-	200.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase utama yang terhubung ke sungai dan berfungsi baik	100 Persen	5.140.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat, dinas teknis pengelola sumber daya air dan drainase, pengguna infrastruktur drainase	-	200.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan											
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	5.140.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat, dinas teknis pengelola sumber daya air dan drainase, pengguna infrastruktur drainase		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100 Persen	6.715.006.160,00						-	3.347.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase permohonan perizinan bangunan gedung yang diproses tepat waktu sesuai standar layanan	100 Persen	6.715.006.160,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik bangunan gedung, Pemohon IMB/PBG (Perseorangan dan Badan Hukum), Pelaku Usaha, Masyarakat, Dinas teknis bidang bangunan gedung, Tim ahli bangunan gedung (TABG)	-	3.347.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	6.709.416.160,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik bangunan gedung, Pemohon IMB/PBG (Perseorangan dan Badan Hukum), Pelaku Usaha, Masyarakat, Dinas teknis bidang bangunan gedung, Tim ahli bangunan gedung (TABG)		3.282.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120 Dokumen	5.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik bangunan gedung, Pemohon IMB/PBG (Perseorangan dan Badan Hukum), Pelaku Usaha, Masyarakat, Dinas teknis bidang bangunan gedung, Tim ahli bangunan gedung (TABG)		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	76,273 Persen	15.357.935.220,00						-	51.685.266.857,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jalan Mantap Kabupaten/Kota	1,233 Persen	15.357.935.220,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna jalan (masyarakat umum, pelaku usaha, pelajar, tenaga kesehatan, dsb.), Masyarakat di kawasan terlayani jalan kabupaten/kota , DInas Teknis, Penyedia jasa konstruksi dan perawatan jalan	-	51.685.266.857,00	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	6.945.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna jalan (masyarakat umum, pelaku usaha, pelajar, tenaga kesehatan, dsb.), Masyarakat di kawasan terlayani jalan kabupaten/kota , DInas Teknis, Penyedia jasa konstruksi dan perawatan jalan		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	500 KM	5.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna jalan (masyarakat umum, pelaku usaha, pelajar, tenaga kesehatan, dsb.), Masyarakat di kawasan terlayani jalan kabupaten/kota , DInas Teknis, Penyedia jasa konstruksi dan perawatan jalan		145.229.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	6.980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna jalan (masyarakat umum, pelaku usaha, pelajar, tenaga kesehatan, dsb.), Masyarakat di kawasan terlayani jalan kabupaten/kota , DInas Teknis, Penyedia jasa konstruksi dan perawatan jalan		3.872.098.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan											
							Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	150 Meter	1.505.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna jalan (masyarakat umum, pelaku usaha, pelajar, tenaga kesehatan, dsb.), Masyarakat di kawasan terlayani jalan kabupaten/kota , DInas Teknis, Penyedia jasa konstruksi dan perawatan jalan		7.217.938.920,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan											
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	16 KM	13.833.370.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna jalan (masyarakat umum, pelaku usaha, pelajar, tenaga kesehatan, dsb.), Masyarakat di kawasan terlayani jalan kabupaten/kota , DInas Teknis, Penyedia jasa konstruksi dan perawatan jalan		40.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
112	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis	100 Persen	33.975.220,00						-	80.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta yang lulus sertifikasi kompetensi	100 Persen	33.975.220,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Tenaga kerja konstruksi lokal, pelaku usaha jasa konstruksi, penyedia pelatihan konstruksi, asosiasi profesi konstruksi	-	80.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis											
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	33.975.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Tenaga kerja konstruksi lokal, pelaku usaha jasa konstruksi, penyedia pelatihan konstruksi, asosiasi profesi konstruksi		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	230.393.000,00						-	550.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan	55.55 Persen	192.218.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat	-	300.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	125.028.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.190.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	100 Persen	20.475.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (OPD Teknis), Forum Penataan Ruang Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat Umum	-	150.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang											
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	300 Layanan	20.475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah Terkait (OPD Teknis), Forum Penataan Ruang Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat Umum		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2 Kasus	17.700.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	OPD teknis terkait, Forum Perangkat Daerah, Pemilik KKPR	-	100.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang											
							Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	2 Kasus	17.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	OPD teknis terkait, Forum Perangkat Daerah, Pemilik KKPR		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			31.702.404.542,00							54.605.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.622.404.721,00							52.405.000.000,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			31.622.404.721,00							52.405.000.000,00	
114	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	undefined undefined	8.093.463.044,00						-	8.555.000.000,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 Persen	26.718.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	400.000.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.718.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	12.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan PD	0 Persen	5.980.865.775,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	6.040.000.000,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	5.973.155.775,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.710.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP	100 Persen	276.942.044,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	215.000.000,00	
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	166.459.544,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	105.370.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.112.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	100 Persen	1.265.188.864,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	1.450.000.000,00	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.648.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.152.540.864,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		1.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100 Persen	543.748.361,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	450.000.000,00	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	336.711.540,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	207.036.821,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
115	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100 Persen	81.976.164,00						-	2.350.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	1 Dokumen	64.250.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	250.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	64.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota yang tertangani	30 Unit	5.000.000,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	2.000.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	8 Unit Rumah	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan/Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	2 unit	12.726.164,00			-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	100.000.000,00	
	1	04	02	2.05	0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota											
							Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	12.726.164,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
116	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	100 Persen	325.501.189,00						-	20.250.000.000,00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	1,78 Ha	325.501.189,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	20.250.000.000,00	
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh											
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	15.520.307,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh											
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1,78 Ha	309.980.882,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
117	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Tidak Huni yang Tetangani	3,44 Persen	4.744.164.706,00						-	11.250.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tertangani	500 Unit	4.744.164.706,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	11.250.000.000,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	380 Unit Rumah	4.744.164.706,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		11.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
118	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	10,13 Persen	18.377.299.618,00						-	10.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang terbangun di kawasan permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase, PJU Permukiman, RTH)	100 Persen	18.377.299.618,00			-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	10.000.000.000,00	
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan											
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	321 Lokasi	18.377.299.618,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			79.999.821,00							2.200.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			79.999.821,00							2.200.000.000,00	
119	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 Persen	34.742.172,00						-	2.000.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	1 Lokasi	34.742.172,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	2.000.000.000,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.742.172,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
120	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dokumen penatagunaan tanah	1 Dokumen	45.257.649,00						-	200.000.000,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.257.649,00			-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	200.000.000,00	
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.114.372,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	06	2.01	0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria											
							Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara	22.143.277,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Satuan Polisi Pamong Praja			19.917.931.133,00							24.651.317.772,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.917.931.133,00							24.651.317.772,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			19.917.931.133,00							24.651.317.772,00	
121	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pencapaian IKU Perangkat daerah	100 persen	18.571.527.636,00						-	20.685.692.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	7 dokumen	51.946.930,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	117.800.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.878.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.806.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.806.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.806.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.806.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	25.999.858,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		19.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.839.988,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.196,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.000.078,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 llaporan	15.934.820.550,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	19.448.000.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	256 Orang/bulan	15.925.006.822,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		19.420.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.201.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	8.611.988,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian	13 laporan	5.911.766,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	20.900.000,00	
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.911.766,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		20.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum perangkat daerah	12 laporan	28.781.010,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	155.940.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.410.888,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.796.122,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		63.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	22.564.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		76.740.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.010.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	2.198.160.240,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	373.800.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.960.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		63.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.140.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		310.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan	12 laporan	351.907.140,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	569.252.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	319.419.640,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		502.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	7.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.087.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
122	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	1.346.403.497,00						-	3.965.625.772,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	170 kasus	243.467.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat	-	1.313.600.000,00	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	52.714.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat											
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	3.001.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	113.919.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		363.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	24.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		45.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah											
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	4.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
							Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja											
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	426 Orang	39.981.898,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		405.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda perkada yang ditangani	122 kasus	1.098.666.459,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	2.374.525.772,00	
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	4.960.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	3.001.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	4.914.088,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		82.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah											
							Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 laporan	4.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	12 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		82.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	404.999.736,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		632.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	614.950.907,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		845.525.772,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	55.999.988,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	4 orang	4.270.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	277.500.000,00	
	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS											
							Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	2.275.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	1.995.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			7.840.182.251,00							11.704.444.566,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.840.182.251,00							11.704.444.566,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			7.840.182.251,00							11.704.444.566,00	
123	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	undefined undefined	7.516.658.194,00						-	10.770.694.566,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	61.681.560,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	65.040.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.919.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		6.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		3.125.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.167.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.375.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19.836.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.790.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.006.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	10.002.560,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.788.224.154,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	7.576.063.080,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	6.760.647.494,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.563.563.080,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	17.987.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		3.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.849.660,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		8.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.295.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	0,00	
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.295.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	81.351.774,00			-	-	-	-	1.154.588.711,00	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.061.774,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		931.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	74.330.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		217.088.711,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	1.960.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		6.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	199.494.406,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	579.329.775,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	91.655.178,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		144.329.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.839.228,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		435.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	384.611.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.395.673.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	359.604.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.145.673.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	25.007.060,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 Persen	323.524.057,00						-	933.750.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	100 Persen	242.508.802,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	-	576.250.000,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	14.306.052,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	108.317.850,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	20.009.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		51.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)											
							Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	99.875.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	14.989.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	117.500.000,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran											
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	14.989.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		117.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	17.496.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	0,00	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran											
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	4 Dokumen	17.496.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	30.529.555,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	183.750.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat											
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	270 Orang	14.934.260,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran											
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	15.595.295,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		58.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	18.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	56.250.000,00	
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		56.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4.510.312.330,00							5.267.719.301,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.510.312.330,00							5.267.719.301,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			4.510.312.330,00							5.267.719.301,00	
125	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.572.198.262,00						-	3.743.722.213,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.222.215,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	77.668.632,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.469.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		19.661.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.017.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.761.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.517.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.761.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.017.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.551.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.017.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.551.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.610.480,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		8.975.208,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.091.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		14.008.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	6.480.635,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		14.396.324,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.038.560.195,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	3.017.208.953,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.012.876.759,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		2.981.891.852,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.827.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		25.441.284,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.889.200,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.995.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.967.236,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.879.977,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	132.073.266,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	185.429.946,00	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.849.140,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		89.014.113,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.932.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		21.524.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		2.970.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.592.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		64.002.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.126,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.918.633,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.422.679,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	24.265.259,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Unit	4.422.679,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		24.265.259,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	230.092.432,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	258.591.854,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.831.824,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		84.497.054,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129.260.608,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		174.094.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	119.827.475,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	180.557.569,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	86.513.255,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		109.548.021,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.114.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.919.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		54.090.198,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
126	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	938.114.068,00						-	1.523.997.088,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	79.652.646,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	45.281.344,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	250 Orang	79.652.646,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		45.281.344,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	227.738.343,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	685.501.607,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	4 Unit	10.392.912,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		183.599.791,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana											
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	85.494.431,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		172.108.187,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	116.903.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	14.948.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		79.793.629,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	368.618.697,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	365.225.181,00	
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang	368.618.697,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		365.225.181,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	262.104.382,00			-	-	-	-	427.988.956,00	
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana											
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	44.418.652,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	200 Kegiatan	167.685.730,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		252.988.956,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial			6.170.183.847,00							8.649.580.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.170.183.847,00							8.649.580.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.170.183.847,00							8.649.580.000,00	
127	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan penunjang urusan pemerintah Daerah	68.03 Numerik/Angka	3.639.441.212,00						-	5.008.930.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	74.445.842,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan	-	840.430.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.936.460,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		43.230.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.938.080,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		5.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.481.380,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.970.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.773.740,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.778.320,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.189.880,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	26.808.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		745.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	11.568.532,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Dokumen dan Laporan		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	13 Laporan	2.798.798.585,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	PNSD, Dokumen Laporan	-	3.322.200.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.780.713.655,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	PNSD, Dokumen Laporan		3.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.167.810,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	PNSD, Dokumen Laporan		5.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	13.917.120,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	PNSD, Dokumen Laporan		16.500.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bimtek sebagai dukungan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	1 Kali	31.999.738,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	PNSD	-	27.500.000,00	
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	31.999.738,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	PNSD		27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	5 Laporan 90 Paket	212.823.737,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan	-	236.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	123 Paket	185.745.581,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan		190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	24.316.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan		41.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.762.156,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	356.721.396,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan	-	169.000.000,00	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.401.300,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan		69.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	283.320.096,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Laporan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	35 Unit	164.651.914,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Barang Milik Daerah	-	413.800.000,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	113.285.980,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Barang Milik Daerah		157.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Barang Milik Daerah		6.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.925.934,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Barang Milik Daerah		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
128	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam	100 % 54.39 % 54.39 % 54.39 % 8.96 %	528.879.052,00						-	833.500.000,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Lembaga	6.776.052,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat	-	6.000.000,00	
	1	06	02	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	6.776.052,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat		6.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat mendapatkan peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perseorangan yang mendapatkan peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	50 Lembaga 62 Orang	522.103.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	LKS, KT, PSM dan TKSK	-	827.500.000,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga	508.190.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	LKS, KT, PSM dan TKSK		800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	112 Orang	13.913.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	LKS, KT, PSM dan TKSK		27.500.000,00	DINAS SOSIAL
129	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	10 Orang	21.030.000,00						-	55.000.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang ditangani	10 Orang	21.030.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	55.000.000,00	
	1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal											
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	21.030.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
130	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	46.55 %	378.969.314,00						-	803.150.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	592 Orang	299.999.314,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	682.150.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	519 Orang	114.999.780,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		129.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang	34.999.835,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	74.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	49.999.934,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		208.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	3.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		7.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	4.999.965,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	78.970.000,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	121.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	49.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	50 Dokumen	28.970.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		44.000.000,00	DINAS SOSIAL
131	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	undefined %	1.238.885.800,00						-	1.590.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di kelola	1 Dokumen	1.238.885.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Fakir Miskin	-	1.590.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	151.504.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Fakir Miskin		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60430 Orang	1.048.884.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Fakir Miskin		770.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	3000 Usulan	38.496.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Fakir Miskin		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
132	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	100 %	349.992.541,00						-	344.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	2300 Orang	289.364.014,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Korban Bencana, Kelompok Rentan	-	250.500.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	204.969.210,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Korban Bencana, Kelompok Rentan		165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	248 Orang	24.989.065,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Korban Bencana, Kelompok Rentan		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	15.005.739,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Korban Bencana, Kelompok Rentan		22.500.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial											
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	14.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Korban Bencana, Kelompok Rentan		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi											
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	30.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Korban Bencana, Kelompok Rentan		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	500 Orang	60.628.527,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana	-	93.500.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana											
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	28.134.156,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana		27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	26.081.319,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana		44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda											
							Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	6.413.052,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
133	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	100 %	12.985.928,00						-	15.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	1 TMPK	12.985.928,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	TMPK	-	15.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	17 Makam	12.985.928,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	TMPK		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			9.612.069.597,00							14.254.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.578.059.317,00							14.164.000.000,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.578.059.317,00							14.164.000.000,00	
134	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	7.192.521.565,00						-	7.177.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan	5 Dokumen	58.600.935,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	114.000.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.902.828,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.762.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.529.480,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	8.806.627,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6.455.295.899,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	ASN	-	6.119.000.000,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	6.440.918.159,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	ASN		6.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.696.740,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	ASN		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	10.681.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	ASN		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	159.219.613,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI	-	182.000.000,00	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.944.273,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.201.340,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	24.074.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	359.227.788,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI	-	432.000.000,00	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.203.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		252.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102.024.788,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Kondisi Baik	29 Unit	160.177.330,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI	-	330.000.000,00	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	94.985.630,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	13.890.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	51.301.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas SDM	INSTANSI		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
135	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60 %	678.953.250,00						-	2.187.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	640 orang	589.967.582,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Kerja	-	2.000.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	560 Orang	539.090.720,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Kerja		1.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota											
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	50.876.862,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS Yang Terakreditasi	3 Lembaga	49.489.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Instruktur	-	50.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta											
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 Lembaga	49.489.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Instruktur		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Izin LPKS yang diterbitkan	5 Lembaga	10.387.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Instruktur	-	12.000.000,00	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	10.387.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Instruktur		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Menerapkan Rekomendasi Hasil Konsultansi	40 Perusahaan	7.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-	25.000.000,00	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil											
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan dan Tenaga Kerja		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dokumen Pengukuran Produktivitas	1 Dokumen	22.109.268,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-	-	100.000.000,00	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	22.109.268,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
136	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	95 %	241.804.988,00						-	1.080.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Antar Kerja	3.3 Predikat	7.168.208,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja Terdaftar	-	520.000.000,00	
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan											
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	5.560.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja Terdaftar		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	44 Orang	1.608.208,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas SDM	Pencari Kerja Terdaftar		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Perpanjangan Ynag diterbitkan	10 Lembaga	14.050.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	-	40.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS											
							Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	54 Lembaga	14.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja Yang Disebarluaskan	2400 Lowongan	40.769.135,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	PENCARI KERJA	-	60.000.000,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	7500 Orang	40.769.135,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	PENCARI KERJA		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Pra dan Purna yang mendapatkan Layanan	7750 orang	179.817.645,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	-	460.000.000,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	48.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran											
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	7500 Orang	70.829.990,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Kualitas SDM	Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan											
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	32 Orang	60.087.655,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Kualitas SDM	Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
137	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagkerjaan Cakupan Kepesertaaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	51 % 54 %	1.464.779.514,00						-	3.720.000.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang disahkan	14 Peraturan	84.826.882,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-	-	1.620.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan											
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	34.911.782,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	49.915.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial Yang disahkan Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Disahkan	14 kasus 14 Kasus	1.379.952.632,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan dan Pekerja	-	2.100.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	14 Perkara	30.442.232,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan dan Pekerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6000 Orang	1.349.510.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	Perusahaan dan Pekerja		2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			34.010.280,00							90.000.000,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			34.010.280,00							90.000.000,00	
138	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Transmigran Yang Difasilitasi	100 %	34.010.280,00						-	90.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penempatan Transmigran	100 %	34.010.280,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	calon transmigran	-	90.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3 Kepala Keluarga	8.045.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas SDM	calon transmigran		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi											
							Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	25.965.280,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	calon transmigran		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan			11.486.315.117,00							16.014.470.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.486.315.117,00							16.014.470.000,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN			5.650.089.766,00							6.134.270.000,00	
139	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.520.686.985,00						-	6.034.270.000,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	77.734.441,00			-	-	-	-	106.980.000,00	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	21.815.052,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	10.546.811,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.616.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	15.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	12.482.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.473.052,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.501.526,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.442.709.129,00			-	-	-	-	5.137.890.000,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.409.419.129,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	33.290.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	133.234.427,00			-	-	-	-	138.100.000,00	
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	47.461.821,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.964.606,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	42.808.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	81.892.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-	-	100.000.000,00	
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	81.892.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	157.691.270,00			-	-	-	-	108.800.000,00	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.066.438,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.624.832,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	627.425.718,00			-	-	-	-	442.500.000,00	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	171.827.718,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		142.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	455.598.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
140	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	66.445.240,00						-	100.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	38.175.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG											
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	45 Lembaga	15.675.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	28.270.240,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	28.270.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
141	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	105.982.411,00						-	0,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	64.386.867,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	26 Lembaga	36.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	0 Kebijakan	28.386.867,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	41.595.544,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	0,00	
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40 orang	41.595.544,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
142	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	35.673.299,00						-	0,00	
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.673.299,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota											
							Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	70 Orang	35.673.299,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
143	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	113.495.000,00						-	0,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	113.495.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	113.495.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
144	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	214.065.947,00						-	0,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	181.486.369,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Lembaga	181.486.369,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	32.579.578,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.579.578,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
145	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	593.740.884,00						-	0,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	95.512.150,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota											
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	63.804.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	45 Kegiatan	20.658.150,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	12 Dokumen	11.050.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	39.255.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40 Orang	39.255.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	458.973.734,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	07	2.03	0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	356.373.734,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai											
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	25 Orang	102.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			5.836.225.351,00							9.880.200.000,00	
146	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	197.307.000,00						-	255.000.000,00	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	197.307.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	255.000.000,00	
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	52.707.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	144.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
147	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	2.189.799.195,00						-	4.320.000.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	177.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Laporan	177.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	840.835.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	1.045.000.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2040 Orang	834.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	6.835.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.151.744.195,00			-	-	-	-	2.655.000.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51 Laporan	40.705.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6823 Orang	1.084.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak											
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	15 Laporan	26.718.995,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	20.220.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	20.000.000,00	
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB											
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	20.220.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
148	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	3.449.119.156,00						-	5.305.200.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	35.719.156,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	45.000.000,00	
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	4 Laporan	8.475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	154 Kelompok	27.244.156,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	3.413.400.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	5.260.200.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2391 laporan	2.391.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		2.391.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	797 laporan	1.022.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		2.869.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Ketahanan Pangan			3.422.300.677,00							107.169.040.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.422.300.677,00							107.169.040.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.422.300.677,00							107.169.040.000,00	
149	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	2.694.652.719,00						-	103.564.040.000,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	23 Dokumen	26.000.428,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan	-	65.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.076,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.010,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.110,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.080,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.280,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.000.072,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	1.999.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.999.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan	12 Bulan	2.504.211.645,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan	-	3.023.000.000,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	2.492.942.769,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.499.788,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.769.088,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		19.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Manajemen Administrasi Umum	12 Bulan	27.758.456,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan	-	100.088.540.000,00	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.006.496,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		100.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		10.540.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	15.752.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.999.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	939.000,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	30.000.000,00	
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	939.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	63.729.910,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan	-	61.500.000,00	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.790,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.729.120,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		21.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	22 Unit	72.013.280,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan	-	296.000.000,00	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	71.567.380,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	384.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Ketahanan Pangan		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dinas Ketahanan Pangan		175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
150	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	118,992 Prosentase	100.000.100,00						-	1.000.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	1 Unit	100.000.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	-	1.000.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya											
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	100.000.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
151	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tertanganinya Fluktuasi Harga Komoditas Pangan undefined	1 -+ 5 Prosentase undefined undefined	460.851.361,00						-	1.910.000.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedia dan Tersalurnya Pangan Pokok Yang Merata dan cukup undefined	100 % undefined undefined	270.306.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	-	565.000.000,00	
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	175.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota											
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan											
							Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota											
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	5.306.650,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	169.992.961,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	-	780.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	99.992.961,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		510.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota											
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	6.62 Ton	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)											
							Jumlah LPM yang terfasilitasi	10 kelompok	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN-PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan ANGKA Kecukupan Gizi	1 Laporan	20.551.650,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	-	565.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5.551.650,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani		550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
152	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	0,019 %	108.309.578,00						-	445.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	21.426.578,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desa	-	75.000.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan											
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	21.426.578,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desa		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	86.883.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desa	-	370.000.000,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.012.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desa		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota											
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desa		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi											
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 Dokumen	56.871.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desa		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
153	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Post dan Pre Market	77 %	58.486.919,00						-	250.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	28 Dokumen	58.486.919,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kelompok Tani	-	250.000.000,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kelompok Tani		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	10 Dokumen	19.999.952,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kelompok Tani		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kelompok Tani		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Laporan	16.486.967,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						Dinas Lingkungan Hidup			12.638.325.016,00							16.324.805.680,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.638.325.016,00							16.324.805.680,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			12.638.325.016,00							16.324.805.680,00	
154	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100 Persen	7.976.271.121,00						-	8.642.805.680,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	43.638.820,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	73.500.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.392.790,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.685.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.383.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.822.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.355.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	16.447.200,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	8.552.630,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan	19 Laporan	6.433.644.204,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	7.511.500.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	938 Orang/bulan	6.423.044.704,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		7.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.599.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya manajemen administrasi umum	2 Dokumen	116.863.185,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	195.000.000,00	
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.127.385,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		126.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	51.736.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		53.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	10 Unit	0,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	55.000.000,00	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	48 Laporan	1.127.005.992,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	452.805.680,00	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	71.076.936,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		71.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.055.929.056,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		381.805.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	255.118.920,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	355.000.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	229.821.920,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.297.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
155	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100 Persen	177.640.300,00						-	378.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4 Dokumen	177.640.300,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	378.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut											
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	37.888.060,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	40.007.079,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		118.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota											
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3 Dokumen	99.745.161,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan taman kehati	5,37 Hektar	33.714.374,00						-	68.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	33.714.374,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	68.000.000,00	
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	33.714.374,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		68.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
157	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan Atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	50 Persen	90.513.460,00						-	150.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan yang terbit Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dan diawasi	6 izin 52 Dokumen	90.513.460,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	150.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	6 Dokumen	6.000.549,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		31.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	46 Badan Usaha	84.512.911,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		119.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100 Persen	6.234.000,00						-	16.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 Pengaduan	6.234.000,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	16.000.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	6 Pengaduan	6.234.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	10,21 Persen 28 Persen	4.353.951.761,00						-	7.070.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	19,29 Persen 20,75 Persen	4.353.951.761,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-	-	7.070.000.000,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota											
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan											
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15000 Ton	2.423.532.191,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		3.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah											
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	30 Persentase	350.574.870,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan											
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	20000 Ton	9.872.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional											
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20000 Ton	1.267.901.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Pengengat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	11	2.01	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	5 Unit	302.071.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD4 - Optimalisasi Pembangunan Inklusif, Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dan Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			6.881.999.019,00							7.986.631.230,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.881.999.019,00							7.986.631.230,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN			6.881.999.019,00							7.986.631.230,00	
160	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.353.792.038,00						-	7.548.315.000,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	48.302.751,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	90.406.000,00	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.441.090,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		37.494.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.625.826,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		5.292.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.781.380,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		3.435.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.455.210,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		7.978.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.491.770,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		3.870.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.780.380,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		5.460.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	18.727.095,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		26.877.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Dokumen	4.130.672.241,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	4.741.221.000,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.099.818.327,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		4.707.460.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18 Dokumen	30.853.914,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		33.761.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keakuratan Pencatatan Barang Milik Daerah	82 Persen	9.170.448,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	18.367.000,00	
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.170.448,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		18.367.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Individu ASN	83 Persen	45.857.224,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	63.434.000,00	
	2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	24.446.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		17.734.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	21.411.224,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		45.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86 Persen	712.363.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	162.771.000,00	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	627.291.900,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		17.734.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		53.637.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	71.472.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		45.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.960.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		45.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	99 Persen	697.301.272,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	1.576.612.000,00	
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	677.301.272,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		1.536.612.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	551.400.922,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	685.320.000,00	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	194.129.498,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		175.565.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.271.424,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		509.755.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	90 Persen	158.723.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	210.184.000,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	105.842.720,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		156.573.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	52.880.560,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		53.611.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
161	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	140.260.350,00						-	181.776.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan penyelenggaran pendaftaran penduduk	3 Dokumen	140.260.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	181.776.000,00	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	800 Dokumen	12.938.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		12.436.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	66.072.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		102.851.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
							Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	135000 Laporan	61.249.850,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		66.489.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
162	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	233.087.106,00						-	50.136.230,00	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	46004 Dokumen	233.087.106,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	50.136.230,00	
	2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan	181.557.140,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		4.419.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	51.529.966,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		45.717.230,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
163	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	154.859.525,00						-	206.404.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Database Kependudukan yang dikumpulkan, disajikan dan dimanfaatkan	14 Dokumen	95.854.661,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	93.266.000,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	15 Dokumen	50.476.936,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		58.299.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	14 Dokumen	45.377.725,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		34.967.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Regulasi dan Inovasi terkait Layanan Administrasi Kependudukan yang diterbitkan	2 Regulasi	20.452.189,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	64.829.000,00	
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	20.452.189,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		64.829.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 Persen	38.552.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	-	48.309.000,00	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	38.552.675,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah		48.309.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			5.180.913.147,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.180.913.147,00							0,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.180.913.147,00							0,00	
164	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.782.962.710,60						-	0,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	26.706.744,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.716.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.990.504,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.331.257.348,60			-	-	-	-	0,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.331.257.348,60	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	186.175.262,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.997.362,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	62.460.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	29.718.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.999.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	116.378.872,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.277.752,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.101.120,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	122.444.484,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	97.449.020,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.995.464,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
165	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	74.981.308,00						-	0,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	74.981.308,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa											
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	41 Desa	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	24.981.308,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
166	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	499.999.189,00						-	0,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	499.999.189,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	499.999.189,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
167	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	320.983.602,40						-	0,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	320.983.602,40			-	-	-	-	0,00	
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	142 Dokumen	9.999.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	142 Dokumen	19.995.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	61.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa											
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	86 Laporan	149.999.514,40	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa											
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	142 Dokumen	9.989.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	142 Laporan	9.999.915,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	49.999.973,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
168	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	501.986.337,00						-	0,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	501.986.337,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	45.999.775,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	72 Lembaga	85.999.838,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	9.986.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	359.999.924,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Dinas Perhubungan			21.061.251.825,00							23.203.713.698,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.061.251.825,00							23.203.713.698,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			21.061.251.825,00							23.203.713.698,00	
169	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100 %	6.805.575.082,00						-	6.498.969.472,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	65.925.029,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur	-	136.757.171,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.145.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		63.340.080,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.279.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		4.572.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	3.079.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		1.764.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.098.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		1.965.132,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.329.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		1.764.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17.002.440,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		24.390.720,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8.333.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		19.622.746,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah dan Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	10.656.389,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		9.338.493,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.684.535.309,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Unit Kerja dan Aparatur	-	5.469.643.687,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan	5.633.773.869,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Unit Kerja dan Aparatur		5.451.043.687,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.966.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Unit Kerja dan Aparatur		1.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	48.794.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Unit Kerja dan Aparatur		16.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.641.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur	-	3.000.000,00	
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.641.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.700.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Unit Kerja dan Aparatur	-	23.477.760,00	
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	16.700.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Unit Kerja dan Aparatur		23.477.760,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	165.950.618,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Aparatur	-	334.622.708,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	55.881.026,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Aparatur		178.784.786,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	43.651.792,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Aparatur		36.518.709,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	64.418.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Aparatur		96.328.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Aparatur		22.990.413,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	521.713.676,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur	-	140.242.074,00	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.089.292,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		96.083.150,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	441.624.384,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		44.158.924,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	343.108.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur	-	391.226.072,00	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	221.754.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		181.146.072,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		54.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.488.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		31.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.565.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perangkat Daerah dan Aparatur		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
170	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Rasio Konektivitas Darat Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	27.91 % 46,67 % 9,09 %	14.220.069.613,00						-	16.544.744.226,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	55.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	13.352.160.168,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan	-	14.309.985.990,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	145 Unit	485.544.420,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		13.998.000.202,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	881 Unit	12.866.615.748,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		311.985.788,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	16.950.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	260.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C											
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	12 Dokumen	16.950.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)											
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	85.070.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Penyelenggara parkir	-	241.185.788,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	85.070.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Penyelenggara parkir		241.185.788,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	180.970.685,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	507.748.687,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit	45.654.970,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batujai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji		70.526.392,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji		73.671.792,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	21.253.784,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batujai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji		158.246.186,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	114.061.931,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batujai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji		205.304.317,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	244.778.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan	-	500.157.545,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	203.288.050,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		360.157.545,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	41.490.870,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	9.010.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan	-	170.666.216,00	
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum											
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	9.010.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		110.666.216,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	257.631.440,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan dan Penyelenggara Angkutan Umum	-	500.000.000,00	
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	257.631.440,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengguna Jalan dan Penyelenggara Angkutan Umum		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	73.497.600,00			-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-	-	0,00	
	2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73.497.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
171	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut	33,33 %	35.607.130,00						-	160.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.607.130,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD5 - Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah	Penyelenggara Angkutan Laut	-	60.000.000,00	
	2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	35.607.130,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD5 - Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah	Penyelenggara Angkutan Laut		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0,00			-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD5 - Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah	-	-	100.000.000,00	
	2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal											
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-6 Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan PD5 - Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi dan Informatika			8.456.749.151,00							9.436.007.832,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.456.749.151,00							9.436.007.832,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.210.557.895,00							9.165.527.450,00	
172	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	73 Poin	4.259.034.631,00						-	4.851.191.859,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	undefined undefined 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1 Laporan	84.351.350,00			-	-	-	-	82.300.735,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.300.730,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.130.803,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.125.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.437.610,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.400.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.840.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.158.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.374.350,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	17.183.120,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.476.432,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.308.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.878.930,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	160 Data Dokumen	6.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.260.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	11.775.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.952.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	1 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	3.758.508.341,00			-	-	-	-	4.134.359.142,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.750.883.241,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.125.971.532,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.625.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.087.610,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Paket	219.824.660,00			-	-	-	-	241.807.126,00	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.317.660,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.949.426,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	163.507.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		179.857.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Paket 3 Unit	11.416.240,00			-	-	-	-	1.557.864,00	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	11.416.240,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.557.864,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.203.220,00			-	-	-	-	303.463.090,00	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.203.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		303.463.090,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Mobil 5 Motor	79.730.820,00			-	-	-	-	87.703.902,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	79.730.820,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		87.703.902,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
173	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	64 %	1.899.999.460,00						-	2.089.999.406,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah Konten Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah rekomendasi komunikasi	60 Laporan 138 Orang 15 Komunitas 120 Komten 5 Laporan 60 Media 100 % 22 Dokumen 100 % 100 % 100 %	1.899.999.460,00			-	-	-	-	2.089.999.406,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media											
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	60 Laporan	1.425.794.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.568.373.510,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	25.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi											
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	70.002.177,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.002.395,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	60 Media	15.924.983,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.517.481,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten											
							Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	268.633.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		295.497.180,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	138 Orang	94.144.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		103.558.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
174	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	1 Aplikasi	2.051.523.804,00						-	2.224.336.185,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Laporan Opasionalisasi Pusat Kendali Jumlah Laporan Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi,	5 Aplikasi 1 aplikasi 1 Aplikasi 8 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Layanan 500 Orang 8 Perangkat Daerah	2.051.523.804,00				-	-	-	-	2.224.336.185,00	
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	4 Dokumen	470.421.976,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		485.124.174,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	22 Perangkat Daerah	1.419.269.840,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.561.196.824,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	50.891.988,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.981.187,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	8 Dokumen	110.940.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		122.034.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			120.377.560,00							132.415.316,00	
175	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3.00 Poin	120.377.560,00						-	132.415.316,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang terverifikasi melalui SIPD e-Walidata Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Persentase kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya bisa diakses pengguna data Persentase kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Persentase Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	160 Data 45 Perangkat Daerah 80 % 80 % 80 % 80 %	120.377.560,00				-	-	-	-	132.415.316,00	
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	75 %	8.220.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.042.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	420 Data %	76.112.360,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		83.723.596,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	45 Orang	27.825.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.607.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar											
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	25 Dokumen %	8.220.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.042.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			125.813.696,00							138.065.066,00	
176	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	16 %	125.813.696,00						-	138.065.066,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Dokumen 3 Laporan 2 Laporan 45 Perangkat Daerah	125.813.696,00			-	-	-	-	138.065.066,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	74.803.296,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.283.626,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	19.576.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.534.040,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45 Perangkat Daerah	14.992.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.491.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2 Dokumen	16.442.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.756.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			4.962.958.114,00							9.731.146.756,70	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.962.958.114,00							9.731.146.756,70	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			4.962.958.114,00							9.731.146.756,70	
177	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.012.114.742,00						-	5.041.044.232,70	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.396.364,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	108.659.450,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.569.470,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		35.407.090,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.618.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		5.228.090,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.915.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.208.090,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.715.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.961.090,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.786.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.796.090,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.460.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.810.350,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.763.480,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		26.142.350,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.267.570,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	10.300.104,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		23.106.300,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.487.059.848,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	4.307.875.664,70	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.459.126.368,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.263.804.444,70	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.763.480,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.107.610,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	23.170.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		39.963.610,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.068.270,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	4.010.220,00	
	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.068.270,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		4.010.220,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	174.270.096,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	293.190.658,00	
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.129.488,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		100.393.930,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.640.608,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		78.792.728,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		88.740.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		25.264.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	161.830.928,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	246.579.120,00	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.993.280,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.546.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		5.850.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.291.648,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		40.729.120,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	136.489.236,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	80.729.120,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	60.669.236,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		40.729.120,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.820.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
178	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	15.706.920,00						-	23.977.350,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15.706.920,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	23.977.350,00	
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	15.706.920,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		23.977.350,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
179	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	117.465.580,00						-	199.249.903,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	117.465.580,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	199.249.903,00	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Unit Usaha	14.342.790,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		98.796.293,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	103.122.790,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		100.453.610,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
180	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	41.168.851,00						-	360.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	41.168.851,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	360.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	41.168.851,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		360.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
181	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	70.818.440,00						-	535.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	70.818.440,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	535.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi											
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	30 Kelompok Masyarakat	12.439.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	150 Unit Usaha	11.278.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota											
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	47.101.090,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
182	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	125.601.281,00						-	671.875.271,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	125.601.281,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	671.875.271,00	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro											
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	13.950.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro											
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	67.390.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		311.875.271,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	44.261.281,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		360.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
183	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	580.082.300,00						-	2.900.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	580.082.300,00			-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	2.900.000.000,00	
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi											
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	120 Unit Usaha	580.082.300,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		2.900.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.135.011.049,00							5.953.239.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.135.011.049,00							5.953.239.000,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.135.011.049,00							5.953.239.000,00	
184	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.905.313.619,00						-	5.720.299.000,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	okumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	9 Dokumen	96.389.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP	-	130.344.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.381.840,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		61.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.820.892,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		5.445.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.835.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		3.289.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.114.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		4.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.301.840,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		2.585.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.130.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		2.365.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	55.737.070,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		17.325.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.086.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	12.981.930,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPTSP		28.215.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34 Dokumen	3.523.481.419,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.696.770.000,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.507.823.555,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.679.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.486.740,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	14.171.124,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	216.797.924,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	274.940.000,00	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.634.856,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		81.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38.767.268,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		94.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.396.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		87.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.330.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintahan daerah	12 Bulan	902.039.328,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.067.310.000,00	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	531.418.560,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		625.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.620.768,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		442.310.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	1 Dokumen	166.605.076,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	550.935.000,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	59.622.166,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		82.115.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	27.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.690.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	79.082.910,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		438.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
185	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5 %	20.740.000,00						-	33.100.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Event Promosi	2 Event	20.740.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha	-	33.100.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha		33.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
186	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin sesuai Ketentuan	100 %	56.945.070,00						-	79.530.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Cakupan Layanan Perizinan Berusaha Kewenangan Kabupaten	100 %	56.945.070,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha	-	79.530.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3582 Pelaku Usaha	32.674.260,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha		52.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	9.795.810,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha		10.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	14.475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha		15.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
187	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %	122.012.360,00						-	90.310.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2 Dokumen	122.012.360,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha	-	90.310.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	99.999.820,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha		48.730.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal											
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	21 Kegiatan Usaha	22.012.540,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha		41.580.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
188	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data Digital Investasi	1 Database	30.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DPMPTSP	-	30.000.000,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DPMPTSP		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			5.677.423.126,00							16.373.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.677.423.126,00							16.373.000.000,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			5.677.423.126,00							16.373.000.000,00	
189	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.688.838.637,00						-	3.340.500.000,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	28.481.427,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	102.000.000,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.702.680,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.009.107,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		18.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.569.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		17.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan Laporan	5.327.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.975.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.897.140,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.334.054.876,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	2.310.000.000,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.327.831.890,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		2.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.223.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		3.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.999.486,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		6.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	STNK kendaraan	17 STNK	9.491.300,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	12.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	9.491.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.216.600,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	10.000.000,00	
	2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.216.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	91.449.000,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	356.500.000,00	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.675.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		225.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	87.774.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		6.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	132.396.454,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	275.000.000,00	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.491.472,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.904.982,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung bangunan yang telah direhab Terlaksananya pemeliharaan BMD	1 unit 11 Unit	88.748.980,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah	-	275.000.000,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	63.748.980,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Barang Milik Daerah		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	-	Barang Milik Daerah		125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
190	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	232.762.862,00						-	1.000.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan pengembangan Kepeloporan pemuda	125 Orang	127.906.862,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	-	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	-	480.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota											
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	30.212.952,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	-	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		180.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang	97.693.910,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	-	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang yang Aktif Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	3 Organisasi 5 %	104.856.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Organisasi Kepemudaan	-	520.000.000,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Organisasi Kepemudaan		450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	18 Orang	4.856.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Organisasi Kepemudaan		70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
191	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.655.821.627,00						-	11.862.500.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlit Usia Pelajar / Jenjang Pendidikan berprestasi	20 orang	5.132.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Atlet, organisasi keolahragaan	-	4.000.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7 Unit	5.132.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Atlet, organisasi keolahragaan		4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tk. Kab/Kota	600 Orang	443.489.427,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Atlet, organisasi keolahragaan	-	1.300.000.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	441.389.427,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Atlet, organisasi keolahragaan		800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga											
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	50 Orang	2.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Atlet, organisasi keolahragaan		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.057.200.000,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	6.075.000.000,00	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah											
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10 Orang	21.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	64 Orang	2.036.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		6.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	150.000.000,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	487.500.000,00	
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		187.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
192	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	100.000.000,00						-	170.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	100.000.000,00			-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-	-	170.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah											
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	-		170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			5.230.823.247,00							10.690.299.550,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.230.823.247,00							10.690.299.550,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.139.142.631,00							10.371.069.550,00	
193	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100 %	4.749.076.274,00						-	6.791.721.550,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	61.244.400,00			-	-	-	-	299.157.500,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	27.237.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.457.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.790.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.454.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.570.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.643.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.744.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.473.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.032.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.173.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan Kualitas SDM	-		23.817.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	65 Data	1.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan Kualitas SDM	-		13.513.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.085.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.313.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.223.262.385,00			-	-	-	-	4.249.446.050,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.210.085.715,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.213.624.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	13.176.670,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.822.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	0,00			-	-	-	-	41.361.000,00	
	2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.857.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.504.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	73.206.232,00			-	-	-	-	314.243.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.686.232,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		163.242.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		122.751.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	1 Unit	0,00			-	-	-	-	1.309.700.000,00	
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		239.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.020.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	319.955.037,00			-	-	-	-	395.180.000,00	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.125.664,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		136.973.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.102.905,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		146.682.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.726.468,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		111.525.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Kondisi Baik	10 Unit	71.408.220,00			-	-	-	-	182.634.000,00	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	71.408.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		146.812.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.822.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
194	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kunjungan Perpustakaan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan	2 % 83,5 %	376.146.357,00						-	3.533.043.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan tingkat daerah kewenangan Kabupaten yang dikelola	6 Perpustakaan	97.671.357,00			-	-	-	-	908.183.000,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	398 Perpustakaan	9.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	6 Layanan	28.926.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		127.153.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	17 Perpustakaan	7.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat											
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	5300 Eksemplar	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.120.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	36.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		99.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan											
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	5 Dokumen	6.570.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.679.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	36920 Eksemplar	3.075.357,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		239.137.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	500 Eksemplar	3.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan kegiatan pembudayaan gemar membaca	17 Laporan	278.475.000,00			-	-	-	-	2.624.860.000,00	
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.974.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	28 Perpustakaan	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		255.278.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 Perpustakaan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang	12.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		189.751.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	12 Lokus	7.575.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		148.857.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
195	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Presentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	47 %	13.920.000,00						-	46.305.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Nasional Naskah Kuno yang Dilestarikan	7 Eksemplar	13.920.000,00			-	-	-	-	46.305.000,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno											
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	7 Orang	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.945.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan											
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	7 Eksemplar	7.920.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.360.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			91.680.616,00							319.230.000,00	
196	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	40 %	76.005.616,00						-	223.395.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang Mengimplementasikan Pengelolaan Arsip Dinamis	19 %	46.305.616,00			-	-	-	-	56.630.000,00	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Laporan	27.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.726.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	47 Instansi	18.705.616,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.904.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis yang dikelola	100 %	15.000.000,00			-	-	-	-	46.000.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis											
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7700 Arsip	15.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Arsip yang digitalisasi	100 %	14.700.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	-	-	120.765.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN											
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	9 Laporan	8.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas SDM	-		82.765.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
197	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	20 %	6.300.000,00						-	72.106.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Presentase Arsip yang dimusnahkan	100 %	6.300.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	72.106.000,00	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun											
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1500 Berkas	3.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.612.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun											
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5700 Arsip	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		46.494.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
198	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 %	9.375.000,00						-	23.729.000,00	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang Diterbitkan	1 Arsip	9.375.000,00			-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-	-	23.729.000,00	
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup											
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	4.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Peningkatan Kualitas SDM	-		15.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup											
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	4.875.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.185.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Dinas Kelautan dan Perikanan			6.255.400.349,00							9.380.145.468,15	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.255.400.349,00							9.380.145.468,15	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			6.255.400.349,00							9.380.145.468,15	
199	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.487.332.145,00						-	5.869.315.175,15	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	50.635.440,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	145.548.255,60	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.904.470,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		13.199.639,25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.412.011,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.032.088,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		5.775.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	752.088,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.625.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.937.364,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.632.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		13.875.715,35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	10.377.430,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		42.160.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun (Dokumen)	19 Dokumen	5.015.243.962,72			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	4.894.015.011,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	620 Orang/bulan	4.992.397.755,72	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		4.803.676.401,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.289.697,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.163.260,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19.556.510,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		81.175.350,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	52.184.373,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	161.526.129,95	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.020.955,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.296.407,20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.914.418,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	42.049.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		122.479.722,75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.508.120,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	115.500.000,00	
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.708.120,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		94.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	224.793.174,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	314.694.000,00	
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.840.452,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		183.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.952.722,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.944.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	127.967.075,28			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	238.031.778,60	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	96.850.019,28	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		154.031.778,60	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	7.790.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.837.056,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5.490.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
200	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	237.499.641,00						-	504.919.824,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Volume hasil tangkapan ikan dari perairan darat yang tercatat	605,78 Ton	17.775.340,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	22.226.400,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	17.775.340,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		22.226.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat Pembinaan	52 Kelompok	185.027.561,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan	-	409.985.033,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil											
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	135.030.622,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan		159.516.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil											
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	22 Kelompok	10.867.234,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan		31.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha											
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	9 Unit Usaha	12.601.402,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan		11.025.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	152 Unit	26.528.303,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan		207.944.033,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pelayanan di TPI	12 Kali	1.952.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	39.633.391,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	1.952.750,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		39.633.391,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai 10 GT yang terdaftar	200 unit	32.743.990,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	33.075.000,00	
	3	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)											
							Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	200 Rekomendasi	32.743.990,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		33.075.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
201	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	47800,51 Ton	358.039.435,00						-	2.728.847.520,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	70.560.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembudidaya Ikan	-	18.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil											
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	70.560.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembudidaya Ikan		18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan volume produksi ikan hasil kegiatan pembudidayaan	723,72 ton	287.479.435,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembudidaya Ikan	-	2.710.847.520,00	
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	287.479.435,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembudidaya Ikan		2.710.847.520,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	44.993.688,00						-	33.000.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan PUD yang diawasi	2 lokasi	44.993.688,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	33.000.000,00	
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota											
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	6 Pelaku Usaha	17.498.860,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota											
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 Pelaku Usaha	10.000.228,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0012	Pengawasan Ekstraksi Garam											
							0	4 0	17.494.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
203	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	127.535.440,00						-	244.062.949,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	13.519.950,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	21.000.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen	13.519.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	114.015.490,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	223.062.949,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.4992,63 Ton	94.330.580,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		113.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	19.684.910,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109.662.949,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Dinas Pariwisata			7.690.777.999,00							229.865.500.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.690.777.999,00							229.865.500.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			7.690.777.999,00							229.865.500.000,00	
204	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	5.995.562.966,00						-	6.785.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa-skpd jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan jumlah dokumenperubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka-skpd jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan apaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	9 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 laporan	52.972.920,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd	-	95.500.000,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.337.710,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		12.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.938.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		3.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.106.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		3.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.106.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		3.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.106.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		3.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8.578.840,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		12.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	opd		12.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	10.617.570,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	100 % 1 laporan 18 laporan 980 Orang	5.570.530.709,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd	-	6.106.000.000,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	854 Orang/bulan	5.550.605.045,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	17.225.664,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jumlah paket logistik kantor yang disediakan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan administrasi umum PD	12 laporan 10 Unit 10 Unit 4 Dokumen	222.649.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd	-	330.000.000,00	
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	151.606.143,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	67.436.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.607.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	opd		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Layanan pemerintahan daerah	12 laporan 12 Bulan	64.338.240,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd	-	79.000.000,00	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53.058.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	opd		54.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Jenis 24 Unit	85.071.714,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd	-	175.000.000,00	
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	85.071.714,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	opd		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan dan wisatwan	7 persen	55.810.835,00						-	221.030.000.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikelola Jumlah Desa Wisata dengan sarpras yang memadai jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi 14 Desa Wisata 2 dokumen 2 Lokasi	30.199.294,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata	-	220.420.000.000,00	
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	16.779.647,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		220.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	13.419.647,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		420.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan Jumlah destinasi yang dikelola Jumlah dokumen penetapan, perencanaan, serta unit sarpras pengelolaan destinasi jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Melalui Penetapan,Perencanaan,dan Pembangunan Sarana Destinasi	2 Lokasi 1 Destinasi 8 dokumen 2 dokumen 3 laporan 2 Unit 2 Lokasi	25.611.541,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata	-	610.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	7.940.297,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.511.244,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		320.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	8.160.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
206	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase pertumbuhan tamu wisatawan asing (menginap di hotel berbintang/ non berbintang) Media promosi online yang aktif	10 persen 1 Media	574.302.670,00						-	1.225.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemasaran pariwisata jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya jumlah dokumen hasil penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata jumlah dokumen kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri Media promosi yang aktif	10 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 10 Media	574.302.670,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata	-	1.225.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	29.249.841,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	15.383.894,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	529.668.935,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	Objek Daya Tarik Wisata		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
207	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	10 persen	48.831.050,00						-	675.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen, lembaga atau produk hasil fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif jumlah dokumen pendidikan ekraf yang dikembangkan jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf jumlah dokumen strategis bidang ekraf daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah jumlah produk hasil hki dan pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf	14 dokumen 2 dokumen 1 Orang 1 dokumen 5 Lembaga 5 produk	48.831.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Pelaku Usaha Pariwisata	-	675.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	2 Dokumen	6.951.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Pelaku Usaha Pariwisata		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif											
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	7.926.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Pelaku Usaha Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah											
							Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	5 Lembaga	9.617.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Pelaku Usaha Pariwisata		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah											
							Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	9.336.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Pelaku Usaha Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual											
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk	15.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi Peningkatan Kualitas SDM	Pelaku Usaha Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
208	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya persentase sdm pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi Presentase SDM Pariwisata dan EKraf Bersertifikat	100 Orang 10 persen 20 %	1.016.270.478,00						-	150.000.000,00	
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan ekraf Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang meningkat kapasitasnya	100 Orang 50 Orang	1.016.270.478,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	sdm pariwisata dan ekraf	-	150.000.000,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	1.016.270.478,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM	sdm pariwisata dan ekraf		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
						Dinas Pertanian			52.761.718.163,00							69.136.445.697,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			52.761.718.163,00							69.136.445.697,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			52.761.718.163,00							69.136.445.697,00	
209	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.864.718.163,00						-	34.604.247.007,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan Tepat Waktu	12 Dokumen	65.854.642,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	196.484.200,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.964.070,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		65.584.200,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.634.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Petani, peternak, masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.638.520,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		6.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.723.480,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.935.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		3.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	11.115.514,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		22.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	13.843.838,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		49.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petani, peternak, masyarakat		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	10.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	Petani, peternak, masyarakat		27.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	30.228.834.304,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	33.365.912.894,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	311 Orang/bulan	30.162.849.272,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		33.288.307.894,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.805.654,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	53.179.378,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		66.605.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 Laporan	148.238.589,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	248.635.200,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.257.460,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket	31.429.171,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.507.368,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		16.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.906.590,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		22.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.138.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		89.135.200,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111 Laporan	239.768.688,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	409.429.267,00	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	99 Laporan	135.882.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		155.086.915,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.886.688,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		254.342.352,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	109 Unit	182.021.940,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	383.785.446,00	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	107 Unit	157.021.940,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		328.785.446,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
210	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura dan Perkebunan	2 % 3 % 5 %	13.290.000.000,00						-	22.319.000.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Dukungan Sarana Pertanian yang Memadai	70 Unit	11.610.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	21.219.000.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi											
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	11.510.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		20.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih											
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	200 Ton	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		319.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1.680.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	1.100.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1.680.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
211	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	37225 Ha	6.970.000.000,00						-	5.060.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi KP2B	44067 Ha	45.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	110.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	22.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian											
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	44067 Ha	22.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	6.925.000.000,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	4.950.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	500.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	4.075.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.650.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani											
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit	2.350.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
212	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	10 % 30 %	65.000.000,00						-	5.358.859.000,00	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk Bahan Pangan Asal Hewan yang keluar di Kabupaten Lombok Tengah Jumlah produk Bahan Pangan Asal Hewan yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah Jumlah ternak (Besar, Kecil dan Unggas) yang keluar dari Kabupaten Lombok Tengah Jumlah ternak (Besar, Kecil dan Unggas) yang masuk dari Kabupaten Lombok Tengah	4000 kg 3000 kg 9300 ekor 9100 ekor	40.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	160.000.000,00	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)											
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	693 laporan	40.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00			-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	5.198.859.000,00	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner											
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	86400 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN-PERTANIAN	-	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.198.859.000,00	DINAS PERTANIAN
213	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian	15 % 30 %	536.000.000,00						-	299.200.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3000 Ha	536.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	299.200.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1000 Ha	436.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		79.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2000 Ha	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
214	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	10 %	36.000.000,00						-	660.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis pendukung usaha pertanian sesuai SOP yang diterbitkan	85 Dokumen	36.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	660.000.000,00	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian											
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		660.000.000,00	DINAS PERTANIAN
215	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan Beroperasi	10 % 3 %	1.000.000.000,00						-	835.139.690,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan layanan penyuluhan	578 Kelompok Tani	1.000.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat	-	835.139.690,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa											
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Petani, peternak, masyarakat		835.139.690,00	DINAS PERTANIAN
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan			10.538.138.886,00							0,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.538.138.886,00							0,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			6.737.124.826,00							0,00	
216	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.245.362.258,00						-	0,00	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja terselesaikan	12 bulan	76.784.000,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.762.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.772.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji asn dan honorer terpenuhi	12 bulan	4.894.143.398,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.867.029.398,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	27.114.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	178.716.346,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.923.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.792.646,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Listrik ,air, Internet dan Honor PTT	12 bulan	913.310.914,00			-	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	841.310.914,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	72.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	182.407.600,00			-	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	182.407.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
217	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	48.300.000,00						-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	36.900.000,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3 Laporan	36.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-	11.400.000,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA											
							Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
218	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	77.685.993,00						-	0,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana perdagangan yang dibangun/direhab	3 unit	24.308.250,00			-	-	-	-	0,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan											
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	24.308.250,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku perdagangan yang dilatih	506 orang	53.377.743,00			-	-	-	-	0,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	53.377.743,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
219	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	39.305.000,00						-	0,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	39.305.000,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	39.305.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	105.647.815,00						-	0,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah even pameran dagang nasional yang diikuti	3 kali	105.647.815,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	96.634.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	9.013.815,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
221	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	220.823.760,00						-	0,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan diawasi	7310 alat	220.823.760,00			-	-	-	-	0,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang											
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6500 Unit	91.270.460,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	54 Orang	129.553.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.801.014.060,00							0,00	
222	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.771.740,00						-	0,00	
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji asn dan honorer terpenuhi	12 bulan	4.771.740,00			-	-	-	-	0,00	
	3	31	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	4.771.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
223	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	3.747.492.320,00						-	0,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK, Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah)	2 dok	3.747.492.320,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.358.030.701,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2.364.461.619,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
224	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	48.750.000,00						-	0,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	48.750.000,00			-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-	-	0,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota											
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)											
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	23.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Sekretariat Daerah			34.760.151.398,00							37.234.906.094,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			34.760.151.398,00							37.234.906.094,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			34.760.151.398,00							37.234.906.094,00	
225	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.503.122.314,79						-	24.784.906.094,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	240.458.185,00			-	-	-	-	270.000.000,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.622.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.698.620,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.380.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39.533.265,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	97.224.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.443.009.304,00			-	-	-	-	14.232.295.959,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1666 Orang/bulan	14.211.094.104,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.897.295.959,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	178.915.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.735.552.224,00			-	-	-	-	2.765.000.000,00	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.200.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.552.424,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.999.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	1.500.000.000,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.014.119.646,00			-	-	-	-	1.544.577.600,00	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.169.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		435.169.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	299.987.966,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	278.962.080,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		759.408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	932.254.955,00			-	-	-	-	1.050.000.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	908.784.955,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23.470.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1.100.515.079,00			-	-	-	-	1.200.515.079,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26 Orang/Bulan	349.815.079,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		349.815.079,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	600.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	590.695.465,79			-	-	-	-	672.000.000,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	264.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		264.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	264.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		264.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	62.695.465,79	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		144.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	586.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	120.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	336.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	860.517.456,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	950.517.456,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	500.517.456,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.517.456,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan											
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
226	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	8.597.639.083,20						-	10.035.000.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	400.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	350.000.000,00	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	7.225.639.083,20			-	-	-	-	8.650.000.000,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	7.185.839.083,20	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial											
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	14.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	856.000.000,00			-	-	-	-	950.000.000,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah											
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	536.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum											
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	200.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan											
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	116.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	116.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
227	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	1.609.390.000,01						-	2.415.000.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	432.390.000,01			-	-	-	-	950.000.000,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	1.390.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil											
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	35.000.000,01	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4 Dokumen	186.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
228	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	50.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	0,00	
	4	01	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
229	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	1.609.390.000,01						-	2.415.000.000,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	486.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	86.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	641.000.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	156 Dokumen	166.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik											
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	250.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	50.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD			44.148.206.018,00							62.150.004.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			44.148.206.018,00							62.150.004.000,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			44.148.206.018,00							62.150.004.000,00	
230	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	36.765.151.030,00						-	45.317.885.000,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	22 Dokumen	124.094.442,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD	-	176.485.000,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.876.011,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		28.367.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.786.762,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		16.752.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.696.922,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		11.564.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.692.900,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		7.773.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.803.394,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		8.185.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.217.248,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		6.788.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.930.436,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		19.715.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	24.090.769,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		77.341.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	19 Dokumen	4.890.341.913,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD	-	5.390.863.000,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50/14 Orang/bulan	4.816.618.172,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		5.296.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	25.595.180,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		45.973.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.331.230,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		8.895.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	37.797.331,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		39.495.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	12 Laporan	684.698.030,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD	-	3.201.557.000,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	102.361.717,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		112.478.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.410.820,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		1.302.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	96.152.682,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		165.547.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.327.640,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		465.846.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52.303.760,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		54.048.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	263.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		303.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	49.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretariat DPRD		161.810.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	51.798.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		572.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.043.411,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		63.932.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 Unit	120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD	-	0,00	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	45.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan	12 Bulan	2.029.292.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD	-	2.280.507.000,00	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	533.979.728,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		587.378.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.495.312.416,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		1.693.129.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD kondisi baik	87 Unit	437.542.874,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretariat DPRD	-	2.719.081.000,00	
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	180.212.980,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretariat DPRD		301.954.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	103.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	153.729.894,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		2.217.127.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 Laporan	28.160.699.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD	-	31.247.579.000,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50/12 Orang/Bulan	27.918.000.722,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD		30.874.801.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	104 Paket	225.198.540,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD		355.278.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	17.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD		17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Laporan layanan administrasi DPRD	58 Dokumen	438.362.365,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	301.813.000,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	35.670.410,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		39.201.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	49 Laporan	212.941.955,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		262.612.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	11 Paket	189.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD & Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
231	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Ketepatan Penetapan Perda APBD	100 Persentase 55 Persentase Tepat Tepat/tidak tepat	7.383.054.988,00						-	16.832.119.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	6 Ranperda	153.044.226,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	1.870.472.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	13.402.164,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		14.471.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	86.642.062,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPRD & Masyarakat		1.633.856.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		222.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	173.801.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	799.067.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	34.924.300,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		181.459.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	34.636.380,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		181.008.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	34.882.732,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		74.628.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	34.579.948,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		180.788.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	34.778.380,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		181.184.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	6 Dokumen	160.454.096,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	225.581.000,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	36.528.165,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		25.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	23.577.165,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		26.008.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	23.535.165,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		26.066.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	23.581.165,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPRD & Masyarakat		26.070.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	18.024.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		19.864.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan											
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	35.208.436,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		101.583.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	19 Dokumen	925.780.793,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	6.374.628.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	49.673.365,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		2.064.641.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 Orang	30.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPRD & Masyarakat		901.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi											
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	243.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		324.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD											
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	4.795.247,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		5.039.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	510 Dokumen	628.282.181,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		3.079.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Aspirasi Masyarakat	3 Dokumen	5.918.381.165,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	6.705.145.000,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	42.864.056,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		46.877.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.802.814,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		13.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	5.862.714.295,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		6.644.443.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	31 Dokumen	51.592.968,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	857.226.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	6.489.795,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		809.311.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	7.999.114,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		8.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Dokumen	31.686.813,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		34.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9 Dokumen	5.417.246,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		5.306.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			11.800.208.234,00							8.299.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			11.800.208.234,00							8.299.000.000,00	
	5	01				PERENCANAAN			10.725.893.726,00							5.666.000.000,00	
232	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100 %	7.413.720.852,00						-	185.000.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	12 Dokumen	228.310.374,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	80.000.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	48.143.128,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	25.424.678,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	26.230.678,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	16.284.940,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	17.047.850,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	51.769.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	36.047.850,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	2.225.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	5.135.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	14 Laporan	6.411.373.814,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-	-	0,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	6.352.579.614,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	32.548.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	26.245.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah	1 Dokumen	22.927.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	7.271.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	15.655.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	35.197.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	16.471.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	18.725.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	1 Dokumen	363.430.678,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	21.546.438,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	116.504.328,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	223.301.532,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	2.078.380,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 Jenis	137.268.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	105.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	25.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	78.165.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	34.103.760,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	69.241.536,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	69.241.536,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD kondisi baik	2 Jenis	145.970.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	145.970.040,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
233	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD, Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	100 %	1.211.696.460,00						-	2.245.000.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	7 Dokumen	402.390.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.460.000.000,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	37.930.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	38.266.478,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	83.514.066,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	23.319.804,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	114.732.762,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan											
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	344 Usulan	12.240.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	92.387.360,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	181.466.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	190.000.000,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	146.051.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah											
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45 Orang	35.414.840,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	594.993.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	575.000.000,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	449.729.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	145.263.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	32.845.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	20.000.000,00	
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	32.845.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
234	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	2.100.476.414,00						-	3.236.000.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	800.547.365,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	2.350.000.000,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	48.575.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	32.943.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	16.431.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	164.755.805,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	77.079.930,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	39.221.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	17.901.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	403.636.230,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen	877.568.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	886.000.000,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	67.669.804,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	49.528.812,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	46.122.270,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	254.126.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	13.706.266,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	20.137.406,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	26.277.406,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	400.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	422.360.285,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	44.989.690,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	56.370.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	18.221.895,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	202.570.010,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	21.940.090,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	45.321.305,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	15.094.795,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	17.852.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.074.314.508,00							2.633.000.000,00	
235	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 %	648.213.208,00						-	1.540.000.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	15.744.738,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	150.000.000,00	
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	15.744.738,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 Dokumen	463.555.644,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	450.000.000,00	
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	14.313.168,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	226.181.738,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	223.060.738,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	134.940.856,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	300.000.000,00	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	113.260.738,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	21.680.118,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah prototipe teknologi yang dipromosikan	3 Prototipe	33.971.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	640.000.000,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	33.971.970,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
236	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan, Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah, Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	100 %	426.101.300,00						-	1.093.000.000,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Yang Terpublikasi	6 Laporan	34.349.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	403.000.000,00	
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan											
							Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset											
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	3 Naskah	34.349.170,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	4 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	4 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan											
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah											
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Publikasi Yang Terbit di Jurnal	13 Laporan	391.752.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	690.000.000,00	
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	260.307.130,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	102 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		204.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	5 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	0 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	4 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	60 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah											
							Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	4 Kegiatan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	4 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi											
							Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	2 Laporan	22.245.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi											
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	24 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	50 Laporan	49.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah											
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						Badan Keuangan dan Aset Daerah			397.608.637.317,00							419.431.893.698,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			397.608.637.317,00							419.431.893.698,00	
	5	02				KEUANGAN			397.608.637.317,00							419.431.893.698,00	
237	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	71.657.743.303,00						-	57.915.855.435,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	120.875.890,00			-	-	-	-	149.240.824,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.731.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.443.660,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.167.180,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.311.755,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.611.310,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		11.090.478,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.058.480,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		6.748.292,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.603.480,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.986.540,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	35.820.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		34.833.964,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	14.884.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.826.135,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	70.782.707.885,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	56.759.213.337,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	70.736.036.293,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		56.700.178.503,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.734.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		27.982.255,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.261.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.308.793,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.362.024,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		9.586.996,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4.313.588,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.156.790,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	70.300.000,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	218.974.036,00	
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	70.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		218.974.036,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	230.592.000,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	109.309.847,00	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	222.180.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		98.951.034,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.412.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.358.813,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	123.776.500,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	278.087.566,00	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	123.776.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		278.087.566,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	179.844.768,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	200.042.753,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	82.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		64.925.454,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97.044.768,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		135.117.299,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	149.646.260,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	200.987.072,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	149.646.260,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.987.072,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
238	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100 % 36.78 % 91.2 %	324.516.666.620,00						-	359.231.152.135,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	2 Dokumen	1.463.937.992,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD	-	1.609.874.843,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	846.712.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		862.317.230,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	92.383.660,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		114.958.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	67.138.266,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		59.363.287,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	61.999.890,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		60.522.530,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD											
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	27.840.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		28.442.333,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	31.846.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		32.141.337,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	78.071.320,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		140.019.598,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	59.239.016,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		74.390.361,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	131.818.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		122.592.577,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	35.936.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		28.256.445,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	30.953.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		86.870.965,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kelengkapan dokumen Penatausahaan APBD	100 %	784.628.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD	-	466.322.400,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	480.307.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		109.127.380,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	43.249.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		32.861.259,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	50.799.880,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		62.442.830,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	51.011.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		85.453.581,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	21.301.348,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		21.389.404,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	39.271.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		31.971.916,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	78.515.412,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		70.440.880,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	8.075.178,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		8.360.784,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	12.097.676,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		44.274.366,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase kelengkapan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban APBD	100 %	434.518.154,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD	-	380.735.968,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	27.286.276,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		22.354.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	115.351.553,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		109.572.730,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	89.667.707,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		79.533.292,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	156.390.098,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		123.453.016,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	32.643.870,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		32.643.870,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota											
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	30 Lembaga	13.178.650,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	BKAD		13.178.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran dana bantuan pemerintah daerah Persentase penyelesaian kewajiban pemerintah	100 % 100 %	321.833.582.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah	-	356.774.218.924,00	
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	7.951.838.240,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		11.870.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	282.308.907.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		319.315.858.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.500.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	29.072.837.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		20.588.360.124,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
239	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	1.434.227.394,00						-	2.284.886.128,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.434.227.394,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	2.284.886.128,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	59.341.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		66.686.544,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	44 Dokumen	35.027.620,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		86.874.208,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	272.517.823,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		627.637.497,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	515.874.836,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.111.874.548,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	222.019.260,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		121.532.493,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	176.403.420,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		104.876.210,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	34.997.170,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		34.963.543,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	118.045.865,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.441.085,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah			28.489.605.803,00							27.897.185.121,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			28.489.605.803,00							27.897.185.121,00	
	5	02				KEUANGAN			28.489.605.803,00							27.897.185.121,00	
240	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.143.733.903,00						-	24.891.593.216,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	133.098.480,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	226.208.570,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.086.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		25.337.660,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.138.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.115.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.505.220,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.505.220,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.611.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.603.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	981.090,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	41.063.840,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		71.830.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	54.386.310,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		76.668.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		13.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	13.525.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		20.197.480,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	22.602.582.083,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	21.805.234.915,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	22.571.734.503,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		21.772.726.815,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.508.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.105.220,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.338.880,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		25.402.880,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.036.579.350,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.740.853.473,00	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	579.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.252.820.198,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		146.215.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.650.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		235.617.355,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		90.175.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.679.350,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.025.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.946.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.946.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	112.719.120,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	137.226.768,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.990.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		75.406.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.729.120,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		61.820.768,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	217.808.870,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	482.069.490,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	140.383.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		116.801.520,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	51.612.990,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		69.324.910,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.812.280,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		295.943.060,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
241	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	4.345.871.900,00						-	3.005.591.905,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	4.345.871.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	3.005.591.905,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	78.248.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		189.509.820,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	30.758.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		31.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	61.418.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		183.689.850,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	1.808.318.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		518.790.288,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	708.827.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.509.409.059,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		43.094.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	1.608.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		529.498.588,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.075.640.939,00							9.534.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.075.640.939,00							9.534.000.000,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			7.604.333.407,00							8.289.000.000,00	
242	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.685.364.498,00						-	5.809.000.000,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	8 Dokumen	152.904.690,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	209.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.945.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.639.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.575.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	13.147.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	117.416.590,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.115.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	7.066.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	12 Dokumen	5.284.015.907,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	5.055.000.000,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.232.161.967,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.225.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	47.628.140,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi BMD pada SKPD	1 Dokumen	4.630.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.630.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1 Dokumen	4.396.600,00			-	-	-	-	15.000.000,00	
	5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	4.396.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	12 Dokumen	65.721.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	345.000.000,00	
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.124.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.572.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.025.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	84.219.331,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	70.000.000,00	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.917.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.301.731,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD kondisi baik	2 Jenis	89.476.970,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	100.000.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	89.476.970,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
243	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	1.918.968.909,00						-	2.480.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	3 Dokumen	772.445.522,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	940.000.000,00	
	5	03	02	2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.821.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	33.154.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK											
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	143.555.334,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi											
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	39.609.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN											
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	150.306.361,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	337.985.041,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	62.014.786,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen SK mutasi dan promosi ASN	2 Dokumen	303.721.971,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	465.000.000,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	105.354.090,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	32.129.920,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	166.237.961,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen Laporan pengembangan kompetensi ASN	12 Dokumen	622.638.883,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	585.000.000,00	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center											
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	265.856.948,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	8 Orang	304.686.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	100 Orang	28.219.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional											
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	23.876.435,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	12 Dokumen	220.162.533,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	490.000.000,00	
	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	32.532.460,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	43.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai											
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	125 Orang	20.363.375,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	4000 Orang	63.220.140,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	30.123.838,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai											
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen	22.782.720,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			471.307.532,00							1.245.000.000,00	
244	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	471.307.532,00						-	1.245.000.000,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen Laporan pengembangan kompetensi teknis	1 Dokumen	149.065.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	245.000.000,00	
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	49.038.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	100.027.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Dokumen	322.241.732,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.000.000.000,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	322.241.732,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Inspektorat			26.536.807.222,00							29.203.000.000,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			26.536.807.222,00							29.203.000.000,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			26.536.807.222,00							29.203.000.000,00	
245	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.447.142.416,00						-	19.053.000.000,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.362.804,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	65.000.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.314.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.486.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.486.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.486.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.083.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.269.144,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.414.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	34.822.480,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.139.258.682,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	14.024.000.000,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	11.109.454.858,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		14.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	29.803.824,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		24.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.342.533.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.500.000.000,00	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	3.342.533.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.006.172.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	775.000.000,00	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	239.089.878,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.775.596,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	732.046.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.261.150,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.426.597.172,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	2.466.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.893.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	205.535.915,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		116.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	327.621.257,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.145.824,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.000.000,00	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.145.824,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	444.071.510,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	215.000.000,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	444.071.510,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		215.000.000,00	INSPEKTORAT
246	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	6.171.362.728,00						-	8.650.000.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	3.730.873.403,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	7.450.000.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan	570.060.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		3.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	320 Laporan	655.277.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	42.508.080,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	154 Laporan	1.294.261.440,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	250 Dokumen	1.168.765.923,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim	-		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	2.440.489.325,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.200.000.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian											
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	1.782.900.845,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	657.588.480,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
247	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	1.918.302.078,00						-	1.500.000.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	99.257.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	200.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	99.257.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	1.819.044.478,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	1.300.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 perangkat daerah	420.335.090,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 perangkat daerah	121.630.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.124.439.388,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	152.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
						Kantor Camat Praya			12.690.738.242,00							14.443.684.429,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.690.738.242,00							14.443.684.429,00	
	7	01				KECAMATAN			12.690.738.242,00							14.443.684.429,00	
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	11.564.939.255,00						-	13.589.643.828,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	63.914.802,00			-	-	-	-	73.939.966,00	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.279.050,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.800.986,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.300.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.341.500,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.939.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.638.080,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.601.500,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.746.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.492.300,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.638.952,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.073.400,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	30.490.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.992.200,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	11.190.610.789,00			-	-	-	-	13.107.165.108,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	11.117.841.045,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.983.634.195,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.242.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.719.350,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	66.527.744,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		117.811.563,00	KANTOR CAMAT PRAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	4 Laporan	134.028.158,00			-	-	-	-	185.804.285,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	129.528.158,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.675.585,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.513.200,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.615.500,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD tercatat	4 Jenis	40.946.000,00			-	-	-	-	43.735.188,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	40.946.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.735.188,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintah daerah	12 Laporan	52.416.000,00			-	-	-	-	43.066.800,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	52.416.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.066.800,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD kondisi baik	10 Jenis	83.023.506,00			-	-	-	-	135.932.481,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	70.193.506,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.703.181,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12.830.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.471.500,00	KANTOR CAMAT PRAYA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.757.800,00	KANTOR CAMAT PRAYA
249	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100 %	134.930.216,00						-	109.188.070,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	2 Laporan	128.526.416,00			-	-	-	-	61.188.070,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	128.526.416,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.188.070,00	KANTOR CAMAT PRAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan hasil penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan	2 Laporan	6.403.800,00			-	-	-	-	48.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	6.403.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	42.327.817,00						-	55.955.531,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan hasil Koordinasi pemberdayaan desa	2 Laporan	42.327.817,00			-	-	-	-	55.955.531,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.327.817,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.955.531,00	KANTOR CAMAT PRAYA
251	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100 %	93.360.578,00						-	63.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	93.360.578,00			-	-	-	-	63.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	93.360.578,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA
252	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100 %	840.484.676,00						-	609.608.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3 Laporan	840.484.676,00			-	-	-	-	609.608.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	840.484.676,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		609.608.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA
253	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	97 %	14.695.700,00						-	16.289.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	14.695.700,00			-	-	-	-	16.289.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	14.695.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.289.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA
						Kelurahan Gonjak			1.043.792.012,00							1.435.248.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.043.792.012,00							1.435.248.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.043.792.012,00							1.435.248.000,00	
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.043.792.012,00						-	1.435.248.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.043.792.012,00			-	-	-	-	1.435.248.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.159.156,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gonjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.558.000,00	KELURAHAN GONJAK
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	311.297.620,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gonjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		481.950.000,00	KELURAHAN GONJAK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	694.904.236,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gonjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		893.865.000,00	KELURAHAN GONJAK
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	30.431.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gonjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.875.000,00	KELURAHAN GONJAK
						Kelurahan Semayan			1.087.869.936,00							1.450.995.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.087.869.936,00							1.450.995.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.087.869.936,00							1.450.995.000,00	
255	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentse usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.087.869.936,00						-	1.450.995.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.087.869.936,00			-	-	-	-	1.450.995.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.194.126,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.718.000,00	KELURAHAN SEMAYAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	308.699.248,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		537.600.000,00	KELURAHAN SEMAYAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	696.293.562,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		803.775.000,00	KELURAHAN SEMAYAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	72.683.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.902.000,00	KELURAHAN SEMAYAN
						Kelurahan Tiwugalih			1.084.279.988,00							1.345.985.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.084.279.988,00							1.345.985.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.084.279.988,00							1.345.985.000,00	
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.084.279.988,00						-	1.345.985.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.084.279.988,00			-	-	-	-	1.345.985.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.385.871,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.960.000,00	KELURAHAN TIWUGALIH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	342.388.017,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		424.200.000,00	KELURAHAN TIWUGALIH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	634.766.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		823.200.000,00	KELURAHAN TIWUGALIH
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	95.740.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Tiwugalih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.625.000,00	KELURAHAN TIWUGALIH
						Kelurahan Prapen			1.132.756.932,00							1.450.460.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.132.756.932,00							1.450.460.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.132.756.932,00							1.450.460.000,00	
257	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.132.756.932,00						-	1.450.460.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.132.756.932,00			-	-	-	-	1.450.460.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.885.795,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.013.000,00	KELURAHAN PRAPEN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	187.268.870,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		286.965.000,00	KELURAHAN PRAPEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	848.193.267,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		1.055.775.000,00	KELURAHAN PRAPEN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	86.409.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.707.000,00	KELURAHAN PRAPEN
						Kelurahan Leneng			1.297.874.665,00							1.386.283.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.297.874.665,00							1.386.283.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.297.874.665,00							1.386.283.000,00	
258	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.297.874.665,00						-	1.386.283.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.297.874.665,00			-	-	-	-	1.386.283.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	12.086.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.925.000,00	KELURAHAN LENENG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	333.376.969,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		458.325.000,00	KELURAHAN LENENG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	859.468.696,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		855.907.000,00	KELURAHAN LENENG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	92.943.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.126.000,00	KELURAHAN LENENG
						Kelurahan Gerunung			1.075.867.802,00							1.341.363.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.075.867.802,00							1.341.363.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.075.867.802,00							1.341.363.000,00	
259	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.075.867.802,00						-	1.341.363.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.075.867.802,00			-	-	-	-	1.341.363.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.138.052,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gerunung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.736.000,00	KELURAHAN GERUNUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	446.007.422,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gerunung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		478.800.000,00	KELURAHAN GERUNUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	601.598.328,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gerunung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		812.700.000,00	KELURAHAN GERUNUNG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	20.124.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Gerunung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		41.127.000,00	KELURAHAN GERUNUNG
						Kelurahan Praya			1.098.949.994,00							1.450.858.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.098.949.994,00							1.450.858.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.098.949.994,00							1.450.858.000,00	
260	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.098.949.994,00						-	1.450.858.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.098.949.994,00			-	-	-	-	1.450.858.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.623.704,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.650.000,00	KELURAHAN PRAYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	309.887.998,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		505.050.000,00	KELURAHAN PRAYA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	731.794.292,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		856.800.000,00	KELURAHAN PRAYA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan	45.644.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.358.000,00	KELURAHAN PRAYA
						Kelurahan Panjisari			928.590.956,00							1.159.871.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			928.590.956,00							1.159.871.000,00	
	7	01				KECAMATAN			928.590.956,00							1.159.871.000,00	
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	928.590.956,00						-	1.159.871.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	928.590.956,00			-	-	-	-	1.159.871.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.697.142,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Panji Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.285.000,00	KELURAHAN PANJISARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	194.522.198,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Panji Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		306.075.000,00	KELURAHAN PANJISARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	680.155.616,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Panji Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		788.025.000,00	KELURAHAN PANJISARI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	42.216.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Panji Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		53.486.000,00	KELURAHAN PANJISARI
						Kelurahan Renteng			1.040.314.130,00							1.301.783.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.040.314.130,00							1.301.783.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.040.314.130,00							1.301.783.000,00	
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20 %	1.040.314.130,00						-	1.301.783.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	1.040.314.130,00			-	-	-	-	1.301.783.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.679.290,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Renteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.337.000,00	KELURAHAN RENTENG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	209.292.885,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Renteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		406.560.000,00	KELURAHAN RENTENG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	755.276.955,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Renteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		794.850.000,00	KELURAHAN RENTENG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	64.065.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Renteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.036.000,00	KELURAHAN RENTENG
						Kantor Camat Praya Tengah			6.183.693.479,00							6.019.555.146,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.183.693.479,00							6.019.555.146,00	
	7	01				KECAMATAN			6.183.693.479,00							6.019.555.146,00	
263	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.409.051.317,00						-	5.189.489.396,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kantor Camat Praya Tengah	4 dokumen	53.313.475,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	64.559.967,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.128.311,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		19.374.803,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.256.392,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		4.256.392,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.403.248,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		1.403.248,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.789.696,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		1.789.696,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.759.348,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		1.759.348,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.587.392,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		9.587.392,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.006.088,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		22.006.088,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4.383.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		4.383.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi keuangan Kantor Camat Praya Tengah	3 dokumen	4.797.282.265,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	4.615.106.205,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.777.483.924,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		4.590.735.238,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.181.503,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		3.181.503,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.616.838,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		21.189.464,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi BMD pada SKPD	4 dokumen	1.642.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	1.644.838,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.642.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		1.644.838,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	5.742.200,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	6.362.330,00	
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.742.200,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		6.362.330,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	4 dokumen	159.138.567,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	153.158.888,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	113.295.679,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		100.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.656.192,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		25.656.192,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	14.632.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		21.948.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.554.696,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		5.554.696,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD tercatat	4 jenis	21.038.600,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	18.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	21.038.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		18.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintah daerah	12 bulan	100.816.730,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	96.857.378,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.196.750,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		38.145.750,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.599.212,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		10.599.212,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.020.768,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		48.112.416,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD kondisi baik	59 jenis	270.077.480,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah	-	233.799.790,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	45.709.790,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		74.899.790,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.630.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		8.900.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.687.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		50.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		50.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.050.690,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Praya Tengah		50.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
264	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pelayanan yang di limpahkan	100 PERSEN	30.767.286,00						-	47.768.290,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	9.268.290,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Praya Tengah	-	9.268.290,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	9.268.290,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Praya Tengah		9.268.290,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 dokumen	21.498.996,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Praya Tengah	-	38.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	21.498.996,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Praya Tengah		38.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
265	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100 persen	116.511.692,00						-	73.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	47.812.692,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Praya tengah	-	35.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	47.812.692,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Praya tengah		35.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan hasil pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 laporan	68.699.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	68.699.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
266	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 persen	24.378.150,00						-	27.500.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	24.378.150,00			-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah	-	27.500.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	24.378.150,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah		27.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
267	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan	100 persen	557.461.904,00						-	634.872.460,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3 dokumen	557.461.904,00			-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah	-	634.872.460,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35 Orang	141.040.697,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah		154.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	402.291.737,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah		466.748.590,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	14.129.470,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah		14.123.870,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
268	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	75 persen	45.523.130,00						-	46.425.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 dokumen	45.523.130,00			-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah	-	46.425.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	20.097.630,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah		21.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	25.425.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Tengah		25.425.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
						Kelurahan Jontlak			1.063.875.000,00							1.329.436.128,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.063.875.000,00							1.329.436.128,00	
	7	01				KECAMATAN			1.063.875.000,00							1.329.436.128,00	
269	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 persen	1.063.875.000,00						-	1.329.436.128,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan	3 dokumen	1.063.875.000,00			-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Jontlak	-	1.329.436.128,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.481.114,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Jontlak		9.449.854,00	KELURAHAN JONTLAK
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	384.673.969,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Jontlak		400.000.000,00	KELURAHAN JONTLAK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	655.749.697,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Jontlak		905.756.308,00	KELURAHAN JONTLAK
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	15.970.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Jontlak		14.229.966,00	KELURAHAN JONTLAK
						Kelurahan Sasake			1.020.317.539,00							1.182.644.914,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.020.317.539,00							1.182.644.914,00	
	7	01				KECAMATAN			1.020.317.539,00							1.182.644.914,00	
270	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 persen	1.020.317.539,00						-	1.182.644.914,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan	3 dokumen	1.020.317.539,00			-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Sasake	-	1.182.644.914,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.536.396,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Sasake	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Sasake		11.536.652,00	KELURAHAN SASAKE
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	214.248.642,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Sasake	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Sasake		195.481.103,00	KELURAHAN SASAKE
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	751.219.311,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Sasake	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Sasake		932.313.827,00	KELURAHAN SASAKE
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	43.313.190,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Sasake	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Sasake		43.313.332,00	KELURAHAN SASAKE
						Kelurahan Gerantung			1.031.422.992,00							1.233.508.569,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.031.422.992,00							1.233.508.569,00	
	7	01				KECAMATAN			1.031.422.992,00							1.233.508.569,00	
271	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 persen	1.031.422.992,00						-	1.233.508.569,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan	3 dokumen	1.031.422.992,00			-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Gerantung	-	1.233.508.569,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.644.902,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Gerantung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Gerantung		6.655.120,00	KELURAHAN GERANTUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	199.937.502,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Gerantung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Gerantung		253.195.177,00	KELURAHAN GERANTUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	810.725.658,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Gerantung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Gerantung		959.543.342,00	KELURAHAN GERANTUNG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	14.114.930,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Gerantung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Wilayah Kelurahan Gerantung		14.114.930,00	KELURAHAN GERANTUNG
						Kantor Camat Praya Barat			3.368.277.543,00							3.877.621.600,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.368.277.543,00							3.877.621.600,00	
	7	01				KECAMATAN			3.368.277.543,00							3.877.621.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.544.708.701,00						-	2.820.111.600,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	84.193.000,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	139.915.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.502.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		81.900.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.747.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		10.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		7.140.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.850.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		8.925.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		6.300.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.694.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		8.200.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		11.700.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		5.250.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	8 dokumen	2.047.833.321,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	2.383.696.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.994.667.521,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		2.321.756.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		16.800.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	48.665.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		45.140.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.537.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	5.250.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.537.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		5.250.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	93.322.400,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	123.078.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.952.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		11.545.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.760.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		52.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.516.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		24.005.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	34.244.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		29.778.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.850.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		5.250.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.307.400,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	28.035.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	43.307.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		28.035.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	270.515.580,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	140.137.600,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	42.396.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		71.887.600,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	228.118.780,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		68.250.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
273	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	76.304.952,00						-	213.150.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.475.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	102.900.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		102.900.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	63.829.952,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	110.250.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	63.829.952,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		110.250.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
274	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	105.890.969,00						-	105.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	75.622.969,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	78.750.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	75.622.969,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		78.750.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	30.268.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	26.250.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	30.268.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		26.250.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
275	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	42.074.000,00						-	63.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	42.074.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	63.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	42.074.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		63.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
276	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	563.097.321,00						-	595.510.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	563.097.321,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	595.510.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	143.888.151,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		139.810.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang	419.209.170,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		455.700.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
277	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	36.201.600,00						-	80.850.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	36.201.600,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	80.850.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7.416.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		23.100.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	16.071.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		21.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	12.714.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		36.750.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
						Kantor Camat Praya Barat Daya			3.128.324.918,00							1.082.122.075,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.128.324.918,00							1.082.122.075,00	
	7	01				KECAMATAN			3.128.324.918,00							1.082.122.075,00	
278	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.364.766.108,00						-	486.024.385,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.534.800,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	97.607.400,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.088.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.747.200,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.033.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.451.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.015.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.073.400,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.534.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.080.217.963,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.314.500,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.072.792.963,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.498.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.645.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.816.500,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.284.000,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.353.500,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.284.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.353.500,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	47.337.895,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	156.675.585,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.940.575,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.487.320,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		114.675.585,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.010.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	26.623.146,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	65.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26.623.146,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		65.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.158.000,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	29.073.400,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.080.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.078.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.073.400,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.610.304,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	117.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	41.830.304,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		86.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	59.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
279	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	79.095.624,00						-	76.778.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	79.095.624,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	76.778.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	79.095.624,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		76.778.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
280	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	59.795.140,00						-	38.475.690,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	59.795.140,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	38.475.690,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Kemasyarakatan	59.795.140,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		38.475.690,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
281	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	71.618.000,00						-	41.844.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	35.618.000,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.374.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.618.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.374.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	36.000.000,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.470.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	39 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.470.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
282	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	502.794.046,00						-	400.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	502.794.046,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 Orang	502.794.046,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
283	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	50.256.000,00						-	39.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.256.000,00			-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	39.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	19.140.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.938.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	17.178.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
						Kantor Camat Praya Timur			2.960.899.322,00							3.522.255.555,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.960.899.322,00							3.522.255.555,00	
	7	01				KECAMATAN			2.960.899.322,00							3.522.255.555,00	
284	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.179.425.176,00						-	2.602.455.555,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	56.468.700,00			-	-	-	-	99.100.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.888.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.800.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.830.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.290.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	11.370.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	6.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.800.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.722.369.222,00			-	-	-	-	2.036.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	1.688.465.222,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.715.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	26.189.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	98.816.328,00			-	-	-	-	141.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.932.554,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.730.804,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.032.970,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	28.120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	33.502.750,00			-	-	-	-	104.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	1.816.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	31.686.530,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	68.849.200,00			-	-	-	-	64.800.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.649.200,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.800.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	199.418.976,00			-	-	-	-	157.555.555,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	55.695.820,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.555.555,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143.723.156,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
285	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	59.250.000,00						-	98.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	38.240.000,00			-	-	-	-	21.500.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	38.240.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	21.010.000,00			-	-	-	-	76.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	21.010.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
286	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	100.024.859,00						-	55.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	100.024.859,00			-	-	-	-	55.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	71.956.859,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	28.068.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
287	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	8.780.000,00						-	22.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	8.780.000,00			-	-	-	-	22.500.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.500.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
288	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	569.971.687,00						-	670.300.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4 Laporan	569.971.687,00			-	-	-	-	670.300.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	119.178.719,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Mujur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 Orang	430.776.968,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		499.300.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	20.016.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
289	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	43.447.600,00						-	74.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	43.447.600,00			-	-	-	-	74.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	26.590.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	9.657.600,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
						Kantor Camat Pujut			3.995.474.795,00							3.758.734.895,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.995.474.795,00							3.758.734.895,00	
	7	01				KECAMATAN			3.995.474.795,00							3.758.734.895,00	
290	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.142.521.604,00						-	2.845.887.323,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.292.448,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	87.450.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.065.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.217.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		6.160.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.580.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.125.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.630.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.950.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.336.448,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.496.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		12.650.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.602.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		27.500.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	8.280.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.500.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.783.249.765,00			-	-	-	-	2.386.539.449,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/bulan	2.732.370.797,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.363.474.773,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.926.200,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		11.275.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	41.952.768,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		11.789.676,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.007.500,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	2.835.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.007.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		2.835.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	119.621.993,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	96.885.516,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.861.250,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		44.505.516,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.108.243,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		8.250.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.340.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		11.550.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.340.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		22.500.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.972.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		10.080.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	22.950.000,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	78.311.159,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		37.611.159,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	22.950.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		40.700.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.014.278,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	76.360.105,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.014.278,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		76.360.105,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	81.385.620,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	117.506.094,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57.049.120,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		100.142.044,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	24.336.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		17.364.050,00	KANTOR CAMAT PUJUT
291	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100 %	92.490.854,00						-	27.693.875,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	44.453.430,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	10.429.595,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	44.453.430,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.429.595,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	48.037.424,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	17.264.280,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	48.037.424,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		17.264.280,00	KANTOR CAMAT PUJUT
292	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	102.215.811,00						-	72.968.244,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	55.877.811,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	57.218.244,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	55.877.811,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		57.218.244,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	46.338.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	15.750.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	46.338.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		15.750.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	37.832.000,00						-	49.664.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	37.832.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	49.664.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	37.832.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		49.664.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
294	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	510.351.426,00						-	705.193.093,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	510.351.426,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	705.193.093,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	146.523.143,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		146.800.500,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 Orang	363.828.283,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		558.392.593,00	KANTOR CAMAT PUJUT
295	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	110.063.100,00						-	57.328.360,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	110.063.100,00			-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	57.328.360,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	9.081.600,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		13.111.560,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	45.562.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-5 Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		30.709.800,00	KANTOR CAMAT PUJUT
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	55.419.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		13.507.000,00	KANTOR CAMAT PUJUT
						Kantor Camat Kopang			3.519.868.756,00							3.590.592.546,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.519.868.756,00							3.590.592.546,00	
	7	01				KECAMATAN			3.519.868.756,00							3.590.592.546,00	
296	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.769.641.178,00						-	2.772.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	66.350.000,00			-	-	-	-	102.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12.640.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.945.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.945.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.945.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.945.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2.780.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	39.150.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.416.346.327,00			-	-	-	-	2.225.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.406.023.327,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.042.500,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.280.500,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	202.172.131,00			-	-	-	-	210.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.234.045,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	92.210.542,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	13.093.576,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55.681.968,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	21.948.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	5.004.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.112.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.112.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	52.660.720,00			-	-	-	-	205.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	40.110.720,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	12.550.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
297	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	62.601.648,00						-	128.350.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	26.901.648,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	26.901.648,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	35.700.000,00			-	-	-	-	28.350.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	35.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		28.350.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
298	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	73.605.998,00						-	50.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	73.605.998,00			-	-	-	-	50.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	73.605.998,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
299	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	44.655.000,00						-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	44.655.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	44.655.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
300	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	512.199.932,00						-	530.242.546,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	512.199.932,00			-	-	-	-	530.242.546,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	145.733.305,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		150.281.450,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	30.400.125,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		31.500.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	318.066.502,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		329.561.096,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		18.900.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
301	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	57.165.000,00						-	60.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	57.165.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	24.470.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	32.695.000,00	Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOPANG
						Kantor Camat Batukliang			2.662.200.936,00							3.970.395.806,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.662.200.936,00							3.970.395.806,00	
	7	01				KECAMATAN			2.662.200.936,00							3.970.395.806,00	
302	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	2.013.993.217,00						-	3.119.022.328,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	7 dokumen	22.917.284,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	41.472.200,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.158.392,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		15.829.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.758.892,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		25.643.200,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.508.986.000,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	2.635.223.390,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.476.409.390,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		2.594.965.590,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	32.576.610,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		40.257.800,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	179.439.249,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	194.481.732,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.193.426,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		11.424.042,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	98.536.577,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		74.187.104,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	28.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		68.761.200,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	6.509.246,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		13.109.386,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	11.609.590,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	57.600.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	11.609.590,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		57.600.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	57.857.544,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	65.094.944,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.182.600,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		35.420.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.674.944,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		29.674.944,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	233.183.550,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	125.150.062,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	89.152.520,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		80.821.822,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	144.031.030,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		44.328.240,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
303	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	33.322.183,00						-	43.817.021,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	8.869.690,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	14.856.918,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	8.869.690,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		14.856.918,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	24.452.493,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	28.960.103,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	24.452.493,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		28.960.103,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
304	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	47.512.117,00						-	43.129.570,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	47.512.117,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	43.129.570,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	47.512.117,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		43.129.570,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
305	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	43.065.974,00						-	63.381.800,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	43.065.974,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	63.381.800,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	43.065.974,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		63.381.800,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
306	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	449.274.437,00						-	608.182.201,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	449.274.437,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	608.182.201,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	533 Orang	126.029.179,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		131.423.574,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1300 Orang	323.245.258,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		476.758.627,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
307	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	75.033.008,00						-	92.862.886,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	75.033.008,00			-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-	-	92.862.886,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	56.596.352,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		59.526.150,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	18.436.656,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial	-		33.336.736,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
						Kantor Camat Batukliang Utara			2.476.400.363,00							2.946.440.219,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.476.400.363,00							2.946.440.219,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01				KECAMATAN			2.476.400.363,00							2.946.440.219,00	
308	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.875.863.990,36						-	2.231.160.219,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.038.740,00			-	-	-	-	33.750.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.852.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.152.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.754.740,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.880.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.750.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.416.462.511,36			-	-	-	-	1.628.910.219,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.371.973.493,36	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.575.910.219,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.388.530,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	39.100.488,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	218.448.719,00			-	-	-	-	260.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.835.615,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	132.741.104,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.500.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	52.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.500.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	18.072.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.500.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	68.687.600,00			-	-	-	-	77.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.426.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.261.600,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.500.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	151.226.420,00			-	-	-	-	230.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	77.729.420,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	68.747.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		140.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
309	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	35.188.700,00						-	70.900.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	8.712.600,00			-	-	-	-	25.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8.712.600,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			25.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	26.476.100,00			-	-	-	-	45.900.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	26.476.100,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		45.900.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	41.287.156,64						-	85.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	41.287.156,64			-	-	-	-	85.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	41.287.156,64	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
311	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	53.256.800,00						-	135.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	25.650.800,00			-	-	-	-	80.500.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25.650.800,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		80.500.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	27.606.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	27.606.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		55.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
312	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	442.471.216,00						-	368.880.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	442.471.216,00			-	-	-	-	368.880.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	76.953.220,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		80.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang	365.517.996,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		288.880.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
313	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	28.332.500,00						-	55.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	28.332.500,00			-	-	-	-	55.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	28.332.500,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		55.000.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
						Kantor Camat Pringgarata			3.109.761.790,00							3.573.203.441,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.109.761.790,00							3.573.203.441,00	
	7	01				KECAMATAN			3.109.761.790,00							3.573.203.441,00	
314	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.305.839.871,00						-	2.629.869.696,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	21 dokumen	20.465.900,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	34.465.830,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		3.465.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.359.400,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		4.577.370,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.073.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		1.109.010,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.383.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		1.452.150,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	475.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		1.050.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	2.085.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		2.189.250,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.950.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		10.123.050,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.630.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		5.250.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.210.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		5.250.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	32 dokumen	1.985.523.893,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	2.238.158.867,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.948.276.443,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		2.202.635.139,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.085.500,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		2.138.325,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	34.161.950,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		33.385.403,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah	1 laporan	980.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	3.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		3.000.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	16 laporan	2.371.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	9.603.300,00	
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Dokumen	2.371.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		9.603.300,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	7 dokumen	93.724.908,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	83.239.910,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.103.197,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		8.190.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.897.711,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		17.110.910,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	29.264.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		47.859.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.460.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		10.080.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Tercatat Jumlah barang milik daerah yang diadakan	11 unit 8 unit	16.200.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	152.573.688,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		36.750.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	16.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		115.823.688,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Layanan pemerintahan daerah	3 laporan 12 bulan	42.714.472,00			-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat	-	33.777.484,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	26.677.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		33.777.484,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	16.037.472,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat dan masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	11 unit	143.859.698,00			-	-	Pegawai Kantor Camat	-	75.050.617,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	43.500.698,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat		75.050.617,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.359.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Camat		0,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
315	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100 %	56.684.252,00						-	103.582.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3 dokumen	24.660.000,00			-	-	Masyarakat	-	32.130.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	24.660.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		32.130.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	aporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dokumen)	1 dokumen	32.024.252,00			-	-	Masyarakat	-	71.452.500,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	32.024.252,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		71.452.500,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
316	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100 %	52.135.843,00						-	112.350.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	45.467.843,00			-	-	Masyarakat	-	78.750.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.467.843,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		78.750.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas PKK Tingkat Kecamatan	50 orang	6.668.000,00			-	-	Masyarakat	-	33.600.000,00	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	6.668.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		33.600.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
317	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	26.584.400,00						-	139.621.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	12 laporan	26.584.400,00			-	-	Masyarakat	-	139.621.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	26.584.400,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		139.621.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
318	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	100 %	589.926.224,00						-	476.889.745,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dokumen) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6 dokumen 350 orang	589.926.224,00			-	-	Masyarakat	-	476.889.745,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	156.894.100,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	408.327.424,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Masyarakat		455.532.745,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	24.704.700,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		21.357.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
319	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu	100 %	78.591.200,00						-	110.890.500,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	5 dokumen	78.591.200,00			-	-	Masyarakat	-	110.890.500,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	28.921.200,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		48.510.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	3.980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		15.834.000,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	30.495.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		21.582.750,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	15.195.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat		24.963.750,00	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
						Kantor Camat Jonggat			3.127.691.247,00							4.225.664.854,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.127.691.247,00							4.225.664.854,00	
	7	01				KECAMATAN			3.127.691.247,00							4.225.664.854,00	
320	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.469.025.635,00						-	3.219.736.561,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	42.741.000,00			-	-	-	-	53.722.450,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.640.900,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.373.750,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.657.200,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.811.500,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.540.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.465.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.420.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.680.750,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.496.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.282.550,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4.185.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.810.800,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.015.204.381,00			-	-	-	-	2.705.259.286,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.993.130.381,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.681.321.886,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	9.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.847.400,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	13.074.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.090.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.440.000,00			-	-	-	-	9.603.300,00	
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Dokumen	10.440.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.603.300,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	261.940.554,00			-	-	-	-	259.360.700,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.308.769,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.177.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.715.785,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.783.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.609.400,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	16.616.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.538.800,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.252.500,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.740.600,00			-	-	-	-	43.507.200,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.740.600,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.507.200,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	103.959.100,00			-	-	-	-	148.283.625,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	78.005.900,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.246.125,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.953.200,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		69.037.500,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
321	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	66.797.472,00						-	99.071.800,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	40.020.000,00			-	-	-	-	22.293.800,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	40.020.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			22.293.800,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	26.777.472,00			-	-	-	-	76.778.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	26.777.472,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		76.778.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
322	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	60.551.218,00						-	74.525.850,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	39.215.218,00			-	-	-	-	36.725.850,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60 Lembaga Kemasyarakatan	39.215.218,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		36.725.850,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	21.336.000,00			-	-	-	-	37.800.000,00	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	21.336.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		37.800.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
323	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	18.340.000,00						-	135.973.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	18.340.000,00			-	-	-	-	135.973.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	18.340.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		135.973.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
324	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	414.021.322,00						-	585.168.143,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	414.021.322,00			-	-	-	-	585.168.143,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	109.013.718,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		149.250.500,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	288.003.604,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		413.615.520,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	17.004.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.302.123,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
325	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	98.955.600,00						-	111.189.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	98.955.600,00			-	-	-	-	111.189.500,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	41.220.000,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		20.443.500,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	57.735.600,00	Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		90.746.000,00	KANTOR CAMAT JONGGAT
						Kantor Camat Janapria			2.918.216.399,00							3.585.641.049,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.918.216.399,00							3.585.641.049,00	
	7	01				KECAMATAN			2.918.216.399,00							3.585.641.049,00	
326	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.156.093.812,00						-	2.754.004.855,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	32.920.150,00			-	-	-	-	43.689.723,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.482.440,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.897.485,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.372.570,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		6.692.609,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.537.570,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		2.346.960,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.287.570,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		3.642.969,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.975.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		2.106.500,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.195.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		7.320.500,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.155.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		10.182.700,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.915.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.500.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.841.897.823,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	2.442.415.132,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.810.734.373,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		2.411.785.663,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.913.440,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		6.629.469,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	27.250.010,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		24.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.055.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	3.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.055.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		3.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	145.886.045,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	97.900.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.034.215,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		5.300.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.041.830,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		44.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	19.845.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		44.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.965.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.600.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	33.956.674,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	38.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	33.956.674,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		38.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.884.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	27.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.884.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		27.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	66.494.120,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	102.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	42.599.120,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		57.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23.895.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		45.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
327	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	93.456.000,00						-	98.251.194,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	55.070.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	24.750.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	55.070.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		24.750.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	38.386.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	73.501.194,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	38.386.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		73.501.194,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
328	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	43.117.763,00						-	47.385.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	43.117.763,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	47.385.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	43.117.763,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Janapria	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		47.385.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
329	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	29.892.890,00						-	86.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	5.279.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	62.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.279.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		62.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	24.613.890,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	24.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	24.613.890,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		24.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
330	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	534.273.304,00						-	475.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	534.273.304,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	475.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	129.413.488,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		160.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	404.859.816,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		315.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
331	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	61.382.630,00						-	125.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	61.382.630,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	125.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	8.575.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		18.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	29.127.630,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		32.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	21.125.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		45.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	2.555.000,00	Kab. Lombok Tengah, Janapria, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT JANAPRIA
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			6.731.883.748,00							7.664.736.352,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.731.883.748,00							7.664.736.352,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.731.883.748,00							7.664.736.352,00	
332	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.686.440.484,00						-	3.259.933.820,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	14 Dokumen	23.578.250,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol	-	87.081.651,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.317.930,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		14.818.675,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.513.770,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		4.939.558,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.656.002,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		4.939.558,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.561.740,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		4.939.558,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.058.570,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		4.939.558,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.003.567,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		2.404.744,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		17.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	7.466.671,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan	2.515.090.198,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol	-	2.890.697.628,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	2.507.019.332,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		2.874.739.318,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.870.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		2.415.765,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.200.866,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		13.542.545,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	47.195.654,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol	-	112.690.141,00	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.767.825,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		27.182.741,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	41.427.829,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		80.007.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	27.743.742,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol	-	36.139.296,00	
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.743.742,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		36.139.296,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD kondisi baik	14 Unit	72.832.640,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol	-	133.325.104,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	72.832.640,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kesbangpol		133.325.104,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
333	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	1.157.933.074,00						-	1.523.002.563,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	9 Dokumen	1.157.933.074,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol	-	1.523.002.563,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	2.245.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		1.501.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	9 Dokumen	1.510.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		1.653.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	43.484.937,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		190.739.575,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	8.816.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		16.477.763,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	2.330.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		3.561.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka											
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	268.367.094,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		323.537.889,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka											
							Jumlah Paskibraka	37 Orang	724.386.882,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		754.674.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila											
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	73.238.042,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		195.975.723,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila											
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	33.554.619,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		34.881.114,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
334	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan politik pada Kader Partai Politik	72,22 persen	1.087.001.522,00						-	1.286.181.089,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Dokumen	1.087.001.522,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol	-	1.286.181.089,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	1.003.786,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		21.093.082,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	1.971.380,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		17.113.149,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	36.223.406,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		48.066.639,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	1.015.170.100,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		1.178.826.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Laporan	32.632.850,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		21.082.074,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
335	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	40,43 persen	914.416.181,00						-	227.639.754,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	914.416.181,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol	-	227.639.754,00	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	962.491,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		9.022.329,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	604.460,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		59.446.422,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	869.821.380,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		114.845.183,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19 Orang	5.145.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		21.880.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 Laporan	37.882.850,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan,	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		22.445.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
336	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 persen	242.766.118,00						-	278.100.196,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 Dokumen	242.766.118,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol	-	278.100.196,00	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	7 Dokumen	976.516,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		4.682.945,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	7 Dokumen	1.249.300,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		61.831.673,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	830 Orang	156.982.223,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		175.976.733,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	4.400.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		31.074.851,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	79.158.079,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		4.533.994,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
337	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 persen	643.326.369,00						-	1.089.878.930,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6 Dokumen	643.326.369,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol	-	1.089.878.930,00	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 Dokumen	1.122.164,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		1.994.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 Dokumen	102.616.033,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		143.998.496,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	115 Orang	124.365.436,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		384.732.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	218.321.596,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		324.462.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	96.953.910,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		124.690.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	99.947.230,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD6 - Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	Kesbangpol		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								J U M L A H	**2.398.210.370.660,00**							**2.946.573.532.975,99**	

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

6.1. Target Indikator Makro

Indikator kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) indikator sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Tahun 2026

No	Uraian	Satuan	Target	Ket
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5-6,13	
2	PDRB Per Kapita	Juta	24,076	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	12,75	
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,27	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.47	
6	Rasio Gini	Nilai	0,324	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,23	
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	3,71	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	72,11	

6.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator yang menjadi tujuan dan sasaran utama daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pemerintah daerah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merupakan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah dan merupakan kinerja dampak atau ultimate *outcome*. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*. Realisasi IKU Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2024 serta target tahun 2026 disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Target Indikator Utama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2026	Target Akhir Periode (2030)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71.19	72.23	75.13
2	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79.50	80.50	82.50
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77.28	78.76	81.23
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3.68	3.76	3.87
5	Nilai Implementasi SAKIP Pemda	Angka	62.90	77.06	85.91

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2026	Target Akhir Periode (2030)
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.34	6.13	6.73
7	PDRB Per Kapita ADHB	Juta/ Tahun	20.37	24.04	32.79
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	12.07	11.27	9.91
9	Rasio Gini	Angka	0.342	0.339	0.333
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.55	2.38	2.02
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/ a	80.58	88.58
12	Indeks Desa	Angka	0.7988	0.8692	0.9537
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	63.47	72.11	72.95
14	Indeks Risiko Bencana	Poin	133.05	125.76	123.38
15	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	n/ a	6.60	7.00

6.3. Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2026

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu daerah. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut tercapai. Indikator ini tergambarkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum. Adapun realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 serta target tahun 2026 disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Target Indikator Utama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,11	72,95	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	3,71	5,45	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,50	82,50	
4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	125,76	123,38	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	52,33	71,33	
6	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,59	0,71	
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	3,71	5,45	
8	Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	95,81	98,93	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	28	40	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
10	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	10,21	14,43	
11	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	4,47	12,52	
12	Konsumsi listrik per kapita	kWh	374,69	435,17	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,23	75,13	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,13	6,73	
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. Juta Per Tahun	24.040.000	32.790.000	
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	11,27	9,91	
5	Rasio Gini	Indeks	0,339	0,333	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	2,02	
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,46	81,38	
8	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca	%	52,10	61,34	
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	1,36	1,15	
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,17	75,91	
11	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	50,71	52,71	
12	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	48,68	58,64	
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,426	0,190	
14	Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat Nasional Untuk : Literasi Membaca	%	28,02	41,07	
15	Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat	%	25,06	38,73	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
	Nasional Untuk : Numerasi				
16	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,91	7,45	
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,07	14,37	
18	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,426	0,190	
19	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	56,420	57,900	
20	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,66	0,82	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	76,59	78,13	
2	Indeks Desa	Poin	0,8692	0,9537	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,76	3,87	
4	Nilai Investasi Daerah	Rp	3.183.900.000.000	4.105.588.452.702	
5	Tingkat Inflasi	(%)	2,00	2,00	
6	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	7,65	10,43	
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,59	1,95	
8	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	5,08	5,71	
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	96,13	96,71	
10	Indeks Infrastruktur	Angka	73,93	89,83	
11	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	916.019.427.929	1.500.123.758.357	
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,47	0,55	
13	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	3,59	3,67	
14	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Koefisien	0,86	0,48	
15	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	42,80	91,90	
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,53	2,10	
17	Persentase kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB daerah	%	3,59	3,67	
18	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,47	0,55	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,96	0,97	
20	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,08	5,71	
21	Nilai Investasi Daerah	Rp	3.183.900.000.000	4.105.588.452.702,47	
22	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	0,86	0,95	
23	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	46,67	48,06	
24	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	234.313	326.671	
25	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	52,20	53,62	
26	Jumlah BUMD	Unit	1	2	
27	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-32,10	-30,01	
28	Proporsi fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan EBT	%	1,51	6,26	
29	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	0,86	0,95	
30	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,36	3,51	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,60	7,00	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,76	81,23	
3	Indeks Toleransi	poin	3,75	3,83	
4	Survey Penilaian Integritas Kabupaten (SPI) Kabupaten/Kota	Nilai	74,10	76,02	
5	Indeks Pemerintah Digital	Poin	2,79	3,43	
6	Indeks Kriminalitas	Indeks	13,74	9,78	
7	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Melalui Musyawarah Adat	%	100	100	
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	65,00	85,00	
9	Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah	Poin	77,06	85,91	
10	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,78	3,86	
11	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	82,12	83,82	
12	Indeks Pemdi	Poin	2,79	3,43	
13	Tingkat Partisipasi Pemilu	%	0	0	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
14	Persentase desa tangguh bencana	%	37,01%	47,40%	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	20	15	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
7	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	
AB	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	81,32	84,24	
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	%	88,69	100,00	
3	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	76,786	81,166	
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	88,93	91,93	
5	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	
AC	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	3,56	4,15	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	6,25	15,84	
4	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
AD	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	
2	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	%	87,5	100	
3	Persentase warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	
6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	
AE	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti sesuai standar	%	100	100	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	46,55	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,23	0,96	
4	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	52,94	100	
5	Persentase korban bencana alam,sosial dan non alam yang terpenuhi	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
	kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota				
6	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	100	100	
7	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	44,58	100	
9	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	
10	Jumlah Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	33,33	33,33	
11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKs) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	41,81	100	
12	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100	100	
13	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
14	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	81	85	
AF	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	21,10	21,50	
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	96,75	97,75	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	51,00	55,00	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	60,00	65,00	
AG	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,23	90,13	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	0,07	0,2	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	
4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	
AH	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	%	110,00	125,00	
AI	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	%	52	65	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
	diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota				
AJ	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99,58	99,9	
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	13,23	26,15	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	60	80	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,63	99,95	
5	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	38,80	48,80	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	20,45	29,94	
AK	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	91,67	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	11,36	7,30	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	20,51	5,32	
AL	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,31	2,31	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	56,88	59,00	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8	4	
AM	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	9,09	45,45	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
AN	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	64,44	75,56	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	64,44	75,56	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	4,44	13,33	
AO	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,8	0,8	
2	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	0,1	0,1	
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	25,6	27,3	
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	2	2	
AP	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6,13	6,73	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	
AQ	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,65	1	
2	Persentase atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk pelatda provinsi	%	4	6	
AR	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3	3,5	
AS	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	16,34	27,23	
AT	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	46,21	65	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,10	73	
AU	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	40	70	
AV	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/TH	41,71	45,10	
2	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	100	100	
AW	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	53,71	57,38	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	7,25	7,73	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0,13	0,23	
AX	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	5	5	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	3	3	
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2	2	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	5	5	
AY	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persentase	82	91	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
	bertanda tera sah yang berlaku				
AZ	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	4,08	4,48	
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	8,6	9	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	70	90	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0,16	0,2	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	54	62	
6	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	0,0000125	0,000025	
7	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0,1	0,5	
BA	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
1	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	3,5	4,5	
2	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	Poin	74	80	
3	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Poin	3,12	3,15	
BB	4.02 - SEKRETARIAT DPRD				
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	1	1	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	55,00	65,00	
BC	5.01 - PERENCANAAN				
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
BD	5.02 - KEUANGAN				
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	15,87	16,41	
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	5,40	5,53	
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	36,78	33,97	
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	91,20	92,30	
5	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	100	
6	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	100	
7	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	-6,0	-8,5	
8	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	29,32	35,35	
BE	5.03 - KEPEGAWAIAN				
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	67	71	
BF	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	-	-	
BG	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir Periode (2030)	Ket
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	92,06	92,65	
4	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
5	Manajemen Risiko Indeks	Level	3	3	

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 7
PENUTUP

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi tujuan di atas disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun 2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2026 berdasarkan RKPD 2026.